



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
2018

JANUARI 2018

# EVALUASI BERITA

 *Dan Pendapat Masyarakat*



**Biro Humas dan Informasi Publik**

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12550 Telp ( 021 ) 7806131, Ext. 2303,2308

Email : [humas-ip@pertanian.go.id](mailto:humas-ip@pertanian.go.id)



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
2018

030 055

Bln

u

# EVALUASI BERITA

*Dan Pendapat Masyarakat*

4-965



**Biro Humas dan Informasi Publik**

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12550 Telp ( 021 ) 7806131, Ext. 2303,2308

Email : [humas-ip@pertanian.go.id](mailto:humas-ip@pertanian.go.id)

## KATA PENGANTAR

Media massa merupakan wahana komunikasi yang memiliki peranan yang penting dalam mempublikasikan dan menyampaikan suatu pesan atau informasi, sebagai upaya menciptakan pemahaman dan pengetahuan bagi publik atau khalayak. Media massa secara umum dapat digolongkan menjadi media cetak (surat kabar, majalah, dan tabloid) dan media elektronik (radio, televisi, dan internet).

Media cetak merupakan salah satu jenis media massa yang digunakan dalam penyuluhan yang mempunyai karakteristik tertentu. Informasi dan literature tentang pertanian dapat di temui dalam artikel, buku, jurnal, surat kabar, dan majalah. Media cetak juga dapat membantu penerimaan informasi bagi petani yang buta aksara gambar atau diagram yang diperlihatkan sebagai contoh adalah poster.

Informasi yang dimuat oleh media cetak baik dalam bentuk berita, abstrak maupun pelaporan peristiwa secara mendalam/*depth reporting*, merupakan hal yang sangat berharga untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi atau informasi tambahan dalam pengambilan suatu keputusan.

Dalam rangka memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambilan keputusan bidang pertanian, diperlukan evaluasi terhadap berbagai berita pertanian yang dimuat pada media massa. Kegiatan evaluasi ini juga merupakan salah satu langkah pengawalan terhadap berita yang mempunyai kecenderungan bersifat negatif yang dimuat di media massa, khususnya di media cetak, yang diharapkan dapat menjadi umpan balik dan dapat diseimbangkan dengan informasi yang bermanfaat bagi publik atau masyarakat guna mewujudkan pencitraan positif pembangunan pertanian.

Sehubungan dengan hal dimaksud, maka Biro Humas dan Informasi Publik, melakukan kegiatan Evaluasi Berita dan Pendapat Masyarakat Pertanian. Kegiatan ini dilakukan secara periodik dan dipublikasikan setiap kurun waktu satu bulan sekali. Semoga laporan evaluasi ini bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2018  
Kementerian Pertanian  
Biro Humas dan Informasi Publik



## HASIL EVALUASI BERITA DAN PENDAPAT MASYARAKAT

### DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii-xii
Abstrak.....	xiii-xiv
<b>BAB. I</b> <b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 <b>Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1.2 <b>Tujuan.....</b>	<b>1</b>
1.3 <b>Metode Evaluasi.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB. II</b> <b>Hasil Evaluasi.....</b>	<b>2</b>
1. <b>Tanaman Pangan</b>	
1 <b>Sapi Impor Kedelai ;</b>	
a <b>Impor Disetop Akhir Tahun.....</b>	<b>3</b>
2. <b>Hortikultura</b>	
1 <b>Harga Bawang/Cabai</b>	
a <b>Ketika Harga Pangan Naik Sewot, Giliran Petani Merugi Kok Sepi.....</b>	<b>4</b>
b <b>Harga Bawang Kembali Turun ke Level Terendah Rp 2.000/Kg.....</b>	<b>4</b>
c <b>Pasokan Berkurang, Harga Cabai Rawit Merah Terdongkrak.....</b>	<b>4</b>
d <b>Harga Hancurkan Asa Petani.....</b>	<b>5</b>
e <b>Berita Foto: Harga Cabai Rawit Merah Merangkak Naik.....</b>	<b>5</b>
f <b>Harga Cabai Merah di Panyabungan Naik 100%.....</b>	<b>5</b>
g <b>Cabai Rawit di Teluk Wondama Papua Barat Capai Rp100 ribu/kg.....</b>	<b>6</b>
h <b>Harga Cabai Rawit di Papua Barat Capai Rp 100 Ribu per Kg.....</b>	<b>6</b>
i <b>Wow! Harga Cabai di Papua Tembus Rp100 Ribu Perkilo.....</b>	<b>6</b>
j <b>Harga Cabai Kembali Menggila.....</b>	<b>7</b>
k <b>Harga Cabai Rawit Lokal Pangkalpinang Tembus Rp 120 Ribu.....</b>	<b>7</b>
l <b>Awal 2018, Harga Aneka Cabai Tanpa Gejolak.....</b>	<b>7</b>
m <b>Musim Hujan Bukan Lagi Hambatan Tanam Cabai.....</b>	<b>7</b>
n <b>Kementan Sayangkan Gejolak Harga Ditengah Produksi Cabai Melimpah</b>	<b>8</b>
o <b>Kementan : Stok dan Harga Aneka Cabai secara Nasional Aman dan Stabil.....</b>	<b>8</b>
p <b>'Pedasnya' Harga Cabai Rawit di Awal Tahun.....</b>	<b>8</b>
q <b>Harga Cabe Makin Pedas.....</b>	<b>9</b>
r <b>Pasokan dan Harga Aneka Cabai di Awal Tahun 2018, Aman dan Stabil...</b>	<b>9</b>
s <b>Harga Cabai Naik Hingga Rp 65.000/Kg, Kementan: Enggak Masuk Akal...</b>	<b>10</b>
t <b>Perluakah Operasi Pasar Cabai? Kementan: Ngapain, Barangnya Ada.....</b>	<b>10</b>
u <b>Pejabat Kok Salahkan Pasar.....</b>	<b>10</b>
v <b>Ada Potensi Kelangkaan Komoditas Bawang Putih.....</b>	<b>11</b>



w	Pengamat Perkirakan Komoditas Bawang Putih Semakin Langka.....	11
x	Inilah Pemicu Potensi Kelangkaan Bawang Putih.....	11
y	Indonesia Dibayangi Kelangkaan Bawang Putih, Ini Penyebabnya.....	12
z	Bawang Putih Terancam Langka.....	12
3.	<b>Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	
1	<b>Harga Telur</b>	
a	Harga Telur Mulai Tinggi.....	13
2	<b>Harga Daging Ayam</b>	
a	Harga Daging Ayam Tembus Rp 40.000/Ekor, Ini Sebabnya.....	13
b	Harga Daging Ayam Terus Naik.....	13
3	<b>Sapi Perah/siwab/upsus</b>	
a	Populasi Sapi Perah Masih Kurang.....	14
4	<b>Solusi Penyakit Unggas</b>	
a	Pemerintah Diminta Segera Temukan Solusi Penyakit Unggas.....	14
5	<b>Impor Daging Kerbau</b>	
a	Iklim Investasi Peternakan Sapi Perlu Diperbaiki.....	15
b	Harga Sudah Naik: Impor Pangan Dinilai Terlambat.....	15
c	Peternak Tolak Impor Daging Kerbau.....	15
d	Pemerintah Diminta Tinjau Rencana Importasi Daging Kerbau.....	16
e	Peternak Tolak Rencana Impor Daging Kerbau.....	16
f	Daging Kerbau Juga Impor, Setelah Itu Apa Lagi? .....	16
g	Kebijakan Impor Daging Kerbau 100 Ribu Ton jadi Sorotan.....	17
h	Maret, Daging Kerbau Impor Serbu Indonesia.....	17
i	PPSKI Kembali Tolak Impor Daging Kerbau.....	18
j	Pertanyakan Rencana Datangkan Daging Kerbau.....	18
k	Tolak Impor Daging Kerbau.....	18
l	Impor Daging Kerbau Rugikan Peternak.....	19
m	Rencana Pemerintah Impor Daging Kerbau Panen Kritikan.....	19
n	Perhimpunan Peternak Menolak: Setelah Beras, Pemerintah Akan Impor Daging Kerbau.....	19
o	CIPS Atasi Rantai Distribusi Turunkan Harga Daging Sapi.....	20
p	Peternak Sebut Indonesia Sulit Capai Swasembada Daging.....	20
6	<b>Larangan Penggunaan AGP</b>	
a	Pakan Ternak AGP Dilarang, Ayam di Blitar Diserang Penyakit.....	20
4.	<b>Badan Ketahanan Pangan</b>	
1	<b>Stop Impor Kedelai</b>	
a	Impor Disetop Akhir Tahun.....	22
2	<b>Beras/Data Pangan</b>	
a	Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Indef: Ada Masalah Suplai.....	22
b	Data Beras Kementan Dikritik.....	22



c	Pemerintah Harus Perbaiki Data Pangan.....	23
d	Data Pangan Kementan dan BPS Sering Tak Cocok, Harus Segera Diperbaiki.....	23
e	Suplai Turun Drastis, Stok Beras Tipis.....	24
f	Pemerintah Punya Banyak Pekerjaan Rumah di 2018.....	24
g	Meningkari Gejala.....	24
h	Kementan Harus Perbaiki Data Produksi Beras.....	25
i	Beras Langka, Pemerintah Diminta Audit Data BPS dan Kementan Beras Langka, Pemerintah Diminta Audit Data BPS dan Kementan.....	25
j	Permasalahan Data Harus Selesai Untuk Atasi Kisruh Beras.....	25
k	KPPU: Data Produksi Beras Perlu Diaudit Supaya Tak Jadi Debat.....	26
l	Simpang Siur Data Buat Pemerintah Tak Siap Atasi Masalah Beras.....	26
m	Tips Mengatasi Persoalan Perberasan Nasional Versi KPPU.....	26
n	KPPU: Data Produksi Beras yang Dipublikasikan BPS dan Kementan Kredibilitasnya Rendah.....	26
o	Masih Impor, Kementan Diminta Stop Bangun Opini Beras Surplus.....	27
p	BPS Nyatakan Data Produksi Beras Wewenang Kementerian Pertanian...	27
q	Data Beras Mendag dan Mentan Beda, Ini Kata BPS.....	27
r	Data Beras Beda, BPS: Kementan Lihat Produksi, Kemendag dari Harga Pasar.....	28
s	Ombudsman Minta Kementan Setop Umbar Surplus Beras.....	28
t	Ombudsman: Kementan Jangan Bilang Beras Surplus.....	28
u	Ombudsman: Pemerintah Jangan Umbar Pernyataan Surplus Beras.....	29
v	Ombudsman Kritik Data Stok Beras Kementerian Pertanian.....	29
w	Ini Diduga Penyebab Harga Beras Naik di Berbagai Daerah.....	29
x	Pantauan Ombudsman: Data Surplus Beras dari Mentan Tak Akurat.....	29
y	BPS Belum Miliki Data Stok Beras.....	30
z	Kementan Diminta Perbaiki Data Produksi Beras Dalam Negeri.....	30
aa	Karut Marut Soal Beras Versi KPPU.....	30
ab	Kementan Sebut Surplus Beras, Ini Kata Rizal Ramli.....	31
ac	Klaim Mentan soal Surplus Beras Tak Sesuai Kenyataan.....	31
ad	BPS akan Perbaiki Data Beras Nasional.....	31
ae	Indef: Kementan Harus Perbaiki Data Produksi Beras.....	32
af	Pemerintah Akui Kekeliruan Data Beras.....	32
ag	Pasokan Beras Pas-pasan Dan Tidak Merata.....	32
ah	Data Perberasan Disorot.....	32
ai	Simpang-Siur Surplus Beras.....	33
aj	Govt Sticks to Importing Medium-Grade Rice.....	33
ak	Kredibilitas Data Beras Dipertanyakan.....	34
al	Indef: Kementan Harus Perbaiki Data Produksi Beras.....	34



am	Kredibilitas Data Beras Dipertanyakan.....	34
an	Validitas Data Beras Dibenahi.....	35
ao	Kementan Harus Perbaiki Data Riil Produksi Beras Domestik.....	35
ap	Indef: Kementan Harus Perbaiki Data Produksi Beras.....	35
aq	Data Stok Beras Kementan Dinilai Tak Akurat.....	35
ar	Kemtan Harus Perbaiki Data untuk Rujukan Kebijakan.....	36
as	KPPU Desak Konsolidasi Data.....	36
at	Kebijakan Satu Peta Dirilis Agustus 2018.....	36
au	The Unreliability Of Rice Data.....	37
av	Koperasi Pasar Cipinang Bantah Klaim Mentan Soal Surplus Beras.....	37
aw	BPS Diminta Validasi Data Pangan.....	37
ax	BPS Diminta Validasi Data Pangan.....	38
ay	Pemerintah Didesak Perbaiki Data Pangan.....	38
az	Data Produksi Berlebih Bisa Mengirim Sinyal yang Salah.....	38
ba	Pemerintah Dituding Tidak Miliki Data Produksi dan Konsumsi Beras Nasional.....	39
bb	Simpang-Siur Data Beras.....	39
bc	Mentan Dinilai Bohong Soal Stok Beras Medium Bulog.....	39
bd	Beras Medium Langka di Pasaran.....	40
be	Negara Agraris, Fakta atau Utopia? .....	40
bf	DPR Minta Kementan Jujur Soal Data Produksi Beras.....	40
bg	Ombudsman Minta Kementan Jangan Sampaikan Data Salah Stok Beras.....	41
bh	Data Produksi Makin Diragukan.....	41
bi	BPS dan BPPT Diminta Kelola Data Beras Agar Tidak Ada Dusta.....	41
bj	Berita Foto: Kisruh Data Di Balik Impor Beras.....	42
bk	Data Produksi Beras Keliru, JK Akui Sudah Dua Kali Koreksi.....	42
bl	Ekonom UI: Harga Terus Naik, Data Surplus Beras Diragukan.....	42
bm	Agar Tak Simpang Siur, Pemerintah Perlu Perbaiki Data Beras.....	42
bn	Peneliti Sebut Data Surplus Beras Tidak Valid.....	42
bo	Hentikan Klaim Surplus Beras.....	43
bp	PS dan BPPT Diminta Kelola Data Beras Agar Tidak Ada Dusta.....	43
bq	Akurasi Data.....	43
br	Data Beras Harus Lebih Akurat.....	44
bs	Harga Beras Terus Melonjak, Data Pangan Dianggap Tidak Sesuai.....	44
bu	Pasokan Beras Langka.....	45
bv	Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan.....	45
bw	DPR Desak Kementan Jujur Soal Data Pangan.....	46
bx	Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan.....	46
by	BPS Diminta Segera Sudahi Puasa Merilis Data Pangan.....	46
bz	DPR Minta Kementerian Pertanian Jujur Soal Data Pangan.....	46



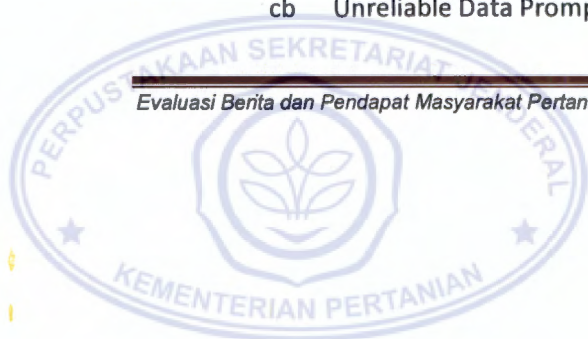
ca	Kebijakan Pangan Mendesak.....	47
cb	Harga Beras Mahal, Pemerintah Perluas Jangkauan Operasi Pasar.....	47
cc	Kualat Kalau Mainin Urusan Perut Rakyat.....	47
cd	Bola Panas Bernama Harga Beras.....	48
ce	Menteri Selalu Katakan Beras Surplus.....	48
cf	Harga Beras Capai Rekor Nasional Termahal.....	48
cg	Harga Beras Tinggi, Komisi IV akan Panggil Kementan .....	49
ch	Harga Beras Naik, Data Produksi Surplus Kementan Dikritik.....	49
ci	Bola Panas Bernama Harga Beras .....	49
cj	Harga Beras Tetap Mahal, Pemerintah Harus Kaji Opsi Impor Beras.....	50
ck	Harga Beras Medium Makin Tinggi.....	51
cl	DPR: Katanya Produksi Beras Meningkat, Kok Harganya Melambung.....	51
cm	DPR Sebut Penyebab Gejolak Harga Beras Tak Bisa Diantisipasi.....	51
cn	Pemerintah Diminta Atasi Kenaikan Harga Beras.....	51
Co	Pemerintah Diminta Segera Atasi Masalah Kenaikan Harga Beras.....	52
cp	DPR Minta Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Beras.....	52
cq	Harga Beras Diprediksi Stabil Tinggi Hingga Maret.....	52
cr	Krisis Beras.....	53
cs	Tragedi Kenaikan Harga Beras.....	53
ct	Operasi Pasar Belum Bisa Tekan Harga Beras Turun.....	53
cu	Pedagang Beras: Mentan Ngomong Surplus di Kantor dan di Tempat Panen.....	54
cv	Tragedi Kenaikan Harga Beras.....	54
cw	DPR Desak Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Beras.....	55
cx	Fahri Minta Pemerintah Akui Salah Kebijakan.....	55
cy	Telusuri Kecurangan Distribusi Beras.....	55
cz	Kebijakan Instan dan Instabilitas Harga Pangan.....	56
da	KPPU: Rendahnya Kredibilitas Data Jadi Sebab Harga Beras Tinggi.....	56
db	Harga Beras Tak Terkendali, Bukti Regulasi Tata Kelola Buruk.....	56
dc	Spekulan Mainkan Pasokan Beras.....	57
dd	Ombudsman Minta Kementan Stop Klaim Pasokan Beras Surplus.....	57
de	Headline: Harga Beras Meroket, Salah Siapa? .....	58
df	Duh, Harga Pangan Liar Tak Terkendali. ....	58
dg	Produksi Dalam Negeri Pas-pasan.....	58
dh	Perlu Upaya Luar Biasa untuk Beras.....	59
di	Pemerintah Didesak Revisi Kebijakan Sektor Pangan.....	59
3	<b>Pangan/Impor Beras</b>	
a	Harga Beras Sulit Dikendalikan.....	60
b	Hantu-Hantu Perberasan.....	60
c	Ironi.....	60



d	Aliansi Petani: Impor Beras Permainan Pedagang Besar.....	60
e	JK Sebut Beras Impor tak akan Pengaruhi Harga Tingkat Petani.....	61
f	Fadli Zon Kritik Kebijakan Impor Beras.....	61
g	Ombudsman Ingatkan Maladministrasi karena Beras.....	61
h	Surplus Produksi, Rencana Impor Beras Dipertanyakan.....	62
i	Impor Beras Sangat Melukai Petani.....	62
j	KPPU: Kebijakan Impor Beras Harus Didukung Data Valid.....	62
k	Saran Ombudsman Saat Temukan Gejala Maladministrasi Impor Beras...	63
l	Ribut Soal Impor Beras.....	63
m	Rencana Impor Berubah.....	63
n	Penugasan Impor Beras Dialihkan ke Perum Bulog.....	64
o	Rencana Impor Sudah Lama? .....	64
p	Perum Bulog Ambil Alih Impor Beras.....	64
q	Ombudsman Temukan Pelanggaran Impor Beras.....	65
r	Govt Sticks to Importing Medium-Grade Rice .....	65
s	Pemerintah Akan Impor 500.000 Ton Beras Khusus.....	66
t	Menkeu: Jika Ingin Harga Beras Stabilkan Inflasi, Data Kementan Harus Diperbaiki.....	66
u	Impor Beras Malaadministrasi.....	66
v	Swasembada, Data Meragukan, dan Pulen-nya Untung Impor Beras.....	67
w	Satgas Pangan Akan Tangkap Penimbun Beras.....	67
x	Ombudsman Sarankan Pemerataan Stok Beras.....	67
y	Rencana Impor Beras Sudah Lama? .....	68
z	Impor Beras Kontra Produktif dengan Visi Misi Jokowi.....	68
aa	Gaduh Politik Impor Beras.....	68
ab	Penunjukkan PPI Dipertanyakan.....	69
ac	Gaduh Politik Dan Pulennya Impor Beras.....	69
ad	Perjalanan Impor Beras Indonesia Mulai Tahun 2000 hingga 2018.....	69
ae	Pemerintah Gagal Menata Mata Rantai Pasokan Beras.....	70
af	Beras Impor.....	70
ag	Pemerintah Gagal Menata Mata Rantai Pasokan Beras.....	71
ah	Perlukah Impor Beras Saat Ini? .....	71
ai	Impor Beras, `Cerdik` Tapi Sadis! .....	71
aj	Komisi VI DPR RI Tolak Impor Beras.....	72
ak	PPU Minta Ada Data Akurat Sebelum Impor Beras.....	72
al	Ironi Impor Beras.....	72
am	Menyelisik (Kembali) Urusan Beras.....	73
an	Beras (Kian) Memanas.....	73
ao	Alamak, Kenapa Harga Beras Naik? .....	74
ap	Kejanggalan Dibalik Impor Beras.....	74



aq	Kejanggalan Dibalik Impor Beras.....	74
ar	Gertakan Impor tak Mampu Menurunkan Harga Beras.....	75
as	KPPU Bentuk Tim Selidiki Kejanggalan Impor Beras.....	75
at	Sebelum Impor Beras Seharusnya Antar Kementerian Bersinergi.....	75
au	Beras Impor Akan Tiba Akhir Bulan.....	75
av	Surplus Dulu Minus Kemudian.....	76
aw	Aliansi Petani: Impor Beras Permainan Pedagang Besar.....	76
ax	JK Sebut Beras Impor tak akan Pengaruhi Harga Tingkat Petani.....	76
ay	Impor Beras Ancam Produksi Petani.....	77
az	Pemerintah Impor Beras 500.000 Ton, Pengamat Pertanian Angkat Bicara.....	77
ba	Pemerintah Impor Beras 500.000 Ton.....	77
bb	Impor Beras Ancam Produksi Petani.....	78
bc	DPR: Jangan Ambil Gampangnya, Kurang Stok Beras Lalu Impor.....	78
bd	Ekonom: Impor Beras Bukti Kegagalan Kementan Jaga Produk.....	79
be	Impor Beras Bikin Harga Gabah Petani Anjlok Saat Panen? .....	79
bf	Perbaiki Data Beras Nasional.....	79
bg	Impor Beras, Anggota DPR: Ada Permainan Mafia? .....	80
bh	Pemerintah Impor 500 Ribu Ton Beras, DPR: Keputusan Ini Pil Pahit.....	80
bi	Impor Beras Jauhkan RI dari Kedaulatan Pangan.....	81
by	Hati-Hati dengan Impor Beras.....	81
bk	Impor Beras Bukan Berarti Gagal.....	81
bl	Impor Beras.....	87
bm	Impor Beras Jauhkan RI dari Kedaulatan Pangan.....	82
bn	Jika Terus Impor, Harga Beras Petani Dapat Jatuh.....	83
bo	Ironi Impor Beras.....	83
bp	Kebijakan Instan dan Instabilitas Harga Pangan.....	83
bq	Beras: Swasembada Tetapi Impor.....	84
br	Serikat Petani: Impor Beras Langgar UU Pangan.....	84
bs	Bola Panas Impor Beras.....	84
bt	Dinilai Banyak Kejanggalan, Impor Beras Ditolak.....	85
bu	Lima Kejanggalan Rencana Impor Beras.....	85
bv	Batalkan Impor Beras.....	85
bw	Sepertinya Kartel Beras Lebih Berdaya ketimbang Pemerintah.....	86
bx	Anggota DPR Soal Impor Beras: Yang Salah Mentan atau Mendag.....	86
by	Pernyataan Mentan dan Mendag Berlawanan, Komisi IV: Siapa yang Sebenarnya Bersalah? .....	86
bz	Ombudsman Temukan Gejala Maladministrasi Stok dan Impor Beras.....	87
ca	Stop Impor Beras, Presiden Jokowi Didesak Copot Menteri Perdagangan	87
cb	Unreliable Data Prompted Govt to Import Rice: Analyst.....	87



cc	Gerindra Anggap Jokowi Gagal Wujudkan Janji Swasembada Pangan.....	88
cd	Ombudsman Deteksi Gejala Maladministrasi dalam Pengelolaan Stok dan Rencana Impor Beras.....	88
ce	Ada Disparitas Harga Beras Internasional Sebabkan Impor.....	88
cf	Beras Mahal, Ombudsman Curigai Adanya Maladministrasi.....	88
cg	Ombudsman Sebut Ada Maladministrasi di Keputusan Impor Beras.....	89
ch	Ombudsman Pantau Pasokan Beras di 31 Provinsi, Ini Dia Hasilnya.....	89
ci	Ombudsman Impor Beras Abaikan Prinsip Kehati-hatian.....	89
cj	Ombudsman ke Pemerintah: Hentikan Membuat Opini Surplus Beras.....	90
ck	Asosiasi Pemkab Pertanyakan Rencana Kemendag Mengimpor Beras.....	90
cl	Ombudsman Minta Kementan Stop Buat Opini Surplus Beras Berlebihan	90
cm	Ombudsman Cium Ada Margin Rp 1 Triliun di Impor Beras, Serius?.....	91
cn	Ombudsman Sarankan Pemerataan Stok Beras.....	91
co	Impor Beras, Jokowi Diminta Evaluasi Mentan Amran.....	91
cp	Komisi VI Cengar Mendag dan Bulog soal Impor Beras.....	92
cq	Pengusaha: Mentan Sebut Stok Beras 1,2 Juta Ton Itu Beras Raskin Tak Layak Jual.....	92
cr	Tak Puas dengan Mendag, Komisi VI DPR akan Bentuk Tim Pengawas Impor Beras.....	92
cs	Data Pangan Pemerintah tak Kompak, DPR Tolak Impor Beras.....	93
ct	Bahas Impor Beras, DPR akan Rapat Bareng Mendag dan Mentan.....	93
cu	Ekonom UI: Harga Beras Tinggi karena Masalah Pasokan.....	93
cv	Impor Beras Dinilai Bakal Berdampak ke Penurunan Harga Gabah.....	94
cw	Kejanggalan Menyelimuti Impor Beras Bulog.....	94
cx	Enggar Kelabakan.....	94
cy	Tolak Impor Beras, GP Ansor Ingin Pemerintah Pastikan Data Stok Beras	95
cz	Politik Impor Beras.....	95
da	Beras Impor Akan Tiba Akhir Bulan.....	95
db	Stop Impor Beras, PISPI : Sarankan Pemerintah Bentuk Kelembagaan Pangan dan Investigasi Mafia Pangan! .....	96
dc	Akademisi Kritik Kebijakan Impor Beras yang Dilakukan Jelang Panen Raya.....	96
dd	Impor Beras Harusnya Oktober, Bukan Jelang Musim Panen.....	96
de	Enggar Kelabakan.....	97
df	Boleh Saja Impor Beras, Asal Tidak Jelang Musim Panen.....	97
dg	Iluni UI Anggap Impor Beras Bukan Hal Tabu.....	98
dh	Menghindari Jawa Sentris.....	98
di	Beras Langka, Harga Melejit.....	98
dj	Impor Beras Versus Akurasi Data Produksi.....	99
dk	Centang Perenang Mengurus Beras.....	99



dl	Kebijakan HET Beras Dinilai Bisa Eliminasi Usaha Penggilingan.....	100
dm	Target Swasembada Beras Pemerintah Dinilai tak Realistis.....	100
dn	Pemerintah Diminta Jangan Klaim Stok Beras Surplus Namun Masih Impor.....	101
do	Logika "Abu-Abu" Impor Beras.....	101
dp	Awas Harga Beras Terjun Bebas! .....	101
dq	Logika "Abu-Abu" Impor Beras.....	102
dr	Impor Beras Jauhkan RI dari Kedaulatan Pangan.....	102
ds	Impor Beras, Petani Bakal Dirugikan.....	102
dt	Impor Beras Dibuka Lagi.....	103
du	Impor Beras Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian Pertanian.....	103
dv	Impor Beras, Jokowi Jahati Petani tapi Muliakan Pemburu Rente.....	104
dw	Impor Beras Mengancam Petani.....	104
dx	Indef: Pemerintah Gagal Jaga Produksi Beras Dalam Negeri.....	104
dy	Impor Beras Terus, Kapan Mau Swasembada? .....	105
dz	Komisi IV: Kebijakan Impor Beras tidak Tepat.....	105
ea	Impor Beras Mengkhianati Petani.....	105
eb	Daniel Johan: Kebijakan Impor Beras tidak Tepat.....	106
ec	Presiden Harus Segera Mengevaluasi.....	106
ed	Impor beras untuk Efek Psikologis.....	107
ee	KPPU: Ada Spekulasi yang Sengaja Mainkan Pasokan Beras.....	107
ef	Impor Beras untuk Efek Psikologis.....	107
eg	Serikat Petani Sebut Kenaikan Harga Beras Sangat Merugikan.....	108
eh	Ketua Fraksi PKS DPR Heran, Katanya Surplus Beras Tapi kok Impor 500 Ribu Ton? .....	108
ei	Impor Beras, CSIS Minta Harga Eceran Tertinggi Dicabut.....	108
ej	Impor Beras, PKS: Ketidakmampuan Pemerintah Kelola Beras.....	108
ek	Serikat Petani Sebut Pemerintah Gagal.....	109
el	Fadli Zon Sebut Empat Keanehan Rencana Impor Beras Pemerintah.....	109
em	Impor Beras 500 Ribu Ton, Ini 4 Keanehan Pemerintah Menurut Fadli Zon.....	109
en	Fadli Zon Temukan Empat Keanehan Rencana Pemerintah Impor Beras..	110
eo	Tata Kelola Pangan Kacau Balau Tuh.....	110
ep	Tata Kelola Pangan Kacau Balau Tuh.....	110
eq	Premium Rice Import Sparks Questions, Criticism.....	111
er	Batalkan Impor Beras! .....	111
es	Ironi Impor Beras.....	111
et	Kasih Petani Sudah Kerja Membanting Tulang.....	112
eu	Jokowi Gadaikan Elektabilitas.....	112
ev	Hentikan Klaim Surplus Beras.....	113



ew	Dukung Produk Pangan Lokal agar Mampu Saingi Impor.....	113
ex	Dukung Produk Pangan Lokal agar Mampu Saingi impor.....	113
ey	Simalakama Kebijakan Impor Beras.....	113
4	Program Kementan gagal	
a	Program Kementan Gagal? Padi Mulai Menguning Bantuan Datang.....	114
5	Operasi Pasar	
a	Operasi Pasar Belum Berdampak Signifikan.....	114
b	Beras Operasi Pasar Kurang Diminati.....	115
c	Operasi Pasar Belum Bisa Tekan Harga Beras Turun.....	115
d	Perbaiki Regulasi Beras.....	116
e	Akurasi Data .....	116
6	Data Cabai/Bawang	
a	Harga Cabai Rawit Merah Masih Tinggi Rp 60.000/Kg.....	117
b	Petani Bawang Cirebon Ancam Mogok Tanam.....	117
7	Asuransi Pertanian	
a	Program Asuransi Pemerintah Masih Hadapi Berbagai Kendala.....	118
b	Sektor Pertanian Kian Tak Menarik.....	118
c	Sektor Pertanian Kian Tak Menarik.....	118
8	Swasembada Pangan	
a	Impor Pangan Indikasikan Program Swasembada Bermasalah.....	119
b	Mimpi Swasembada.....	119
c	Swasembada Beras Dinilai Tak Relevan Lagi.....	119
9	Hama Padi	
a	Tanam Tiga Kali Picu Hama Padi.....	120
b	Penggilingan Kesulitan Cari Stok Gabah.....	120
5.	Prasarana dan Sarana Pertanian	
1	Kartu Tani	
a	Akali Kartu Tani Petani Timbun Pupuk.....	122
2	Subsidi Benih	
a	Menyoal Subsidi Benih.....	122
b	Pencabutan Subsidi Benih Ancam Ketersediaan Pangan.....	122
c	Mentan Amran Tegaskan Pemerintah Tak Cabut Subsidi Benih.....	123
d	DPR Kritik Penghapusan Subsidi Benih.....	123
e	Wacana Penghapusan Subsidi Benih Bakal Tekan Petani.....	124
f	Subsidi Benih Dihapus, Produksi Padi Terancam.....	124
g	Berita Foto: Kebijakan.....	124
3	Subsidi Pertanian	
a	Subsidi Pertanian Rp52,2 T Dinilai Rawan Disalahgunakan.....	125
b	Mengupayakan Kelancaran Tepat Sasaran Subsidi Pertanian 2018.....	125



4	Lahan Pertanian Rusak	
a	Petani Lingkar Sinabung Kembali Terpuruk.....	126
5	Stok Pupuk	
a	Petani Sulit Dapat Pupuk Urea dan SP-36.....	126
b	Petani Aceh Kesulitan Pupuk.....	
c	Pupuk Subsidi Langka di Provinsi Aceh, Produksi Padi Terancam Menurun.....	127
6	Cetak sawah	
a	Pemerintah Berhasil Cetak Sawah Baru 200 Ribu Hektar, Kenapa Harus Impor.....	127
6.	Pertanian Umum	
1	Perekonomian	
a	Mengelola Tarik-Menarik Kepentingan.....	129
2	Sektor Pertanian	
a	Korban Terbesar Jokowi Bernama Sektor Pertanian.....	129
3	Regenerasi Petani	
a	Bertani Harus Pakai Jurus Jaman Now.....	129
BAB.III	Penutup.....	131



## Abstrak

Dari hasil evaluasi terhadap berbagai berita pertanian yang dimuat pada media massa. Salah satu langkah pengawalan terhadap berita yang mempunyai kecenderungan bersifat negatif yang dimuat di media massa, khususnya di media cetak, maupun di media online yang diharapkan dapat menjadi umpan balik dan dapat diseimbangkan dengan informasi yang bermanfaat bagi publik atau masyarakat guna mewujudkan pencitraan positif pembangunan pertanian. Pemberitaan tentang *Perberasan* menjadi topik yang paling banyak, sebagai berikut :

### 1. *Impor Beras ;*

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen bulan Januari 2018 terjadi inflasi sebesar 0,62 persen. Inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga beras. Berdasarkan data BPS, harga beras medium di penggilingan mencapai Rp 10.177 per kg. Harga tersebut naik 6,83 persen dibandingkan Desember 2017. Sementara harga beras medium pada Januari 2017 mencapai Rp 9.100 per kg. Harga beras premium pada Januari 2018 juga mengalami kenaikan 4,96 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya dari Rp 9.860 per kg menjadi Rp 10.350 per kg. Begitu juga harga beras kualitas rendah mengalami kenaikan sebesar 5,2 persen dari Rp 9.309 per kg menjadi Rp 9.753 per kg.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan, kenaikan harga beras tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2018. Namun harganya cenderung turun pada akhir bulan. Hal ini disebabkan karena mulai terjadi panen di beberapa wilayah di Indonesia. "Kemungkinan puncak panennya adalah pertengahan Februari. Sekarang harganya mulai berangsur turun," ujar Suhariyanto saat konferensi pers di Jakarta, Kamis 1 Februari 2018. Penurunan beras juga dipengaruhi oleh kebijakan impor yang dilakukan Januari lalu. Rencananya impor beras tersebut akan tiba di Indonesia pada Februari ini.

### 2. *Mentan Klaim Impor Beras Awal 2018 Tak akan Picu Harga Gabah Anjlok*

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim rencana impor beras khusus 500.000 ton di awal 2018, tak akan memicu harga gabah petani anjlok meski Indonesia akan memasuki masa panen puncak padi pada Februari mendatang. "Petani tetap terlindungi karena ada HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," kata Amran di kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/1/2018) seperti dikutip Antara. Selain itu, Amran mengatakan rata-rata kebutuhan beras nasional yang mencapai 2,5 juta ton per bulan. Sementara impor 500.000 ton beras itu hanya mencukupi setara dengan enam hari kebutuhan nasional. Amran berharap ada peningkatan produksi beras nasional saat Indonesia memasuki masa puncak panen padi pada Februari 2018. "Oktober (2017) musim hujan.

Kalau umur padi tiga bulan, Januari berarti panen sehingga di Februari masuk panen puncak," kata Amran. Amran mengatakan kondisi cuaca tersebut sama dengan yang terjadi pada awal 2017. Ia mengatakan cuaca di Indonesia baru normal dalam dua tahun terakhir mengingat sebelumnya terjadi fenomena el nino dan la nina. Selain itu, Amran juga mengatakan bahwa terjadi peningkatan produksi beras karena ada penambahan luas sawah, pembangunan irigasi tersier, dan normalisasi saluran irigasi dan embung, serta pembagian bibit unggul.



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Latar Belakang**

Dalam era pembangunan dan perkembangan informasi seperti saat ini, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh media massa yang mempunyai peranan penting sebagai wahana komunikasi antar masyarakat pertanian dan pemerintah. Pemberitaan yang dimuat di media massa, merupakan informasi yang sedang berkembang secara dinamis di masyarakat. Evaluasi berita, dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan, untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang dihadapi oleh petani dan masyarakat. Evaluasi berita dilakukan melalui pengumpulan berita terkait isu yang bersumber dari hasil kliping harian secara berturut-turut.

Evaluasi berita ini dilakukan terutama pada isu dan topik berita yang mempunyai kecenderungan sifat negatif, yaitu pemberitaan yang apabila judul dan isi berita dimaksud dapat memberikan pencitraan negatif bagi Kementerian Pertanian dan/atau pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor pertanian.

Informasi berita yang dikategorikan negatif merupakan indikasi salah satu langkah awal untuk bahan pimpinan dalam mengambil kebijakan. Sebagai bagian dari proses pengawalan dan evaluasi berita di lingkup Kementerian Pertanian, maka Biro Humas dan Informasi Publik berupaya untuk dapat menyeleksi, menggolongkan berita-berita pertanian dan menganalisisnya sehingga dapat menjadi bahan informasi dan masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan pertanian terutama terkait isu negatif yang berkembang di masyarakat.

#### **1. 2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Berita dan Pendapat Masyarakat ini adalah memberikan masukan kepada pimpinan berdasarkan berita-berita di media massa yang mempunyai sifat kecenderungan negatif, guna menjadi informasi yang berasal dari publik atau masyarakat, dalam mendukung pengambilan kebijakan di lingkup Kementerian Pertanian.

#### **1. 3. Metode Evaluasi**

Penyusunan Evaluasi Berita dan Pendapat Masyarakat bulan Januari 2018 ini dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

Menyeleksi dan menginventarisasi berita pertanian dari kliping harian yang mempunyai kecenderungan sifat negatif;

Mengklasifikasikan berita yang bersifat negatif sesuai tanggung jawab teknis unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;

Merangkum berita cenderung negatif yang dimuat di media cetak



## BAB. II

### HASIL EVALUASI BERITA DAN PENDAPAT MASYARAKAT

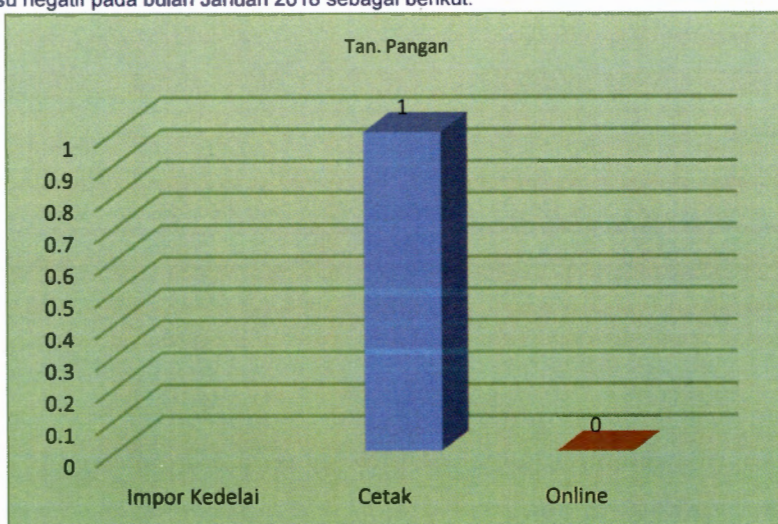
Berdasarkan hasil seleksi, inventarisasi, dan penggolongan yang telah dilaksanakan selama bulan Juni 2017 dari sumber 20 media cetak, maka ditemukan berita–berita dengan kecenderungan negatif. Adapun klasifikasi berita kecenderungan negatif dengan topik berita yang hangat dan secara berturut-turut dimuat di media massa dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab tugas pokok dan fungsi teknis di lingkup unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, antara lain dengan maka topik berita antara lain ;

1. Ditjen Tanaman Pangan; Impor Kedelai.
2. Ditjen Hortikultura ; Harga Bawang
3. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; harga telur, harga daging ayam, sapi perah/Siwab, solusi penyakit ungags, impor daging kerbau, larangan penggunaan AGP.
4. Badan Ketahanan Pangan; stop impor kedelai, data pangan, impor beras, program Kementan gagal, data cabai, auransi pertanian, swasembada pangan, dan hama padi
5. Prasarana dan Sarana Pertanian; kartu tani, subsidi benih, subsidi pertanian, lahan pertanian rusak, stok pupuk, cetak sawah.
6. Pertanian Umum. sektor pertanian, dan regenerasi pertanian



No.	Tan. Pangan
1	Impor Kedelai
a	<p><b>Impor Disetop Akhir Tahun</b> (<i>Bisnis Indonesia</i>, 3 Januari 2018). Jakarta - Pemerintah berencana menutup keran impor kedelai pada pengujung tahun ini karena optimistis kebutuhan yang ada mampu dipenuhi dari panen di dalam negeri. Dirjen Tanaman pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto menjelaskan pemerintah tahun ini akan menambah lahan tanam kedelai 1,5 juta hektare (ha) setelah tahun lalu merealisasikan tanam 500.000 ha.</p> <p>Gatot mengestimasi kebutuhan benih 50 kg per ha sehingga jika luas tanam tahun ini mencapai 2,5 juta ha, maka dibutuhkan benih 125.000 ton. Kementan memprediksi produksi kedelai 2018 sebesar 3,5 juta ton. Pada outlook tanaman kedelai 2016 yang diterbitkan oleh Kementan, produksi kedelai pada 2018 diperkirakan hanya 935.191 ton, jauh di bawah angka estimasi setelah ada program tambah area tanam demi mengejar swasembada 2018 (lihat tabel).</p> <p>Selain itu, Indonesia sudah telanjur bergantung pada kedelai impor-hingga 87% dari total konsumsi-sehingga memaksakan swasembada kedelai tahun ini akan sukar dilakukan. Di sisi lain, lanjutnya, memperoleh lahan tanam tidak semudah yang dibayangkan di tengah persaingan antarkomoditas padi, jagung, dan tebu, terutama di Jawa. Mendorong swasembada kedelai akan mengorbankan lahan padi dan jagung pada saat yang sama. Ide tumpangsari antara tebu-kedelai yang disuarakan Kementan pun sulit diterapkan.</p>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gambaran isu berita negatif terkait pada Tan. Pangan untuk bulan Januari 2018, meliputi impor kedelai. Secara rinci gambaran jumlah isu negatif pada bulan Januari 2018 sebagai berikut.




Gambar 2.2 Tanaman Pangan  
Jumlah berita negatif sebanyak 1 judul 1 berita cetak, 0 berita online



No.	Hortikultura
1	Harga Bawang
a	<p><b>Ketika Harga Pangan Naik Sewot, Giliran Petani Merugi Kok Sepi</b> (<i>Rakyat Merdeka</i>, 2 Januari 2018). Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna menyayangkan belum ada respons pemerintah mengatasi jatuhnya harga bawang merah di Brebes. Hal ini disayangkan karena kerja keras petani mendongkrak produksi pertanian seakan tidak dihargai.</p> <p>Badan Urusan Logistik (Bulog), lanjut dia, sebagai stabilisator harga belum melakukan tindakan apa-apa terhadap jatuhnya harga bawang merah para petani di Brebes. Politisi Gerindra ini menduga, sejak awal memang Bulog tidak akan sanggup mendongkrak harga di tingkat petani karena secara kinerja memang tidak akan mampu. "Harga bawang merah di sana itu sudah terlalu jatuh sementara idealnya Bulog bisa mengambil peranan di sana.</p> <p>Jatuhnya harga bawang merah di berbagai sentra produksi termasuk Brebes, bagi Oo Sutisna, sebenarnya merupakan lagu lama. Sebab umumnya ketika mulai panen, harga selalu saja jatuh. "Repotnya bahan-bahan pertanian seperti bawang merah, cabe dan Sayuran ini kan cepat busuk. Sekarang peranan pemerintah bagaimana kalau terjadi over produksi karena kalau itu terus terjadi petani akan rugi," katanya.</p> <p>Menteri Pertanian sejauh ini, kata dia, sudah kerja keras mengikat produksi agar kebiasaan pemerintah impor" saat stok rendah sehingga harga melambung tinggi tidak terjadi lagi. Bahkan Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menginisiasi ekspor untuk atasi over produksi ini. Sementara, harga rata-rata bawang merah di 43 pasar ritel Jakarta mencapai Rp 27.732 per kg. Rata-rata ini didapat dari harga jual terendah sekitar Rp 12 ribu per kg, yaitu di Pasar Induk Kramat Jati dan harga tertinggi mencapai Rp 35 ribu per kg.</p>
b	<p><b>Harga Bawang Kembali Turun ke Level Terendah Rp 2.000/Kg</b> (<i>Detik.com</i>, 24 Januari 2018). Brebes - Harga bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kembali anjlok. Kali ini harga komoditas asli Brebes tersebut turun ke level terendah yakni Rp 2.000 per kg. Di pasar pasar tradisional, harga bawang kualitas super Rp 6.000. Bawang kualitas medium dijual Rp 4.000 sampai Rp 5.000 per kg. Bahkan ada bawang merah yang harganya menyentuh level terendah, yakni Rp 2.000. Bawang ini merupakan bawang ukuran kecil.</p> <p>Sejumlah pedagang di Pasar Induk Brebes Kota mengaku, sebelumnya harga kualitas super sempat berada pada Rp 8.000 per kg. Bawang standar Rp 6.000 dan ukuran kecil Rp 4.000. Namun sejak beberapa pekan lalu, harga ini malah terus mengalami penurunan hingga level terendah.</p> <p>Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Juwari, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Terjadinya penurunan harga hingga titik rendah disebabkan tidak adanya upaya pemerintah dalam menstabilkan harga. Menurut Juwari, sejauh ini, pemerintah belum serius menangani masalah harga bawang.</p>
c	<p><b>Pasokan Berkurang, Harga Cabai Rawit Merah Terdongkrak</b> (<i>Kompas</i>, 2 Januari 2018). Jakarta - Harga cabai rawit merah naik lebih dari 80 persen karena berkurangnya pasokan pada dua pekan terakhir. Berkurangnya produksi ini diperkirakan terjadi antara lain karena serangan penyakit dan usia tanaman yang sebagian telah memasuki masa panen akhir.</p>

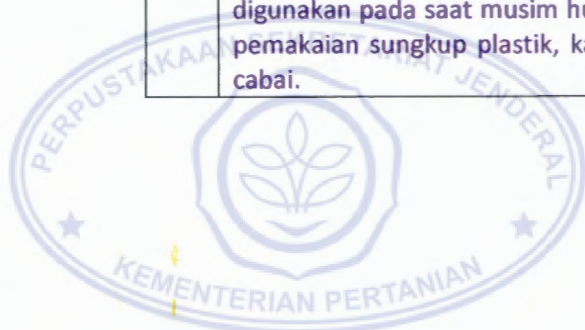


	<p>Direktur Pengembangan Agribisnis Pusat Komoditi Nasional (Puskomnas) Soekam Parwadi mengatakan, pasokan cabai rawit merah ke Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, Banten, juga turun drastis. Ketika harganya Rp 15.000 per kg, pasokan rata-rata mencapai 60 ton per hari. Harga kemudian naik ke kisaran Rp 25.000 per kg ketika pasokan turun menjadi 40 ton per hari. Belakangan, harga naik lagi menjadi Rp 40.000 per kg (tingkat pedagang grosir), tetapi pasokan hanya sekitar 25 ton per hari.</p> <p>Ketua Gabungan Kelompok tani Budi Luhur di Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Abdul Jafar menambahkan, produksi jauh berkurang karena masa panen telah usai. Harga cabai rawit merah di tingkat petani kini berkisar Rp 28.000 per kg atau lebih dari dua lipat dibandingkan harga dua bulan lalu. Anjloknya harga selama beberapa bulan telah menurunkan motivasi untuk merawat tanaman atau menanam cabai lagi. Ade Sutrisno, petani asal Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyatakan, sebagian petani kapok menanam lagi karena harga anjlok.</p>
d	<p><b>Harga Hancurkan Asa Petani</b> (<i>Kompas</i>, 3 Januari 2018). Jakarta - Harga bawang merah yang anjlok beberapa bulan terakhir menghancurkan harapan petani. Mereka menuntut komitmen pemerintah untuk melindungi petani dengan merealisasikan harga acuan pembelian di tingkat produsen. Harga jual bawang merah di tingkat petani di Brebes dan Tegal, Jawa Tengah, Selasa (2/1), hanya berkisar Rp 5.000-Rp 7.000 per kilogram (kg).</p> <p>Terkait dengan kondisi itu, petani bawang merah di Brebes berunjuk rasa di depan kantor Bupati Brebes, Jumat (29/12) pekan lalu, menuntut pemerintah merealisasikan Permendag No 27/2017. Tuntutan serupa pernah disuarakan petani bawang merah di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (11/10), karena harga anjlok hingga Rp 6.000-Rp 7.000 per kg.</p> <p>Menurut Ketua Gabungan Kelompok Tani Budi Luhur di Bojong, Kabupaten Tegal, Abdul Jafar, ongkos produksi yang dikeluarkan petani setidaknya Rp 12.500 per kg. Petani mengeluarkan modal Rp 125 juta untuk menanam bawang merah di lahan seluas 1 hektar. Mardiyah menambahkan, Kementerian Pertanian telah meminta Perum Bulog menyerap hasil panen petani untuk mengerem penurunan harga.</p>
e	<p><b>Berita Foto: Harga Cabai Rawit Merah Merangkak Naik</b> (<i>Kompas</i>, 3 Januari 2018). Harga Cabai. Pedagang menimbang cabai rawit merah pesanan pembeli di Pasar Tebet Barat, Jakarta, Selasa (2/1). Sejak pertengahan Desember, harga cabai rawit merambat naik dari Rp 35.000 menjadi Rp 70.000 per kilogram di pasar itu. Berkurangnya pasokan dikeluhkan pedagang sebagai penyebab kenaikan harga cabai rawit ; Berita Foto</p> 
f	<p><b>Harga Cabai Merah di Panyabungan Naik 100%</b> (<i>Medanbisnisdaily.com</i>, 3 Januari 2018). Panyabungan - Harga cabai merah di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) naik 100%, yakni dari Rp 40.000/kg menjadi Rp 80.000/kg. Akibatnya banyak kaum ibu mengeluhkan tingginya harga itu. Sebab baru satu hari harga meroket</p>

	<p>tajam. "Harga naik begitu cepat, sehingga kita pedagang makanan bisa merugi. Karena harga jual kita pada konsumen masih sama," ujar Juriah, pedagang kedai nasi di Panyabungan kepada medanbisnisdaily.com, Rabu (3/12/2018).</p> <p>Mawadah ibu rumah tangga terpaksa mencampur cabai merah dengan tomat untuk mengurangi pembelian cabai merah. "Harga terlalu mahal maka kita kurangi jatah pembelian cabai," ujarnya. Pantauan di Pasar Pagi Gunungtua, Panyabungan melonjaknya harga jual cabai merah diakibatkan kurangnya pasokan dari petani, sehingga barang sedikit harga pun meroket. "Pasokan kurang drastis, kita pun ke Pusat Pasar Baru Panyabungan paling 3 karung saja masuk cabai dari petani, katanya sih karena musim hujan tidak ada berani panen, karena bisa merusak tanaman cabai," ujar Harman Nasution, pedagang.</p>
g	<p><b>Cabai Rawit di Teluk Wondama Papua Barat Capai Rp100 ribu/kg</b> (<i>Antaraneews.com</i>, 3 Januari 2018). Wasior - Harga cabai rawit di pasar tradisional Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mencapai Rp100 ribu/kilogram. Menurut sejumlah pedagang, harga cabai mulai meroket tajam sejak dua hari menjelang tahun baru. Sebelum hari Raya Natal harga cabai daerah tersebut masih berkisar antara Rp50 hingga 55 ribu perkilo.</p> <p>Di daerah ini, umumnya menjual cabai oleh pedagang kecil dilakukan dengan sistim tumpukan. Mereka mensiasati kenaikan harga ini dengan mengurangi porsi takaran cabai untuk setiap tumpukan kecil seharga 5 ribu maupun tumpukan yang lebih besar seharga 10 ribu. "Kita kurangi sedikit saja, karena kalau banyak nanti tidak ada yang beli. Asal ada untung sedikit. Perayaan Natal dan tahun baru sudah berlalu, namun harga sejumlah barang kebutuhan pokok selain cabai di daerah tersebut juga masih relatif tinggi.</p>
h	<p><b>Harga Cabai Rawit di Papua Barat Capai Rp 100 Ribu per Kg</b> (<i>Tempo.co</i>, 4 Januari 2018). Jakarta - Harga cabai rawit di pasar tradisional Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mencapai Rp 100 ribu per kilogram. Lisna, salah satu pedagang di Pasar Soyar Wasior mengungkapkan, kenaikan harga cabai di tingkat pedagang dipicu oleh kenaikan harga di tingkat petani. "Kita jual Rp 100 ribu per kilogram karena memang kita beli dari petani sudah mahal. Kita belinya Rp 90 ribu satu kilogram," katanya, Rabu, 3 Januari 2018.</p> <p>Menurut sejumlah pedagang, harga cabai mulai meroket tajam sejak dua hari menjelang tahun baru. Sebelum Natal, harga cabai di daerah tersebut masih berkisar antara Rp 50 ribu hingga 55 ribu per kilogram. Harga sejumlah bahan pokok selain cabai di daerah tersebut relatif masih tinggi pasca Natal dan tahun baru. Bawang merah dan bawang putih masih bertahan pada Rp 55 ribu per kilogram dari semula berkisar Rp 30 ribu sampai Rp 35 ribu per kilogram.</p>
i	<p><b>Wow! Harga Cabai di Papua Tembus Rp100 Ribu Perkilo</b> (<i>Wartaekonomi.co.id</i>, 4 Januari 2018). Harga cabai rawit di pasar tradisional di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mencapai Rp.100 ribu per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, harga cabai mulai meroket tajam sejak dua hari menjelang tahun baru. Sebelum hari Raya Natal harga cabai daerah tersebut masih berkisar antara Rp50 ribu hingga 55 ribu perkilogram (kg).</p> <p>"Kita jual 100 ribu per kilo karena memang kita beli dari petani sudah mahal. Kita belinya 90 ribu satu kilo," kata Lisna. Di daerah ini, umumnya penjualan cabai oleh pedagang kecil dilakukan dengan sistem tumpukan. Mereka menyiasati kenaikan harga ini dengan mengurangi porsi takaran cabai untuk setiap tumpukan kecil seharga Rp5 ribu maupun tumpukan yang lebih besar seharga Rp10 ribu.</p>



j	<p><b>Harga Cabai Kembali Menggila</b> (<i>Harianterbit.com, 4 Januari 2018</i>). Bekasi, Markinah, 60 tahun, seorang pemilik warung nasi uduk dan lontong sayur di Jatiwaringin, Pd Gede, Bekasi, pagi-pagi sudah 'ngedumel' meroketnya harga cabai merah. "Aduh...cabai merah harganya menggila, bikin susah aja. Masa harganya sekarang Rp70 ribu per kilogram, padahal sebelumnya Rp27 ribu, lalu menjadi Rp40 ribu, sekarang Rp70 ribu, kemana ini menteri Jokowi" kata Markina ditemui Harian Terbit, Kamis (4/1/2018). Hal sama juga disampaikan Aprilia (50), pedagang warung di kawasan Jati Cempaka, Bekasi.</p> <p>"Harga naiknya gila banget, bingung mau jual berapa kepada pembeli. Saya heran mencegah harga cabai agar tidak naik aja pemerintah tidak bisa," ujar Aprilia dihubungi terpisah. Karuan saja Mar dan April 'ngedumel' karena keduanya bingung untuk menjualnya kepada pembeli. Otomatis pendapatan mereka kurang karena harga jual dagangan dinaikkan akibat naiknya harga cabai.</p>
k	<p><b>Harga Cabai Rawit Lokal Pangkalpinang Tembus Rp 120 Ribu</b> (<i>Republika.co.id, 6 Januari 2018</i>). Pangkalpinang -- Harga cabai rawit panen petani lokal di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp 120 ribu per kilogram. Ini lebih mahal dibandingkan dengan cabai rawit dari luar daerah yakni Rp 70 ribu/kg. "Harga cabai rawit lokal mahal, karena rasanya lebih pedas dibandingkan cabai rawit dari luar daerah," kata seorang pedagang di Pasar Pembangunan, Tofik di Pangkalpinang, Jumat (5/1). Harga cabai rawit hijau Rp 60 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp 35 ribu sedangkan harga bawang merah lokal masih bertahan Rp 18 ribu per kilogram, bawang merah Brebes Rp 26 ribu dan bawang putih Rp 20 ribu per kilogram.</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Akhmad Subekti mengatakan, cabai lokal lebih pedas karena pengaruh kondisi alam dan tanah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi di daerah Babel.</p>
l	<p><b>Awal 2018, Harga Aneka Cabai Tanpa Gejolak</b> (<i>Rilis.id, 6 Januari 2018</i>). Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok cabai nasional pada awal 2018 aman. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan di lapangan pada Desember 2017. "Terjadi gejolak sedikit, tetapi gejolak itu wajar. Harga di tingkat petani wajar dan ketersediaan pertanaman di lapangan sangat memadai," ujar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura, Prihasto Setyanto, di Jakarta, Jumat (5/1/2018).</p> <p>Sementara, meski harga cabai di wilayah Papua Barat cenderung lebih tinggi dibandingkan Jawa, Sumatera, dan lainnya, namun tetap stabil. Itu, sebagaimana diutarakan Kepala Dinas Pertanian Sorong, Benyamin Halladu. "Saat ini harga aneka cabai sudah kembali normal," tegasnya. Per tanggal 5 Januari, harga cabai rawit merah di petani berkisar Rp50 ribu-60 ribu per kilogram dan Rp30 ribu per kilogram untuk cabai keriting. Normalnya harga cabai di Papua Barat, lantaran ada panen di Distrik Aimas, Sorong. Panen cabai rawit merah sekitar lima hektare dan cabai keriting 10 hektare.</p>
m	<p><b>Musim Hujan Bukan Lagi Hambatan Tanam Cabai</b> (<i>Rilis.id, 6 Januari 2018</i>). Jakarta - Penerapan teknologi tepat guna membantu para petani dalam bertanam cabai saat musim hujan, apalagi jika curah hujan tinggi. Demikian disampaikan Kasubdi Aneka Cabai dan Sayuran Buah Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (STO), Agung Sunusi. "Penggunaan sungkup plastik atau rain shelter, merupakan salah satu teknologi yang cukup efektif digunakan pada saat musim hujan tiba," ujarnya di Jakarta, Jumat (5/1/2018). Dengan pemakaian sungkup plastik, katanya, tak lagi mempengaruhi produktivitas dan kualitas cabai.</p>



	<p>Agung menambahkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) telah bersinergi dengan petani-petani cabai unggulannya (champion) di sejumlah daerah untuk menerapkan inovasi tersebut. Mereka juga diminta mengatur pola tanam.</p> <p>Sementara itu, Direktur STO Ditjen Hortikultura, Prihasto Setyanto, menerangkan, di sejumlah daerah sedang panen cabai saat musim hujan Desember 2017-Januari 2018. Misalnya, Kulon Progo panen cabai keriting di lahan seluas 1.013 ha pada Desember dan Januari 982 hektare, Brebes (Desember 945 hektare dan Januari 562 hektare), serta Rejang Lebong (Desember 893 hektare dan Januari 1.096 hektare).</p>
n	<p><b>Kementan Sayangkan Gejolak Harga Ditengah Produksi Cabai Melimpah</b> (<i>Citraindonesia.com, 6 Januari 2018</i>). Jakarta - Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian RI, menyangkan adanya gejolak harga Cabai di pasaran sementara hasil panen melimpah. 'Bahwa terjadi gejolak sedikit, tetapi gejolak itu wajar. Harga di tingkat petani wajar dan ketersediaan pertanaman di lapangan sangat memadai', ungkap Prihasto Setyanto, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, tertulis dari Humas Kementerian Pertanian, Sabtu malam ini (6/1/2018).</p> <p>Sementara itu, Agung Sunusi, Kasubdit Aneka Cabai dan Sayuran Buah Dit. Sayuran dan Tanaman Obat, menegaskan di beberapa daerah mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi, namun dengan penerapan teknologi yang tepat, produktivitas tidak mengalami penurunan yang signifikan. Menurutnya, penggunaan Sungkup plastik/rain shelter merupakan salah satu teknologi yang cukup efektif digunakan pada saat musim hujan tiba. Agung sunusi menuturkan Direktorat Jenderal Hortikultura telah bekerjasama dengan champion untuk mengatur pola tanam di wilayahnya masing-masing.</p>
o	<p><b>Kementan : Stok dan Harga Aneka Cabai secara Nasional Aman dan Stabil</b> (<i>Monitor.co.id, 6 Januari 2018</i>). Jakarta - Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian stok cabai secara nasional aman diawal tahun 2018 ini khususnya Januari. Hal ini dapat dilihat dari data ketersediaan berdasarkan pantauan lapangan pada bulan Desember 2017.</p> <p>Sementara itu, Agung Sunusi Kasubdit Aneka Cabai dan sayuran Buah Dit. Sayuran dan Tanaman Obat menyampaikan saat ini memang di beberapa daerah mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi namun dengan penerapan teknologi yang tepat, produktivitas tidak mengalami penurunan yang banyak. Agung menambahkan tingkat kepatuhan petani dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pengaturan pola tanam yang telah disepakati sangat menentukan stabilisasi harga dan pasokan. Diharapkan champion bisa berkembang dan berperan di wilayah Indonesia Timur.</p> <p>"Per tanggal 5 Januari harga cabai rawit merah di petani berkisar 50-60 ribu per kilogram dan 30 ribu per kilogram untuk cabai keriting. Saat ini di Kabupeten Sorong sendiri ada panen cabai rawit merah sekitar 5 ha dan cabai keriting 10 ha seperti di Distrik Aimas. Dalam satu tahun di Kabupaten Sorong pertanaman cabai rawit merah mencapai 80 ha dan cabai keriting 70 ha. Benyamin menyampaikan faktor cuaca dan transportasi distribusi sangat berpengaruh pada harga di wilayah tersebut," katanya.</p>
p	<p><b>Pedasnya' Harga Cabai Rawit di Awal Tahun</b> (<i>Detik.com, 7 Januari 2018</i>). Jakarta - Harga cabai rawit merah eceran menyentuh angka Rp 65.000/ kg. Menurut salah satu pedagang sayur di Pasar Mampang Prapatan, Bono, harga beberapa jenis cabai mulai naik sejak awal Desember hingga Januari 2018 ini.</p>



	<p>"Baru dua minggu ini, harganya bertahap naik sejak awal Desember. Tapi udah dua minggu ini harganya Rp 65.000. Selain rawit ada juga beberapa jenis cabai seperti cabai merah besar yang saat ini menyentuh harga Rp 40.000/kilogram dari harga normal yaitu Rp 25.000/ kilogram di pertengahan Desember lalu. Sementara untuk jenis cabai hijau besar juga mengalami kenaikan. Bila dua minggu lalu harga cabai hijau besar dijual dengan harga Rp 15.000/ kilogram saat ini cabai hijau besar dijual dengan harga Rp 24.000/ kilogram.</p>
q	<p><b>Harga Cabe Makin Pedas (Rakyat Merdeka, 8 Januari 2018).</b> Sejumlah harga pangan mengalami kenaikan akibat distribusi yang tidak lancar akibat faktor cuaca. Dari hal tersebut, kenaikan harga cabe layak mendapatkan penanganan ekstra dari pemerintah. Khususnya cabe rawit merah harganya sudah tembus mencapai dia atas Rp 70 ribu per kilo dari normalnya Rp 25 ribu per kg.</p> <p>Selain cabe, Mansuri mengungkapkan, telur ayam juga mengalami kenaikan cukup tinggi. Harga telur kini di eceran Rp 26 ribu perkg. Padahal harga normalnya di kisaran Rp 20 ribu per kg. Untuk mengatasi fluktuasi harga telur, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita belum lama ini menyampaikan akan segera menentukan rentang harga di tingkat produsen untuk telur dan ayam. "Kita akan buat harga acuan dengan range supaya tidak naik dan tidak terlalu turun. Menurut Enggar, pada pertengahan 2017 lalu, harga telur ayam sempat merosot tajam sampai peternak merugi. Hal itu terjadi karena produksi telur sedang tinggi sementara permintaan tetap. Kemudian, di akhir 2017, harga telur dan daging ayam meningkat hingga melebihi harga acuan pembelian di tingkat konsumen.</p>
r	<p><b>Pasokan dan Harga Aneka Cabai di Awal Tahun 2018, Aman dan Stabil (Betaenews.com, 8 Januari 2018).</b> Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura memastikan stok cabai secara nasional aman di awal tahun 2018, yaitu di Januari sampai Maret. Buktinya, dari data ketersediaan berdasarkan pantauan lapangan pada bulan Desember, cabe besar di Januari sekitar 102.153 ton, Februari 101.840 ton, dan Maret 101.855 ton. Sementara kebutuhan secara nasional di Januari hanya 93.331 ton, Februari 93.311 ton, dan Maret 93.645 ton. Sedangkan cabai rawit, ketersediaan di Januari sekitar 77.847 ton, Februari 78.090 ton, dan Maret 78.564 ton. Kebutuhan bulan Januari hanya 69.843 ton, Februari 69.861 ton, dan Maret 69.945 ton.</p> <p>"Berdasarkan data tersebut, baik cabai besar maupun cabai rawit masih aman, bahkan surplus," kata Spudnik Sujono, Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura dalam keterangan tertulisnya melalui Humas Ditjen Hortikultura, Senin (8/1/2018). Menurut Spudnik, harga saat ini di lapangan sesuai data yang dimiliki masih wajar, dan ketersediaan pertanaman di lapangan sangat memadai. Dia mengungkapkan, per tanggal 8 Januari 2018, harga cabe merah keriting di tingkat petani di Jawa Barat seperti Bandung, Garut, Cianjur, Sumedang hanya sekitar Rp 19 ribu – Rp 24 ribu, dan cabai rawit merah Rp 28 ribu – Rp 32 ribu.</p> <p>Agung Sunusi, Kasubdit Aneka Cabai dan Sayuran Buah Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura mengakui bahwa produktivitas aneka cabai tidak mengalami penurunan yang banyak walaupun saat ini di beberapa daerah mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi. "Hal itu karena adanya penerapan teknologi yang tepat," ujarnya. Menurutnya, penggunaan sungkup plastik/rain shelter merupakan salah satu teknologi yang cukup efektif saat musim hujan tiba. Untuk itu, pihaknya telah bekerjasama dengan champion untuk mengatur pola tanam di wilayahnya masing-masing.</p>



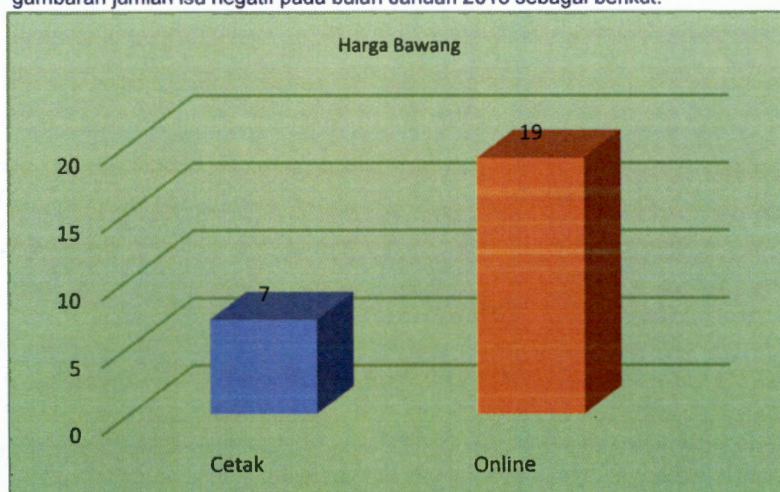
s	<p><b>Harga Cabai Naik Hingga Rp 65.000/Kg, Kementan: Enggak Masuk Akal</b> (<i>Detik.com, 8 Januari 2018</i>). Jakarta - Memasuki awal tahun, harga kebutuhan pangan seperti cabai mengalami kenaikan. Misalnya saja cabai rawit merah yang dipatok Rp 65 ribu/kg di Pasar Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Spudnik Sudjono mengatakan bahwa lonjakan harga cabai tersebut dikarenakan adanya permainan harga. Pasalnya saat ini harga cabai di petani masih dianggap murah.</p> <p>Berdasarkan data Kementerian Pertanian, harga cabai rawit merah per tanggal 7 Januari 2018, di Sambas dipatok Rp 40.000/kg dan di Pasar Induk Kramat Jati Rp 37.000kg. Lantas, untuk mengatasi hal tersebut pihaknya pun telah bekerjasama dengan Satgas Pangan. "Satgas pangan sudah turun dari Desember lalu. Tapi naik ya karena namanya pedagang jadi nggak ada namanya supply-demand," pungkasnya.</p>
t	<p><b>Perluah Operasi Pasar Cabai? Kementan: Ngapain, Barangnya Ada</b> (<i>Detik.com, 8 Januari 2018</i>). Jakarta - Di awal tahun harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp 65 ribu/kg. Contohnya di Pasar Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pekan lalu. Lantas, perluah operasi pasar untuk menstabilkan harga cabai tersebut?</p> <p>Menurut Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Spudnik Sudjono operasi pasar hanya dilakukan ketika produksi suatu barang berkurang. Namun, menurut Spudnik, kenaikan harga cabai tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Sederhananya, produksi cabai rawit merah masih dinilai stabil. Sehingga pihaknya tidak akan melaksanakan operasi pasar. " Berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati masih sebanyak 21 ton. Lebih lanjut ia menjelaskan, kenaikan harga cabai rawit merah terjadi karena adanya permainan harga. Pasalnya saat ini harga cabai di petani masih dianggap murah. "Itu memang di tata niaganya (harga cabai tinggi). Di petani masih murah kok, masa di ritel Rp 60 ribu kan nggak masuk akal, berarti tata niaganya," imbuhnya.</p>
u	<p><b>Pejabat Kok Salahkan Pasar</b> (<i>Rakyat Merdeka, 9 Januari 2018</i>). Harga cabe makin melambung tinggi. Kemarin, bumbu pedas ini sudah menyentuh Rp 65 ribu per kg di pasaran. Parahnya, para pejabat seperti cuma bisa cuap-cuap menanggapi masalah ini. Ada yang menyalahkan cuaca, ada juga yang menyalahkan pasar sebagai gara-gara melejitnya harga cabai.</p> <p>Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sudjono. Pejabat ini punya analisis, lonjakan harga cabai terjadi dikarenakan permainan harga. Pasalnya saat ini harga cabai di petani masih terbilang murah. "Itu memang di tata niaganya (harga cabai tinggi). Di petani masih murah kok, masa di retail Rp 60 ribu kan enggak masuk akal, berarti tata niaganya," kata Spudnik seperti dilansir detik.com, kemarin. Spudnik menambahkan, saat ini belum ada aturan terkait distribusi dan harga cabe, sehingga pedagang pun bebas memanfaatkan celah tersebut. "Kan kalau jual enggak ada regulasi yang ngatur harga. Berarti pedagang memanfaatkan momen saja," sebutnya.</p> <p>Terpisah, Ketua Satgas Pangan Polri, Irjen Setyo Wasisto menambahkan, ada beberapa hal yang menyebabkan harga cabe naik. Salah satunya ada kendala sistem produksi karena musim hujan dan sistem distribusi yang menyebabkan pasokan cabai terlambat. "Memang ada yang terganggu karena hujan jadi panennya kurang bagus. Kemudian kemarin terganggu karena transportasi jadi terlambat sampai di Pasar Induk," katanya dilansir situs</p>

	<p>berita yang sama. Soal adanya permainan harga pedagang, pihaknya mengatakan akan mengecek hal itu. "Karena selama ini belum ada laporan. Satgas Pangan akan terus mengawasi," pungkasnya.</p>
v	<p><b>Ada Potensi Kelangkaan Komoditas Bawang Putih</b> (<i>Kontan.co.id, 29 Januari 2018</i>). Jakarta - Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengingatkan potensi kelangkaan komoditas bawang putih karena minimnya stok dan keengganan importir untuk menanam bibit bawang putih. Menurut Dwi, salah satu penyebab potensi kelangkaan bawang putih, selain karena tingginya kebutuhan, adalah munculnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dalam peraturan tersebut, kata dia, terdapat kewajiban bagi para importir untuk menghasilkan atau menanam sebanyak lima persen bawang putih dari total izin impor yang telah didapatkan untuk memenuhi pasokan.</p> <p>Padahal dalam periode 2014 hingga awal 2017, setidaknya terdapat 112 importir yang memperoleh izin untuk perdagangan bawang putih. Faktor ini yang menyebabkan target penanaman dari importir sebanyak 2.868 hektare, saat ini baru 865 hektare yang terwujud. Hingga pertengahan Januari 2018, Kementerian Perdagangan belum memberikan izin impor bawang putih kepada importir. Merujuk pada tahun-tahun yang lalu, pada Januari 2016 sudah dilakukan impor bawang putih sebanyak 41,84 ribu ton. Angka tersebut meningkat 10,22 persen dibandingkan periode 2015.</p>
w	<p><b>Pengamat Perkiraan Komoditas Bawang Putih Semakin Langka</b> (<i>Metrotvnews.com, 29 Januari 2018</i>). Jakarta - Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengingatkan besarnya potensi kelangkaan komoditas bawang putih karena minimnya stok dan keengganan importir untuk menanam bibit bawang putih. Menurut Dwi, salah satu penyebab potensi kelangkaan bawang putih, selain karena tingginya kebutuhan, adalah munculnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).</p> <p>Dalam peraturan tersebut, kata dia, terdapat kewajiban bagi para importir untuk menghasilkan atau menanam sebanyak lima persen bawang putih dari total izin impor yang telah didapatkan untuk memenuhi pasokan. Faktor ini yang menyebabkan target penanaman dari importir sebanyak 2.868 hektare, saat ini baru 865 hektare yang terwujud. Hingga pertengahan Januari 2018, Kementerian Perdagangan belum memberikan izin impor bawang putih kepada importir. Merujuk pada tahun-tahun yang lalu, pada Januari 2016 sudah dilakukan impor bawang putih sebanyak 41,84 ribu ton. Angka tersebut meningkat 10,22 persen dibandingkan periode 2015.</p>
x	<p><b>Inilah Pemicu Potensi Kelangkaan Bawang Putih</b> (<i>Inilah.com, 29 Januari 2018</i>). Jakarta - Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas mengingatkan potensi kelangkaan komoditas bawang putih karena minimnya stok dan keengganan importir untuk menanam bibit bawang putih. Menurut Dwi, salah satu penyebab potensi kelangkaan bawang putih, selain karena tingginya kebutuhan, adalah munculnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).</p> <p>Hingga pertengahan Januari 2018, Kementerian Perdagangan belum memberikan izin impor bawang putih kepada importir. Merujuk pada tahun-tahun yang lalu, pada Januari 2016 sudah dilakukan impor bawang putih sebanyak 41,84 ribu ton. Angka tersebut meningkat 10,22 persen dibandingkan periode 2015.</p>



y	<p><b>Indonesia Dibayangi Kelangkaan Bawang Putih, Ini Penyebabnya</b> (<i>Merdeka.com, 29 Januari 2018</i>). Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas mengingatkan potensi kelangkaan komoditas bawang putih karena minimnya stok dan keengganan importir untuk menanam bibit bawang putih.</p> <p>Menurut Dwi, salah satu penyebab potensi kelangkaan bawang putih, selain karena tingginya kebutuhan, adalah munculnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Faktor ini yang menyebabkan target penanaman dari importir sebanyak 2.868 hektare, saat ini baru 865 hektare yang terwujud. Hingga pertengahan Januari 2018, Kementerian Perdagangan belum memberikan izin impor bawang putih kepada importir. Merujuk pada tahun-tahun yang lalu, pada Januari 2016 sudah dilakukan impor bawang putih sebanyak 41,84 ribu ton. Angka tersebut meningkat 10,22 persen dibandingkan periode 2015.</p>
z	<p><b>Bawang Putih Terancam Langka</b> (<i>Pikiran Rakyat, 30 Januari 2018</i>). Pasokan bawang putih di sejumlah pasar terus berkurang sehingga harganya merangkak naik. Kondisi ini dikhawatirkan akan kembali bergejolak seperti pada pertengahan tahun lalu ketika harga bawang putih sempat menyentuh Rp 80.000 per kg. Pasalnya, komoditas ini pasokannya berkurang seiring keengganan importir mengimpor dari negara produsen.</p> <p>Sementara itu, pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menyatakan, kelangkaan bawang putih pada tahun ini sudah mengintip dan bisa lebih parah dibandingkan dengan tahun 2017. Saat itu, harga bawang putih mencapai Rp 80.000 per kilogram karena saking minimnya stok dan tingginya kebutuhan. Dijelaskannya, jika seorang importir ingin mengeksekusi hak impornya sebanyak 1.000 ton bawang putih dalam setahun, harus memproduksi sekitar 50 ton bawang putih dari kebun yang ia tanami.</p>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gambaran isu berita negatif terkait pada Hortikultura untuk bulan Januari 2018, meliputi harga bawang. Secara rinci gambaran jumlah isu negatif pada bulan Januari 2018 sebagai berikut.



Gambar 2.2 Hortikultura  
Jumlah berita negatif sebanyak 1 judul, 7 berita cetak, dan 19 berita online.

No.	Peternakan dan Kesehatan Hewan
1	<b>Harga Telur</b>
a	<p><b>Harga Telur Mulai Tinggi</b> (<i>Pikiran Rakyat, 2 Januari 2018</i>). Harga telur berada di batas atas sejak sebulan terakhir. Hal itu mengakibatkan harga di konsumen pun relatif tinggi. Diduga, kenaikan harga terjadi bukan hanya karena peningkatan permintaan selama libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, melainkan juga lantaran penyakit yang menyerang ayam.</p> <p>Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional Rofl Yasifun mengatakan, kenaikan harga telur telah berlangsung dalam sebulan terakhir. Namun, harga telur di tingkat peternak di Blitar dalam tren penurunan jika dibandingkan dengan pekan kemarin yang kini posisinya di kisaran Rp 20.800-Rp 21.200 per kilogram. Pengurus Pinsar Petelur Nasional Jawa Barat, Awan Sastrawijaya, mengakui, harga telur merangkak naik, bahkan di Jawa Barat terjadi sejak pertengahan November. Di tingkat peternak, harga telur saat ini sekitar Rp 22.000-Rp 23.000 dari sebelumnya Rp 18.000-Rp 19.000 perkg.</p> <p>Dampaknya, terjadi pembengkakan biaya produksi yang bergantung pada kondisi masing-masing peternak mulai dari 10% hingga 40% bahkan lebih. Awan menyebutkan, penyakit yang menyerang ayam petelur adalah gangguan produksi dan penyakit inclusion body hepatitis (IBH). "Dalam penanggulangan merebaknya penyakit tersebut, dinas terkait harus segera turun ke lapangan dan bisa segera membuat vaksin untuk penanggulangannya," ujar Awan.</p>
2	<b>Harga Daging Ayam</b>
a	<p><b>Harga Daging Ayam Tembus Rp 40.000/Ekor, Ini Sebabnya</b> (<i>Detik.com, 16 Januari 2018</i>). Harga daging ayam di pasar belakangan ini melonjak hingga Rp 40.000/ekor. Hal tersebut dikarenakan gagal panen yang terjadi pada sektor peternakan ayam. Ketua Umum Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN), Sigit Prabowo mengatakan bahwa saat ini harga ayam yang dijualnya, yakni Rp 22.000/kg sampai Rp 22.500/kg. Padahal biasanya harga dipatok Rp 18.000/kg sampai 18.500/kg.</p> <p>Melonjaknya harga ayam dari sektor peternakan tersebut dikarenakan terjadinya gagal panen. Di mana gagal panen tersebut menyebabkan kematian dan perkembangan yang terganggu pada ayam, sehingga pasokan ayam pun berkurang. "Yang jelas faktor dari alam gagal panen karena penyakit dengan cuaca yang buruk. Itu menyebabkan kematian di lapangan sama ayam tumbuh kerdil enggak bisa jadi daging," jelasnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kenaikan tersebut sudah terjadi sejak awal Desember 2017. Oleh karena itu pihaknya terpaksa menaikkan harga ayam tersebut. "Sejak awal Desember 2017 ini belum teratasi sudah hampir 2 bulan. Jadi harga naik," imbuhnya.</p>
b	<p><b>Harga Daging Ayam Terus Naik</b> (<i>Pikiran Rakyat, 17 Januari 2018</i>). Ribuan bandar, peternak, pengusaha, dan pedagang Daging ayam se-Bandung Raya yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Persatuan Pasar dan Warung Tradisional Jawa Barat (LSM Pesat Jabar) mengancam melakukan mogok berjualan karena terus meroketnya harga Daging ayam.</p> <p>Ketua Koperasi Pesat Bakti Bangsa lim Ruhimat menuturkan, saat ini harga karkas Daging ayam berada di kisaran Rp 37.000-Rp 38.000 per kilogram. Sedangkan normalnya, pedagang menjual di angka Rp 32.000-Rp 34.000 per kilogram. Dengan harga tersebut tentunya sangat memberatkan konsumen, khususnya para pedagang makanan jadi. Kenaikan tersebut diakuiinya telah berjalan selama tiga bulan terakhir.</p>



	<p>Pit Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Hening Widiatmoko menuturkan, informasi yang dikumpulkan di lapangan, beberapa waktu yang lalu para pedagang Daging ayam di Cianjur juga telah melakukan aksi serupa. Terungkap di tingkat peternak harga DOC telah cukup tinggi, yakni di kisaran Rp 5.000 atau 6.000. "Berdasarkan investigasi disimpulkan ada pihak di rantai distribusi yang mengambil untung di luar batas kewajaran.</p>
<b>3</b>	<b>Sapi Perah/siwab/upsus</b>
a	<p><b>Populasi Sapi Perah Masih Kurang</b> (<i>Kontan, 9 Januari 2018</i>). Jakarta - Populasi sapi perah di dalam negeri semakin turun. Akibatnya, produksi susu sapi secara nasional stagnan bahkan cenderung turun dari tahun ke tahun. Tahun 2017 produksi susu sapi sebanyak 600.000 ton. Tahun ini, produksi susu sapi diproyeksikan maksimal sama dengan tahun lalu. Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN) Teguh Boediyana mengatakan, minimnya dukungan pemerintah terhadap pengembangbiakan sapi perah menjadi penyebab menyusutnya populasi dan penurunan produksi susu lokal. "</p> <p>Menurut Teguh, Kemtan belum memiliki upaya serius meningkatkan populasi sapi perah. Padahal peternak sangat membutuhkan bantuan subsidi untuk melakukan impor sapi perah. Impor perlu dilakukan untuk menambah populasi sapi perah. Sebab saat ini, menurut Teguh, populasi sapi perah betina baik yang dara maupun laktasi hanya berkisar 350.000 ekor. Jumlah itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan susu Industri Pengolahan Susu (IPS) yang mencapai sekitar 3,7 juta ton. Penambahan populasi sapi perah perlu untuk mengejar target pemenuhan 10% bahan baku susu untuk IPS di tahun 2020.</p> <p>Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito mengatakan, pada saat ini kendala utama peternakan sapi perah adalah harga susu yang murah dan harga pakan yang mahal. "Ketika harganya tidak memadai, peternak tidak akan mampu membeli pakan ternak yang berkualitas, dengan begitu akan berdampak pada produksi yang tidak maksimal dan kualitasnya tidak bagus," ujarnya</p>
<b>4</b>	<b>Solusi Penyakit Unggas</b>
a	<p><b>Pemerintah Diminta Segera Temukan Solusi Penyakit Unggas</b> (<i>Bisnis.com, 21 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah diharapkan bisa segera mencari solusi atas merebaknya penyakit yang menyebabkan kematian serta gangguan pertumbuhan pada ayam baik petelur dan pedaging. Presiden Peternak Laver Nasional Musbar menyebutkan penurunan kasus produksi ayam petelur sebenarnya telah terjadi sejak November 2016. Namun penurunan tersebut baru terjadi secara berpindah-pindah di beberapa daerah.</p> <p>Di sisi lain, keadaan cuaca dengan tingkat curah hujan yang tinggi dalam dua bulan terakhir juga memperparah keadaan. Tingkat kelembaban udara yang meninggi membuat terganggunya sirkulasi udara sehingga mengganggu kesehatan ayam-ayam para peternak rakyat. Untuk sementara, para peternak rakyat hanya bisa menekan persebaran penyakit dengan menerapkan bio security. Penerapan bio security pada hewan unggas telah terbukti mampu menekan angka kematian dan persebaran penyakit.</p>



	<p>Berdasarkan penjelasan Musbar, penyakit mulai menjangkit ketika anak ayam baru berusia 5 hari (day old chick). Selain merugikan konsumen karena harga yang akan terus naik, peternak pun tak luput dari kerugian. Saat ini, kata Musbar, ada banyak kandang para peternak yang kosong atau hanya terisi 30-40% nya saja karena para peternak sudah tidak sanggup untuk meneruskan usahanya. Tak hanya ayam petelur, belakangan ini, ayam pedaging pun tak luput dari masalah penyakit yang menyebabkan kematian ayam. Kalaupun anak ayam berhasil bertahan hidup, maka perkembangannya akan terganggu sehingga berat saat panen tidak bisa mencapai maksimal.</p>
<b>5</b>	<b>Impor Daging Kerbau</b>
<b>a</b>	<p><b>Iklim Investasi Peternakan Sapi Perlu Diperbaiki</b> (<i>Investor Daily, 4 Januari 2018</i>). Jakarta - Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPPSKI) meminta pemerintah memperbaiki Iklim Investasi Peternakan Sapi dan kerbau di Tanah Air agar lebih kondusif. Salah satunya dengan segera mengubah kebijakan yang membebaskan impor daging dan sapi.</p> <p>Ketua Umum DPP PPPSKI Teguh Boediyana mengatakan, selama 2017, iklim usaha beternak sapi dan kerbau di Tanah Air sangat tidak kondusif. Penyebab utama tidak kondusifnya iklim usaha peternakan itu adalah ketidakberpihakan pemerintah terhadap peternakan rakyat yang menguasai 98% populasi ternak, pemerintah lebih berpihak kepada konsumen dan produsen industri. "Bercermin dari kondisi 2017 maka tahun ini pemerintah harus melakukan perubahan. Pemerintah harus segera mengubah tujuh kebijakan yang kontraproduktif, sehingga usaha peternakan sapi dan kerbau dapat tumbuh dan berkembang secara kondusif," kata dia di Jakarta, Rabu (3/1).</p>
<b>b</b>	<p><b>Harga Sudah Naik: Impor Pangan Dinilai Terlambat</b> (<i>Jawa Pos, 22 Januari 2018</i>). Jakarta - Setelah beras, dalam waktu dekat pemerintah akan mengimpor Daging kerbau untuk menutupi kebutuhan nasional. Direktur Pengadaan Bulog Adrianto Wahyu Adi mengatakan, rencana impor 100 ton Daging kerbau dari India itu dikeluarkan dalam rakortas Kemenko Perekonomian pada 20 November 2017. "Memang ada rencana (impor), tapi rekom dari kementerian belum terbit," kata Adrianto kepada Jawa Pos kemarin (21/1).</p> <p>Rekomendasi impor itu, lanjut dia, dikeluarkan Kemendag yang diteruskan kepada Kementerian BUMN yang akan menugasi Perum Bulog. Impor akan dilakukan secara bertahap pada awal 2018. Tujuan impor adalah menghindari lonjakan harga daging. Per 19 Januari 2018, stok daging sapi di gudang Bulog masih 10.800 ton.</p> <p>Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai kebijakan impor cukup terlambat. "Seharusnya diimpor sejak September tahun lalu," katanya. Kesalahan pemerintah paling mendasar adalah menetapkan indikator kesuksesan pengelolaan pangan dengan kondisi tanpa impor.</p>
<b>c</b>	<p><b>Peternak Tolak Impor Daging Kerbau</b> (<i>Harnas.co, 22 Januari 2018</i>). Jakarta - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali mengajukan izin impor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton dari India untuk pengadaan tahun ini. Namun, rencana tersebut ditolak peternak lokal lantaran bakal menjatuhkan harga daging sapi dalam negeri.</p> <p>Ketua Umum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menolak keras rencana tersebut. Penolakan becermine dari kebijakan impor daging kerbau tahun lalu yang lebih banyak menyusahkan peternak. Kegagalan selanjutnya, kurs rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Menurut dia, harga daging lokal dipastikan bisa di bawah Rp 80 ribu per kilogram (kg) jika nilai tukar rupiah di kisaran Rp 12 ribu per dolar AS.</p>

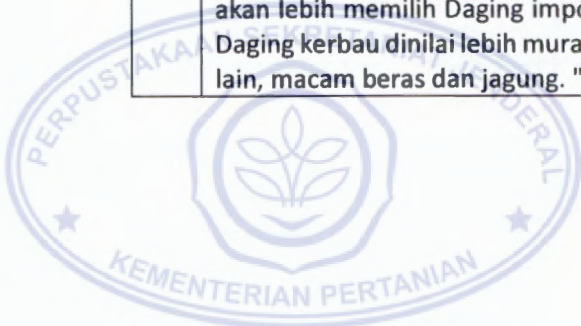
	<p>PPSKI menilai, pemerintah tidak adil. Peternak seakan harus menjadi pihak dirugikan atas kegagalan program pemerintah untuk mewujudkan swasembada sapi. Kebijakan impor daging kerbau 100 ribu ton dipastikan menjatuhkan harga daging sapi lokal dan merugikan peternak. Kebijakan impor daging kerbau dari India juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi karena India termasuk zona belum bebas penyakit mulut dan kuku. "Kami mengimbau pemerintah meninjau kembali rencana importasi yang sangat distortif pada peternakan sapi lokal. Ini kontradiktif dengan target swasembada sapi pada 2024," ujar dia.</p> <p>Sekretaris Perusahaan Bulog Siti Kuwati mengatakan, impor daging kerbau dari India tetap dilaksanakan. Saat ini Bulog masih menyelesaikan proses perizinan impor. "Bulog hanya pelaksana kebijakan pemerintah. Sampai saat ini sesuai Rakortas, Bulog masih diberi penugasan.</p>
d	<p><b>Pemerintah Diminta Tinjau Rencana Importasi Daging Kerbau</b> (<i>Metrotvnews.com, 22 Januari 2018</i>). Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) meninjau rencana importasi daging kerbau sebanyak 100 ribu ton dari India pada 2018.</p> <p>Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana menyatakan penolakannya karena kebijakan impor daging kerbau yang dianggap murah tersebut sangat kontradiktif dengan target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan dicapai pada 2024. "DPP PPSKI menyatakan dengan keras menolak rencana pemerintah tersebut. Telah terbukti bahwa kebijakan impor daging kerbau tahun lalu bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata Teguh, seperti dikutip dari Antara, Senin, 22 Januari 2018.</p>
e	<p><b>Peternak Tolak Rencana Impor Daging Kerbau</b> (<i>Republika.co.id, 22 Januari 2018</i>). Sejumlah peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menolak rencana Bulog untuk mengimpor daging kerbau asal India sebanyak 100 ribu ton untuk tahun 2018. PPSKI menilai, kebijakan impor tidak berpihak pada peternak lokal. "Telah terbukti bahwa kebijakan impor daging kerbau di tahun lalu bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana, lewat keterangan tertulis, Senin (22/1).</p> <p>PPSKI menilai, pemerintah telah gagal mewujudkan program swasembada daging sapi di tahun 2010 dan 2014. Kegagalan itu, kata Teguh, berimplikasi pada pemenuhan daging sapi impor sebanyak 50 persen dari kebutuhan nasional. "Sangat tidak adil kegagalan pemerintah sekarang ditimpakan kepada peternak sapi dan kerbau lokal dengan mengimpor daging yang murah," kata dia.</p> <p>Karena itu, PPSKI meminta pemerintah meninjau kembali rencana impor daging kerbau di tahun ini. Sebelumnya, Perum Bulog mengungkap rencana impor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton untuk tahun 2018. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, impor dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga daging pada bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri yang akan jatuh pada pertengahan tahun ini.</p>
f	<p><b>Daging Kerbau Juga Impor, Setelah Itu Apa Lagi?</b> (<i>Jpnn.com, 22 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah akan segera mengimpor daging kerbau untuk menutupi kebutuhan nasional. Direktur Pengadaan Bulog Adrianto Wahyu Adi mengatakan, rencana impor 100 ton daging kerbau dari India itu dikeluarkan dalam rakortas Kemenko Perekonomian pada 20 November 2017.</p>



	<p>Rekomendasi impor itu, lanjut dia, dikeluarkan Kemendag yang diteruskan pada Kementerian BUMN yang akan menugasi Perum Bulog. Impor akan dilakukan secara bertahap pada awal 2018. Tujuan impor adalah menghindari lonjakan harga daging. Per 19 Januari 2018, stok daging sapi di gudang Bulog masih 10.800 ton. Implikasinya adalah 50 persen pemenuhan daging sapi (setara 250 ribu ton) harus diimpor. Karena harus diimpor, harga daging dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan harga internasional.</p> <p>Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai kebijakan impor cukup terlambat. Beras, contohnya. "Seharusnya diimpor sejak September tahun lalu," katanya. Menurut dia, kesalahan pemerintah paling mendasar adalah menetapkan indikator kesuksesan pengelolaan pangan dengan kondisi tanpa impor. Akibatnya, kondisi pasar sangat reaktif saat mendengar kebijakan impor. "Pada suatu kondisi kita harus impor, itu hal yang biasa," timpalnya.</p>
g	<p><b>Kebijakan Impor Daging Kerbau 100 Ribu Ton jadi Sorotan</b> (<i>Cnnindonesia.com, 22 Januari 2018</i>). Setelah kebijakan impor beras dan garam, kini giliran kebijakan impor daging kerbau jadi sorotan. Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, meninjau niat impor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton dari India.</p> <p>Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPSKI Teguh Boediyana menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah mengimpor daging kerbau. Alasannya, kebijakan tersebut kontradiktif dengan target swasembada daging yang dicanangkan tercapai pada 2024 mendatang. "PPSKI menyatakan dengan keras menolak rencana pemerintah tersebut (impor daging kerbau). Telah terbukti bahwa kebijakan impor daging kerbau bagi peternak rakyat di tahun lalu, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," ujarnya, mengutip Antara, Senin (22/1).</p> <p>Bahkan, pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya lebih dari Rp18 triliun sejak era Menteri Pertanian Anton Apriantono tidak efektif untuk mewujudkan program swasembada daging sapi. Selain itu, sambung dia, kebijakan impor daging ruminansia dari negara atau zona yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. "Apabila kebijakan impor daging kerbau dengan alasan harga murah, kebijakan tersebut harus diterapkan pula untuk komoditas pertanian lain, seperti beras dan jagung yang harganya lebih murah dibandingkan dengan produksi dalam negeri," terang Teguh.</p>
h	<p><b>Maret, Daging Kerbau Impor Serbu Indonesia</b> (<i>Jurnas.com, 22 Januari 2018</i>). Perum Bulog hari ini mengajukan permintaan (Request For Quotation) kepada para pemasok daging kerbau di India untuk menutupi kebutuhan nasional. "RFQ kami kirim hari ini, bid dan kontrak selesai dua minggu dari tanggal hari ini. Kami perkirakan minggu pertama Maret kapal pemasok akan masuk ke Indonesia," demikian disampaikan, Direktur Pengadaan Bulog Adrianto Wahyu Adi saat dikonfirmasi <i>jurnas.com</i>. "RFQ akan ditindak lanjuti menjadi Invitation to Bid hanya bila penugasan kementerian terkait sudah kami dapatkan. Kami sudah kirim. Ada sekitar delapan yang kami kirim RFQ. India semua," sambungnya.</p> <p>Pada Minggu (21/1), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menolak kebijakan impor daging kerbau. Pasalnya impor tahun lalu bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Selain itu, kebijakan mengimpor daging kerbau sangat kontradiktif dengan target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan dicapai pada 2026 oleh Kementerian Pertanian (Kementan).</p>



i	<p><b>PPSKI Kembali Tolak Impor Daging Kerbau</b> (<i>Investor Daily Indonesia, 23 Januari 2018</i>). Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) kembali menolak rencana pemerintah melalui Perum Bulog untuk mengimpor daging kerbau dari India sebanyak 100 ribu ton tahun ini. Berdasarkan pengalaman 2017, kebijakan impor daging kerbau lebih banyak merugikan petani. Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana mengatakan, apabila pemerintah beranggapan bahwa harga daging sapi lokal terlalu mahal maka sesungguhnya itu adalah akibat kesalahan pemerintah sendiri. Yakni, akibat kegagalan pemerintah mewujudkan swasembada daging sapi mulai era pemerintahan Presiden SBY.</p> <p>Kesalahan selanjutnya adalah pengelolaan dana APBN yang jumlahnya lebih dari Rp 18 triliun sejak era Menteri Anton Apriantono yang selama ini digunakan untuk PSDS mungkin tidak efektif. "Jadi, sangatlah tidak adil kegagalan pemerintah sekarang ditimpakan kepada peternak sapi dan kerbau lokal dengan mengimpor daging yang murah," jelas dia.</p> <p>Selain itu, kebijakan impor daging ruminansia dari negara atau zona yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, apabila alasan kebijakan impor daging kerbau adalah harga murah, kebijakan tersebut harus diterapkan pula untuk komoditas pertanian lain, seperti beras dan jagung, yang harganya lebih murah dibandingkan dengan produksi dalam negeri.</p>
j	<p><b>Pertanyakan Rencana Datangkan Daging Kerbau</b> (<i>Jawa Pos, 23 Januari 2018</i>). Surabaya - Pemerintah melalui Bulog berencana kembali mengimpor 100 ribu ton Daging kerbau dari India tahun ini. Langkah tersebut dinilai tidak menguntungkan peternak rakyat. Sebab, pemerintah telah mengambil kebijakan serupa tahun lalu.</p> <p>Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana mengatakan, kebijakan impor dengan alasan mendapatkan Daging dengan harga murah tidaklah tepat. "Kalau pemerintah beranggapan harga Daging sapi lokal terlalu mahal, itu tidak terlepas dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada Daging sapi yang dicanangkan sejak 2010," paparnya kemarin. Pada 2010 pemerintah mengeluarkan program swasembada Daging sapi, tetapi tidak tercapai. Diikuti program serupa pada 2014 yang juga mengalami kegagalan.</p> <p>Dampaknya, separo dari kebutuhan Daging sapi dipenuhi dari impor. Besarannya mencapai 250 ribu ton. "Karena impor, harga Daging terpengaruh harga internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," jelasnya. Masih tingginya harga Daging sapi lokal semestinya tidak ditanggulangi dengan impor. "Selain itu, kebijakan impor Daging ruminansia dari negara atau zona yang belum bebas Penyakit mulut dan kuku bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi," tegas Teguh.</p>
k	<p><b>Tolak Impor Daging Kerbau</b> (<i>Indo Pos, 23 Januari 2018</i>). Jakarta -Kontroversi kebijakan impor beras belum mereda. Kini giliran kebijakan impor Daging kerbau menuai protes. Berdasar rencana, Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog), mendapat mandat mendaratkan 100 ribu ton Daging kerbau dari India. Menanggapi rencana itu, perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) tentu meradang dan menolak keras rencana tersebut).</p> <p>Impor Daging kerbau sambung Teguh, membuat harga Daging menjadi murah. Di mana, pasar akan lebih memilih Daging impor ketimbang Daging lokal hasil peternak. Kalau kebijakan impor Daging kerbau dinilai lebih murah, kebijakan itu harus diterapkan juga untuk komoditas Pertanian lain, macam beras dan jagung. "Ya, biar adil. Dan, peternak terlindungi," ingatnya.</p>



	<p>Upaya pemerintah gagal swasembada Daging sapi bukan cerita baru. Sejak era Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriantono tidak mampu mewujudkan program swasembada Daging sapi. Padahal, kala disiapkan anggaran tidak kurang Rp 18 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p> <p>Terpisah Sekretaris Perum Bulog Siti Kuwati menyebut pihaknya mendapat penugasan edisi tahun ini untuk mendatangkan Daging 100 ribu ton. Karena bersifat mandat, sebagai lembaga bawahan pemerintah, tentu tidak bisa menolak. Nah, terakait penolakan kalangan peternak atas rencana tersebut, Perum Bulog tidak bisa berbuat banyak.</p>
l	<p><b>Impor Daging Kerbau Rugikan Peternak</b> (<i>Koran Jakarta, 23 Januari 2018</i>). Jakarta - Para peternak sapi dan kerbau meolak rencana pemerintah mengimpor Daging kerbau sebanyak 100 ribu ton pada 2018 melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebab, kebijakan impor Daging kerbau oleh pemerintah tahun lalu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun peternak.</p> <p>Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana meminta pemerintah meninjau kembali rencana importasi Daging kerbau yang sangat distortif pada peternakan sapi lokal. "Kebijakan impor Daging kerbau yang dianggap murah ini kontradiktif dengan target swasembada Daging sapi yg dicanangkan akan dicapai di tahun 2024," tegasnya di Jakarta, Senin (22/1).</p> <p>Teguh menjelaskan beberapa faktor yang mengakibatkan harga Daging sapi terlampau mahal tahun lalu akibat kegagalan mewujudkan program swasembada Daging sapi 2010 dan 2014. "Implikasinya adalah 50 persen pemenuhan Daging sapi atau sekitar setara 250 ribu ton harus diimpor. Karena harus diimpor maka harga Daging dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar dan harga Daging internasionalkata Teguh.</p>
m	<p><b>Rencana Pemerintah Impor Daging Kerbau Panen Kritikan</b> (<i>Jpnn.com, 24 Januari 2018</i>). Jakarta - Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mengkritik rencana pemerintah mengimpor seratus ribu ton daging kerbau dari India pada tahun ini. Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana menilai langkah itu tidak menguntungkan peternak rakyat.</p> <p>Masih tingginya harga daging sapi lokal semestinya tidak ditanggulangi dengan mendatangkan daging impor murah. "Selain itu, kebijakan impor daging ruminansia dari negara atau zona yang belum bebas penyakit mulut dan kuku bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi," tegas Teguh.</p>
n	<p><b>Perhimpunan Peternak Menolak: Setelah Beras, Pemerintah Akan Impor Daging Kerbau</b> (<i>Harianterbit.com, 24 Januari 2018</i>). Pasca pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor beras sebanyak 500.000 ton di awal tahun 2018, pemerintah kembali melakukan impor terhadap daging kerbau. Rencananya, sebanyak 100 ribu ton daging kerbau dari India akan didatangkan secara bertahap mulai bulan Maret 2018. Adapun gencarnya kegiatan mengimpor yang dilakukan pemerintah kerap menuai tanya di berbagai kalangan.</p> <p>Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) meninjau kembali rencana importasi daging kerbau sebanyak 100 ribu ton dari India pada 2018. Ketua Umum DPP PPSKI, Teguh Boediyana, menyatakan penolakannya karena kebijakan impor daging kerbau yang dianggap murah tersebut sangat kontradiktif dengan target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan dicapai pada 2024.</p>



	<p>"DPP PPSKI menyatakan dengan keras menolak rencana pemerintah tersebut. Telah terbukti bahwa kebijakan impor daging kerbau tahun lalu bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata Teguh, seperti dikutip dari Antara, Selasa, (23/1/ 2018).</p> <p>Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan rencana pemerintah melakukan berbagai kegiatan impor. Seakan senada dengan persoalan impor daging, ia mencontohkan, keputusan pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada awal tahun 2018 menurutnya sangat terlambat.</p>
o	<p><b>CIPS Atasi Rantai Distribusi Turunkan Harga Daging Sapi</b> (<i>Harian Ekonomi Neraca, 25 Januari 2018</i>). Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan bahwa mengatasi rantai distribusi panjang yang ada di berbagai daerah dinilai bakal bisa menurunkan tingkat harga daging sapi lokal. "Pemerintah memandang solusi untuk memotong rantai distribusi adalah dengan menyerahkan prosesnya ke badan-badan pemerintah. Padahal kalau pemerintah mau menangani semua proses distribusi Daging sapi, maka pemerintah juga harus siap menanggung seluruh biaya terkait transportasi," kata Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi, yang disalin dari Antara.</p> <p>Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana dalam keterangan tertulisnya menyatakan penolakannya karena kebijakan impor daging kerbau yang dianggap murah tersebut sangat kontradiktif dengan target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan dicapai pada 2024. "DPP PPSKI menyatakan dengan keras menolak rencana pemerintah tersebut. Telah terbukti bahwa kebijakan impor daging kerbau tahun lalu bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata Teguh. Ia menjelaskan harga daging sapi lokal yang terlalu mahal disebabkan salah satunya kegagalan pemerintah mewujudkan Program Swasembada Daging Sapi pada 2010 dan dilanjutkan dengan program yang sama pada 2014 yang juga tidak tercapai.</p> <p>Sebelumnya, menurut Hizkia, banyak hal yang membuat harga daging sapi tetap mahal, salah satunya adalah kebijakan pembatasan impor daging sapi yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, lanjutnya, harga daging sapi di pasar internasional lebih murah dari pada harga daging sapi di dalam negeri.</p>
p	<p><b>Peternak Sebut Indonesia Sulit Capai Swasembada Daging</b> (<i>Republika.co.id, 25 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah diyakini tidak akan bisa swasembada daging dan akan terus impor. Salah satu penyebabnya, karena pemerintah masih menjadikan tolak ukur harga sebagai keberhasilan. Menurut Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Tawaf, saat ini harga sapi masih dijadikan pemerintah sebagai patokan, bukan kesejahteraan para petani, dalam hal ini peternak.</p> <p>Pemerintah juga menunjuk pihak swasta untuk melakukan pembibitan tanpa diberi insentif yang tentunya tidak menguntungkan. Selain itu, impor daging juga dibebaskan. Padahal dulu, kata Rochadi, jumlah daging yang harus diimpor dikendalikan pemerintah. Menurut Rochadi, banyak riset- riset mengenai ternak yang dapat dijadikan patokan sebelum mengambil kebijakan. Namun selama ini kebijakan yang diambil pemerintah terkait daging menurutnya merupakan kebijakan emosional.</p>
6	<b>Larangan penggunaan AGP</b>
a	<p><b>Pakan Ternak AGP Dilarang, Ayam di Blitar Diserang Penyakit</b> (<i>Detik.com, 26 Januari 2018</i>). Blitar - Awal tahun 2018, pemerintah melarang pemakaian imbuhan pakan ternak, Antibiotic Growth Promoters (AGP) dan Ractopamine. Residu AGP dari hasil produksi ternak, dikhawatirkan menimbulkan resistensi bagi orang yang mengkonsumsi daging atau telur.</p>

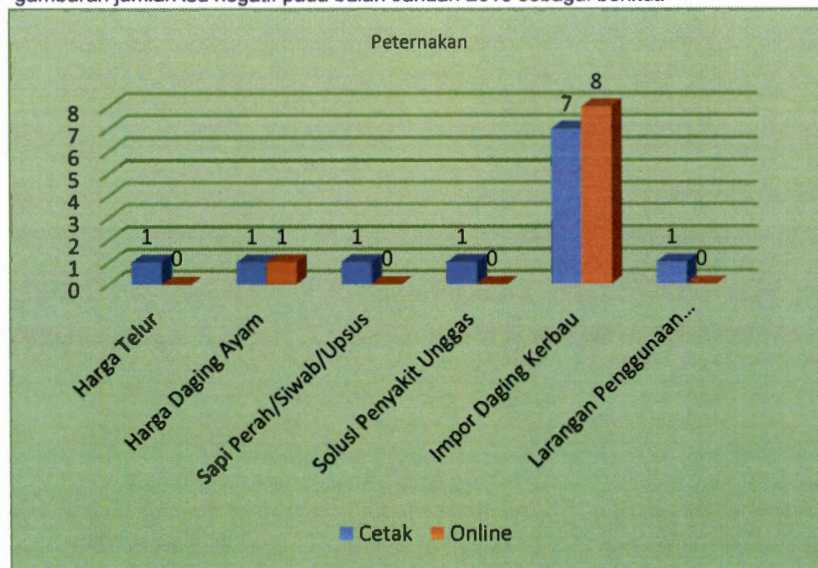


Larangan ini berakibat penyakit 90-40 melanda hampir sebagian besar peternak ayam, baik petelur maupun pedaging di kawasan Blitar. Penyakit 90-40 hanyalah istilah yang dipakai kalangan peternak di Blitar, untuk menyebutkan turunnya angka produktivitas. Dari kapasitas produksi semula sebanyak 90% dari populasi yang ada. Dengan adanya larangan AGP, produksi menurun drastis menjadi 40%.

Peternak disuruh berpikir sendiri, mencari sendiri. Lalu dimana fungsi pemerintah dalam kasus ini. Akan berbeda, ketika government to government yang membuat kesepakatan atau kerjasama dengan negara lain yang sudah berhasil mencari alternatifnya. Nanti kalau kalangan pengusaha yang import, pasti terhalang regulasi dari dinas perdagangan atau lainnya," ungkap Sigit.

Sementara penyakit 90-40, makin lama semakin banyak penderitanya. Peternak ayam pedaging, sudah mengeluh turunnya bobot daging sampai 40% dari kapasitas semula. Sedangkan telur, Sigit mengaku masih menunggu kalkulasi sampai pertengahan Februari mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gambaran isu berita negatif terkait pada Peternakan untuk bulan Januari 2018, meliputi harga telur, harga daging ayam, sapi perah/Siwab, solusi penyakit unggas, impor daging kerbau, larangan penggunaan AGP. Secara rinci gambaran jumlah isu negatif pada bulan Januari 2018 sebagai berikut.

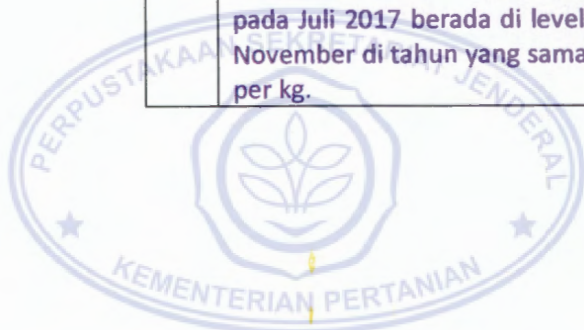


Gambar 2.3. Peternakan  
Jumlah berita negatif sebanyak 6 judul, 12 berita cetak, dan 9 berita online.

No.	Badan Ketahanan Pangan
1	Stop Impor Kedelai
a	<p><b>Impor Disetop Akhir Tahun</b> (<i>Bisnis Indonesia</i>, 4 Januari 2018). Jakarta - Pemerintah berencana menutup keran impor kedelai pada pengujung tahun ini karena optimistis kebutuhan yang ada mampu dipenuhi dari panen di dalam negeri. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto menjelaskan pemerintah tahun ini akan menambah lahan tanam kedelai 1,5 juta hektare (ha) setelah tahun lalu merealisasikan tanam 500.000 ha. Dengan produktivitas 1,5 ton per ha, produksi kedelai tahun ini diperkirakan 3,75 juta ton atau di atas kebutuhan 2,8 juta ton. Angka itu di luar lahan kedelai masyarakat yang seluas 300.000 ha-500.000 ha.</p> <p>Pakar pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, berpendapat rencana swasembada kedelai yang diikuti dengan penutupan keran impor tidak masuk akal. Jika swasembada kedelai dipaksakan, Dwi Andreas khawatir harga kedelai lokal akan lebih mahal, bahkan dua kali lipat, dari harga di pasar internasional. Selain itu, Indonesia sudah telanjur bergantung pada kedelai impor hingga 87% dari total konsumsi-sehingga memaksakan swasembada kedelai tahun ini akan sukar dilakukan.</p> <p>Di sisi lain, lanjutnya, memperoleh lahan tanam tidak semudah yang dibayangkan di tengah persaingan antarkomoditas padi, jagung, dan tebu, terutama di Jawa. Mendorong swasembada kedelai akan mengorbankan lahan padi dan jagung pada saat yang sama. Ide tumpang Sari antara tebu-kedelai yang disuarakan Kementan pun sulit diterapkan.</p>
2	Beras/Data Pangan
a	<p><b>Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Indef: Ada Masalah Suplai</b> (<i>Tempo.co</i>, 8 Januari 2018). Jakarta – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebutkan penyebab utama kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok di pasar sejak Desember hingga awal tahun baru karena tak seimbang antara ketersediaan dan permintaan pangan. Ditambah lagi ada kecenderungan masyarakat lebih banyak melakukan pembelian kebutuhan pokok sehingga membuat harga meningkat karena ketersediaan yang terbatas.</p> <p>Enny menyoroti sikap Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang sering mengklaim pasokan pangan di masyarakat cukup dan berencana untuk ekspor. Namun bukti kenaikan komoditas pokok menjadi salah satu tanda bahwa ketersediaan pangan sendiri belum terpenuhi di masyarakat. Indef yang menilai kenaikan harga sejumlah bahan pokok pada saat Natal dan Tahun Baru sebagai persoalan klasik seharusnya sudah bisa diantisipasi. Pasalnya, harga pangan selama ini ditentukan sendiri oleh pengusaha komoditas tertentu. "Saat ada musim Hari Raya, Tahun Baru, (price maker) ini bisa menentukan harganya dinaikkan atau tidak," katanya.</p> <p>Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, pemerintah mengatur soal harga 22 ligopol bahan pokok komoditas sebagai upaya stabilisasi harga. Kesembilan bahan pokok itu ialah beras, jagung, kedelai, gula, minyak 22 ligop, bawang merah, bawang merah daging beku daging ayam ras, hingga telur ayam ras.</p>
b	<p><b>Data Beras Kementan Dikritik</b> (<i>Republika</i>, 11 Januari 2018). Jakarta - Pakar pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) perihal data stok beras yang diklaim surplus. Namun, kenyataannya harga beras kualitas medium melambung hingga mencapai Rp 13 ribu per kg. "Kementan tidak bisa dipercaya. Data Kementan ini kacau</p>



	<p>sekali dan repotnya data mereka yang dijadikan landasan oleh Presiden sehingga semua langkah menjadi terlambat," ujar Dwi kepada Republika di Jakarta, Rabu (10/1).</p> <p>Pada pertengahan Desember lalu, sempat dikabarkan Bulog memiliki stok beras yang cukup, yakni di atas 2 juta ton. Namun, kenyataannya sampai awal Januari ini, stok beras di Bulog tidak lebih dari 1 juta ton. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Michael Watimena, hal itu yang menyebabkan melambungnya harga beras di pasaran. Pada akhirnya beras di pasaran juga sedikit berkurang. Sementara, permintaan dari masyarakat terhadap beras relatif normal. "Hal inilah yang membuat harga di pasaran meningkat dan akhirnya membuat masyarakat menjerit," ujar Watimena saat dikon firmasi, Rabu (10/1).</p>
c	<p><b>Pemerintah Harus Perbaiki Data Pangan</b> (<i>Seputar Indonesia, 12 Januari 2018</i>). Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) harus segera memperbaiki data pangan khususnya beras agar bisa menjadi acuan yang tepat dalam mengambil kebijakan soal pangan. Data pangan yang dipublikasikan selama ini diragukan keakuratannya. "Pemerintah harus perbaiki data pangan yang selalu bermasalah setiap tahun sehingga membuat pemerintah kurang mampuantisipasi gejolak harga beras. Pemerintah juga harus perbaiki kebijakan yang dapat memicu kenaikan harga dan gejolak stok beras nasional," kata Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus melalui keterangan tertulisnya, kemarin.</p> <p>Menurutnya, kenaikan harga beras per Januari 2018, khususnya harga beras medium, setidaknya disebabkan beberapa hal, mulai dari keraguan akan data naiknya produksi beras hingga adanya kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang mengatur harga beras medium (broken 15%) dihargai premium yang menyebabkan kelangkaan beras medium dipasaran.</p> <p>Sementara itu, kendati pemerintah melalui Perum Bulog sudah mengintervensi harga beras dipasaran. Tapi harga beras di sejumlah daerah belum juga turun. Di Kendal, Jawa Tengah (Jateng), hargaberas di sejumlah pasar tradisional naik hingga Rp2.500per kilogram (kg). Dari informasi sejumlah distributor beras di Salatiga, kata Muthoin, saat ini daerah produsen beras di Jawa Timur sedang mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Karena itu, produksi menurun dan stok sudahmenipis. Imbasnya.beras yang dipasok ke Salatiga pun jumlahnya menurun drastis.</p>
d	<p><b>Data Pangan Kementan dan BPS Sering Tak Cocok, Harus Segera Diperbaiki</b> (<i>Okezone.com, 12 Januari 2018</i>). Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) harus segera memperbaiki data pangan khususnya beras agar bisa menjadi acuan yang tepat dalam mengambil kebijakan soal pangan. Data pangan yang dipublikasikan selama ini diragukan keakuratannya. "Pemerintah harus perbaiki data pangan yang selalu bermasalah setiap tahun sehingga membuat pemerintah kurang mampuantisipasi gejolak harga beras. Pemerintah juga harus perbaiki kebijakan yang dapat memicu kenaikan harga dan gejolak stok beras nasional," kata Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus melalui keterangan tertulisnya, kemarin.</p> <p>Dari informasi sejumlah distributor beras di Salatiga, kata Muthoin, saat ini daerah produsen beras di Jawa Timur sedang mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Karena itu, produksi menurun dan stok sudahmenipis. Imbasnya, beras yang dipasok ke Salatiga pun jumlahnya menurun drastis. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga beras medium pada Juli 2017 berada di level Rp10.574 per kg dan meningkat menjadi Rp10.794 per kg pada November di tahun yang sama. Pada Januari 2018, angka ini merangkak naik menjadi Rp11.041 per kg.</p>



e	<p><b>Suplai Turun Drastis, Stok Beras Tipis</b> (<i>Kontan, 8 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah harus cepat bergerak menjaga stok beras yang kian tipis. Sebab, lonjakan harga beras kian tak terkendali dan berpotensi menyulut inflasi tinggi. Bahkan beras medium di sejumlah toko beras di daerah Jabodetabek mulai langka. Kelangkaan beras ini terjadi akibat pasokan dari sentra produksi berkurang.</p> <p>Berdasarkan pantauan Kontan di sejumlah pedagang beras di Jakarta, Ciputat, dan Depok, umumnya pasokan beras mereka berkurang cukup drastis. Salah seorang pedagang beras di daerah Ciputat Tangerang Selatan bernama Abdul mengatakan, sejak akhir tahun lalu, stok beras berkurang drastis. Untuk menambah stok, Arief mengaku, FSTJ juga akan menambah pasokan beras dari Demak dan Sragen Jawa Tengah dalam waktu dua sampai tiga pekan lagi. Menurutnya dua daerah ini sudah mulai memasuki masa panen. Sementara untuk panen raya padi diprediksi baru akan terjadi di akhir bulan Februari 2018.</p> <p>Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, sampai saat ini pasokan beras medium di pasar masih langka. "Kalau beras premium mulai Minggu ini sudah kembali normal," ujarnya. Menurutnya, kenaikan harga beras ikut mendorong kenaikan harga komoditas pangan lain. Contoh harga cabai rawit merah di kisaran Rp 55.500 per kg dari sebelumnya di harga Rp 30.000 per kg. Demikian juga harga daging ayam masih mahal yakni rata-rata Rp 34.000 dari harga normal 30.000 per kg. "Harga telur juga tinggi Rp 26.000 dari sebelumnya Rp 22.000 per kg," ujarnya.</p>
f	<p><b>Pemerintah Punya Banyak Pekerjaan Rumah di 2018</b> (<i>Harian Kontan, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak memiliki banyak waktu untuk menuntaskan seluruh pekerjaan rumah (PR). Jika dihitung, masa yang tersisa hanya kurang dari dua tahun, tepatnya 22 bulan. Menurut catatan KONTAN, tahun ini pemerintah harus menyelesaikan beberapa kebijakan. Pertama, sejumlah Kementerian mengejar One Map Policy atau kebijakan satu peta. Peta itu akan digunakan sebagai basis data di Tanah Air. Salah satunya, basis data di sektor pangan.</p> <p>Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan padi dan beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan pemerintah semestinya memprioritaskan kebijakan untuk mendukung Ketahanan Pangan pada tahun ini. Dalam kacamata Sutarto, pemerintah masih perlu berupaya mendorong peningkatan produksi pangan demi mengamankan kebutuhan dalam negeri. Menurut dia, bila kebutuhan pangan terpenuhi, kesejahteraan akan meningkat dan ekonomi akan ikut terangkat. "Kesejahteraan dimulai dari perhatian pemerintah kepada petani," ujar Sutarto, Minggu (14/1).</p> <p>Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai pemerintah bisa menggenjot penyelesaian infrastruktur prioritas pada tahun ini. Langkah ini guna menumbuhkan pemerataan ekonomi di penjuru Indonesia. Tapi, di tahun politik seperti saat ini, Kabinet Kerja harus lebih kompak.</p>
g	<p><b>Mengingkari Gejala</b> (<i>Kompas, 15 Januari 2018</i>). Serin, 4 Desember 2017, Kompas menerbitkan laporan utama berjudul "Waspadaai Gejolak Beras" yang menggulirkan persoalan ini hingga beberapa pekan kemudian. Kemelut soal ketersediaan pasokan beras yang coba digambarkan dalam sejumlah laporan itu merupakan klimaks dari rangkaian dinamika sektor Pertanian tanaman pangan, khususnya padi, sepanjang 2017.</p>



	<p>Keresahan serupa disampaikan perwakilan petani, kelompok tani, serta asosiasi petani dalam rangkaian Rembuk Nasional yang puncaknya digelar di Jakarta, Oktober 2017. Keluhan, kritik, dan saran disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI melalui panitia rembuk yang melibatkan pengamat, pelaku usaha, serta akademisi dari 16 perguruan tinggi negeri di 14 provinsi di Indonesia</p>
h	<p><b>Kementan Harus Perbaiki Data Produksi Beras</b> (<i>Indo Pos, 15 Januari 2018</i>). Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk melakukan perbaikan data terkait dengan produksi beras domestik. Hal itu menjadi penting karena dapat dijadikan rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang stok beras di Indonesia. "Kementan harus memperbaiki data produksi beras domestik, karena selama ini datanya tidak akurat," ujar pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawedaya, Minggu (14/1).</p> <p>Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk menutupi kebutuhan konsumsi beras di masyarakat yakni sekitar 2,5 juta ton per bulan. Selain itu, diharapkan impor beras juga menekan tingginya harga beras yang terus melonjak mulai akhir tahun 2017 lalu, dengan demikian dapat sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Impor tersebut dilakukan guna mengisi pasokan beras di dalam negeri sambil menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018.</p>
i	<p><b>Beras Langka, Pemerintah Diminta Audit Data BPS dan Kementan</b> (<i>Cnnindonesia.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Kredibilitas Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik yang kurang mumpuni dalam menyediakan data produksi beras disebut menjadi salah satu penyebab kelangkaan sekaligus melonjaknya harga beras di pasaran. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Syarkawi Rauf dalam keterangan tertulisnya menanggapi kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras yang terjadi belakangan ini. "Rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan Oleh bps dan Kementan (jadi salah satu penyebab permasalahan pasokan beras)," sebutnya, Minggu (14/1).</p> <p>Pengembangan Pasar Induk Beras Nasional di Sentra-Sentra produksi beras nasional juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Lokasi sentra yang dimaksud seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta - Jawa Barat, dan Sumatra Utara. "Pasar Induk diharapkan dapat menjadi sumber referensi ketersediaan atau pasokan dan harga beras nasional. Langkah ini menjadi tanggung jawab Bulog dan Kemendag," katanya. Bulog harus berperan mengoptimalkan program operasi pasar melalui peningkatan penyerapan beras petani. Terakhir, KPPU dan kepolisian bertanggung jawab melakukan penegakan hukum terhadap spekulasi yang sengaja memperlmainkan pasokan dan harga.</p>
j	<p><b>Permasalahan Data Harus Selesai Untuk Atasi Kisruh Beras</b> (<i>Bisnis.com, 15 Januari 2018</i>). Direktur Penelitian Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan permasalahan yang pertama adalah perbedaan data yang dimiliki antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). "Jika pemerintah ingin mengatasi masalah ini [kekurangan stok beras], pemerintah harus mempunyai kendali dalam stok beras," katanya kepada Bisnis, belum lama ini.</p> <p>Sementara itu, Indonesia hanya memiliki data dari Perum Bulog yang menguasai 10% stok beras nasional. Artinya, pemerintah tidak memiliki data atas 90% stok beras. Jumlah penduduk yang terus bertambah menjadi faktor lain yang berpengaruh dan mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras meningkatkan produksi beras tiap tahunnya. Apalagi, selalu ada lonjakan permintaan pada masa-masa tertentu, seperti Hari Raya dan masa liburan. Kenaikan permintaan biasanya membuat harga turut melambung.</p>



k	<p><b>KPPU: Data Produksi Beras Perlu Diaudit Supaya Tak Jadi Debat</b> (<i>Liputan6.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan supaya kegiatan produksi dan tata niaga beras diperbaiki. Sehingga, harga beras tidak melambung tinggi seperti saat ini. "Meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian (tanam, panen dan pasca panen) di hulu dan juga memperbaiki tata niaga beras sehingga adil bagi petani, pedagang, dan konsumen," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf dalam keterangan yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Senin (15/1/2018). Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan dibukanya keran impor beras ini membuktikan jika data yang selama ini dimiliki oleh pemerintah terkait dengan stok beras tidak kredibel.</p> <p>"Ada misskoordinasi juga di internal pemerintah antara Menteri Pertanian dan Bulog," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com. Selain itu, lanjut Bhima, dibukanya keran impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton ini juga menjadi bukti kegagalan Kementan dalam menjaga produksi beras di dalam negeri. Akibatnya, pasokan beras di pasaran menurun dan membuat harga melambung.</p>
l	<p><b>Simpang Siur Data Buat Pemerintah Tak Siap Atasi Masalah Beras</b> (<i>Tempo.co, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Direktur Penelitian Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menduga salah satu penyebab pemerintah tak siap menghadapi masalah perberasan belakangan ini adalah simpang siurnya data stok beras. "Salah satu hambatannya adalah keterbatasan dana untuk melakukan survei atas stok beras yang ada," ujarnya, belum lama ini, di Jakarta.</p> <p>Jumlah penduduk yang terus bertambah menjadi faktor lain yang berpengaruh dan mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras meningkatkan produksi beras tiap tahunnya. Apalagi, selalu ada lonjakan permintaan pada masa-masa tertentu, seperti Hari Raya dan masa liburan. Kenaikan permintaan biasanya membuat harga turut melambung.</p> <p>Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), beras merupakan komoditas yang memberi sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan dengan porsi 18,8 persen di perkotaan dan 24,52 persen di pedesaan. "Oleh karena itu, beras sangat rentan," ucap Faisal.</p>
m	<p><b>Tips Mengatasi Persoalan Perberasan Nasional Versi KPPU</b> (<i>Okezone.com, 15 Januari 2018</i>). Permasalahan kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras saat ini tengah menjadi sorotan, pasalnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan impor beras yang dikabarkan akan tiba pada akhir Januari 2018. Menanggapi hal tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia menjelaskan penyebab permasalahan kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras.</p> <p>Ketua KPPU RI Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras disebabkan tingginya disparitas harga beras internasional, dibandingkan dengan harga beras di dalam negeri memberikan dorongan untuk melakukan impor.</p> <p>"Karena langkah ini menjadi tanggung jawab Bulog dan Kemendag. Oleh karena itu, optimaslisasi peran Bulog dalam operasi pasar melalui peningkatan penyerapan beras petani, dan tentunya penegakan hukum terhadap spekulasi yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. Langkah ini menjadi tanggung jawab KPPU dan Kepolisian," tandas Syarkawi.</p>
n	<p><b>KPPU: Data Produksi Beras yang Dipublikasikan BPS dan Kementan Kredibilitasnya Rendah</b> (<i>Tribunnews.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, ada empat faktor penyebab mengapa muncul kenaikan</p>



	<p>harga jual beras di pasaran dan terjadi ketidakstabilan pasokan beras saat ini. Dia mengatakan, penyebab pertama adalah tingginya disparitas harga beras internasional dibandingkan dengan harga beras di dalam negeri memberikan dorongan untuk melakukan impor.</p> <p>Menurut data FAO Pada tahun 2017, harga beras Vietnam sekitar US\$ 0,31 per kg atau setara dengan Rp 4.100 per kg (Kurs rupiah per US dollar sebesar Rp. 13.225) dan Thailand harganya sekitar US\$ 0,34 per kg atau setara dengan Rp 4.496 per kg). Terakhir, lakukan penegakan hukum terhadap spekulasi yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. Langkah ini menjadi tanggung jawab KPPU dan kepolisian.</p>
o	<p><b>Masih Impor, Kementan Diminta Stop Bangun Opini Beras Surplus</b> (<i>Industry.co.id, 15 Januari 2018</i>). Ombudsman Republik Indonesia meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk hentikan pembangunan opini beras surplus dan stok cukup, yang hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil. Akibat pernyataan surplus yang tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, pengambilan keputusan berpotensi keliru, kata anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih dalam konferensi pers dikantornya, Senin (15/1/2018).</p> <p>Gejala kenaikan harga sejak akhir tahun tanpa temuan penimbunan dalam jumlah besar, mengindikasikan kemungkinan proses mark-up data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini, ujarnya. Atas dasar itulah, kata Alamsyah Ombudsman menyarankan agar pemerintah lakukan langkah berikut untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan meluasnya ketidakpercayaan public.</p>
p	<p><b>BPS Nyatakan Data Produksi Beras Wewenang Kementerian Pertanian</b> (<i>Antaranews.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan wewenang mempublikasikan rilis tentang data produksi beras ada pada Kementerian Pertanian selalu kementerian sektoral yang menangani produksi komoditas itu. "Memang kewenangannya dari Kementerian Pertanian. BPS sampai sekarang belum mengeluarkan lagi data produksi beras," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti usai konferensi pers di Kantor BPS Jakarta, Senin.</p> <p>Ketua KPPU Syarkawi Rauf, dalam keterangan resminya, menilai rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan BPS dan Kementerian Pertanian menjadi satu dari tiga penyebab naiknya harga beras diikuti kelangkaan pasokan. Sementara itu, penyebab lainnya dipicu oleh sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi.</p>
q	<p><b>Data Beras Mendag dan Mentan Beda, Ini Kata BPS</b> (<i>Liputan6.com, 15 Januari 2018</i>). Kebijakan impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton membuat publik bertanya-tanya. Sebab sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin stok beras cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga tidak perlu impor, namun Kementerian Perdagangan (Kemendag) justru mengambil kebijakan berbeda, yakni impor.</p> <p>Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Yunita Rusanti menegaskan, data produksi beras merupakan wewenang dari Kementerian Pertanian (Kementan). Sementara BPS tidak merilisnya sehingga tidak dapat memastikan apakah data Kemendag maupun Kementan yang benar atau salah.</p> <p>Sementara itu, Direktur Statistik Distribusi BPS, Anggoro Dwitjahyono menilai perbedaan data produksi beras terjadi karena Kementan melihat dari sisi produksinya, sementara Kemendag</p>



	<p>memotret dari kenaikan harga beras yang terjadi di pasar. "Kementan melihat dari produksinya pada posisi tertentu, sedangkan Kemendag melihat dari harganya. Harga mulai merangkak tinggi, maka jadi warning yang menggambarkan terganggunya suplai dan demand di sana (pasar)," dia menjelaskan. Senada, Anggoro menegaskan bahwa BPS tengah memperbaiki data produksi padi, beras atau gabah. "Kita sedang melakukan perbaikan. Nanti akan ada rilis. Sekarang ini kan belum ada, tapi nanti akan ada.</p>
r	<p><b>Data Beras Beda, BPS: Kementan Lihat Produksi, Kemendag dari Harga Pasar</b> (<i>Okezone.com, 15 Januari 2018</i>). Saat ini data komoditas beras di antara kementerian masih belum sinkron yakni antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Hal ini terlihat dari Kementan yang terus menyatakan bahwa beras RI surplus sejak tahun 2016 sehingga tidak ada impor beras. Sedangkan Kemendag baru-baru ini menyatakan akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand.</p> <p>Direktur Statistik Distribusi Anggoro Dwitjahyono mengatakan, data beras dari Kemendag dan Kementan ini tidak sinkron dikarenakan perbedaan dari melihat atau mencari data. Dia menilai Kementan melihat data dari produksi komoditas beras sedangkan Kemendag dari situasi pasar saat ini. Sementara itu, BPS sendiri saat ini belum memiliki data beras secara terkini dan baru akan melakukannya. Karena saat ini sedang dilakukan perbaikan agar BPS bisa merekam data beras mulai dari stok hingga harga di pasaran.</p>
s	<p><b>Ombudsman Minta Kementan Setop Umbar Surplus Beras</b> (<i>Viva.co.id, 15 Januari 2018</i>). Ombudsman RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar berhenti mengumbar opini bahwa stok beras nasional dalam keadaan surplus. Padahal, berdasarkan survei yang dilakukan Ombudsman di 31 provinsi dari tanggal 10-12 Januari 2018, menunjukkan bahwa stok beras dalam keadaan pas-pasan, tidak merata, dan harga meningkat tajam sejak Desember.</p> <p>"Kementan selalu menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok cukup hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil," kata anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah, dalam jumpa pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin 15 Januari 2018.</p> <p>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa beras impor tersebut ditargetkan tiba di Indonesia pada akhir Januari 2018. "Saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan. Saya mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam di dalam negeri. Kami kemudian memasok beras impor. Dengan demikian, maka tidak ada kekhawatiran kekurangan pangan," ujar Enggartiasto, Kamis malam, 11 Januari 2018.</p>
t	<p><b>Ombudsman: Kementan Jangan Bilang Beras Surplus</b> (<i>Kompas.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Ombudsman meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) tidak lagi mengatakan bahwa stok beras saat ini dalam kondisi surplus. Pasalnya telah ditemukan indikasi bahwa pencatatan data stok beras yang dilakukan tidak akurat. Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah mengatakan, selama ini Kementan seringkali mengatakan stok beras surplus. Padahal saat pihaknya melakukan pantauan khusus ke 31 provinsi di Indonesia ternyata ditemukan bahwa tidak ada surplus beras dan persebaran stok beras justru tidak merata.</p> <p>Data beras Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman sendiri hingga kini masih enggan menyebutkan jumlah produksi beras nasional. Dia mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan data tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS). "Data kita serahkan BPS. Kita data satu pintu," ujar Amran saat ditanya oleh para awak media perihal stok beras saat ini sesuai Rapat Kerja Nasional</p>

	<p>Pertanian 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/1/2018). Yang pasti menurut Amran, proses produksi beras mulai dari penanaman padi hingga panen memakan waktu selama tiga bulan. Jika bulan Oktober petani melakukan penanaman padi, maka Januari sudah memasuki masa panen.</p>
u	<p><b>Ombudsman: Pemerintah Jangan Umbar Pernyataan Surplus Beras</b> (<i>Republika.co.id</i>, 15 Januari 2018). Jakarta -- Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pertanian, untuk tidak mengumbar pernyataan soal surplus beras. Sebab, Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, pada kenyataannya stok beras saat ini pas-pasan dan tidak merata.</p> <p>Gejolak kenaikan harga yang telah terjadi sejak akhir 2017 lalu, kata Alamsyah, mengindikasikan kemungkinan mark-up data produksi dalam model perhitungan selama ini. Sebab, jika data tersebut valid, harusnya gejolak harga dan kelangkaan pasokan tidak terjadi. Apalagi, sejauh ini tidak ditemukan penimbunan barang dalam jumlah besar.</p> <p>Dalam kondisi stok nasional yang menipis dan tidak merata tersebut, Ombudsman menyarankan agar pemerintah segera melakukan pemerataan stok. Selain itu, Alamsyah juga menyarankan pemerintah pusat meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah agar tidak terjadi penahanan stok lokal.</p>
v	<p><b>Ombudsman Kritik Data Stok Beras Kementerian Pertanian</b> (<i>Cnnindonesia.com</i>, 15 Januari 2018). Jakarta -- Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai, selama ini Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan data yang tidak akurat terkait stok ketersediaan beras.</p> <p>Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan, penyampaian informasi stok beras yang tidak akurat dapat menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat. "Ada semacam pertanyaan publik baik itu menyangkut kelangkaan beras misalnya, apakah benar misalnya penjualan beras yang tidak stabil antara satu daerah dengan daerah lainnya," ujar Rifai saat konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin (15/1).</p> <p>Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kemendag menerapkan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga harga dan memenuhi ketersediaan beras di pasaran. Sementara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan, pemerintah sebetulnya telah berupaya untuk meningkatkan produksi beras dan menahan diri untuk impor beras dalam dua tahun terakhir.</p>
w	<p><b>Ini Diduga Penyebab Harga Beras Naik di Berbagai Daerah</b> (<i>Jawapos.com</i>, 15 Januari 2018). Ombudsman Republik Indonesia menduga data yang disampaikan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian soal stok beras berbeda. Hal ini dinilai menjadi penyebab harga beras naik dan terjadi kelangkaan di berbagai daerah. Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan ada perbedaan data stok beras yang disampaikan Kemendag dan Kementan.</p> <p>"Data stok beras dari Kementan dan Kemendag harus didukung data akurat agar tidak menimbulkan potensi keliru," katanya, di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/1). "Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan. Apakah impor beras khusus diatur penugasannya? Apakah kelangkaan beras khusus yang menyebabkan naiknya harga beras? Apakah PT PPI sudah berpengalaman? Siapa yang paling diuntungkan bila tujuan dari impor bukan untuk menjaga stok beras?" pungkasnya.</p>
x	<p><b>Pantauan Ombudsman: Data Surplus Beras dari Mentan Tak Akurat</b> (<i>Katadata.co.id</i>, 15 Januari 2018). Ombudsman Republik Indonesia menyatakan Kementerian Pertanian melakukan maladministrasi dalam pembentukan opini publik. Kementan dinilai menyampaikan informasi</p>



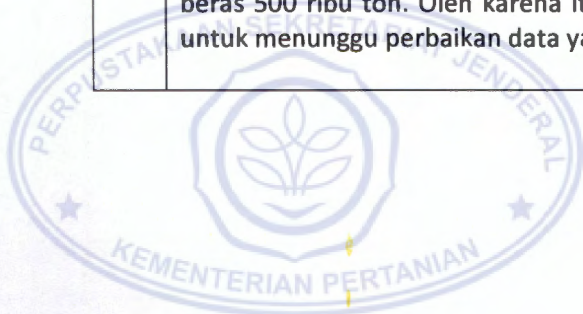
	<p>stok yang tak akurat kepada publik. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menyatakan informasi stok yang tidak akurat ke publik akan menjadi persepsi kesimpangsiuran data. "Perbaiki data adalah kepentingan bersama," kata Alamsyah kepada Katadata di Jakarta, Senin (15/1).</p> <p>Meski begitu, Alamsyah menjelaskan akan memproses pemanggilan pihak terkait, yaitu Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Untuk Amran, praktik klaim data menjadi maladministrasi kedua setelah kasus PT IBU. Berhubungan dengan pelaporan ke Presiden Joko Widodo, Ombudsman akan menunggu hasil pembicaraan dengan kedua kementerian. "Kami tunggu, mereka bakal melakukan perbaikan setelah berkonsultasi dengan kami," jelas Alamsyah.</p>
y	<p><b>BPS Belum Miliki Data Stok Beras</b> (<i>Metrotvnews.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku belum memiliki data yang tepat mengenai stok beras yang ada di dalam negeri. Pasalnya kewenangan itu masih berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga BPS tidak bisa memastikan apakah ada perbedaan data dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). "BPS tidak mengeluarkan data produksi beras. Kita kembalikan ke Mentan karena itu wewenangnya. Sampai sekarang kita belum mengeluarkan lagi data (beras)," kata Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti di Kantor Pusat BPS, Jalan dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.</p> <p>Direktur Statistik Distribusi BPS Anggoro Dwitjahyono menambahkan perbedaan data Kementan dan Kemendag karena keduanya melihat dari sisi berbeda. Jika Kementan melihatnya dari sisi produksi, namun Kemendag melihat data beras dari harga pasar. "BPS sedang melakukan perbaikan, nanti akan ada rilis. Sekarang ini kan belum ada, tapi nanti akan ada. Nanti (tim BPS) ke lapangan juga," pungkask dia.</p>
z	<p><b>Kementan Diminta Perbaiki Data Produksi Beras Dalam Negeri</b> (<i>Okezone.com, 15 Januari 2018</i>). Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk melakukan perbaikan data terkait dengan produksi beras domestik. Hal itu menjadi penting karena dapat dijadikan rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang stok beras di Indonesia. "Kementan harus memperbaiki data produksi beras domestik, karena selama ini datanya tidak akurat," ujar pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawedaya di Jakarta, Senin (15/1).</p> <p>Selama 2018 ini Kementan harus memperbaiki data real produksi untuk menganalisa kebijakan ketersediaan beras yang tepat pada 2019," tutur Berly. Selain itu, hal penting lain yang harus dilakukan oleh Kementan adalah melakukan pemetaan bibit padi dan pupuk yang cocok dan sesuai dengan jenis tanah di masing-masing daerah. Sehingga, hasil produksi beras akan menjadi maksimal. "Agar dapat meningkatkan produksi," tutupnya.</p>
aa	<p><b>Karut Marut Soal Beras Versi KPPU</b> (<i>Bisnis.co., 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan sejumlah penyebab yang memicu terjadinya berbagai persoalan beras di Tanah Air.</p> <p>Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf mengatakan, salah satu penyebab permasalahan beras saat ini adalah sistem distribusi. "Sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi," katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Senin (15/1/2018).</p>



	<p>Bulog bersama Kementerian Perdagangan, sambungnya, bisa mengembangkan pasar induk beras nasional di sentra-sentra produksi beras nasional. Beberapa wilayah yang cocok untuk pengembangan pasar induk beras yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara. "Pasar Induk diharapkan dapat menjadi sumber referensi ketersediaan atau pasokan dan harga beras nasional," tutur Syarkawi.</p>
ab	<p><b>Kementan Sebut Surplus Beras, Ini Kata Rizal Ramli</b> (<i>Septian Deny, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli ikut angkat bicara soal data pangan, khususnya beras yang selama ini selalu disebut surplus oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Rizal mengungkapkan, data pangan sebenarnya ada bermacam-macam, yaitu data Badan Pusat Statistik (BPS), data Kementan, data Kementerian Perdagangan (Kemendag), data Perum Bulog. Sejak dulu, kata dia, yang selalu tidak sinkron yaitu data Kementan dengan data Kemendag dan Perum Bulog.</p> <p>"Dalam kenyataan, data yang benar itu yang di tengah, data Kementan dengan data Kemendag dan Bulog itu di tengah. Harusnya tugas Menko Perekonomian untuk menentukan data yang benar. Tapi saya tidak mengerti ke mana saja Menko Perekonomian sehingga soal begini yang putusin Wakil Presiden. Harusnya cukup ada level menko untuk menentukan data itu. Nah berdasarkan data yang benar itu baru diambil tindakan jika diperlukan," ujar dia.</p>
ac	<p><b>Klaim Mentan soal Surplus Beras Tak Sesuai Kenyataan</b> (<i>Kumparan.com, 15 Januari 2018</i>). Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersikeras bahwa produksi beras melimpah dan ada surplus. Menurutnya, lonjakan harga beras belakangan ini terjadi bukan karena kekurangan pasokan, tapi masalah di distribusi. Tapi klaim surplus beras ini tak sesuai dengan kenyataan yang dialami para pengusaha penggilingan padi dan beras.</p> <p>Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengungkapkan, penggilingan-penggilingan padi kesulitan mendapatkan Gabah Kering Panen (GKP) sejak 4 bulan lalu. "Pasokan gabah di Jawa dan Lampung berkurang, terasa banget. Terjadi persaingan pembelian gabah," ujar Sutarto kepada kumparan (kumparan.com), Senin (15/1).</p> <p>"Indikator-indikator ini terkait dengan produksi. Stok Bulog tidak sesuai target, stok Bulog selalu berbanding lurus dengan produksi, pengalaman selama puluhan tahun seperti itu," ucapnya. Sutarto menegaskan, tidak ada ulah spekulan. "Kalau bicara spekulan, penggilingan sudah bolak-balik didatangi Satgas Pangan kok," ucap mantan Dirut Bulog ini. Agar harga beras tak dimainkan spekulan, Bulog harus punya stok yang cukup. "Bulog harus punya stok yang kuat agar tidak ada spekulan. Hitungan kami, produksi beras di dalam negeri surplus 10 juta ton saja sudah aman," tutupnya.</p>
ad	<p><b>BPS akan Perbaiki Data Beras Nasional</b> (<i>Republika.co.id, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Perbedaan data mengenai pasokan beras antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menimbulkan polemik. Kementan mengklaim produksi beras telah mencukupi kebutuhan nasional sementara Kemendag justru mengambil langkah impor beras untuk menstabilisasi harga di pasar.</p> <p>Direktur Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Anggoro Dwitjahyono mengatakan, BPS saat ini akan melakukan perbaikan terkait data beras. Hal itu guna memberikan referensi terkait data beras yang lebih akurat. "BPS sedang melakukan perbaikan, nanti akan ada rilis. Sekarang ini memang belum ada (data beras). Tapi nanti akan ada," ujar Anggoro di Kantor BPS, Senin (15/1).</p>



ae	<p><b>Indef: Kementan Harus Perbaiki Data Produksi Beras</b> (<i>Antarane.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya mengatakan Kementerian Pertanian harus memperbaiki data riil produksi beras domestik sebagai bahan rujukan mengeluarkan kebijakan terkait persediaan beras. "Setahun ke depan perlu memperbaiki data riil produksi beras untuk kebijakan persediaan pada 2019," kata Berly dalam pernyataan di Jakarta, Senin. Khusus sesuai dengan Permendag Nomor 1 Tahun 2018 yang pasti bukan masuk kategori IR64," ujar Enggartiasto.</p> <p>Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras sebagai upaya menutupi kebutuhan konsumsi beras masyarakat sekitar 2,5 juta ton per bulan dan menekan harga beras yang melonjak sejak akhir 2017. Impor beras juga guna mengisi pasokan beras di dalam negeri sambil menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018.</p>
af	<p><b>Pemerintah Akui Kekeliruan Data Beras</b> (<i>Koran Tempo, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui data produksi beras keliru alias tidak akurat. Karut-marut data produksi pangan, kata dia, bahkan sudah terjadi sejak sebelum dia menjabat wakil presiden pertama kali, pada 2004. "Tapi hal itu sudah kami koreksi sekarang," kata dia di kantornya, kemarin. Menurut Kalla, kesalahan data produksi beras mulai dikoreksi sekitar dua tahun lalu, saat dia menjadi wakil presiden untuk kedua kalinya. Dia mengatakan, akibat tak ada landasan dan patokan yang jelas, terjadi saling klaim data produksi dan konsumsi beras antar-kementerian dan badan pemerintah.</p> <p>Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti, mengatakan beras yang didatangkan dari Thailand dan Vietnam akan tiba dalam beberapa pekan ke depan. Soal pasokan, kata dia, Bulog hingga kini masih mencari sumber beras dari petani.</p> <p>Ketua Kelompok Nelayan dan Tani Andalan (KTNA) Winarno Thohir mengatakan kacaunya rantai dagang pangan membuat petani selalu menjadi korban. Impor, kata dia, membuat harga beras petani yang sudah dipatok tengkulak bakal semakin rendah. "Meski di pasar sedang langka, harga beli dari petani tak bakal naik," kata dia.</p>
ag	<p><b>Pasokan Beras Pas-pasan Dan Tidak Merata</b> (<i>Rakyat Merdeka, 15 Januari 2018</i>). Pasokan beras nasional ternyata tidak surplus. Sebaliknya, pasokan beras nasional pas-pasan dan tidak merata. Hal itu dikatakan Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, kemarin. "Pasokan beras nasional pas-pasan dan tidak merata. Segera stop membuat opini soal beras surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan," katanya. Alamsyah mengatakan, selama ini ada penyampaian informasi stok beras yang tak akurat kepada publik. Kementerian Pertanian selalu menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok cukup, hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil.</p> <p>Di 9 Provinsi lainnya, pasokan beras lancar namun harga sudah merangkak naik, yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sementara di 8 provinsi, pasokan beras lancar dan harganya juga relatif stabil, yakni Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.</p>
ah	<p><b>Data Perberasan Disorot</b> (<i>Republika, 16 Januari 2018</i>). Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok beras dan rencana impor beras 500 ribu ton. Oleh karena itu, ORI menyarankan kepada semua pemangku kepentingan untuk menunggu perbaikan data yang sedang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).</p>



	<p>Anggota ORI, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (15/1), menjelaskan, ORI telah melakukan upaya pemantauan di 31 provinsi pada 10-12 Januari 2018. "Dari pemantauan stok nasional pas-pasan dan tidak merata karena disedot provinsi lain," ujarnya. Ahmad mencontohkan, di Jawa Timur, produksi dari sejumlah sentra produksi beras baik. Namun, hasilnya tersedot ke Kalimantan. Begitu pun produksi dari Sumatra Selatan yang diserap tiga provinsi di Sumatra. "Itulah yang harus diatasi," katanya.</p> <p><b>Bulog mengimpor</b> Terkait impor beras 500 ribu ton, rapat koordinasi tingkat Kemenko Perekonomian memutuskan penugasan diberikan kepada Perum Bulog. Keputusan ini menganulir penunjukan Mendag kepada PPI. "Bulog diminta segera. Kita membuka mandat hanya kepada Bulog untuk melakukan itu," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution. Menurut dia, beras impor tidak akan datang sekaligus, tapi bertahap. Paling lambat beras akan tiba pada pertengahan Februari mendatang.</p> <p>Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menjelaskan, perseroan menyiapkan Rp 15 triliun untuk kebutuhan 500 ribu ton beras impor. Setidaknya ada tiga negara yang dikontak, yaitu Thailand, Vietnam, dan Pakistan. "Saya hanya coba website ke arah mereka," ujarnya.</p>
ai	<p><b>Simpang-Siur Surplus Beras</b> (<i>Koran Tempo, 16 Januari 2018</i>). Kementerian Pertanian semestinya tidak gegabah mengumbar data beras nasional. Sejak dulu soal beras sangat sensitif. Menyampaikan data yang salah tak hanya membuat khalayak bingung, tapi juga bisa menggiring pemerintah ke kebijakan yang melenceng. Kementerian ini kadang mengklaim Indonesia surplus beras sejak tahun lalu dan akan berlanjut tahun ini. Faktanya? Pasokan beras ke pasar-pasar justru seret. Harga beras pun meroket.</p> <p>Melonjaknya harga beras merupakan salah satu pemicu Kementerian Perdagangan membuka pintu impor beras sebanyak 500 ribu ton akhir bulan ini. Kementerian ini mengantongi informasi dan data yang berbeda dari Kementerian Pertanian. Boro-boro surplus beras, mereka malah menemukan gudang-gudang beras yang kosong. Para pedagang pun menaikkan harga karena minimnya pasokan beras.</p> <p>Pemerintah harus membuktikan kebenaran data itu. Masalahnya, banyak pihak yang ragu akan kesahihan data itu. Komisi Pangan dan Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, meminta pemerintah menunjukkan gudang-gudang yang menyimpan beras. Mereka juga diminta memperlihatkan sawah yang disebut sedang menghijau royo-royo dan siap dituai saat panen raya nanti. Sampai saat ini masih belum jelas di mana saja panen raya akan berlangsung.</p>
aj	<p><b>Govt Sticks to Importing Medium-Grade Rice</b> (<i>The Jakarta Post, 16 Januari 2018</i>). Responding to public criticism, the government has instructed the State Logistics Agency (Bulog) - not PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) - to import 500.000 tons of rice to stabilize the rice price. Bulog received the instruction to import medium-grade rice after a controversy ensued as state-owned trading company PPI was earlier appointed to import premium-grade rice from neighboring countries such as Vietnam and Thailand.</p> <p>The plan, said high-ranking officials of various state institutions, was undertaken to ease rising rice prices over the past few months apparently caused by a stock depletion across the country. Furthermore, the Ombudsman also suggested a possible miscalculation in rice production data, especially by the Agriculture Ministry.</p>



	<p>"The Agriculture Ministry always states that the country has a rice surplus and has adequate reserves - which is based on vague estimates of harvest size and rice production without real figures for the reserves and distribution," Alamsyah said,</p>
ak	<p><b>Kredibilitas Data Beras Dipertanyakan</b> (<i>Harian Ekonomi Neraca, 16 Januari 2018</i>). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai perlunya audit terhadap data BPS dan Kementerian Pertanian terkait produksi beras yang tidak stabil di dalam negeri. Sementara itu, Ombudsman RI menemukan sejumlah indikasi mal-administrasi dalam kebijakan impor 500 ribu ton beras, diantaranya pemberian izin impor beras dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan di Kementerian Perdagangan.</p> <p>Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/1), menanggapi kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras yang terjadi belakangan ini disebabkan antara lain oleh data kurang kredibel. "Rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh BPS dan Kementan, salah satu penyebab permasalahan pasokan beras," ujarnya.</p> <p>Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan hal itu usai membuka Rapat Kerja Nasional Pertanian Tahun 2018 di Jakarta, Senin (15/1). "Data serahkan BPS kita satu pintu. Yang terpenting adalah kita melihat tidak ada impor jagung masuk di Indonesia 2017," Ujarnya.</p>
al	<p><b>Indef: Kementan Harus Perbaiki Data Produksi Beras</b> (<i>Industry.co.id, 16 Januari 2018</i>). Jakarta - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya mengatakan Kementerian Pertanian harus memperbaiki data riil produksi beras domestik sebagai bahan rujukan mengeluarkan kebijakan terkait persediaan beras.</p> <p>"Setahun ke depan perlu memperbaiki data riil produksi beras untuk kebijakan persediaan pada 2019," kata Berly dalam pernyataan di Jakarta, kemarin.</p> <p>Berly mengungkapkan jika asumsi yang digunakan cukup jauh dari kondisi yang sebenarnya di lapangan maka perkiraan yang dihasilkan tentu akan menjadi bias. Hal lain yang harus dilakukan Kementan, tambah dia, yakni memetakan jenis bibit padi dan pupuk yang cocok, serta disesuaikan dengan jenis tanah pada setiap daerah agar hasil produksi beras akan menjadi maksimal.</p>
am	<p><b>Kredibilitas Data Beras Dipertanyakan</b> (<i>Neraca.co.id, 16 Januari 2018</i>). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai perlunya audit terhadap data BPS dan Kementerian Pertanian terkait produksi beras yang tidak stabil di dalam negeri. Sementara itu, Ombudsman RI menemukan sejumlah indikasi maladministrasi dalam kebijakan impor 500 ribu ton beras, diantaranya pemberian izin impor beras dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan di Kementerian Perdagangan.</p> <p>Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/1), menanggapi kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras yang terjadi belakangan ini disebabkan antara lain oleh data kurang kredibel. "Rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh BPS dan Kementan, salah satu penyebab permasalahan pasokan beras," ujarnya. Namun Guru Besar IPB Prof Dr. Dwi Andreas Santosa menilai keputusan pemerintah untuk melakukan Impor beras sebanyak 500 ribu ton dinilai terlambat dan tidak efektif untuk menjaga stok beras di pasaran, untuk memenuhi stok beras dan menjaga harga di bulan Januari dan Februari tahun ini.</p>



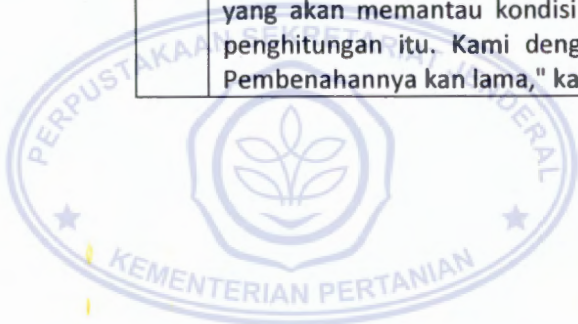
an	<p><b>Validitas Data Beras Dibenahi</b> (<i>Harnas.co, 16 Januari 2018</i>). Menteri Perekonomian Darmin Nasution menilai, validitas data perberasan di Indonesia masih bermasalah. Ketersediaan data luas panen, produktivitas, dan produksi beras selama ini belum menyatu. Hal itu memicu data yang dihasilkan Kementerian Pertanian (Kementan) belum sepenuhnya dapat dipercaya. "Ke depan, pemerintah meminta BPS (Badan Pusat Statistik) dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) bekerja sama membuat data valid," kata Darmin di Jakarta, Senin (15/1).</p> <p>Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyerahkan kewenangan data kepada BPS. Kementan, kata dia, hanya fokus program petani untuk meningkatkan produksi beras nasional. "Kita tidak peduli data karena itu (wewenang) BPS. Yang menjadi patokan kita, beras sejak 2016 sudah tidak impor," kata dia. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mendorong Bulog untuk menyimpan beras impor sebagai cadangan jika harga sudah turun di pasar. "Sisa beras impor bisa disimpan untuk kepentingan operasi pasar berikutnya jika dibutuhkan," ujarnya.</p>
ao	<p><b>Kementan Harus Perbaiki Data Riil Produksi Beras Domestik</b> (<i>Netralnews.com, 16 Januari 2018</i>). Kementerian Pertanian (Kementan) harus perbaiki data riil produksi beras domestik sebagai bahan rujukan mengeluarkan kebijakan terkait persediaan beras. "Setahun ke depan perlu memperbaiki data riil produksi beras untuk kebijakan persediaan pada 2019," kata Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya di Jakarta, Senin (15/1/2018).</p> <p>Berly menjelaskan, selama ini ketidakuratan data panen raya domestik telah mempengaruhi persediaan beras di lapangan. Menurut dia, data yang disajikan oleh Kementan bukan data real produksi namun berdasarkan data produksi rata-rata. Berly menyebutkan data yang disajikan Kementan bisa menghambat pemerintah dalam menganalisa jumlah kebutuhan dengan pasokan beras di daerah. "Apalagi saat ini indikasinya suplai beras menurun, sehingga harga meningkat," jelas pengajar dari Universitas Indonesia itu</p>
ap	<p><b>Indef: Kementan Harus Perbaiki Data Produksi Beras</b> (<i>Metrotvnews.com, 17 Januari 2018</i>). Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) harus memperbaiki data riil produksi beras domestik sebagai bahan rujukan mengeluarkan kebijakan terkait persediaan beras. "Setahun ke depan perlu memperbaiki data riil produksi beras untuk kebijakan persediaan pada 2019," kata Berly, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018.</p> <p>Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras sebagai upaya menutupi kebutuhan konsumsi beras masyarakat sekitar 2,5 juta ton per bulan dan menekan harga beras yang melonjak sejak akhir 2017. Impor beras juga guna mengisi pasokan beras di dalam negeri sambil menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018.</p>
aq	<p><b>Data Stok Beras Kementan Dinilai Tak Akurat</b> (<i>Viva.co.id, 17 Januari 2018</i>). Ekonom senior Indef, Berly Martawardaya, mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) harus melakukan perbaikan data terkait dengan produksi beras domestik. Menurutnya, data itu bisa dijadikan rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang stok beras di Indonesia. "Kementan harus memperbaiki data produksi beras domestik, karena selama ini datanya tidak akurat," ujar Berly di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018. "Kualitasnya masuk kategori beras khusus. Sesuai dengan Permendag Nomor 1 Tahun 2018. Yang pasti bukan masuk kategori IR64. Dia ada ponni, beras jasmine, termasuk beras lain-lain yang mempunyai tingkat kepecahan di bawah 5 persen," kata Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk menutupi kebutuhan konsumsi beras di masyarakat yakni sekitar 2,5 juta ton per bulan.</p>



	<p>Selain itu, diharapkan impor beras juga menekan tingginya harga beras yang terus melonjak mulai akhir tahun 2017 lalu, dengan demikian dapat sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Impor tersebut dilakukan guna mengisi pasokan beras di dalam negeri sambil menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018</p>
ar	<p><b>Kemtan Harus Perbaiki Data untuk Rujukan Kebijakan</b> (<i>Suara Pembaruan, 17 Januari 2018</i>). Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawedaya meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk melakukan perbaikan data terkait dengan produksi beras domestik. Hal itu menjadi penting, karena dapat dijadikan rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang stok beras di Indonesia, termasuk kebijakan impor.</p> <p>Menurut Rizal, impor seharusnya tidak terjadi jika antipasi dilakukan lebih baik, terutama lewat tugas Bulog, yang salah satunya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. "Biasanya, ada stok cadangan Bulog sekitar 2 juta ton hingga 2,5 juta ton. Kalau harga naik, keterlaluhan. Bulog bisa melakukan operasi pasar. Jual di pasar-pasar, sehingga harga turun lagi. Dengan modal stok 2 juta ton, bisa bikin stabil harga pasar 30 juta ton di seluruh Indonesia. Namun, syaratnya Bulog harus aktif. Celakanya, Bulog tidak aktif," katanya.</p>
as	<p><b>KPPU Desak Konsolidasi Data</b> (<i>Republika, 18 Januari 2018</i>). Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak agar pemerintah segera melakukan konsolidasi data sebelum mengambil kebijakan impor beras. Komisioner KPPU RI Saidah Sakwan menjelaskan data merupakan basis diagnostik dalam mengambil kebijakan. "Kalau basis data yang disajikan salah intervensi apa pun terhadap instrumen kebijakan akan missed, akan distorsi terhadap pasar," ujar Saidah dalam diskusi "Dinamika Harga dan Impor Beras" di Jakarta, Rabu (17/1).</p> <p>Ramli mengklaim, stok beras di Sumut kini dalam kondisi aman. Harga beras di tingkat distributor pun, lanjutnya, perlahan turun karena akan memasuki musim panen pada Februari mendatang. "Kemarin itu ada kenaikan karena pasokan agak berkurang," ujar Ramli. Sementara itu, Bongkin (65 tahun), buruh tani asal Desa Balaraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, mengatakan, ia telah puluhan tahun menjadi buruh tani. Selama itu pula ia tak pernah menikmati harga gabah yang bagus karena yang mengambil peran penentuan harga adalah tengkulak.</p>
at	<p><b>Kebijakan Satu Peta Dirilis Agustus 2018</b> (<i>Koran Tempo, 18 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah akan segera merilis kebijakan satu peta atau one map policy pada 17 Agustus nanti. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hal itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). "Kami akan luncurkan 17 Agustus, dan praktik semua yang ada petanya juga akan selesai," ujarnya di Jakarta, kemarin. Darmin menjelaskan, tahap penyusunan kebijakan satu peta saat ini sedang dilakukan. Ia menyebutkan, untuk sejumlah daerah, prosesnya hampir selesai, seperti Kalimantan dan Sumatera. "Kawasan timur, di timurnya Kalimantan, juga hampir selesai. Sedangkan Jawa sedang dimulai."</p> <p>Pemerintah berharap kebijakan itu akan menciptakan keseragaman referensi dan standar acuan bersama untuk menyusun berbagai kebijakan mengenai perencanaan serta pemanfaatan ruang. "Ini juga bisa mencegah pembangunan yang kemungkinan berbenturan," dia menambahkan. Darmin melanjutkan, pemerintah juga akan melakukan serangkaian verifikasi terhadap sampel-sampel untuk pengecekan realisasi di lapangan sebagai dasar perhitungan perkiraan produksi ke depan. Pemerintah juga menerapkan serangkaian langkah strategis untuk memastikan keakuratan data yang ada.</p>



au	<p><b>The Unreliability Of Rice Data</b> (<i>The Jakarta Post</i>, 18 Januari 2018). Every time a bout of price hikes hits the rice market, as it has been over the last few months, the politically sensitive issue about the need for imports again raises its ugly head. After a series of meetings chaired by the chief economics minister, the government finally decided recently to import 500,000 tons, or just 1.5 percent of the estimated domestic consumption of 33 million tons, to help press down the rice price, which affects the vast majority of the population and weighs heavily on the inflation rate. But Agriculture Minister Amran Sulaiman, who seemed to consider rice imports a threat to his portfolio in the Cabinet, as well as a number of politicians, strongly protested the import policy, arguing that domestic supplies are actually adequate and imports would hurt the farmers.</p> <p>In the long run, and in the absence of a new technology breakthrough or of any significant expansion in rice acreage outside Java, there seem to be few better alternative policies for the government but to step up food diversification programs. In the meantime, rice imports should be allowed from time to time as a deterrent to speculative domestic trade and to meet domestic deficit in case of harvest failure. Official data has shown that more than 75 percent of rice growers are net rice consumers themselves.</p>
av	<p><b>Koperasi Pasar Cipinang Bantah Klaim Mentan Soal Surplus Beras</b> (<i>Kumparan.com</i>, 18 Januari 2018). Polemik harga beras medium yang melambung tinggi sejak dua bulan terakhir terus bergulir. Perbedaan pendapat antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menjadi salah satu pemicunya.</p> <p>Mentan Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatannya di publik terus mengatakan bahwa stok beras dalam negeri masih aman alis surplus. Pantauan kumparan (<i>kumparan.com</i>) sampai 11 Januari lalu, menteri asal Bone ini masih mengaku beras Indonesia masih surplus. Klaim dari Amran mengundang reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid. Dia mengatakan surplus stok beras yang diklaim Amran hingga 1,2 juta ton adalah untuk beras miskin. "Intinya omongan beliau soal stok enggak ada karena yang dibilang ada stok 1,2 juta ton itu beras raskin. Kan enggak boleh diperjualbelikan," kata Zulkifli dalam diskusi Iluni UI di Salemba, Jakarta, Kamis, (18/1).</p>
aw	<p><b>BPS Diminta Validasi Data Pangan</b> (<i>Koran Jakarta</i>, 29 Januari 2018). Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan dapat benar-benar memvalidasi data terkait kontroversi impor beras yang mengemuka di masyarakat akhir-akhir ini. Sebab, kalau data yang digunakan berbeda maka berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.</p> <p>Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga tidak menginginkan kebijakan impor beras ditumpangi muatan-muatan kepentingan tertentu. "Kalau disisipi oknum repot. Katanya impor beras premium, namun beras nonpremium ikut juga, maka akan merugikan kita. Apalagi harga beras kini mencapai 13 ribu rupiah, jelas akan memberatkan masyarakat," paparnya. Sebelumnya, pemerintah akan menyelesaikan persoalan mengenai perbedaan data menyangkut beras melalui penyempurnaan data luas panen dan produksi yang selama ini belum menyatu.</p> <p>Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila), Bustanul Arifin, mengatakan pembenahan data pangan, termasuk produksi beras yang dilakukan BPS dengan BPPT diperkirakan selesai Agustus mendatang. Bustanul mengatakan tim bersama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) akan menggunakan satelit dan aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala. "Kami lagi kontribusi metode penghitungan itu. Kami dengan BPPT gunakan satelit. Baru selesai paling cepat Agustus. Pembenahannya kan lama," kata Bustanul.</p>



ax	<p><b>BPS Diminta Validasi Data Pangan</b> (<i>Koran-jakarta.com, 29 Januari 2018</i>). Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan dapat benar-benar memvalidasi data terkait kontroversi impor beras yang mengemuka di masyarakat akhir-akhir ini. Sebab, kalau data yang digunakan berbeda maka berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. “Perlu validitas data BPS dan keterbukaan informasi, jenis apa yang diimpor,” kata Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, dalam rilis diterima, di Jakarta, akhir pekan lalu. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga tidak menginginkan kebijakan impor beras ditumpangi muatanmuatan kepentingan tertentu.</p> <p><b>Perbaiki Metodologi</b> Sementara itu, Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan pihaknya tidak merilis data produksi pangan sejak 2016 karena diduga terjadi overestimate. BPS ingin memperbaiki metodologi untuk penghitungan data produksi pangan dengan menggandeng BPPT menerapkan metode kerangka sampel area (KSA).</p> <p>Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila), Bustanul Arifin, mengatakan pembenahan data pangan, termasuk produksi beras yang dilakukan BPS dengan BPPT diperkirakan selesai Agustus mendatang. Bustanul mengatakan tim bersama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) akan menggunakan satelit dan aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala.</p>
ay	<p><b>Pemerintah Didesak Perbaiki Data Pangan</b> (<i>Harian Ekonomi Neraca, 29 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah harus memprioritaskan pembenahan data pangan mengingat perbedaan data komoditas antara satu institusi dengan lainnya di Tanah Air sudah sering terjadi sehingga berpotensi salah mengambil kebijakan, kata peneliti Hizkia Respatiadi.</p> <p>"Ketidakakuratan data pangan di Tanah Air sudah sering disuarakan sebagai salah satu penyebab permasalahan penanganan pangan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti parameter pengambilan contoh yang sudah usang, ketidak cermatan enumerator dan juga ketidakakuratan data atau jawaban dari narasumber. Panjangnya distribusidatadari tingkat desa hingga ke pusat juga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan.</p>
az	<p><b>Data Produksi Berlebih Bisa Mengirim Sinyal yang Salah</b> (<i>Kompas, 20 Januari 2018</i>). Jakarta - Data produksi padi yang menjadi acuan pemerintah dinilai jauh lebih tinggi dari fakta. Data tersebut mengirim sinyal yang salah dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Kisruh perberasan saat ini tidak lepas dari masalah tersebut. Angka produksi padi tahun 2017, misalnya, disebut mencapai 81,57 juta ton gabah kering giling (GKG). Dengan konversi 62,85 persen, angka itu setara dengan 51,3 juta ton beras. Sementara angka produksi menurut data Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (FAS-USDA) hanya 37 juta ton atau 27,9 persen lebih rendah daripada data Kementerian Pertanian.</p> <p>Menurut anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan, Khudori, selama metode penghitungan tidak diperbaiki, angka produksi yang dihasilkan tidak bisa jadi acuan karena tidak akurat. Angka produksi diperoleh dari perkalian luas panen yang dihitung mantri tani dan produktivitas oleh mantri statistik dan mantri tani. Luas panen diperoleh dengan cara menaksir berdasarkan blok pengairan, pemakaian bibit, dan pandangan mata yang hasilnya sulit diuji secara statistik. Oleh karena itu, sambil menunggu perbaikan metode yang kini berproses di Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah disarankan memangkas angka produksi. Tujuannya, mendekati angka produksi dengan kondisi riil. Dengan demikian, keputusan yang diambil bisa lebih akurat dan mencerminkan kebutuhan sesungguhnya di lapangan.</p>



ba	<p><b>Pemerintah Dituding Tidak Memiliki Data Produksi dan Konsumsi Beras Nasional</b> (<i>Neraca.co.id, 20 Januari 2018</i>). Harga beras terus meroket di pasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampai dengan minggu ke-2 Januari ini, kenaikan harga beras di pasar mencapai 3 persen. BPS menganggap melambungnya harga beras ini sudah dalam kategori mengkhawatirkan atau mencemaskan karena akan mempengaruhi angka inflasi yang berujung ke daya beli masyarakat.</p> <p>Kepala BPS, Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengatakan, pemerintah harus mengendalikan inflasi pada 2018 yang ditargetkan 3,5 persen. Target tersebut dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. "Pemerintah perlu mengendalikan inflasi di 2018, karena volatile food (gejolak pangan), terutama harga beras pergerakannya sudah mencemaskan," kata dia saat Rilis Neraca Perdagangan Desember 2017 di kantornya, Jakarta. Sementara itu, Pengamat Pertanian dan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan, masalah harga beras naik seharusnya bisa diredam jika terdapat data yang jelas. Selama ini, harga beras sering naik karena data produksi dan konsumsi tak jelas. "Jadi kebijakan pangan didasarkan pada data yang tidak akurat selama ini," jelas Dwi.</p> <p><b>Data Tak Akurat</b> Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk tidak lagi menyampaikan informasi stok beras yang tidak akurat kepada publik. Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengungkapkan, selama ini Kementan selalu menyatakan jika produksi beras surplus dan stok cukup. Pernyataan tersebut hanya didasarkan pada perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil. "Kami menyarankan pemerintah menghentikan pembangunan opini-opini surplus yang berlebihan," ujar dia di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.</p>
bb	<p><b>Simpang-Siur Data Beras</b> (<i>Majalah Tempo, 22 Januari 2018</i>). Polemik data beras seperti tak pernah berhenti. Setiap tahun, sejumlah kementerian dan lembaga yang mengurus komoditas ini memiliki perhitungan sendiri.</p> <p>Data mengenai luas lahan, total produksi, persediaan, hingga konsumsi pun simpang-siur. Semua menjadi serba tak pasti. Tak mengherankan bila rencana impor yang akan dilakukan Perum Bulog pada Februari mendatang memicu kontroversi. Sementara itu, harga beras sejak Oktober tahun lalu terus merangkak naik.</p>
bc	<p><b>Mentan Dinilai Bohong Soal Stok Beras Medium Bulog</b> (<i>Inews.id, 18 Januari 2018</i>). Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid memastikan, pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal stok beras medium sebesar 1,2 juta ton di gudang Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) adalah bohong. "1,2 juta ton itu bohong, itu adalah beras rastra (beras sejahtera). Data yang dimiliki Mentan itu tidak valid," katanya di Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Salemba, Jakarta, Kamis (18/1/2018).</p> <p>Beberapa waktu yang lalu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Karyawan Gunarso mengatakan, stok beras untuk bantuan sosial (bansos) bisa bertahan hingga Maret-April 2018. Meski stok beras rastra hanya tersisa 150 ribu ton, pemerintah telah menyediakan duit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp2,5 triliun. Dari anggaran sebanyak itu, Gunarso memastikan stok beras bersubsidi dari pemerintah bisa bertambah sebanyak 400 ribu ton lebih. Pada 25 Januari ini, Bulog akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) rastra sebanyak 142 ribu ton untuk 14,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).</p>



bd	<p><b>Beras Medium Langka di Pasaran</b> (<i>Kompas, 20 Januari 2018</i>). Langkah pemerintah mengimpor beras bukan sesuatu yang tabu selama pasokan komoditas itu belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Apalagi memenuhi kebutuhan pangan rakyat merupakan tugas pemerintah. Hal itu dikatakan Ketua Policy Centre Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Berly Martawardaya. Menurut Berly. Beras adalah komoditas strategis dan menjadi salah satu jenis pangan yang paling tinggi peranannya terhadap inflasi nasional. Kenaikan harga berks, kata dia, sudah mulai terlihat sejak Oktober 2017. Bank Indonesia (BI) pun mencatat harga komoditas itu melonjak sejak Desember 2017. "Hal itu seharusnya tidak terjadi jika pasokan beras memadai," papar Berly yang juga seorang ekonom, dalam keterangan resminya, kemarin.</p> <p>Ketua Umum Koperasi Pasar Induk beras Cipinang (KPIBC) Zulkifli Rasyid juga menekankan perlunya impor beras. Sebab, kata dia, stok beras di sejumlah gudang hanya tinggal beras raskin atau rasta (rakyat sejahtera).</p>
be	<p><b>Negara Agraris, Fakta atau Utopia?</b> (<i>Republika.co.id, 18 Januari 2018</i>). Masyarakat menyambut awal tahun 2018 dengan persoalan yang cukup vital. Yakni, terkait kenaikan harga beras yang persisten hingga mencapai Rp 11.041 per kilogram dari harga Rp 10.794 per kilogram pada November 2017. Sebagaimana diketahui, beras merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Walaupun beras merupakan barang inelastis bagi mayoritas masyarakat, tidak menutup kemungkinan hal ini dapat memicu penurunan daya beli masyarakat secara umum.</p> <p>Pemerintah juga perlu menyediakan ketersediaan lahan pertanian yang luas untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan serta memperhatikan kualitas dan kuantitas agro industrinya, sehingga dapat meningkatkan added value yang menambah devisa negara. Pembangunan yang tepat dengan kondisi alam di Indonesia, dapat menciptakan pertumbuhan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas diharapkan, dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara optimal.</p>
bf	<p><b>DPR Minta Kementan Jujur Soal Data Produksi Beras</b> (<i>Gatra.com, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi IV DR RI, Ichsan Firdaus meminta transparansi data dari Kementerian Pertanian (Kementan) soal stok pangan beras yang diketahui tidak sesuai fakta lapangan. Sebelumnya, Kementan mengaku stok beras surplus, sementara Perum Bulog mengatakan stok beras terbatas. "Saran saya, jujurilah dengan data. Jangan ada akrobatik yang menciptakan 'hantu-hantu' yang tidak selesai," ungkap Ichsan saat menghadiri diskusi Pusat Kajian Pertanian Pangan &amp; Advokasi (Pataka) bertajuk "Mudah Mainkan Data Pangan" di Jakarta, Kamis (18/1).</p> <p>Hantu yang dimaksud Ichsan adalah kebohongan data, spekulasi, dan mafia beras. Politisi partai Golkar itu mengatakan masalah ini kerap muncul, namun belum ada upaya pemerintah mengatasinya. Menurut Ichsan, anggaran yang digelontorkan untuk sektor pertanian cukup besar, namun kinerja produksi pertanian dari Kementan dinilai mengecewakan.</p> <p>Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, pembenahan data pangan termasuk produksi beras yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPPT diperkirakan selesai Agustus mendatang. Bustanul yang juga Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia itu mengatakan, tim bersama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) akan menggunakan satelit dan aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala.</p>



bg	<p><b>Ombudsman Minta Kementan Jangan Sampaikan Data Salah Stok Beras</b> (<i>Liputan6.com, 15 Januari 2018</i>). Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tidak lagi menyampaikan informasi stok beras yang tidak akurat kepada publik. Hal ini menyusul terjadinya gejolak harga beras yang terjadi beberapa waktu terakhir ini akibat kelangkaan beras medium.</p> <p>Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengungkapkan, selama ini Kementan selalu menyatakan jika produksi beras surplus dan stok cukup. Pernyataan tersebut hanya didasarkan pada perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil. Ombudsman menyarankan juga (Kementan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, LTT (luas tambah tanam), benih subsidi, dan pemberantasan hama oleh Kementan," kata dia.</p>
bh	<p><b>Data Produksi Makin Diragukan</b> (<i>Koran-Jakarta.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Melambungnya harga beras medium maupun premium dalam beberapa pekan terakhir memperkut dugaan jika data produksi gabah sepanjang 2017 kian diragukan. Hal itu bisa dibuktikan dengan tak kunjung efektifnya operasi pasar (OP) yang digelontorkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Pakar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengatakan tujuan utama dari OP ialah supaya beras-beras pemasok yang disimpan di gudang keluar atau dijual ke pasar. Dengan itu, harganya turun mengikuti harga yang dijual Bulog melalui beras cadangan pemerintah, sebab jika tidak dijual maka beras yang digudang tak akan laku karena pasar diguyur beras Bulog.</p> <p>Tidak Pro Rakyat  Anggota DPD RI, Dailami Firdaus, menilai kebijakan tersebut jelas tidak memihak kepada masyarakat yang membutuhkan kestabilan harga, sedangkan petani menginginkan kesejahteraannya meningkat. Menurut Anggota Komite II DPD RI, impor beras itu memperlihatkan seluruh program dan komitmen pemerintah yang tidak akan mengimpor beras pada 2018 hanyalah isapan jempol semata.</p>
bi	<p><b>BPS dan BPPT Diminta Kelola Data Beras Agar Tidak Ada Dusta</b> (<i>Okezone.com, 15 Januari 2018</i>). Data mengenai surplus beras menjadi pertanyaan besar utamanya ketika harga melonjak tinggi karena pasokan yang berkurang. Seperti saat ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selalu mengatakan bahwa Indonesia surplus beras, tapi kenyataannya harga beras kelas medium sudah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.450 per kilogram (kg).</p> <p>Dalam menyelesaikan persoalan data, pemerintah sudah memutuskan persoalan data, luas panen, dan produktivitas beras yang selama ini memang belum menyatu akan dikelola oleh BPS dan BPPT. "Selama ini masih ada perbedaan. Ke depan pemerintah pertama meminta BPS dibantu oleh BPPT untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai luas tanah, dan luas panen sebelumnya dan produktivitas dan produksi," tutur Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).</p> <p>Berdasarkan hal itu, Darmin melanjutkan, penugasan untuk Bulog menyerap gabah petani ke depan bisa berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh BPS dibantu oleh BPPT. "Soal data ini pemerintah menyelesaikan one map policy, pemerintah akan launching ini pada 18 Agustus 2018 ini. Akan tetapi daya sebagian besar sudah selesai. Jadi, pakai ini mendukung data BPS. Jadi nanti bukan hanya bukan soal luas tanaman saja, tetapi juga data irigasi kita. Persisnya berapa luas yang irigasi teknis dan berdasarkan cara lain," tuturnya.</p>



	<p>Sementara itu, Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengatakan, penunjukan BPS dan BPPT dalam menggarap data pertanian dimaksudkan supaya hasilnya semakin objektif. "Data produksi selama ini memang over estimated. Ke depan masyarakat bisa mengecek sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita, kita gandeng BPPT," tuturnya.</p>
bj	<p><b>Berita Foto: Kisruh Data Di Balik Impor Beras</b> (<i>Koran Tempo, 22 Januari 2018</i>). Impor beras yang akan berlangsung bulan depan muncul akibat kesimpangsiuran data antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, dan Perum Bulog. Saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim Indonesia surplus beras, Tempo menemukan pasokan beras seret dan harga melonjak di sentra-sentra perdagangan. Sejumlah buzzer ikut politisasi urusan perut ini di media sosial.</p>
bk	<p><b>Data Produksi Beras Keliru, JK Akui Sudah Dua Kali Koreksi</b> (<i>Tempo.co, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan data produksi beras Indonesia selama ini keliru. Kesalahan ini telah dikoreksi JK sekitar dua tahun lalu saat menjadi Wakil Presiden pada periode kedua. "Itu kesalahan beruntun sejak lama, sejak saya jadi Wapres 2004 sudah bikin kesalahan juga. Kami sudah koreksi," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.</p> <p>"Itu kesalahan beruntun sejak lama, sejak saya jadi Wapres 2004 sudah bikin kesalahan juga. Kami sudah koreksi," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.</p>
bl	<p><b>Ekonom UI: Harga Terus Naik, Data Surplus Beras Diragukan</b> (<i>Tempo.co, 18 Januari 2018</i>). Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menilai ada yang salah dari data yang dimiliki pemerintah terkait produksi beras. Menurut dia, salah satunya adalah data yang disajikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengklaim adanya surplus produksi beras. "Jika mengikuti hukum ekonomi, kalau ada produksi yang banyak bahkan surplus harusnya harga turun," kata Berly di Jakarta pada Kamis, 18 Januari 2018.</p> <p>Menteri Pertanian Amran Sulaiman beberapa kali menyebutkan bahwa produksi beras nasional sudah surplus, bahkan Indonesia bersiap mengeksport beras sesegera mungkin. Pada 9 Februari 2017, ia menyebutkan produksi padi nasional mencapai 79,17 juta ton di 2016 atau di atas target 72 juta ton.</p>
bm	<p><b>Agar Tak Simpang Siur, Pemerintah Perlu Perbaiki Data Beras</b> (<i>Detik.com, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah disarankan untuk membenahi data beras agar tak terjadi kesimpangsiuran. Data yang akurat bisa menjadi acuan untuk mengecek pasokan beras. "Jadi ada something wrong dengan pendataan. Jadi ini prioritas pemerintah untuk perbaiki. Kalau datanya salah kita hanya bisa bergantung pada harga," kata Ekonom UI, Berly Martawardaya dalam diskusi ILUNI UI, Jakarta, Kamis (18/1/2018).</p> <p>Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KPIBC) Zulkifli Rasyid ikut menambahkan. Pihaknya setuju ada kesimpangsiuran data yang dimiliki oleh Kementan mengenai surplus beras. Akhirnya, kata Zulkifli, pemerintah pun ambil sikap dengan membuka keran impor karena tidak mau ambil risiko soal ketersediaan beras nasional meskipun diklaim surplus. Dia pun menilai langkah tersebut sudah tepat.</p>
bn	<p><b>Peneliti Sebut Data Surplus Beras Tidak Valid</b> (<i>Akurat.co, 25 Januari 2018</i>). Mengawali 2018 perekonomian Indonesia diwarnai dengan dinamika harga pangan dan energi yang berpotensi menjadi 'batu sandungan' bagi upaya akselerasi perekonomian. Bahkan bahan pangan paling</p>



	<p>pokok di Indonesia yaitu beras mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sehingga seakan mendesak pemerintah untuk segera melakukan stabilisasi.</p> <p>"Data beras itu tidak akurat karena selama ini pemerintah hanya menghitung rata-rata produksi yang dikalikan luas lahan bukan benar-benar ditimbang dari produksi beras itu sendiri. Nah, kalau datanya saja tidak akurat maka kebijakan yang diambil juga tidak tepat," tandasnya.</p>
bo	<p><b>Hentikan Klaim Surplus Beras</b> (<i>Indopos.co.id, 25 Januari 2018</i>). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak pemerintah menghentikan klaim surplus beras. Pasalnya, itu hanya menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. "Surplus dari mana? Tolong hentikan klaim itu sebelum melakukan pendataan produksi beras secara faktual dan sistematis," tutur Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, di Jakarta, Kamis (25/1).</p> <p>Selanjutnya, menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok serta respon cepat pada daerah kekurangan. "Termasuk melakukan lagi kampanye dan langkah sistematis diversifikasi pangan nonberas dengan mengutamakan pokok yang diproduksi sehingga mengurangi permintaan beras jangka panjang," tukasnya.</p>
bp	<p><b>BPS dan BPPT Diminta Kelola Data Beras Agar Tidak Ada Dusta</b> (<i>Okezone.com, 15 Januari 2018</i>). Data mengenai surplus beras menjadi pertanyaan besar utamanya ketika harga melonjak tinggi karena pasokan yang berkurang. Seperti saat ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selalu mengatakan bahwa Indonesia surplus beras, tapi kenyataannya harga beras kelas medium sudah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.450 per kilogram (kg).</p> <p>Dalam menyelesaikan persoalan data, pemerintah sudah memutuskan persoalan data, luas panen, dan produktivitas beras yang selama ini memang belum menyatu akan dikelola oleh BPS dan BPPT. "Selama ini masih ada perbedaan. Ke depan pemerintah pertama meminta BPS dibantu oleh BPPT untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai luas tanah, dan luas panen sebelumnya dan produktivitas dan produksi," tutur Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).</p> <p>Berdasarkan hal itu, Darmin melanjutkan, penugasan untuk Bulog menyerap gabah petani ke depan bisa berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh BPS dibantu oleh BPPT. "Soal data ini pemerintah menyelesaikan one map policy, pemerintah akan launching ini pada 18 Agustus 2018 ini. Akan tetapi daya sebagian besar sudah selesai. Jadi, pakai ini mendukung data BPS. Jadi nanti bukan hanya soal luas tanaman saja, tetapi juga data irigasi kita. Persisnya berapa luas yang irigasi teknis dan berdasarkan cara lain," tuturnya.</p> <p>Sementara itu, Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengatakan, penunjukan BPS dan BPPT dalam menggarap data pertanian dimaksudkan supaya hasilnya semakin objektif. "Data produksi selama ini memang over estimated. Ke depan masyarakat bisa mengecek sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita, kita gandeng BPPT," tuturnya.</p>
bq	<p><b>Akurasi Data</b> (<i>Kontan, 19 Januari 2018</i>). Kebijakan yang baik dibuat berdasarkan data. Bukan sembarang data, tapi harus data yang akurat dan tepercaya. Jika data tak akurat, maka kebijakan yang dibuat bisa salah, dan memalukan. Kurang lebih contohnya bisa kita lihat dalam ribut-ribut impor beras saat ini.</p>



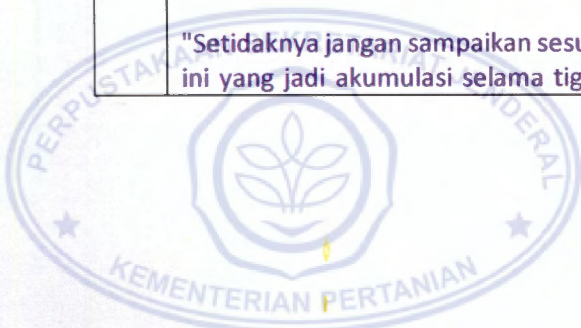
	<p>Menteri Pertanian berulang kali menyatakan kita sudah swasembada beras, sehingga tak perlu impor lagi. Nyatanya, minggu lalu Kementerian Perdagangan mendadak mengumumkan pembukaan keran impor beras sebanyak 500.000 ton.</p> <p>Polemik tahunan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang memalukan ini seharusnya dibereskan pemerintahan Jokowi, yang berjanji mencapai swasembada beras dalam 3 tahun. Salah satu caranya, Presiden menugaskan lembaga lain, BPS misalnya, untuk segera menyajikan data pangan yang akurat dan kredibel. Kalau perlu, pembenahan data pangan ini menjadi prioritas Jokowi di tahun keempat pemerintahannya ini. Presiden juga harus memastikan seluruh menteri bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik, hingga kebijakan yang diambil valid, bukan malah menunjukkan ketakse-suaian satu dengan yang lain.</p>
br	<p><b>Data Beras Harus Lebih Akurat</b> (<i>Koran Jakarta, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Kementerian Pertanian harus jujur soal data pangan terkait ketidaksinkronan fenomena lonjakan harga beras di tengah klaim surplus dari institusi tersebut. Sebab, ketidaksinkronan data pangan membuat publik kebingungan di tengah terus melonjaknya harga beras. Anggota Komisi IV DPR RI, Ichsan Firdaus, menyatakan saat ada gejolak harga beras dan kebijakan impor, selalu ada "hantu" yang bergentayangan dalam masalah tersebut. "Hantu" yang dimaksud yakni klaim surplus, spekulasi, dan mafia beras</p> <p><b>Pasokan Turun</b> Ketua Umum Koperasi Pasar Induk beras Cipinang (KP1BC), Zulkifli Rasyid, mengungkapkan pasokan beras ke Pasar Induk Cipinang turun sehingga harganya naik. Bahkan, beras untuk operasi pasar (OP) pemerintah banyak yang menggunakan beras rastra (dulunya bernama Raskin), bukan beras medium.</p> <p>Guru Besar Hmu Ekonomi pertanian Universitas Lampung (Unila), Bustanul Arifin, mengatakan pembenahan data pangan, termasuk produksi beras yang dilakukan Badan Pusat Statistik dan dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) diperkirakan selesai Agustus mendatang. Bustanul mengatakan tim bersama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) akan menggunakan satelit dan aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala. "Kami lagi kontribusi metode penghitungan itu.</p>
bs	<p><b>Harga Beras Terus Melonjak, Data Pangan Dianggap Tidak Sesuai</b> (<i>Kontan.co.id, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Beberapa waktu terakhir, harga beras terus melonjak. Bahkan rata-rata harga beras, baik medium maupun premium berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kemtan) mengklaim bahwa produksi padi Indonesia masih surplus. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan (Kemtan), pada 2017, Indonesia masih surplus sekitar 17,6 juta ton. Ichsan Firdaus, anggota Komisi IV DPR mengatakan, lonjakan harga yang tinggi ini menunjukkan adanya masalah di tingkat produksi. Sementara, dalam dua tahun terakhir Kemtan mengklaim tidak pernah melakukan impor untuk menambah stok beras karena produksi beras dalam negeri yang melimpah.</p> <p>Khudori berpendapat, saat ini memang belum ada data yang benar-benar valid. Bahkan, dia bilang, sesuai dengan undang-undang data yang bisa dijadikan pedoman adalah data Badan Pusat Statistik (BPS). Masalahnya, lanjut Khudori, dalam dua tahun terakhir, BPS belum mengeluarkan data pangan lantaran adanya perubahan metode pengumpulan data. Nantinya, bila BPS sudah</p>



	<p>mengeluarkan data produksi, kementerian sektoral mau mengoreksi data yang dimiliki, dan disesuaikan dengan data BPS.</p>
bt	<p><b>Pasokan Beras Langka</b> (<i>Harnas.co, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengklaim surplus beras dinilai tak berdasar. Harga beras hingga saat ini justru menunjukkan level tertingginya tiga tahun terakhir. Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid mengatakan, baru kali ini harga beras sangat tinggi. Produksi beras dalam negeri patut dipertanyakan.</p> <p>"Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) beberapa kali menyatakan surplus. Saya katakan itu bohong. Stok beras khususnya jenis medium itu tidak ada," kata Zulkifli di Jakarta, Kamis (18/1).</p> <p>Zulkifli mengatakan, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) turut memicu kelangkaan beras. Mayoritas penggilingan tak bisa memproduksi beras medium karena harga gabah sudah tinggi.</p>
bu	<p><b>Pasokan Beras Langka</b> (<i>Harnas.co, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengklaim surplus beras dinilai tak berdasar. Harga beras hingga saat ini justru menunjukkan level tertingginya tiga tahun terakhir. Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid mengatakan, baru kali ini harga beras sangat tinggi. Produksi beras dalam negeri patut dipertanyakan.</p> <p>"Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) beberapa kali menyatakan surplus. Saya katakan itu bohong. Stok beras khususnya jenis medium itu tidak ada," kata Zulkifli di Jakarta, Kamis (18/1).</p> <p>Zulkifli mengatakan, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) turut memicu kelangkaan beras. Mayoritas penggilingan tak bisa memproduksi beras medium karena harga gabah sudah tinggi.</p>
bv	<p><b>Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan</b> (<i>Okezone.com, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data pangan terkait ketidaksinkronan fenomena harga beras yang meningkat di tengah klaim surplus dari kementerian tersebut. "Saran saya, jujur lah dengan data. Jangan ada akrobatik yang menciptakan 'hantu-hantu' yang tidak selesai," katanya dalam diskusi Pusat Kajian Pertanian Pangan &amp; Advokasi (Pataka) bertajuk "Mudah Mainkan Data Pangan" di Jakarta. Ichsan menjelaskan, saat ada gejolak harga beras dan kebijakan impor, selalu ada "hantu" yang bergentayangan dalam masalah tersebut. Hantu yang dimaksud yakni klaim surplus, spekulasi dan mafia beras.</p> <p>Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan pembenahan data pangan termasuk produksi beras yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPPT diperkirakan selesai Agustus mendatang. Bustanul yang juga Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia itu mengatakan tim bersama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) akan menggunakan satelit dan aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala.</p> <p>Ada pun sebelumnya sesuai arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, semua data produksi harus berasal dari BPS dengan bekerja sama BPPT menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). KSA akan menggunakan satelit milik Lembaga dan Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam pendataan data produksi pangan. Dalam pemantauannya, BPPT menggunakan peta rupa bumi baik dari LAPAN, Badan Informasi Geospasial dan peta administrasi BPS untuk mengambil contoh sample dari titik-titik koordinat yang ditentukan.</p>



bw	<p><b>DPR Desak Kementan Jujur Soal Data Pangan</b> (<i>Industry.co.id, 19 Januari 2018</i>). Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data pangan terkait ketidaksinkronan fenomena harga beras yang meningkat di tengah klaim surplus dari kementerian tersebut. "Saran saya, jujurlah dengan data. Jangan ada akrobatik yang menciptakan 'hantu-hantu' yang tidak selesai," katanya dalam diskusi Pusat Kajian Pertanian Pangan &amp; Advokasi (Pataka) bertajuk "Mudah Mainkan Data Pangan" di Jakarta, Kamis (18/1/2018).</p> <p>Ichsan juga menyebut perdebatan mengenai siapa yang seharusnya merilis data pangan justru menunjukkan tidak ada koordinasi di kalangan pemerintah. "Setidaknya jangan sampaikan sesuatu yang semestinya tidak harus disampaikan," katanya. Ichsan menambahkan, ada kekhawatiran masalah beras dipolitisasi lantaran tahun ini adalah tahun politik.</p>
bx	<p><b>Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan</b> (<i>Harian Ekonomi Neraca, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data pangan terkait ketidaksinkronan fenomena harga beras yang meningkat di tengah klaim surplus dari kementerian tersebut. "Saran saya, jujurlah dengan data. Jangan ada akrobatik yang menciptakan hantu-hantu yang tidak selesai," katanya dalam diskusi Pusat Kajian Pertanian Pangan Advokasi (Pataka) bertajuk "Mudah Mainkan Data Pangan" di Jakarta, Kamis (18/1). Ichsan menjelaskan, saat ada gejolak harga beras dan kebijakan impor, selalu ada "hantu" yang bergen-tayangan dalam masalah tersebut. Hantu yang dimaksud yakni klaim surplus, spekulasi dan mafia beras. Menurut politisi Partai Golkar itu, masalah tersebut kerap kali muncul namun belum ada upaya pemerintah mengatasinya, terutama terkait spekulasi.</p> <p>Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan pembenahan data pangan termasuk produksi beras yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPPT diperkirakan selesai Agustus mendatang. Bustanul yang juga Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia itu mengatakan tim bersama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) akan menggunakan satelit dan aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala.</p>
by	<p><b>BPS Diminta Segera Sudahi Puasa Merilis Data Pangan</b> (<i>Bisnis.com, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan bisa mengakhiri puasa dari merilis data tahun ini, di tengah data pangan, khususnya beras yang dianggap kurang valid oleh sejumlah pihak. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mengatakan berdasarkan perbandingan dengan sejumlah data lain, juga keadaan di lapangan, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian terkait stok pangan dalam negeri terlihat kurang tepat.</p> <p>Untuk itu, BPS, sebagai badan yang mendapat mandat dari undang-undang nomor 16/1997 tentang Statistik diminta untuk segera bisa kembali merilis data-data khususnya yang terkait dengan kepentingan pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.</p>
bz	<p><b>DPR Minta Kementerian Pertanian Jujur Soal Data Pangan</b> (<i>Antaraneews.com, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Ichsan Firdaus, meminta Kementerian Pertanian jujur soal data pangan. Pemerintah mengklaim ada surplus produksi pangan padahal harga beras naik cukup tinggi di atas harga eceran tertinggi. "Saran saya, jujurlah dengan data. Jangan ada akrobatik yang menciptakan 'hantu-hantu' yang tidak selesai," katanya dalam diskusi Pusat Kajian Pertanian Pangan &amp; Advokasi, bertajuk "Mudah Mainkan Data Pangan", di Jakarta, Kamis.</p> <p>"Setidaknya jangan sampaikan sesuatu yang semestinya tidak harus disampaikan. Nah hal seperti ini yang jadi akumulasi selama tiga tahun," katanya. Ichsan menambahkan, ada kekhawatiran</p>



	<p>masalah beras dipolitisasi lantaran tahun ini adalah tahun politik. Ia meminta polemik terkait beras bisa segera diselesaikan.</p>
ca	<p><b>Kebijakan Pangan Mendesak</b> (<i>Kompas</i>, 9 Januari 2018). Operasi pasar beras sejak pertengahan Desember 2017 belum berdampak nyata untuk meredam harga. Kebijakan pangan perlu dievaluasi. Pemerintah berupaya keras mengendalikan harga beras sejak Indonesia merdeka. Harga bahan pangan pokok ini selain dikaitkan dengan inflasi secara nasional, juga menjadi komoditas bernuansa politis, yaitu penanda keberhasilan pembangunan dengan memberi cukup makan bagi rakyat. Beras masih menjadi salah satu belanja terpenting keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah. Upaya meredam kenaikan harga beras medium terus dilakukan Bulog, Kementerian Pertanian melalui Toko Tani Indonesia, dan di Jakarta melalui PT Food Station Cipinang Jaya. Namun, harga beras jenis medium terus naik di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, dari Rp 9.725 per kilogram pada November jadi Rp 10.202 pada Desember lalu. Di tingkat grosir, harga beras pada Minggu (7/1) Rp 10.978.</p> <p>Kenaikan harga beras mengindikasikan kelangkaan pasokan. Dengan diperdagangkannya beras, harga ditentukan pasokan dan permintaan. Pemerintah mengintervensi melalui penambahan pasokan saat harga naik dan membeli beras ketika harga jatuh. Kelangkaan dapat dikarenakan ada gangguan dalam distribusi dari pusat-pusat produksi beras ke pasar, tetapi juga bisa disebabkan tidak tersedia beras dalam jumlah cukup di sentra-sentra produksi utama.</p>
cb	<p><b>Harga Beras Mahal, Pemerintah Perluas Jangkauan Operasi Pasar</b> (<i>Katadata.co.id</i>, 9 Januari 2018). Kementerian Perdagangan dan Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) memperluas jangkauan operasi pasar hingga 1.800 titik jual secara nasional, dari sebelumnya hanya 1.100 titik. Operasi pasar terus digelar karena kenaikan harga akibat rendahnya produksi beras nasional.</p> <p>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, beras medium dalam operasi pasar ini dijual dengan harga Rp 9.300 per kilogram. "Pelepasan operasi pasar beras diawali di 10 pasar di wilayah DKI Jakarta dan diikuti secara serentak di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir Maret 2018," kata Enggar di Jakarta, Selasa (9/1). Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras kualitas medium sudah mencapai Rp 12.050 per kilogram. Jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan, Rp 9.450, Rp 9.950, dan Rp 10.250.</p>
cc	<p><b>Kualat Kalau Mainin Urusan Perut Rakyat</b> (<i>Rakyat Merdeka</i>, 10 Januari 2018). Kenaikan harga beras yang dimulai sejak akhir tahun kemarin terus berlanjut. Operasi pasar yang dilakukan Kementerian Perdagangan sejak Oktober lalu belum membuahkan hasil. Bukannya turun, harga beras di pasaran malah mencapai titik tertinggi atau rekor nasional. Pemerintah kudu serius. Bisa celaka kalau mainin urusan perut rakyat. Kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak November lalu. Saat itu harga beras jenis medium ada di kisaran Rp 9.500 per kilogram. Setelah itu, komoditas makanan pokok ini naik Rp 300 tiap pekan. Sampai kemarin, harga beras di sejumlah pasar tradisional Jakarta belum menunjukkan tanda-tanda akan turun.</p> <p>Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Gatot Irianto memastikan produksi beras tidak berkurang dan stok di Bulog masih 1 juta ton, cukup sampai panen raya pada Februari mendatang sehingga pemerintah tidak akan impor. "Sebentar lagi kan panen raya sehingga tak ada argumen sedikitpun kita harga beras naik," ujarnya. Kata Gatot, kenaikan harga beras bervariasi dan tidak terlalu melonjak. Kenaikan harga beras juga diakibatkan publikasi yang salah sehingga menyebabkan kepanikan konsumen.</p>



	<p>Di tempat terpisah, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, harga beras mempunyai pengaruh besar ke tingkat kemiskinan. Soalnya mayoritas masyarakat masih menjadikan beras sebagai bahari makanan utama "Jaga harga beras untuk masyarakat di pedesaan kalau tidak ingin kemiskinan bertambah," kata Bambang</p>
cd	<p><b>Bola Panas Bernama Harga Beras</b> (<i>Harian Kontan, 10 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah berjanji menggelar operasi pasar beras untuk meredam harga. Maklum, harga beras justru makin liar semenjak beleid Harga Eceran Tertinggi (HET) diterapkan September 2017. Bahkan Januari 2018, harga beras sudah menembus HET akibat minimnya stok. Kemarin, sejumlah Menteri Kabinet Kerja berembug dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk membahas masalah beras. Tampak hadir Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.</p> <p>Namun Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, menyatakan, Bulog tidak bisa sembarangan menyerap beras yang tidak berkualitas. Bulog merupakan BUMN yang harus profit dan pada saat bersamaan juga menjalankan penugasan pemerintah. Menurutnya sejauh ini Bulog telah menyerap beras sesuai penugasan.</p> <p>Impres No 5/2015 memerintahkan Bulog membeli beras seharga Rp 7.300 per kg. Tapi, Bulog kesulitan menyerap ketika beras hasil panen tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. "Bulog disiplin melaksanakan perintah pemerintah. Bulog harus dapat beras medium dengan broken maksimal 20% kadar air 14% menir 2%, dengan harga Rp 7.300. Dengan fleksibilitas 10% atau Rp 8.030 itu pun tak bisa," jelas Djarot</p>
ce	<p><b>Menteri Selalu Katakan Beras Surplus</b> (<i>Republika, 10 Januari 2018</i>). Harga beras kualitas medium di berbagai daerah, tak terkecuali di Jakarta dan sekitarnya, mengalami kenaikan. Bagaimana kondisi pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang saat ini? Ada kekosongan beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Pasokan dari daerah jauh berkurang. Normalnya itu pasokan mencapai 3.000 ton per hari, tetapi sekarang mungkin kurang lebih hanya 2.000 ton.</p> <p>Pemerintah saat ini kembali menggulirkan kegiatan operasi pasar untuk menekan harga. Seperti apa harapan pedagang? Sebenarnya dua bulan lalu juga sudah ada operasi pasar, tetapi tersendat barangnya, tidak sesuai harapan. Inginnya pedagang hari ini ditebus, besok barang keluar, tapi ini tidak. Kemudian, barang yang dipasok juga mutunya kurang bagus. Sebenarnya beras dari Bulog itu kualitas medium, tetapi di pasaran kan sekarang sudah tidak ada beras medium</p>
cf	<p><b>Harga Beras Capai Rekor Nasional Termahal</b> (<i>Warta Kota, 10 Januari 2018</i>). Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan Satgas Pangan turun ke lapangan untuk mengecek distribusi pangan setelah harga beras mengalami kenaikan. Pengecekan ini dilakukan karena menurut Tito sejauh ini suplai pangan cukup setelah memasuki masa panen. Namun harga tetap mengalami kenaikan.</p> <p>Di Pasar Induk Beras Cipinang, harga beras jenis medium pada akhir pekan lalu mencapai antara Rp10.500 sampai Rp11.500. Angka ini jauh melebihi harga beras pada awal 2017 sekitar Rp9.500. Salah seorang pedagang beras, Uwi, mengatakan kenaikan harga beras secara perlahan sudah terjadi sejak akhir November 2017 lalu dari harga Rp9.500. "Setiap minggu naik sekitar Rp300. kemudian naik lagi Rp500 dan seterusnya sampai mencapai harga yang sekarang. Itu tertinggi sejak saya berdagang di sini pada 1991 lalu." jelas Uwi seperti dikutip BBC. Uwi menyebutkan kenaikan harga beras ini terjadi karena pasokan dari daerah penghasil padi di Pulau Jawa menurun, antara lain Karawang, Subang dan Indramayu di Jawa Barat.</p>



	<p>Guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menyebutkan kenaikan harga beras mengikuti peningkatan harga gabah di sejumlah daerah. "Kami ikut memantau dari jaringan di 84 kabupaten/kota, kisaran harga gabah kering panen mencapai Rp5.200-Rp6.000."</p>
cg	<p><b>Harga Beras Tinggi, Komisi IV akan Panggil Kementan</b> (<i>Republika.co.id, 10 Januari 2018</i>). Jakarta - Pada pertengahan bulan Desember lalu, sempat dikabarkan Badan Urusan Logistik (Bulog) memiliki stok beras yang cukup yakni di atas dua juta ton. Namun kenyataannya sampai awal Januari tahun 2018 ini, stok beras di Bulog tidak lebih dari satu juta ton. Ini membuat harga beras melambung, dan untuk itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan memanggil Kementerian Pertanian terkait hal ini.</p> <p>Menurut Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Michael Watimena, kurangnya stok membuat suplai beras ke pengecer menjadi relatif terbatas. Pada akhirnya beras di pasaran juga sedikit berkurang. Sementara permintaan dari masyarakat terhadap beras relatif normal. Oleh karena itu, Politikus Partai Demokrat ini, menegaskan pihaknya akan mengundang dan mempertanyakan kondisi tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Dirut Perum Bulog. Sebab selama ini keduanya selalu optimistis stok beras relatif tersedia. "Sehingga masyarakat diminta tidak khawatir atau takut dengan ketersediaan beras di pasaran untuk ke depannya," tambahnya.</p> <p>Namun ucapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang saat ini terjadi di lapangan atau di masyarakat. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mendorong Menteri Pertanian dan Bulog bersama elemen pemerintahan lainnya untuk segera mengatasi melonjaknya harga bahan pangan seperti beras tersebut.</p>
ch	<p><b>Harga Beras Naik, Data Produksi Surplus Kementan Dikritik</b> (<i>Republika.co.id, 10 Januari 2018</i>). Jakarta - Pengamat Pertanian Institute Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas mengkritik Kementerian Pertanian atas data stok beras yang diklaim surplus. Kenyataannya, kini harga beras melonjak naik, bahkan hingga Rp 11 ribu per liter untuk beras medium. "Kementan tidak bisa dipercaya. Data Kementan ini kacau sekali, dan repotnya data mereka yang dijadikan landasan oleh Presiden, sehingga semua langkah menjadi terlambat," ujar Dwi Andreas kepada <i>Republika.co.id</i>, Rabu (10/1). Dwi menjelaskan, kenaikan harga beras telah terjadi sejak Juli 2017 lalu, bahkan pada Oktober 2017, kenaikan harga semakin tinggi. Kalaupun Pemerintah memutuskan impor, kata Dwi, biasanya sudah diputuskan sejak Juli karena pemerintah punya prediksi yang baik.</p> <p>Berdasarkan pengamatannya di lapangan, stok beras di pedagang dan gudang beras di daerah sudah banyak yang kosong. Dengan aktifnya Satgas Pangan, mereka tidak berani menimbun beras. Padahal dulu, kata Dwi, para pedagang sudah memiliki perencanaan kapan beras dilepas ke pasaran. Sekarang mereka tidak berani untuk melakukan hal tersebut, hingga stok beras kosong. "Sekarang tidak tahu beras ada di mana, di pedagang besar sudah langka," katanya. Dwi juga mengkritik pemerintah yang terkesan tutup mata dengan prediksi dan masukan dari para pengamat mengenai stok beras dan pangan lainnya. Para pengamat sudah menyampaikan untuk melakukan evaluasi data Kementan sejak tiga tahun lalu, tetapi tidak digubris. Akibatnya, harga beras diprediksi akan terus naik hingga Februari mendatang.</p>
ci	<p><b>Bola Panas Bernama Harga Beras</b> (<i>Kontan.co.id, 10 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah berjanji menggelar operasi pasar beras untuk meredam harga. Maklum, harga beras justru makin liar semenjak beleid Harga Eceran Tertinggi (HET) diterapkan September 2017. Bahkan Januari 2018, harga beras sudah menembus HET akibat minimnya stok. Kemarin, sejumlah Menteri Kabinet</p>



	<p>Kerja berembug dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk membahas masalah beras. Tampak hadir Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.</p> <p>Dengan surplus 7 juta ton, seharusnya harga beras turun. Alih-alih turun, Kemtan dan Bulog justru saling tuding dan saling melempar tanggung jawab. Lihat saja, Dirjen Tanaman Pangan Kemtan Sumardjo Gatot Irianto mengklaim, saat ini sejumlah panen terjadi di sentra produksi padi di Tanah Air, seperti di Sulawesi dan Sumatera. Dia menuding kenaikan harga beras terjadi akibat minimnya serapan Bulog. "Serapan Bulog belum optimal menjadi salah satu sebabnya," tudingnya.</p> <p>Tahun lalu, total serapan beras Bulog hanya 2,1 juta ton atau 58% dari target. Padahal menurut Gatot, Bulog bisa menyerap secara komersial bila harga gabah kering panen (GKP) di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). "Jadi tidak ada alasan Bulog belum bisa menyerap," tandasnya. Gatot juga menuding, Bulog tidak maksimal menggelar operasi pasar sehingga harga beras tinggi.</p>
ck	<p><b>Harga Beras Tetap Mahal, Pemerintah Harus Kaji Opsi Impor Beras</b> (<i>Rmol.co, 10 Januari 2018</i>). Tingginya harga beras medium masih membebani masyarakat, terutama mereka yang tergolong miskin. Harga beras yang terus tinggi juga dikhawatirkan akan mempengaruhi inflasi nasional yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian. Pemerintah seharusnya tidak menutup pintu pada opsi mengimpor beras.</p> <p>Kabag Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, kondisi di lapangan berbeda dengan data yang selama ini disampaikan Kementerian Pertanian. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras medium pada Juli 2017 adalah Rp 10.574 per kilogram dan naik menjadi Rp 10.794 per kilogram pada November. Di Januari 2018, harga terus merangkak naik jadi Rp 11.041 per kilogram.</p> <p>Kebijakan HET dan operasi pasar juga tidak fair karena menekan pedagang kecil, padahal yang dapat profit margin terbesar justru pemilik penggilingan dan pedagang grosir dan tengkulak. Kalau hal itu dipaksakan, para pedagang bisa saja memilih untuk tidak jualan, seperti yang terjadi pada Oktober 2017 lalu di Pasar Induk Cipinang di mana pasokan beras berkurang drastis setelah HET diterapkan. Atau bisa saja tetap berjualan tetapi berasnya dioplos dengan yang berkualitas buruk.</p>
ck	<p><b>Harga Beras Medium Makin Tinggi</b> (<i>Bisnis Indonesia, 11 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah diimbau menambah pasokan beras medium untuk mengerem kenaikan harga yang masih berlangsung. Pantauan Bisnis di Pasar Induk beras Cipinang (PIBC) kenaikan harga beras pada 10 Januari 2018 dibandingkan dengan awal tahun ini, bahkan ada yang sudah mengalami peningkatan 14%. Dari data PIBC kenaikan beras Cianjur slyp (pandan wangi) sebesar 1,9% menjadi Rp 13.150/kg, setra (4,2%) ke Rp13.550, saigon (4,0%) jadi Rp12.700, muncul I (8,4%) ke Rp12.575, muncul II (5,5%) ke Rp11.750, muncul III (7,38%) jadi Rp11.275, IR-64-1 (5,5%) ke Rp12.450, IR-64-II (6,3%) menjadi Rp11.800, IR-64-III (14,1%) ke Rp8.900 (beras operasi pasar Bulog).</p> <p>Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Ninuk Rahayuningrum mengemukakan kenaikan harga beras medium saat ini akibat panen di sejumlah wilayah di Indonesia menghasilkan kualitas gabah yang baik, sehingga turut menaikkan harga gabah menjadi lebih dari Rp6.000/kg.</p>



	<p>Kondisi tersebut, ujarnya, menggerakkan pemerintah melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan beras medium dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Jumlah beras yang digelontorkan sekitar 13.000 ton per hari. Kemendag juga tidak membatasi berapa lama operasi pasar ini dilakukan. Upaya ini dilakukan hingga harga beras stabil.</p>
cl	<p><b>DPR: Katanya Produksi Beras Meningkat, Kok Harganya Melambung</b> (<i>Poskotanews.com, 11 Januari 2018</i>). Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mempertanyakan produksi beras Indonesia yang konon ditargetkan pada tahun 2017 lalu mencapai 70-an juta ton per tahun. Hal itu diungkapkannya kepada Parleментарia di ruang kerjanya, Senayan Jakarta, Rabu (10/1).</p> <p>“Katanya kita sudah bisa memproduksi 70 juta ton per tahun. Artinya kalau produksinya meningkat, kita sudah surplus beras dan bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan dunia. Tapi ini kenyataannya stok beras di pasaran berkurang, sehingga harga melambung tinggi hingga mencapai 24 persen, yang pada akhirnya membuat masyarakat menjerit. Sehingga timbul pertanyaan kami, benarkah produksi meningkat seperti yang dikatakan pemerintah,” papar Daniel.</p> <p>“Sehingga bagaimana Bulog mau menjalani semua tugasnya itu. Yang paling mudah menurut saya, jadikan Bulog sebagai badan pangan nasional. Sehingga semua masalah komoditas pangan menjadi tanggung jawab Bulog, tentunya disertai dengan berbagai kewenangan di dalamnya,” ujarnya. Tapi lanjut dia, ini kita (Komisi IV) rapat terus tapi pemerintah tetap ngotot, jadi mentok disana. Sementara Mafia selalu dijadikan kambing hitam.</p>
cm	<p><b>DPR Sebut Penyebab Gejolak Harga Beras Tak Bisa Diantisipasi</b> (<i>Tempo.co, 11 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat DPR dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus mendesak pemerintah cepat mengambil langkah terkait naiknya harga beras di awal tahun 2018. Dia menilai kenaikan harga ini disebabkan oleh data pangan yang bermasalah.</p> <p>"Data pangan ini bermasalah sehingga membuat pemerintah kurang mampu mengantisipasi gejolak harga beras," ujar Ichsan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018. Ichsan menilai kenaikan harga beras per Januari 2018 khususnya beras medium dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya, kebijakan Menteri Pertanian yang mengatur harga beras medium (broken 15 persen) menjadi harga beras premium. "Sehingga menyebabkan kelangkaan beras medium di pasar," katanya. Ichsan juga berpendapat siklus tanam menjadi salah satu yang menyebabkan harga beras melonjak. Menurut dia, pada Desember ke Februari ini merupakan masa tanam bukan masa panen. "Sehingga kalau ada pihak yang mengatakan minggu ketiga bulan Januari 2018 itu masa panen, perlu dipertanyakan akurasi," ucapnya.</p> <p>Di sisi lain, menurut Ichsan pemerintah seharusnya memperbaiki kebijakan yang dapat memicu kenaikan harga dan gejolak stok beras nasional. Selain itu, langkah-langkah seperti operasi pasar harus diikuti opsi lain dalam menekan harga beras.</p>
cn	<p><b>Pemerintah Diminta Atasi Kenaikan Harga Beras</b> (<i>Elshinta.com, 11 Januari 2018</i>). Pemerintah diminta segera melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kenaikan harga beras, salah satu opsi adalah melakukan operasi pasar. Hal itu dikatakan anggota Komisi IV DPR RI, Ichsan Firdaus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (10/1). Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan pada Desember 2017 naik sebesar 2,66 persen menjadi Rp9.526 per kilogram jika dibandingkan dengan November.</p>



	<p>Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (2/1), mengatakan bahwa kenaikan harga beras khususnya kualitas medium pada Desember 2017 tersebut akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat. Kenaikan rata-rata harga beras bukan hanya terjadi pada beras kualitas medium saja. Namun, untuk beras kualitas premium tercatat juga mengalami kenaikan menjadi Rp9.860 per kilogram atau naik 3,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya.</p>
co	<p><b>Pemerintah Diminta Segera Atasi Masalah Kenaikan Harga Beras</b> (<i>Netralnews.com, 11 Januari 2018</i>). Pemerintah diminta segera lakukan langkah tepat mengatasi masalah kenaikan harga beras, salah satu opsi adalah melakukan operasi pasar. "Namun operasi pasar tanpa diiringi dengan langkah lain, maka tidak akan berjalan dengan efektif," kata Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus di Jakarta, Rabu (10/1/2018).</p> <p>Langkah lain tersebut adalah perbaiki data pangan yang selalu bermasalah tiap tahun, sehingga dapat membuat pemerintah kurang mampu antisipasi gejolak harga beras. "Kenaikan harga beras dikhawatirkan akan memicu kenaikan angka inflasi, dan ini menunjukkan bahwa memang benar salah satu penyebab utama naiknya inflasi di Indonesia adalah naiknya harga bahan pangan terutama beras," ujarnya.</p> <p>Politisi Partai Golkar itu menjelaskan kenaikan harga beras per-Januari 2018 khususnya harga beras medium, setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, pertama keraguan akan data naiknya produksi beras tahun sangat mempengaruhi kebijakan 2018.</p>
cp	<p><b>DPR Minta Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Beras</b> (<i>Antaraneews.com, 10 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kenaikan harga beras, salah satu opsi adalah melakukan operasi pasar. "Namun operasi pasar tanpa diiringi dengan langkah lain, maka tidak akan berjalan dengan efektif," kata Ichsan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan langkah lain tersebut adalah perbaiki data pangan yang selalu bermasalah tiap tahun, sehingga dapat membuat pemerintah kurang mampu antisipasi gejolak harga beras.</p> <p>Selain itu menurut dia, perlu dilakukan perbaikan kebijakan pemerintah yang dapat memicu kenaikan harga dan gejolak stok beras nasional. "Kenaikan harga beras dikhawatirkan akan memicu kenaikan angka inflasi, dan ini menunjukkan bahwa memang benar salah satu penyebab utama naiknya inflasi di Indonesia adalah naiknya harga bahan pangan terutama beras," ujarnya. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan pada Desember 2017 naik sebesar 2,66 persen menjadi Rp9.526 per kilogram jika dibandingkan dengan November.</p> <p>Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (2/1), mengatakan bahwa kenaikan harga beras khususnya kualitas medium pada Desember 2017 tersebut akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat. Kenaikan rata-rata harga beras bukan hanya terjadi pada beras kualitas medium saja. Namun, untuk beras kualitas premium tercatat juga mengalami kenaikan menjadi Rp9.860 per kilogram atau naik 3,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya.</p>
cq	<p><b>Harga Beras Diprediksi Stabil Tinggi Hingga Maret</b> (<i>Bisnis.com, 10 Januari 2018</i>). Jakarta - Peningkatan harga beras medium yang mencapai level Rp11.500 merupakan respon pasar atas minimnya ketersediaan bahan pokok tersebut dan hal ini bisa berlanjut hingga Februari bahkan Maret 2018. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa. Menurutnya, angka Rp11.500 yang timbul di pasar belakangan ini merupakan harga keseimbangan pasar yang terbentuk akibat minimnya suplai dan tidak sesuainya data ketersediaan beras yang dimiliki pemerintah dengan kondisi aktual di lapangan. "Itu harga</p>



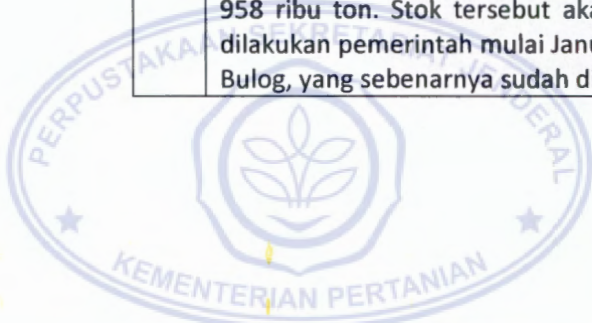
	<p>keseimbangan pasar yang terbentuk. Sekarang sudah di atas Rp11 ribu. Saya kan juga barusan ke daerah daerah, laporan-laporan dari daerah juga sama, kota kota kecil saja sekarang harga beras sudah Rp11 ribu-Rp12 ribu,” Ungkap Dwi ketika dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2018).</p> <p>Kendati bisa dipastikan akan terjadi penurunan harga pada April karena efek Panen Raya, hal ini katanya tidak akan bertahan lama jika pemerintah tidak segera memperbaiki data ketersediaan beras di lapangan. Menurutnya, pemerintah perlu mencari second opinion terkait data ketersediaan pangan di lapangan dan tidak hanya berpatok pada data yang disediakan kementerian atau badan terkait saja guna bisa mengambil keputusan dan langkah antisipasi yang tepat agar ketersediaan dan harga beras bisa terus dikendalikan.</p>
cr	<p><b>Krisis Beras</b> (<i>Republika</i>, 12 Januari 2018). Kenaikan harga beras pada sejumlah daerah sebagai bukti bahwa upaya pemerintah gagal untuk menyediakan pangan murah untuk rakyat. Berkali-kali persoalan ini selalu mencuat ke publik. Pemerintah tidak pernah belajar dari kesalahan. Wajar rencana kedaulatan pangan hanya mantap dalam level perencanaan, tapi tidak diimplementasikan.</p> <p>Mengatasi masalah produksi beras dan tata niaga beras persoalan ini perlu beberapa strategi. Pertama, memonitor, mencatat, dan membandingkan perubahan iklim. Informasi ini harus sampai ke petani. Biasanya para petani ketinggalan informasi. Perubahan iklim perlu dibandingkan setiap tahun. Perubahan dan perbandingan itu dijadikan acuan untuk mengatur jadwal tanam. Semua bisa dilakukan oleh penyuluh pertanian di lapangan dengan mendapatkan informasi iklim.</p>
cs	<p><b>Tragedi Kenaikan Harga Beras</b> (<i>Koran Jakarta</i>, 12 Januari 2018). Sejak awal 2018, harga beras di beberapa daerah naik melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni di atas 9.450 rupiah per kilogram untuk jenis medium dan di atas 12.800 rupiah per kilogram beras premium. Diperkirakan, harga akan terus naik hingga Februari. Guna menekan harga, pemerintah mengadakan operasi pasar. Tak seperti sebelumnya, kali ini operasi diperluas hingga 1.830 titik. Bahkan, Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk operasi pasar hingga harga kembali ke HET. Operasi sampai Mei 2018.</p> <p>Kenaikan harga sesungguhnya tidak akan terjadi bila pembantu-pembantu Presiden menyadari, sistem produksi dan distribusi beras tak bisa ditangani secara parsial. Artinya, sebuah kebijakan seperti HET memiliki beberapa skenario untuk menghadapi tekanan produksi maupun distribusi.</p> <p>Pemerintah memang harus bertindak dan segera mengatasi kenaikan. Pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan panic buying seperti operasi pasar besar-besaran maupun impor. Apabila pemerintah menambah pasokan beras dengan impor bisa berakibat buruk pada para petani. Sebab untuk impor diperlukan waktu dua bulan. Rinciannya untuk administrasi, port to port yang bisa makan waktu sebulan, sampai distribusi ke pasar. Sedangkan dua bulan ke depan sudah mulai memasuki panen raya padi.</p>
ct	<p><b>Operasi Pasar Belum Bisa Tekan Harga Beras Turun</b> (<i>Harian Kontan</i>, 12 Januari 2018). Jakarta - Upaya pemerintah menurunkan harga beras lewat operasi pasar dinilai tidak akan cepat menurunkan harga beras di pasaran. Hal itu terjadi karena pasokan beras sudah menurun drastis sejak akhir tahun 2017 lalu. Sejumlah pedagang pasar yang dihubungi KONTAN mengaku harga beras saat ini sudah terlanjur tinggi karena beras medium hilang dari peredaran. Kendati begitu, mereka tetap berharap kenaikan harga beras tidak berlangsung lama.</p>



	<p>Pemilik toko beras UD Kerkep di Jakarta, Andi Wyaya, mengatakan, saat ini harga beras medium sudah jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). "Kami berharap satu hingga dua hari ke depan harga bisa turun berkat adanya operasi pasar," ujar Rabu (10/1). Andi bilang operasi pasar dapat berpengaruh apabila jumlah yang digelontorkan mencukupi. Sebab kurangnya pasokan menyebabkan harga tinggi.</p> <p>Agar operasi pasar berjalan efektif, Bulog juga mengajak pelaku usaha beras menjadi penyalur. Hal itu dikatakan salah satu pemilik penggilingan gabah di Jawa Timur, Sumanto. Dia mengakui menjadi penyalur beras di daerah Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo dalam rangka stabilisasi harga beras. "Kita sudah lakukan operasi pasar di 20 titik," katanya.</p>
cu	<p><b>Pedagang Beras: Mentan Ngomong Surplus di Kantor dan di Tempat Panen</b> (<i>Okezone.com, 11 Januari 2018</i>). Jakarta - Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPI) menilai kenaikan harga beras kelas medium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.450 per kilogram (kg) karena pasokan atau stok beras berkurang di pasar. Saat ini harga beras medium berkisar Rp10.700-Rp11.000 per kg.</p> <p>Sekretaris Jenderal APPI Ngadiran mengatakan, pemerintah utamanya Kementerian Pertanian (Kementan) harus segera membuktikan mana yang namanya surplus beras selama ini. "Mentan surplus itu kan ngomongnya di kantor, sama ngomong nanti di tempat panen. Tapi barangnya ada enggak?" ujarnya kepada Okezone. Ngadiran menjelaskan, saat ini harga beras kelas medium per kilogram sekira Rp10.700 - Rp11.000. Untuk harga beras di operasi pasar (OP) sebesar Rp9.300 atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.450 per kg.</p> <p>Berdasarkan data produksi dan konsumsi beras Kementerian Pertanian untuk Januari-April 2018, di Januari produksi beras mencapai 329.320 ton, meningkat di Februari sebesar 2,931 juta ton, kembali naik di Maret 4,97 juta ton dan April sebesar 3,01 juta ton. Amran enggan mengomentari soal rencana impor di tengah kenaikan harga. Yang jelas, produksi beras saat ini ada dan apapun kebijakan pemerintah pasti terbaik untuk rakyat.</p>
cv	<p><b>Tragedi Kenaikan Harga Beras</b> (<i>Koran Jakarta, 12 Januari 2018</i>). Sejak awal 2018, harga beras di beberapa daerah naik melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni di atas 9.450 rupiah per kilogram untuk jenis medium dan di atas 12.800 rupiah per kilogram beras premium. Diperkirakan, harga akan terus naik hingga Februari. Guna menekan harga, pemerintah mengadakan operasi pasar. Tak seperti sebelumnya, kali ini operasi diperluas hingga 1.830 titik. Bahkan, Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk operasi pasar hingga harga kembali ke HET. Operasi sampai Mei 2018.</p> <p>Kenaikan harga sesungguhnya tidak akan terjadi bila pembantu-pembantu Presiden menyadari, sistem produksi dan distribusi beras tak bisa ditangani secara parsial. Artinya, sebuah kebijakan seperti HET memiliki beberapa skenario untuk menghadapi tekanan produksi maupun distribusi.</p> <p>Kegagalan HET tidak bisa dianggap sepele. Mesti ada evaluasi komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk sanksi kepada pihak yang menerapkan kebijakan HET. Tanpa sanksi, HET bagaikan "ayam tanpa kepala. Pemerintah juga mesti menyadari, data beras ternyata tidak sinkron dengan kenyataan. Bahkan, ada menteri memastikan stok beras cukup beberapa bulan, namun faktanya harga beras naik. Jika demikian adanya, kemana stok beras itu? Tragedi kenaikan harga beras awal tahun 2018 boleh jadi sebagai sejarah terburuk pengadaan bahan pokok nasional.</p>



cw	<p><b>DPR Desak Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Beras</b> (<i>Harian Ekonomi Neraca, 12 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus mendesak pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kenaikan harga beras, salah satu opsi adalah melakukan operasi pasar. "Namun operasi pasar tanpa diiringi dengan langkah lain, maka tidak akan berjalan dengan efektif," kata Ichsan disalin dari Antara, kemarin. Dia menjelaskan langkah lain tersebut adalah memperbaiki data pangan yang selalu bermasalah tiap tahun, sehingga dapat membuat pemerintah kurang mampu mengantisipasi gejolak harga beras.</p> <p>Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (2/1), mengatakan bahwa kenaikan harga beras khususnya kualitas medium pada Desember 2017 tersebut akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat. Kenaikan rata-rata harga beras bukan hanya terjadi pada beras kualitas medium saja. Namun, untuk beras kualitas premium tercatat juga mengalami kenaikan menjadi Rp9.860 per kilogram atau naik 3,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya.</p> <p>Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Jenny Karouw mengatakan pihaknya selain menyediakan tim khusus pemantauan harga, juga dengan Satgas Pangan melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan. Kementerian Perdagangan membentuk Tim Pengawasan Operasi Pasar (OP) Beras Tahun 2018 untuk memantau ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras medium yang akan mengawal pelaksanaan operasi pasar hingga Maret 2018.</p>
cx	<p><b>Fahri Minta Pemerintah Akui Salah Kebijakan</b> (<i>Warta Kota, 14 Januari 2018</i>). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kenaikan harga beras pada awal Januari tahun 2018. Telah menjadi awal buruk bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan memasuki tahun politik. Harga beras medium mengalami fluktuasi Rp. 9.450-Rp 11.000 per liter selama beberapa hari terakhir. Sementara beras premium juga merangkak naik mulai dari Rp 12.800-13.000 per liter.</p> <p>Dalam beberapa hari ini, lanjut Fahri, masyarakat kembali disuguhkan tidak kompaknya para pembantu Presiden Jokowi. Terutama Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengklaim pasokan aman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang khawatir dengan kenaikan harga akibat pasokan berkurang.</p> <p>Fahri juga meragukan apakah dengan impor harga beras akan turun seketika, Ia menilai, momentum kenaikan harga beras ini harusnya jadi momentum bagi pemerintah untuk menata kembali kebijakan yang harus diakui keliru. "Pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui bahwa kenaikan harga beras awal Januari tahun 2018 ini bukan semata karena faktor supply and demand atau faktor cuaca, tapi malpraktik kebijakan," kata dia.</p>
cy	<p><b>Telusuri Kecurangan Distribusi Beras</b> (<i>Jawa Pos, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyatakan bahwa pihaknya terus mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempelajari adanya kemungkinan kecurangan. Hingga kini belum ada kesimpulan terkait dengan adanya praktik monopoli maupun kartel. "Pengawasan terus kita lakukan. Kalau ada pelanggaran akan ditindaklanjuti," kata Syarkawi kepada Jawa Pos kemarin. Syarkawi juga menyebut buruknya sistem distribusi beras. "Terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi," ujar Syarkawi. Dia menilai hal tersebut semakin diperburuk dengan rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian.</p> <p>Berdasar data terbaru yang dipublikasikan Bulog, saat ini Bulog menyimpan stok beras sekitar 958 ribu ton. Stok tersebut akan digunakan untuk memenuhi perluasan operasi pasar yang dilakukan pemerintah mulai Januari hingga Maret. Operasi pasar yang dilakukan Kemendag dan Bulog, yang sebenarnya sudah dimulai November dan Desember 2017, belum berhasil memukul</p>



	<p>mundur harga beras di pasar. Harga beras, khususnya beras medium, justru terus merangkak meninggalkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 9.450 per kilogram.</p>
cz	<p><b>Kebijakan Instan dan Instabilitas Harga Pangan</b> (<i>Sindonews.com, 15 Januari 2018</i>). Di awal tahun 2018, Indonesia sebagai negara yang memiliki ambisi besar mewujudkan ketahanan pangan, bahkan bermimpi untuk mencapai kedaulatan pangan, mulai terganggu dengan gejala harga beberapa bahan pokok, terutama beras. Harga beras medium di pasaran mencapai titik tertinggi pada awal 2018, yakni Rp10.500 hingga Rp11.500.</p> <p>Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, seharusnya sadar betul bahwa kebijakan regulasi harga, seperti HET, terkesan sebagai sebuah kebijakan instan atau jalan pintas (shortcut) yang cenderung salah fokus karena mengabaikan kepentingan beberapa pihak di sektor pertanian dan tidak memedulikan permasalahan di sektor hulu yang justru perlu menjadi prioritas utama pemerintah.</p> <p>Regulasi harga sangat ideal diberlakukan apabila kebijakan pangan di sektor hulu telah berjalan dengan semestinya. Dengan kata lain, pemerintah dipersilakan untuk menerapkan kebijakan regulasi harga, seperti HET, apabila pemerintah sudah mampu membenahi kebijakan pangan di sektor hulu yang erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi.</p> <p>Pada kesimpulannya, kebijakan regulasi harga, termasuk HET, perlu dievaluasi kembali atau sebaiknya dibatalkan secara hukum karena terbukti gagal mewujudkan kestabilan harga pangan di Indonesia. Sebagai pembelajaran, pemerintah tidak boleh terburu-buru dalam menerapkan sebuah kebijakan, apalagi yang berkaitan dengan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.</p>
da	<p><b>KPPU: Rendahnya Kredibilitas Data Jadi Sebab Harga Beras Tinggi</b> (<i>Liputan6.com, 15 Januari 2018</i>). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai tingginya harga beras karena pasokan yang tidak stabil. Ketidakstabilan pasokan ini disebabkan beberapa hal, salah satunya permasalahan data. Adapun data produksi beras saat ini dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). "Rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh BPS dan Kementan," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, di Jakarta, Senin (15/1/2018).</p> <p>Dampak dari data yang tak akurat ini kemudian merembet karena Kemendag harus impor. Dibukanya keran impor beras ini akan merugikan petani lokal. Sebab beras yang diimpor tersebut diperkirakan baru akan masuk berbarengan dengan masa panen petani pada Maret 2018. "Keputusan impor sekarang ini akan menghancurkan harga gabah di level usaha tani, di saat panen raya pada Maret. Dan keputusan impor ini tidak akan berpengaruh besar terhadap harga, kecuali hanya secara psikologis," ujar dia.</p> <p>Meski Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan beras impor tersebut akan masuk pada akhir Januari, namun Andreas tidak yakin beras tersebut akan masuk sesuai jadwal. Pasalnya, waktu pengiriman dari negara asal beras ke Indonesia setidaknya membutuhkan waktu 1,5 bulan.</p>
db	<p><b>Harga Beras Tak Terkendali, Bukti Regulasi Tata Kelola Buruk</b> (<i>Jpnn.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk meninjau ulang regulasi harga beras yang hingga saat ini masih buruk. Kebijakan-kebijakan berkaitan</p>



	<p>dengan tata niaga beras dimulai dari proses produksi, manajemen stok, pendataan, penentuan harga hingga kebijakan ekspor-impor tidak sinergi sehingga terjadi anomali di beberapa situasi.</p> <p>“Rekomendasi PKS kepada pemerintah ini agar dapat didalami dan menjadi pertimbangan serta masukan sehingga pengelolaan tata niaga pangan kita semakin hari semakin baik. Dengan adanya perbaikan signifikan tata kelola beras di tengah masyarakat yang bisa langsung dirasakan, maka dapat sekaligus menepis dugaan adanya permainan mafia impor beras. Namun bila pemerintah masih terus-menerus melakukan impor dengan berbagai cara meski ada institusi pemerintah yang menyatakan beras surplus, ini jelas menunjukkan pemerintah sedang mengambil keuntungan dari rakyat.”</p>
dc	<p><b>Spekulan Mainkan Pasokan Beras</b> (<i>Medanbisnisdaily.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk kembali membuka keran impor untuk beras khusus sebanyak 500.000 ton. Keputusan itu diambil guna mengatasi kelangkaan yang terjadi dan kenaikan harga. Menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, kelangkaan beras yang terjadi saat ini lantaran rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian.</p> <p>Ombudsman Heran Ombudsman Republik Indonesia mencurigai keputusan impor beras menunjukkan gejala maladministrasi. Pertama, pemerintah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang akan melakukan impor beras tersebut bukan Perum Bulog. "Pengimpor saya cek yang teregister itu seharusnya Perum Bulog, kalau lebih bisa disimpan sebagai cadangan nasional. Lagipula apakah PPI memiliki pengalaman melakukan operasi beras," kata Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih.</p> <p>Dia juga mempertanyakan sikap Kementerian Perdagangan yang terkesan terburu-buru melakukan membuka keran impor. Padahal dengan melakukan pendataan yang akurat kondisi ketersediaan stok saat ini mungkin saja cukup jika dilakukan pemerataan. "Permendag No 1 Tahun 2018 yang dibuat begitu cepat dan belum tersosialisasikan juga berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung unsur konflik kepentingan," tambahnya.</p>
dd	<p><b>Ombudsman Minta Kementan Stop Klaim Pasokan Beras Surplus</b> (<i>Suara.com, 15 Januari 2018</i>). Ombudsman Republik Indonesia menemukan bahwa pasokan beras nasional pas-pasan dan tidak merata. Oleh sebab itu, Ombudsman Kementerian Pertanian tidak terus menerus membuat pernyataan bahwa pasokan beras tengah surplus. "Kami menyarankan pemerintah hentikan kegiatan membuat opini soal beras surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan," kata Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/1/2018). Alamsyah menegaskan selama ini ada penyampaian informasi stok beras yang tidak akurat kepada publik. Kementerian Pertanian selalu menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok cukup, hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil.</p> <p>Disisi lain, ada sembilan Provinsi yang pasokan berasnya lancar namun harga sudah merangkak naik. Antara lain Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sementara di delapan provinsi, pasokan beras lancar dan harganya juga relatif stabil, yakni Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.</p>



de	<p><b>Headline: Harga Beras Meroket, Salah Siapa?</b> (<i>Liputan6.com, 16 Januari 2018</i>). Harga beras terus meroket di pasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampai dengan minggu ke-2 Januari ini, kenaikan harga beras di pasar mencapai 3 persen. BPS menganggap melambungannya harga beras ini sudah dalam kategori mengkhawatirkan atau mencemaskan karena akan mempengaruhi angka inflasi yang berujung ke daya beli masyarakat.</p> <p>Kepala BPS, Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk, mengatakan pemerintah harus mengendalikan inflasi pada 2018 yang ditargetkan 3,5 persen. Target tersebut dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.</p> <p>Gejala kenaikan harga beras sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun, tanpa adanya temuan penimbunan dalam jumlah yang besar. Hal ini mengindikasikan kemungkinan proses mark up data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini. Alamsyah menambahkan, akibat pernyataan surplus yang tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, membuat pengambilan keputusan terkait perberasan berpotensi keliru.</p>
df	<p><b>Duh, Harga Pangan Liar Tak Terkendali</b> (<i>Kontan, 19 Januari 2018</i>). Memasuki pekan kedua Januari 2018, harga bahan pangan masih liar tak terkendali. Mulai dari harga beras medium, daging ayam, telur, bawang putih hingga cabai rawit hingga cabai rawit merah. Penyebab utama linjakan harga pangan adalah pasokan stok yang berkurang drastic di pasar. Berdasarkan reportase Kontan, di Pasar Palmerah, Jakarta Baratharga beras Medium masih bertengger di harga Rp 12.000 –Rp12.500 per kg. Harga itu jauh di atas HET.</p> <p><b>Stol Menipis</b> Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, secara umum pasokan dan stok bahan pangan memang turun. Mulai dari beras, cabai, ayam, telur, maupun bawang putih. Inilah penyebab utama kenaikan harga pangan. Tren penurunan pasokan bahan pangan sudah tampak sejak periode Oktober-Desember 2017. Sayang, pemerintah terlambat mengantisipasinya. "Akibatnya, harga pangan naik," tandasnya</p> <p>Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid menambahkan, campur tangan dan intervensi pemerintah yang terlalu dalam di pasar justru menjadi biang gejalak harga pangan. Dia mencontohkan, beras medium langka dan harganya naik justru setelah Kemdag menetapkan HET pada September 2017. "Seharusnya harga beras tak perlu dipatok karena faktanya harga beras sudah di atas HET," ujarnya.</p>
dg	<p><b>Produksi Dalam Negeri Pas-pasan</b> (<i>Bisnis Indonesia, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Produksi dan stok beras dalam negeri disinyalir pas-pasan dan tidak merata sehingga membuat harga di sejumlah wilayah yang memang memiliki persediaan cukup bahkan surplus ikut terkerek.</p> <p>Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih dalam talkshow bertema "Mudah Mainkan Data Pangan" yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) menyebutkan kenaikan harga di sejumlah titik surplus ini terjadi karena adanya penyerapan oleh daerah-daerah yang mengalami kekurangan stok beras.</p> <p>Terpisah, Direktur Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Djarot Kusumayakti memperkirakan kapal pertama eksportir beras akan tiba dalam waktu 10 hingga 15 hari setelah proses letter of credit (LC) kepada eksportir diterbitkan. Hal ini berdasarkan pengalaman saat impor yang dilakukan Bulog pada 2015</p>

	<p>Pada Rabu (17/1) malam, Bulog telah menutup proses pendaftaran bagi pengeksport beras jenis umum dari sejumlah negara. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi bagi calon eksportir satu hari setelahnya. Pihaknya menargetkan pada Jumat (19/1) akan langsung dilakukan prosesi lelang atau negosiasi harga.</p>
dh	<p><b>Perlu Upaya Luar Biasa untuk Beras</b> (<i>Kompas, 19 Januari 2018</i>). Jakarta - Kondisi perberasan dinilai memasuki masa kritis yang ditandai dengan lonjakan harga di sejumlah daerah. Pemerintah perlu mengambil langkah luar biasa untuk mengendalikannya. Cara yang bisa ditempuh, antara lain, adalah melalui impor di luar mekanisme normal untuk mempercepat realisasi sekaligus mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan di zona-zona merah.</p> <p>Menurut Andreas, berdasarkan laporan petani anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TD, harga beras di Indramayu, Jawa Barat, telah mencapai Rp 17.000 per kilogram, sedangkan di Ngawi, Jawa Timur, sebesar Rp 16.000 per kg. "Petani anggota AB2TI menjual dengan harga itu dan tetap laris manis. Jika benar demikian, situasinya sudah gawat karena lonjakannya belum pernah setinggi ini," ujarnya.</p> <p><b>Prioritas</b> Alamsyah menambahkan, pemerintah perlu menempuh cara luar biasa untuk mempercepat realisasi kedatangan beras impor. Sebab, diperlukan setidaknya satu bulan dengan cara biasa Lewat mekanisme antarpemerintah, yakni dengan memanfaatkan kewenangan Perum Bulog sebagai lembaga resmi dari negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), impor bisa diupayakan lebih cepat.</p> <p>Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti memaparkan, beras impor hanya akan didistribusikan ke daerah-daerah yang bukan sentra penghasil beras. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menolak beras impor didistribusikan dan diperdagangkan di Jatim. Sebab, stok beras saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Selain itu, sebagian petani mulai panen, yang akan mencapai puncaknya pada bulan Maret dengan total surplus produksi 2,1 juta ton.</p>
di	<p><b>Pemerintah Didesak Revisi Kebijakan Sektor Pangan</b> (<i>Neraca.co.id, 4 Januari 2018</i>). Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mendesak pemerintah untuk merevisi berbagai kebijakan yang tidak tepat yang berdampak kepada bidang pangan agar permasalahan ketersediaan serta harga pangan yang terjangkau bisa terwujud di Tanah Air. "Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia seharusnya melihat isu pertanian dan pangan bukan hanya dari sisi produsen, melainkan juga dari sisi konsumen," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Rabu (3/1).</p> <p>Amran menjelaskan dalam evaluasi kinerja 2017, Indonesia berhasil mengurangi, bahkan menghentikan impor bawang merah, yakni dari 2014 sebanyak 72 ribu ton, 2015 sebanyak 12 ribu ton, 2016 berhenti impor dan ekspor ke enam negara, salah satunya Thailand pada 2017. Selain itu, ia meminta Bulog untuk menyerap gabah sebanyak-banyaknya pada Februari, Maret dan April mengingat pada akhir Januari, petani sudah memasuki panen puncak.</p> <p>Pada Desember 2017 lalu, seperti dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan naik sebesar 2,66 persen menjadi Rp9.526 per kilogram jika dibandingkan dengan November. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa kenaikan harga beras khususnya kualitas medium pada Desember 2017 tersebut akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat. Pada bulan tersebut, masih memasuki musim tanam sehingga pasokan menurun.</p>



3	Impor Beras/Pangan
a	<p><b>Harga Beras Sulit Dikendalikan</b> (<i>Pos Kota, 21 Januari 2018</i>). Jakarta - Melambungny harga beras dalam beberapa bulan terakhir ini sebagai imbas dari berkurangnya stok nasional. Ini terjadi antara lain akibat ketidakjujuran kementean pertanian dalam menyampaikan data pangan. "Selama ini Menteri Pertanian selalu mengklaim surplus pangan utamanya beras. Padahal nyatanya beras kurang, sehingga harga melambung diatas harga eceran tertinggi," kata Ichsan Firdaus, Anggota Komisi IV DPR RI di sela Forum Diskusi Publik BBA 29 Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) bertema "Mudah Mainkan Data Pangan", kemarin.</p> <p>Penurunan produksi beras sepanjang 2017 diakui Dwi memang nyata terjadi. Berdasarkan kajian AB2TI Juni-Agustus 2017, terjadi serangan wereng coklat yang meluas, sehingga produksi beras tahun 2017 lebih rendah dibanding 2016. Hasil kajian juga melihat adanya kenaikan harga beras di pasaran sejak pertengahan 2017 yang menandakan ada masalah di produksi dan stok. Dia memastikan harga beras akan terus meningkat hingga Februari 2018 jika pemerintah tidak segera menambah stok,</p>
b	<p><b>Hantu-Hantu Perberasan</b> (<i>Investor Daily, 24 Januari 2018</i>). Impor beras bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sejak zaman penjajahan, impor rutin dilakukan. Sebagai bagian dari aktivitas ekonomi, impor adalah hal lumrah. Namun, sejak Orde Baru impor beras menjadi tidak sederhana. Itu terjadi karena beras tidak lagi komoditas ekonomi, tapi juga politik. Apa pun bisa dikemas menjadi isu terkait beras, baik isu positif maupun negatif. Ini pula yang menimpa rencana impor beras 500 ribu ton.</p> <p>Ada surplus 16,11 juta ton beras. Saat produksi tinggi, bahkan surplus, mengapa impor? Jika surplus itu benar tentu pasar bakal "banjir" beras. Jumlah 16,11 juta ton beras itu setara dengan setengah kebutuhan konsumsi beras nasional setahun. Banjir beras juga bakal membuat harga tertekan ke bawah. Yang terjadi justru sebaliknya: harga beras terus naik sejak September 2017 sampai saat ini. Jika kenaikan harga terjadi dalam 2-3 hari, amat mungkin ada ulah spekulan mengambil untung di air keruh. Tapi jika kenaikan terjadi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ini pertanda pasokan beras ada masalah.</p>
c	<p><b>Ironi</b> (<i>Rakyat Merdeka, 24 Januari 2018</i>). Aada pejabat negara yang "pamer" mobil mewah dan jet pribadi, sementara di Papua puluhan anak meninggal karena gizi buruk dan penyakit campak. Kenyataan ini sangat menyakitkan, tapi begitulah ironi negeri int. Sama seperti misalnya kenyataan pahit bahwa sebagai negara maritim dengan laut terpanjang ketiga di dunia, kita ternyata masih mengimpor garam. Bahkan, walau jumlahnya kecil, ternyata kita juga mengimpor ikan asin!</p> <p>Ironi lainnya, sebagai negara agraris, kita juga masih mengimpor beras. Akhir bulan ini, beras impor sebanyak 500.000 ton diperkirakan akan masuk Indonesia. Kenyataan pahit impor mengimpor ini sama saja misalnya kalau kita membayangkan negara-negara Arab mengimpor pasir atau minyak dari negara lain. Ironis. Yang membuat kita terheran-heran,. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, impor garam sebanyak 3,7 juta ton tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementeriannya. Pihaknya, kata Susi, hanya mengeluarkan rekomendasi impor garam sebanyak 2,17 juta ton. Kok bisa beda?</p>
d	<p><b>Aliansi Petani: Impor Beras Permainan Pedagang Besar</b> (<i>Republika.co.id, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Aliansi Petani Indonesia (API) menilai impor beras ini terjadi karena adanya permainan harga antar pedagang beras dan masalah distribusi yang tidak merata. Padahal, stok beras seharusnya cukup hingga masa panen raya dimulai.</p>



	<p>Sekjen Aliansi Petani Indonesia, M Nuruddin menilai data yang tidak jelas dari Kementerian Pertanian menyebabkan distribusi beras yang tidak merata. "Gejolak harga itu bukan karena faktor produksi petani nanam padi lalu kekurangan. Ini soal spekulatif permainan harga antar pedagang besar, sehingga konsumen terutama di perkotaan yang kelas menengah ke bawah keberatan dengan harga Rp 12 ribu per kilogram," ujar Nuruddin kepada <i>Republika.co.id</i>, Senin (15/1).</p> <p>Di sisi lain, tidak semua sentra beras mengalami kekurangan beras sehingga memerlukan stok beras dari impor. Apalagi saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog yang masih ada sekitar 1 juta ton dinilai cukup hingga masa panen raya Februari ini.</p>
e	<p><b>JK Sebut Beras Impor tak akan Pengaruhi Harga Tingkat Petani</b> (<i>Republika.co.id</i>, 15 Januari 2018). Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, impor beras tidak akan mengganggu harga beras di petani. Menurutnya, impor tersebut untuk menambah dan memperkuat cadangan beras nasional di Bulog yang saat ini sekitar 930 ribu ton. Adapun, stok beras nasional di Bulog harus berada di atas 1 juta ton.</p> <p>Jusuf Kalla menjelaskan, apabila harga beras di pasar naik maka petani juga akan ikut terkena dampak. Sebab, terdapat perbedaan antara petani pada zaman sekarang dengan petani pada zaman dahulu. Menurutnya, petani zaman dahulu petani memiliki lumbung beras yang digunakan untuk menyimpan hasil panen. Sehingga untuk konsumsi sehari-hari, petani hanya mengambil dari hasil panen saja.</p> <p>Dengan jumlah penduduk sekitar 220-260 juta jiwa, maka Indonesia membutuhkan sekitar 28 juta ton beras per tahun. Sementara, produksi beras paling tinggi yakni 30 juta ton per tahun sehingga menurut Jusuf Kalla, Indonesia tidak pernah ekspor beras. "Tidak ada pernah ekspor beras, jadi produksi kita paling tinggi 30 juta ton beras, begitu sedikit ada yang jelek (kualitasnya) bisa jadi masalah," kata Jusuf Kalla.</p>
f	<p><b>Fadli Zon Kritik Kebijakan Impor Beras</b> (<i>Antaraneews.com</i>, 15 Januari 2018). Jakarta - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah mengizinkan impor beras 500 ribu ton pada akhir Januari 2018, menyebutnya sebagai bukti kacaunya tata kelola pangan pemerintah.</p> <p>Fadli mengatakan kalau harga beras naik sementara pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka yang seharusnya pemerintah melakukan operasi pasar, dan bukannya impor. Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani, katanya.</p>
g	<p><b>Ombudsman Ingatkan Maladministrasi karena Beras</b> (<i>Inilah.com</i>, 15 Januari 2018). Jakarta - Ombudsman RI menyarankan pemerintah untuk fokus meratakan stok beras. Agar tidak terjadi maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras, serta mencegah ketidakpercayaan publik. "Pemerintah harus bisa mengkoordinir kepala daerah untuk tidak menahan stok," kata anggota Ombudsman Alamsyah Saragih saat jumpa pers di Jakarta, Senin (15/1/2018). Ombudsman meminta, pemerintah untuk tidak membangun opini stok beras surplus agar tidak membuat optimisme semu dan memicu ketidakpercayaan masyarakat. Ombudsman meminta pemerintah memberikan dukungan yang maksimal kepada Badan Pusat Statistik agar dapat menyediakan data produksi dan stok yang akurat.</p> <p>Pemerintah juga diharapkan agar mengefektifkan kembali fungsi koordinasi oleh Kemenko Perekonomian sehingga perbedaan antar instansi tidak perlu menjadi perdebatan publik.</p>



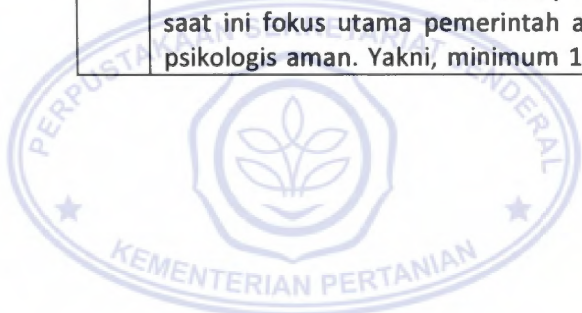
	<p>Ombudsman RI menemukan gejala maladmininstrasi terhadap pengelolaan data stok dan rencana impor beras 500.000 ton oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan berencana mengimpor beras khusus dari Vietnam dan Thailand untuk menekan harga beras medium yang meningkat di pasar.</p>
h	<p><b>Surplus Produksi, Rencana Impor Beras Dipertanyakan</b> (<i>Daulat.co, 15 Januari 2018</i>). Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah memberikan klarifikasi terkait rencana Pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton hingga menimbulkan pro kontra dari sejumlah pihak. "Mohon kiranya dari pemerintah bisa memberikan suatu klarifikasi dengan memberikan data yang sangat transparan kepada publik. Kita akan rapat dengan Bulog dan Kementerian Pertanian, dan mungkin kita akan minta rapat gabungan antara Komisi IV dan Komisi VI, untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah," kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (15/1).</p> <p>Dalam pandangannya, ada beberapa kejanggalan dalam rencana impor beras ini. Pertama, impor beras itu dilakukan apabila produksi pangan nasional tidak memenuhi kebutuhan nasional. Statement Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menunjukkan bahwa pasokan pangan di Indonesia dalam kategori aman. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, perlu ada klarifikasi dari pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Sebab masalah ini menyangkut hajat hidup banyak orang," demikian Firman Soebagyo.</p>
i	<p><b>Impor Beras Sangat Melukai Petani</b> (<i>Rmol.co, 15 Januari 2018</i>). Kebijakan Pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam dikritisi banyak pihak. Anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid Sa'adi menilai keputusan Kementerian Perdagangan melakukan impor sebagai bentuk kepanikan menghadapi lonjakan harga beras di dalam negeri. "Kebijakan impor beras merupakan bentuk kepanikan pemerintah dalam menghadapi gejolak kenaikan harga.</p> <p>Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah tidak memiliki blueprint perberasan nasional dan juga menunjukkan lemahnya database yang terkait dengan ketersediaan stok beras nasional," kata Zainut dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (15/1). "Sehingga tidak ada gurita besar yang bernama kartel yang sengaja ingin mengambil keuntungan di tengah kelemahan data birokrasi kita," tutup politisi PPP itu</p>
j	<p><b>KPPU: Kebijakan Impor Beras Harus Didukung Data Valid</b> (<i>Suaramerdeka.com, 15 Januari 2018</i>). Surabaya - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya, Dendy R Sutrisno mengingatkan pemerintah akan akurasi data menyusul rencana impor beras yang akan di lakukan. Ia meminta pemerintah bersikap cermat dan berhati-hati. "Kebijakan ini harus didukung data valid, pasokannya valid, atau kebutuhannya valid. Jadi harus sangat berhati-hati, harus diperhatikan validitas di lapangan," ungkap Dendy seperti dilansir RRI, Senin (15/1).</p> <p>Terkait kelangkaan dan kenaikan harga beras, KPPU Surabaya akan melakukan sidak. KPPU juga akan menyelenggarakan Forum Grup Discussion (FGD) dengan pemangku kebijakan untuk mencari akar permasalahan kenaikan harga beras di pasaran. "KPPU fokusnya menjaga pangan itu tidak dipermainkan untuk mengeruk keuntungan sepihak. Kalau kenaikan harga ada penahanan pasokan, penetapan harga, ini domain KPPU. Kita berencana akan sidak, hari ini di Jakarta juga ada FGD untuk mencermati harga," terangnya.</p> <p>Menurutnya, saat ini KPPU tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membuat formulasi langkah tepat terkait naiknya harga beras. Selain itu KPPU juga telah bersinergi dengan lintas</p>



	<p>sektor untuk mencari akar permasalahan, mengingat beberapa daerah justru saat ini tengah mempersiapkan panen raya beras bahkan surplus.</p>
k	<p><b>Saran Ombudsman Saat Temukan Gejala Maladministrasi Impor Beras</b> (<i>Tempo.co</i>, 15 Januari 2018). Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menemukan gejala maladministrasi dalam keputusan pemerintah melakukan impor beras khusus di awal 2018. Lembaga ini menyarankan beberapa langkah untuk mencegah gejala tersebut jadi.</p> <p>Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragi, menyarankan pemerintah melakukan pemerataan stok. Berdasarkan data keluhan pedagang beras di pasar 31 provinsi pada 10-12 Januari, stok beras tidak merata. Pasokan sejumlah wilayah terancam menurun karena diserap daerah lain di sekitarnya. "Tingkatkan koordinasi dengan kepala daerah untuk mengatasi penahanan stok lokal secara berlebihan," kata Alamsyah, di kantornya, Senin, 15 Januari 2018.</p> <p>Ombudsman meyakini para petinggi di kementerian terkait mampu duduk bersama dan mencari solusi dari kontroversi impor beras ini. "Jangan ada egois. Jangan yang satu berpikir programnya gagal jika impor dan yang satunya berpikir programnya gagal jika harga melambung," tutur Alamsyah. Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyarankan impor beras segera dilakukan sebelum masa panen tiba. "Supaya tidak memukul harga petani," ucapnya, saat dihubungi, Senin, 15 Januari 2018. Bhima menuturkan, jika nanti beras impor telanjur datang sampai panen raya tiba, sebaiknya stoknya ditahan terlebih dulu. Stok tersebut bisa digunakan untuk keperluan stabilisasi harga menjelang Lebaran.</p>
l	<p><b>Ribut Soal Impor Beras</b> (<i>Kompas</i>, 16 Januari 2018). Awal tahun ini, pemerintah terpaksa mengimpor beras. Jumlahnya sekitar 500.000 ton. Beras ini diharapkan mastik pada akhir Januari ini. Setiap kali pemerintah mengimpor beras, selalu terjadi keributan. Mengapa? Ada dua penyebab, pemerintah tidak memberi sinyal yang jelas tentang perberasan dan sejarah impor beras yang jarang bersih.</p> <p>Hingga Desember tahun lalu, pejabat Kementerian Pertanian masih percaya diri bahwa Indonesia tak perlu impor beras alias swasembada. Pernyataan ini membingungkan beberapa kalangan karena tanda-tanda kenaikan harga beras sudah muncul. Waktu penanaman padi yang mundur dan perubahan cuaca menjadi tanda awal. Kemudian, harga beras medium 1 berdasarkan pemantauan di Pasar Induk Beras Cipinang naik dari Rp 11.250 menjadi Rp 11.500 per kg. Kenaikan harga muncul karena pasokan di pasar berkurang. Otomatis mereka yang paham soal beras tak yakin dengan swasembada yang sering didengungkan.</p> <p>Di masa mendatang, cara efektif mengendalikan harga adalah pembenahan stok beras. Di lapangan, perusahaan beras swasta lebih memiliki daya tawar dibandingkan Perum Bulog sehingga mereka memiliki stok beras memadai. Keadaan ini sangat mungkin mudah mengguncang pasar karena swasta bisa menguasai hingga di atas 400.000 ton saat Perum Bulog memiliki stok sekitar 1 juta ton. Jika kembali harus mengimpor, pemerintah harus membuka sejak rencana hingga pelaksanaan impor beras. Intinya pemerintah harus membersihkan "petualang-petualang" dalam impor beras.</p>
m	<p><b>Rencana Impor Berubah</b> (<i>Bisnis Indonesia</i>, 16 Januari 2018). Jakarta - Setelah sempat menimbulkan kegaduhan, pemerintah akhirnya mengalihkan penugasan impor beras ke Perum Bulog, dari sebelumnya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Adapun, beras yang diimpor adalah beras untuk keperluan umum.</p>



	<p>Keputusan ini sekaligus memperjelas kondisi perberasan di Tanah Air. Merujuk pada regulasi Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, impor beras untuk keperluan umum bertujuan sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk keperluan antara lain stabilisasi harga. Impor beras untuk keperluan umum hanya bisa dilakukan oleh Bulog.</p> <p>Berdasarkan pemantauan Ombudsman di 31 Provinsi pada 10-12 Januari 2018, ada keluhan pedagang bahwa stok beras pas-pasan, tidak merata, dan harga melonjak sejak Desember 2017. Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI, mengatakan saat ini dibutuhkan kepastian data pasokan beras yang akurat agar tidak ada saling tuding dan terjadi konflik kepentingan.</p>
n	<p><b>Penugasan Impor Beras Dialihkan ke Perum Bulog</b> (<i>Kompas, 16 Januari 2018</i>). Gejolak harga beras ditangani melalui operasi pasar dan impor. Semula, penugasan impor diberikan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Namun, tugas itu kemudian dialihkan ke Perum Bulog karena dianggap sesuai regulasi. Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1), menugasi Perum Bulog untuk mengimpor 500.000 ton beras. Keputusan ini sekaligus membatalkan rencana impor oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).</p> <p>Data tak akurat Ketidakakuratan data pangan dinilai ikut berkontribusi dalam gejolak harga beras belakangan ini. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan data luas panen, produktivitas, dan produksi beras melalui data tunggal. Darmin menjelaskan, kebijakan itu diharapkan bisa diluncurkan pada Agustus 2018. Data terkait dengan luas tanam, luas panen, produksi pangan, kondisi irigasi, dan realisasi pengairan. Data diverifikasi sehingga lebih akurat dan valid.</p> <p>Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menjelaskan, Ombudsman menemukan enam gejala malaadministrasi dalam stok beras nasional. Keenam gejala itu adalah penyampaian informasi stok beras yang tidak akurat kepada publik, impor yang tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kewenangan untuk tujuan lain, prosedur yang tidak patut, dan adanya konflik kepentingan.</p>
o	<p><b>Rencana Impor Sudah Lama?</b> (<i>Indo Pos, 16 Januari 2018</i>). Rencana pemerintah mengimpor beras dinilai tidak tepat. Impor 500 ribu ton itu hanya menyusahkan petani. Maklum, Februari-Maret 2018 merupakan periode masuk masa panen. Di samping itu, stok beras sebanyak 950 ribu ton cukup untuk dua bulan. Karena itu, sangat tidak beralasan pemerintah melakukan impor beras. Dalih beras impor berjenis khusus atau super premium juga tidak masuk logika. Ini karena pada dasarnya, pemerintah bertanggung jawab mengurus kebutuhan kaum kecil, bukan kaum berduit. Rizal Ramli, mantan kepala Bulog menyebutkan, rencana impor itu sejatinya bisa dibatalkan. Itu dengan catatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkehendak dan Bulog turut aktif untuk stabilitas harga.</p> <p>Perum Bulog sendiri mengaku siap menjalankan penugasan yang diperintahkan pemerintah untuk melakukan impor beras 500 ribu ton. Asal negara ditetapkan dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. "Kami segera membereskan administrasi atau syarat dalam melakukan impor. Jika sudah proses impor bisa segera dilakukan," ujar Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Djarot Kusumayakti.</p>
p	<p><b>Perum Bulog Ambil Alih Impor Beras</b> (<i>Jawa Pos, 16 Januari 2018</i>). Jakarta - Data beras yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian dinilai kurang akurat. Namun, saat ini fokus utama pemerintah adalah memastikan stok beras di Bulog berada pada level psikologis aman. Yakni, minimum 1 juta ton. Karena itulah, impor dilakukan. "Ada kekeliruan</p>



	<p>data. Secara nasional, terjadi masalah. Baik di BPS, di pertanian," ujar Wapres Jusuf Kalla (JK) di kantornya kemarin (15/1). Menurut JK, itu merupakan persoalan yang sudah lama. Bahkan, saat dia masih menjadi Wapres di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kekeliruan tersebut sudah dikoreksi.</p> <p>JK juga menegaskan, yang mengimpor beras bukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Melainkan Bulog secara langsung karena memang untuk kebutuhan stok di gudang. Perum Bulog pun mengaku siap menjalankan penugasan yang diperintahkan pemerintah untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Asal negara ditetapkan dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. "Kami segera membereskan administrasi atau syarat dalam melakukan impor. Jika sudah, proses impor bisa segera dilakukan," ujar Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.</p>
q	<p><b>Ombudsman Temukan Pelanggaran Impor Beras</b> (<i>Koran Jakarta, 16 Januari 2018</i>). Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan sejumlah pelanggaran atau maladministrasi dalam proses impor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam, yang rencananya akan dilakukan pada akhir Januari 2018. Pelanggaran tersebut antara lain kurangnya kehati-hatian dalam melakukan impor, serta soal kewenangan impor. "Dalam proses impor ada gejala maladministrasi. Penyampaian informasi stok yang tidak akurat, mengabaikan prinsip kehati-hatian, dan ada penyalahgunaan kewenangan," ujar Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah, di kantor Ombudsman, Senin (15/1).</p> <p>Sementara itu, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, dalam rapat koordinasi Kebijakan Impor beras di Jakarta, Senin (15/1), mengatakan tetap melakukan impor beras hingga 500 ribu ton sampai Februari 2018 guna stabilisasi harga dengan pemenuhan kebutuhan di awal tahun.</p> <p>Kesepakatan yang dicapai dalam rapat tersebut adalah pemerintah meminta Bulog terus melakukan operasi pasar seperti yang sudah dilakukan. Kemudian, impor beras yang semula dilakukan oleh PT. PPI (Persero) akan dilakukan oleh Bulog dalam bentuk beras umum sesuai mandat Perpres No 48 Tahun 2016 dengan total volume impor sampai dengan 500 ribu ton, yang akan masuk sampai dengan Februari 2018 untuk stabilisasi harga. Selain mengalihkan pelaksanaan impor, pemerintah juga menugaskan Bulog untuk menyerap gabah dan beras hasil panen petani dengan fleksibilitas harga sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dan Permentan Nomor 71 Tahun 2015.</p>
r	<p><b>Govt Sticks to Importing Medium-Grade Rice</b> (<i>The Jakarta Post, 16 Januari 2018</i>). Responding to public criticism, the government has instructed the State Logistics Agency (Bulog) - not PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) - to import 500.000 tons of rice to stabilize the rice price. Bulog received the instruction to import medium-grade rice after a controversy ensued as state-owned trading company PPI was earlier appointed to import premium-grade rice from neighboring countries such as Vietnam and Thailand.</p> <p>According to the Ombudsman, which surveyed rice traders in various markets, six provinces - Banten, East Java, Jakarta, Papua, South Sumatra and West Java - have been categorized as "red zones" as they saw depleting stocks and rising prices. "From our observation between Jan. 10 and 12, we can confirm that the rice stock is deficient and uneven, but these conditions are taking place before the usual harvest season," Ombudsman commissioner Alamsyah Saragih told the press in a separate occasion. "Therefore, the government needs to be careful [not to hurt local rice producers competitiveness]." Furthermore, the Ombudsman also suggested a possible miscalculation in rice production data, especially by the Agriculture Ministry.</p>



s	<p><b>Pemerintah Akan Impor 500.000 Ton Beras Khusus</b> (<i>Harian Ekonomi Neraca, 16 Januari 2018</i>). Kementerian perdagangan akan mengimpor 500.000 ton beras khusus untuk memperkuat stok dalam rangka menekan harga beras di tingkat konsumen. "Beras itu dari berbagai negara, yaitu Vietnam dan Thailand," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers usai rapat bersama distributor dan asosiasi perdagangan ritel di Kementerian Perdagangan, Jakarta, disalin dari Antara.</p> <p>Menurut Enggartiasto, impor akan dapat dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan mitra agar pemerintah bisa melakukan pengendalian. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan pada Desember 2017 naik sebesar 2,66 persen menjadi Rp9.526 per kilogram jika dibandingkan dengan November.</p> <p>Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (2/1), mengatakan bahwa kenaikan harga beras khususnya kualitas medium pada Desember 2017 tersebut akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat. Kenaikan rata-rata harga beras bukan hanya terjadi pada beras kualitas medium saja. Namun, untuk beras kualitas premium tercatat juga mengalami kenaikan menjadi Rp9.860 per kilogram atau naik 3,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya,</p>
t	<p><b>Menkeu: Jika Ingin Harga Beras Stabilkan Inflasi, Data Kementan Harus Diperbaiki</b> (<i>Akurat.co, 16 Januari 2018</i>). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah akan terus berupaya menjaga laju inflasi dari awal 2018 dengan cara mengendalikan harga berbagai komoditas pangan seperti beras. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani menyusul ramainya pembicaraan impor beras yang terjadi di masyarakat, saat Indonesia akan menuju panen raya beras beberapa waktu lagi kedepan.</p> <p>"Fokus pada kestabilan harga beras menjadi perhatian yang utama pada bulan-bulan ini," kata Sri Mulyani saat konferensi pers mengenai APBN 2018 di Jakarta, Senin sore (15/1). Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras merupakan komoditas kelima, setelah tarif listrik, biaya perpanjangan STNK, ikan segar dan bensin, yang dominan mempengaruhi inflasi pada 2017. Meski demikian, harga beras yang tinggi pada November-Desember 2017 memberikan kontribusi yang signifikan pada tingkat inflasi nasional. Sehingga pemerintah berupaya untuk mengimpor beras khusus sebanyak 500.000 ton.</p>
u	<p><b>Impor Beras Malaadministrasi</b> (<i>Pikiran Rakyat, 16 Januari 2018</i>). Ombudsman Republik Indonesia melihat gejala malaadministrasi pengelolaan data stok dan rencana impor beras 500.00 ton oleh pemerintah. Berdasarkan peta keluhan pedagang yang dibuat Ombudsman, stok beras pas-pasan dan tidak merata membuat harga meningkat tajam sejak Desember 2017.</p> <p>Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, kebijakan impor beras yang diambil pemerintah pada awal tahun 2018 menuai kontroversi. Hal ini diawali kenaikan beras yang terjadi terus-menerus pada akhir tahun 2017. Bulog kemudian melakukan operasi pasar, tetapi belum berdampak pada harga beras. Hal itu memicu Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor pada Januari 2018.</p> <p>Ombudsman RI juga menyoroti kurangnya koordinasi yang seharusnya dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan demikian, tidak ada dua menteri yang mengeluarkan kebijakan berseberangan. "Sama-sama dalam satu kabinet, kan bisa duduk bersama, ada rakortas. Kenapa harus ricuh di publik dan membuat tingkat ketidakpercayaan publik menjadi meningkat," ujarnya.</p>



	<p>Berdasarkan hal itu, Ombudsman menyarankan agar pemerintah mengambil langkah untuk mencegah malaadministrasi. Langkah pertama yaitu pemerataan stok dan mengembalikan tugas impor beras ke Perum Bulog. Langkah berikutnya yaitu menghentikan pembangunan opini surplus dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, luas tambah tanam, benih subsidi, dan pemberantasan hama. Langkah selanjutnya adalah tetapkan pencapaian jumlah stok yang kredibel dan memberikan dukungan maksimum ke BPS untuk menyediakan data produksi dan stok yang akurat. "Terakhir yaitu mengefektifkan fungsi koordinasi oleh Kemenko Perekonomian sehingga perbedaan instansi tidak perlu menjadi perdebatan publik yang tidak produktif," ujarnya.</p>
v	<p><b>Swasembada, Data Meragukan, dan Puluhan Untung Impor Beras</b> (<i>Republika.co.id</i>, 16 Januari 2018). Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Perdagangan pada Kamis, 11 Januari 2018 memutuskan akan mengimpor 500 ribu ton beras telah memunculkan kegaduhan politik. Terlebih kebijakan impor ini diambil pada musim panen, di mana Februari biasanya masuk puncak panen. "Wajar jika banyak yang khawatir harga gabah bakal anjlok dan petani sangat dirugikan," kata ekonomi senior INDEF, Dradjad H Wibowo, kepada <i>Republika.co.id</i>, Selasa (16/1).</p> <p>Dradjad mempunyai dua catatan terkait beras ini. Pertama, beras memang sejak dulu sudah dan selalu menjadi barang politik. Jadi, kebijakan perberasan memang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Estimasi 2016, jumlah petani di Indonesia sekitar 37 juta, sebagian besar petani padi dari berbagai kategori. Ini adalah jumlah pemilih yang signifikan bagi capres dan parpol manapun.</p>
w	<p><b>Satgas Pangan Akan Tangkap Penimbun Beras</b> (<i>Beritasatu.com</i>, 16 Januari 2018). Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Pangan ikut angkat bicara soal rencana pemerintah mengimpor 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand. Impor dilakukan karena pemerintah tak ingin kekurangan stok menjelang panen Maret nanti serta untuk mengantisipasi lonjakan harga beras. Satgas Pangan juga memastikan saat ini tak ada yang menimbun beras dan jika ada yang melakukannya bakal langsung ditangkap. "Satgas pangan itu bertugas mengawasi distribusinya selain kita mengecek ketersediaan stok. Kita mendapatkan fakta, memang di lapangan, ada panen, tetapi panennya tidak panen raya karena saya juga diajak ke (lumbung beras di) Karawang, Jawa Barat oleh Menteri Pertanian beberapa hari lalu. Kalau panen raya kan pasti luas," kata Ketua Satgas Pangan Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Selasa (16/2).</p> <p>Ombudsman RI langsung menyatakan, telah menemukan gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras. Telah terjadi penyampaian informasi stok yang tidak akurat kepada publik, pengabaian prinsip kehati-hatian, dan penggunaan kewenangan untuk tujuan lain. Selain itu, terjadi penyalahgunaan kewenangan, prosedur tak patut/pembiaran, dan konflik kepentingan.</p>
x	<p><b>Ombudsman Sarankan Pemerataan Stok Beras</b> (<i>Jpp.go.id</i>, 16 Januari 2018). Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pemerintah untuk fokus meratakan stok beras agar tidak terjadi maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras serta mencegah ketidakpercayaan publik. "Pemerintah harus bisa mengkoordinir kepala daerah untuk tidak menahan stok," kata anggota Ombudsman Alamsyah Saragih saat jumpa pers di Jakarta, Senin (15/1/2018).</p> <p>Ombudsman meminta pemerintah untuk tidak membangun opini stok beras surplus agar tidak membuat optimisme semu dan memicu ketidakpercayaan masyarakat. Ombudsman memantau</p>



	<p>pasokan beras di 31 provinsi di Indonesia pada 10-12 Januari lalu dan menemukan sebaran stok beras tidak merata.</p> <p>Pemerintah juga diharapkan agar mengefektifkan kembali fungsi koordinasi oleh Kemenko Perekonomian sehingga perbedaan antar instansi tidak perlu menjadi perdebatan publik. Ombudsman RI menemukan gejala maladministrasi terhadap pengelolaan data stok dan rencana impor beras 500.000 ton oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan berencana mengimpor beras khusus dari Vietnam dan Thailand untuk menekan harga beras medium yang meningkat di pasar.</p>
y	<p><b>Rencana Impor Beras Sudah Lama?</b> (<i>Indopos.co.id</i>, 16 Januari 2018). Rencana pemerintah mengimpor beras dinilai tidak tepat. Impor 500 ribu ton itu hanya menyusahkan petani. Maklum, Februari-Maret 2018 merupakan periode masuk masa panen. Di samping itu, stok beras sebanyak 950 ribu ton cukup untuk dua bulan. Karena itu, sangat tidak beralasan pemerintah melakukan impor beras. Dalih beras impor berjenis khusus atau super premium juga tidak masuk logika. Ini karena pada dasarnya, pemerintah bertanggung jawab mengurus kebutuhan kaum kecil, bukan kaum berduit.</p> <p><b>JK Akui Data Bermasalah</b> Data beras yang dikeluarkan BPS dan Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai kurang akurat. Namun, saat ini fokus utama pemerintah adalah memastikan stok beras di Bulog berada pada level psikologis aman yakni minimum 1 juta ton. Karena itulah impor dilakukan. "Ada kekeliruan data. Secara nasional, terjadi masalah baik di BPS, di pertanian (Kementan, Red)," ujar Wapres Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Senin (15/1).</p> <p>Wapres menuturkan, konsumsi beras per kapita berada pada angka 114 kilogram (kg). Dengan hitungan jumlah penduduk Indonesia antara 250-260 juta, kebutuhan beras nasional per tahun mencapai 28-29,6 juta ton. Indonesia juga tidak pernah ekspor beras. Sementara itu, produksi dalam negeri paling tinggi 30 juta ton pertahun. "Makanya, begitu ada sedikit cuaca jelek, iklim jelek, memang bisa terjadi masalah," lanjut JK.</p>
z	<p><b>Impor Beras Kontra Produktif dengan Visi Misi Jokowi</b> (<i>Jurnas.com</i>, 16 Januari 2018). Jakarta - Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerang Tani) Idham Arsyad, menilai kebijakan pemerintah mengimpor beras kontra produktif dengan visi dan misi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan. "Rencana impor beras ini sungguh tidak sesuai dengan janji Presiden untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan," kata Idham Arsyad dalam siaran pers ke redaksi, di Jakarta, Selasa (16/1).</p> <p>Jika kebijakan importasi ini yang menjadi pilihan, maka diyakini bahwa akan menggerus popularitas Presiden Jokowi karena masalah pangan ini sangat dekat dengan kehidupan rakyat kita di pedesaan" Kata Idham.</p>
aa	<p><b>Gaduh Politik Impor Beras</b> (<i>Tribunnews.com</i>, 16 Januari 2018). Jakarta - Kamis 11 Januari lalu pemerintah cq Menteri Perdagangan memutuskan akan mengimpor 500 ribu ton beras. Kegaduhan politik pun muncul. Kegaduhan ini tak terelakkan. Apalagi, kebijakan impor diambil pada musim panen, Februari biasanya masuk puncak panen. Wajar jika banyak yang khawatir harga gabah bakal anjlok dan petani sangat dirugikan. Saya punya 2 catatan terkait beras ini. Pertama, beras memang sejak dulu sudah dan selalu menjadi barang politik. Kebijakan perberasan memang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.</p>



	<p>Kenapa? Memangnya spekulasi tidak perlu modal, gudang, dan sebagainya? Dengan “surplus” beras minimal 24,5 juta ton setahun, paling tidak perlu uang tidur Rp 16-20 triliun untuk dispekulasikan setiap bulan! Karena itu, saya lebih percaya bahwa pasar memang kekurangan supply beras. Kesalahan berikutnya, Kementan terlanjur goang-gaung swasembada. Sementara kata pasar, kita belum swasembada beras. Akibatnya, pemerintah lengah. Harga melonjak terus dan telat direspon. Ketika direspon, timing-nya sangat jelek, menjelang puncak panen.</p>
ab	<p><b>Penunjukkan PPI Dipertanyakan</b> (<i>Agroindonesia.co.id, 16 Januari 2018</i>). Klaim Kementerian Pertanian soal melimpahnya produksi beras akhirnya kandas. Tingginya risiko yang bakal dipikul memaksa pemerintah mengimpor beras 500.000 ton. Yang sedikit aneh, pelaksana dan penyalur beras impor eks Thailand dan Vietnam itu bukan Perum Bulog, tapi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Ada apa?</p> <p>Praktik tak lazim ini dipertanyakan Koperasi Pedagang Pasar induk Beras Cipinang (KOPPIC). “PPI itu tak punya pengalaman dengan komoditas beras. Bagaimana dia bisa mendistribusikan beras yang diimpornya?” tanya Ketua Umum KOPPIC Zulkifli Rasyid, Jumat (12/01/2018). Sejauh ini, Dirut PPI, Agus Andayani tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Pesan-pesan yang dikirim Agro Indonesia melalui aplikasi WhatsApp (WA) pun tidak dibalas. Bulog pun tidak bersuara.</p>
ac	<p><b>Gaduh Politik Dan Pulennya Impor Beras</b> (<i>Rmol.co, 16 Januari 2018</i>). Kamis 11 Januari lalu pemerintah cq Menteri Perdagangan memutuskan akan mengimpor 500 ribu ton beras. Kegaduhan politik pun muncul. Kegaduhan ini tak terelakkan. Apalagi, kebijakan impor diambil pada musim panen, di mana Februari biasanya masuk puncak panen. Wajar jika banyak yang khawatir harga gabah bakal anjlok dan petani sangat dirugikan.</p> <p>Kita ambil harga US\$ 350/MT, dengan asumsi tanpa diskon. Biaya freight dan asuransi sekitar US\$ 31/MT. Ini asumsi tinggi, setelah saya konversi semuanya ke MT. Biar aman, kita mahalkan lagi ke US\$ 35/MT. Asumsikan kurs-nya Rp 13500/US\$. Kita anggap importir tidak punya stok dolar, sehingga harus beli dolar mahal. Beras tidak kena PPN, tapi per 1 April 2011 impor beras kena bea masuk Rp 450/kg. Saya belum menemukan apakah bea ini dicabut atau diubah.</p>
ad	<p><b>Perjalanan Impor Beras Indonesia Mulai Tahun 2000 hingga 2018</b> (<i>Tribunnews.com, 16 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membuka keran impor beras pada tahun 2018. Sebanyak 500.000 ton beras akan diimpor dari Vietnam dan Thailand. Kebijakan impor beras dilakukan untuk menambah stok beras yang akhir-akhir ini mengalami penurunan. Kebijakan impor beras pemerintah sendiri menarik untuk dicermati, sebab berkorelasi dengan ketahanan pangan Indonesia.</p> <p>Indonesia yang selalu disebut negara agraris, subur dan sebagainya ternyata tidak mampu "memberi makan" penduduknya, sehingga untuk urusan nasi saja harus impor. Dalam tulisan ini, Kompas.com ingin membedah perjalanan impor beras di Indonesia selama hampir dua dasawarsa, yakni sepanjang tahun 2000-2018. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia selalu mengimpor beras mulai dari tahun 2000 hingga 2015 atau selama 15 tahun. Sementara, pada tahun 2016 sampai 2017 pemerintah berhenti sementara untuk mengimpor beras dan pada 2018 Indonesia kembali mengimpor beras.</p> <p>Kepala Divre Bulog Sulsel Dindin Syamsuddin mengatakan, stok beras di Sulsel mencapai 82.000 ton yang mampu memenuhi kebutuhan hingga 20 bulan ke depan. Bahkan, pihaknya pun siap menyuplai beras ke Aceh hingga Papua. "Stok beras di Sulsel aman hingga 20 bulan ke depan. Kami sudah suplai ke provinsi lain di Indonesia. Besok kami kirimkan lagi beras ke Aceh dengan harga dibawah HET," kata Dindin saat melepas mobil truk pengangkut beras untuk operasi pasar</p>



	<p>di gudang Bulog Panaikang, Jumat (12/1/2018). Dindin mengungkapkan, HET beras saat ini sebesar Rp 9.450 per kilogram. Namun, Bulog Sulsel menjualnya dengan harga Rp 9.000 per kilogram untuk menormalkan harga beras premium di pasaran.</p>
ae	<p><b>Pemerintah Gagal Menata Mata Rantai Pasokan Beras</b> (<i>Koran-jakarta.com, 17 Januari 2018</i>). Jakarta – Naiknya harga beras disebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menata mata rantai pasokan. Kebijakan impor beras dalam situasi seperti ini justru menjadi pemicu inflasi dan menekan kehidupan petani. “Impor beras justru melemahkan ekonomi pedesaan, dan menurunkan daya beli,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Imron Rozuli, saat dihubungi Koran Jakarta, Selasa (16/1). Pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton pada akhir bulan Januari ini. Bulog akan mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.</p> <p>Harus Diusut</p> <p>Di tempat terpisah, Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM, Masyhuri, mengatakan temuan Ombudsman mengenai maladministrasi proses impor beras dari Vietnam dan Thailand sebesar 500 ribu ton mesti ditindaklanjuti serius oleh Presiden. Sebab, selama ini persoalan data yang membuat karut-marut kebijakan pertanian. “Selama ini, akademisi selalu mengingatkan lemahnya data pertanian nasional yang sayangnya tidak pernah digubris pemerintah. Padahal, setiap pengambilan keputusan selalu berdasarkan data. Yang paling membuat miris adalah masing-masing pihak mengklaim pencapaian, padahal ada data yang menunjukkan sebaliknya,” tegas Masyhuri.</p> <p>Kementerian Pertanian, misalnya, dalam setiap kesempatan mengatakan Indonesia telah sukses swasembada beras, padahal setiap orang bisa mengecek ke situs Badan Pusat Statistik bahwa setiap tahun ada impor beras dengan jumlah ratusan ribu ton.</p>
af	<p><b>Beras Impor</b> (<i>Pikiran Rakyat, 17 Januari 2018</i>). Data Kementerian Pertanian juga menyebutkan, luas panen padi nasional pada Januari-Februari 2018 mencapai 2,50 juta hektare. Persediaan beras diperkirakan 8,26 juta ton. Sementara itu, konsumsi beras nasional per bulannya hanya 2,50 juta ton. Artinya, terjadi kelebihan atau surplus beras 3,26 juta ton. Jadi, sebenarnya kita tidak perlu impor beras.</p> <p>Berdasarkan pantauan Ombudsman di 31 provinsi, diduga terjadi penyampaian informasi stok yang tidak akurat kepada publik. Kementerian Pertanian selalu menyatakan produksi beras surplus dan stok cukup tanpa disertai jumlah dan sebaran riil. Data produksi hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah. Gejala kenaikan harga sejak akhir tahun tanpa temuan penimbunan dalam jumlah besar, mengindikasikan kemungkinan proses mark-up data produksi dalam model penghitungan yang digunakan selama ini. Akibat pernyataan surplus yang tidak didukung data akurat tentang stok dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, pengambilan keputusan pun berpotensi keliru.</p> <p>Ombudsman juga melihat ada penyalahgunaan kewenangan karena Menteri Perdagangan melalui Permendag Nomor 1 Tahun 2018 yang menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) untuk melakukan impor beras khusus. Padahal, berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015, mengatur bahwa yang diberikan tugas impor dalam upaya menjaga stabilisasi harga adalah Perum Bulog. Skema impor seharusnya bertujuan meningkatkan cadangan beras Bulog yang menipis, bukan untuk langsung mengguyur barang ke pasar. Kemudian, pemerintah membatalkan penugasan impor beras oleh PT PPI. Langkah impor beras tetap akan dilakukan pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).</p>



ag	<p><b>Pemerintah Gagal Menata Mata Rantai Pasokan Beras</b> (<i>Koran Jakarta, 17 Januari 2018</i>). Jakarta - Naiknya harga beras disebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menata mata rantai pasokan. Kebijakan impor beras dalam situasi seperti ini justru menjadi pemicu inflasi dan menekan kehidupan petani. "Impor beras justru melemahkan ekonomi pedesaan, dan menurunkan daya beli," kata pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Imron Rozuli, saat dihubungi Koran Jakarta, Selasa (16/1).</p> <p>Pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton pada akhir bulan Januari ini. Bulog akan mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Beras yang akan diimpor ialah beras umum dengan tingkat kepecahan 0-5 persen (premium) dan 0-25.</p> <p>Di tempat terpisah, Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM, Masyhuri, mengatakan temuan Ombudsman mengenai mal-administrasi proses impor beras dari Vietnam dan Thailand sebesar 500 ribu ton mesti ditindaklanjuti serius oleh Presiden. Kementerian Pertanian, misalnya, dalam setiap kesempatan mengatakan Indonesia telah sukses swasembada beras, padahal setiap orang bisa mengecek ke situs Badan Pusat Statistik bahwa setiap tahun ada impor beras dengan jumlah ratusan ribu ton.</p>
ah	<p><b>Perlukah Impor Beras Saat Ini?</b> (<i>Detik.com, 17 Januari 2018</i>). (Detik.com, 17 Januari 2018). Jakarta - Rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melakukan impor beras menarik untuk dicermati bersama. Setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan impor beras saat ini. Pertama, dari sisi jenis beras yang akan diimpor, yang merupakan jenis khusus. Artinya bukan beras kelas medium yang saat ini sedang mengalami lonjakan harga di pasaran. Kedua, momentum untuk melakukan impor beras. Ketiga, jumlah beras yang akan diimpor. Dan, yang terakhir adalah lembaga yang ditugasi untuk melakukan impor beras.</p> <p>Kementerian Pertanian dalam beberapa kesempatan mengklaim sejatinya saat ini pasokan beras dalam negeri masih cukup. Sehingga kita tidak perlu lagi impor. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, Suswandi menyampaikan bahwa produksi gabah kita dalam satu tahun mencapai 5 juta ton yang jika dikonversikan akan menjadi 3 juta ton beras. Sementara, kebutuhan konsumsi nasional adalah sekitar 2,6 juta ton beras. Artinya kita masih surplus sekitar 400 ribu ton.</p>
ai	<p><b>Impor Beras, 'Cerdik' Tapi Sadis!</b> (<i>Harianterbit.com, 17 Januari 2018</i>). Ibarat saluran listrik, huru-hara soal beras yang terjadi beberapa hari ini sekali lagi menunjukkan ada yang korselet dari kebijakan Pemerintah. Menjelang panen raya, Pemerintah justru mengimpor beras. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 500.000 ton. Impor beras sudah lama menjadi solusi instan atas masalah perberasan nasional. Alasannya selalu saja klasik dan seolah-olah mulia sekali, untuk memperkuat stok nasional. Untuk menurunkan harga beras agar rakyat bisa menjangkau. Tapi, benarkah demikian? Ekonom senior Rizal Ramli yang pernah menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) era Presiden Gus Dur punya pendapat berbeda.</p> <p>Impor beras bukanlah solusi bijak, apalagi satu-satunya, bagi masalah perberasan nasional. Impor beras adalah cara gampang koalisi penguasa dan pengusaha memgeruk keuntungan dalam jumlah jumbo. Kunci politik perberasan nasional bermula dari keberpihakan kepada petani. Kalau Pemerintah tidak berpihak kepada petani, maka kebijakan korselet semacam ini akan selalu berulang dan berulang. Apesnya, pasca reformasi boleh disebut Bulog tidak berperan sebagai <i>bufferstock</i> dan stabilisator harga beras sebagai seharusnya.</p>



aj	<p><b>Komisi VI DPR RI Tolak Impor Beras</b> (<i>Republika.co.id, 17 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menolak dengan tegas rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, keputusan impor tidak didasari dengan data yang riil untuk mengambil kebijakan.</p> <p>Menurut Rieke, ketidaksesuaian data antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait lainnya harus diwaspadai. Karena hal-hal tersebut telah mencederai kredibilitas pemerintah, apalagi masalah beras merupakan masalah krusial seluruh rakyat. Rieke berpendapat, seharusnya keputusan impor tidak dilakukan dekat dengan masa panen raya. Apalagi proses impor akan memakan waktu lebih dari sebulan, dan beras impor akan masuk saat masa panen raya yang dimulai Februari ini. Selain itu, sebelum melakukan keputusan impor, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi data stok beras nasional. Data stok beras nasional, kata Rieke, tidak hanya berada di pemerintah ataupun Bulog, tapi juga di pedagang beras dan petani.</p>
ak	<p><b>PPU Minta Ada Data Akurat Sebelum Impor Beras</b> (<i>Republika.co.id, 17 Januari 2018</i>). Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan agar pemerintah segera melakukan konsolidasi data sebelum mengambil kebijakan impor beras. Komisioner KPPU RI, Saidah Sakwan menjelaskan, data merupakan basis diagnostik dalam mengambil kebijakan. Ketika data yang tercatat salah maka dipastikan kebijakan yang diambil akan salah. Pemerintah mengatakan bahwa panen raya baru dimulai pada Februari, tetapi menurut informasi yang diterima KPPU, di beberapa daerah sudah ada yang mulai panen raya bulan ini. Kendalanya, apabila misalnya Sulawesi Selatan panen raya, maka stok beras yang sekitar 2,5 juta ton akan diperebutkan oleh seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>Terkait keputusan impor, kata Saidah, beras impor harus menjadi stok Bulog dan tidak boleh didistribusikan ke pasar ketika panen raya. Karena jika didistribusikan, sedangkan Bulog tidak bisa melakukan penyerapan maksimal beras petani, maka akan terjadi distorsi terhadap pasar, karena harga gabah petani menjadi turun. "Bulog harus bisa melindungi harga di tingkat petani, jangan sampai dibeli murah. Masalahnya saat panen raya pengeringnya tidak ada, sehingga pasti harga akan murah juga dan petani rugi petani," tutur Saidah. Ia berharap pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut, yang tidak hanya berada di hilir tapi juga hulu.</p>
al	<p><b>Ironi Impor Beras</b> (<i>Kompas, 18 Januari 2018</i>). Selama tiga tahun pemerintahan ini, gejala harga beras pernah terjadi pada 2015. Saat itu. Harga beras medium rata-rata nasional meningkat tajam dari Rp 9.646 pada Januari kemudian memuncak di angka Rp 10.375 pada Maret 2015. Harga kemudian kembali turun pada April dan Mei. Setelah Mei 2015, harga kembali meningkat tajam dan tidak ada bulan tanpa kenaikan harga beras di tengah ironi klaim peningkatan produksi yang luar biasa, yakni dari 70,8 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2014 menjadi 75,4 juta ton GKG pada 2015 atau peningkatan sebesar 6,42 persen (Badan Pusat Statistik/BPS, Juli 2016).</p> <p>HET tersebut ditetapkan saat harga beras medium rata-rata nasional telah mencapai Rp 10.617/kg dan harga gabah kering panen (GKP) sudah mencapai Rp 4.509/kg (BPS, September 2017), yang jauh melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 3.700/kg- HPP digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan penetapan HET. Akibatnya, beras medium mulai langka di pasaran karena pedagang takut menjual di atas harga ketetapan dan/atau diubah menjadi beras premium. HET tidak memiliki dampak apa pun dan harga terus naik hingga September 2017 meskipun dengan kenaikan yang relatif kecil.</p>



	<p>Terakhir, kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan di Nawacita telah berbelok arah menjadi swasembada pangan. Petani ditempatkan sebagai obyek melalui berbagai program, bantuan dan subsidi input agar berproduksi setinggi-tingginya dan melupakan hakikat terbesar kedaulatan pangan, yaitu menempatkan petani sebagai subyek yang ikut menentukan arah dan kebijakan pertanian, meningkatkan hak dan kedaulatan petani, serta memuliakan petani. Salah satu upaya pragmatis yang bisa ditempuh adalah mengubah berbagai program, bantuan dan subsidi, menjadi subsidi output yang lebih menyejahterakan.</p>
am	<p><b>Menyelisik (Kembali) Urusan Beras</b> (<i>Kompas</i>, 18 Januari 2018). Apabila kedaulatan pangan identik dengan kedaulatan negara, jelas pangan menjadi persoalan negara. Sejak lama urusan pangan khususnya beras bukan hanya menjadi urusan satu kementerian atau lembaga. Ketika Kementerian Pertanian fokus kepada pencapaian produksi, ada Kementerian Perdagangan yang mengurus distribusi dan regulasi, ada Bulog yang terkait dengan stok dan distribusi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait pembangunan infrastruktur pertanian, dan beberapa kementerian lain yang terkait penyediaan pupuk, lahan, serta dukungan modal, teknologi, dan kelembagaan.</p> <p>Kebijakan pemerintah di awal 2018 yang mengimpor 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam membuat masyarakat tersentak dan terbelah menjadi dua kubu antara yang mendukung impor dan yang menolaknya. Apalagi, pemerintahan Jokowi-JK menempatkan kedaulatan pangan sebagai program prioritas dalam Nawa Cita.</p> <p>Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa data produksi beras nasional menjadi kewenangan Kementerian Pertanian, karena otoritas statistik nasional tidak menerbitkan data produksi (Detikfinance, 15 Januari 2018). Dari data yang dikeluarkan Kementan dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan produksi padi lebih dari 15 juta ton (GKG) dari 70,84 juta ton pada 2014 menjadi 81,1 juta ton pada 2017. Produksi pada 2017 setara dengan 48 juta ton beras yang apabila dibandingkan dengan tingkat kebutuhan konsumsi 33 juta ton, terdapat surplus produksi beras hingga 15 juta ton.</p>
an	<p><b>Beras (Kian) Memanas</b> (<i>Harian Fajar</i>, 18 Januari 2018). Impor beras menjadi polemik di awal tahun 2018. Keputusan tersebut diambil untuk mengatasi kenaikan harga beras di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan ini diputuskan menjelang waktu panen raya. Impor juga dilakukan untuk memenuhi cadangan beras dalam negeri. Rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah kembali menjadi topik hangat yang menyeruak beberapa pekan terakhir. Pasalnya, impor beras akan dilakukan menjelang panen raya dan dianggap akan merugikan petani. Selain itu, keputusan tersebut diambil setelah Kementan merilis angka jumlah produksi beras yang katanya surplus. Data produksi kembali menjadi sorotan dan dipertanyakan keakuratannya.</p> <p>Data inflasi bulan Desember 2017 yang dirilis BPS Sulsel (2/1/2018) menempatkan beras sebagai komoditas yang mengalami kenaikan harga. Tingkat inflasi Sulsel pada bulan Desember mencapai 1,04 persen. Beras menjadi bahan makanan yang memiliki andil cukup besar terhadap tingkat inflasi. Artinya, harga beras cukup memengaruhi stabilitas harga komoditas lainnya di Indonesia termasuk di Sulsel.</p> <p>Data produksi sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan. Untuk itu, penyempurnaan data menjadi hal mendasar ditandai dengan pelaksanaan KSA oleh BPS tahun ini. Masalah cadangan beras juga perlu mendapatkan perbaikan. Serapan beras petani yang dilakukan Bulog perlu ditingkatkan demi memperbaiki manajemen stok beras. Petani butuh perhatian yang lebih besar dari pemerintah dengan harga pembelian</p>



ao	<p><b>Alamak, Kenapa Harga Beras Naik?</b> (<i>Jpnn.com, 18 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih menilai ada perbedaan data stok beras yang disampaikan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Hal ini dinilai menjadi penyebab harga beras naik dan terjadi kelangkaan di berbagai daerah.</p> <p>"Data stok beras dari Kementan dan Kemendag harus didukung data akurat agar tidak menimbulkan potensi keliru," katanya kepada JawaPos.com awal pekan ini. Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya indikasi konflik kepentingan. Ahmad menuturkan, Permendag Nomor 1 tahun 2018 dibuat begitu cepat dan tanpa sosialisasi dari berbagai pihak. "Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan. Apakah impor beras khusus diatur penugasannya? Apakah kelangkaan beras khusus yang menyebabkan naiknya harga beras? Apakah PT PPI sudah berpengalaman? Siapa yang paling diuntungkan bila tujuan dari impor bukan untuk menjaga stok beras?" pungkasnya.</p>
ap	<p><b>Kejanggalan Dibalik Impor Beras</b> (<i>Merdeka.com, 18 Januari 2018</i>). Pemerintah Jokowi-Jk resmi melakukan impor 500.000 ton beras dari Thailand, Vietnam dan Pakistan. Impor dilakukan untuk meningkatkan cadangan beras dan menjaga ketersediaan beras. Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid mengatakan, impor ini perlu dilakukan karena stok beras medium berkurang. Akibat kekurangan tersebut harga beras di pasar melambung tinggi.</p> <p>Menurutnya, di awal stok beras mulai berkurang dia telah mempertanyakan stok kepada pemerintah melalui Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Tapi menurutnya, Mentan telah memastikan bahwa stok beras berlebih sampai 1,2 juta ton. Hal itu tentu bertolak belakang dengan fakta di lapangan bahwa stok beras kurang sehingga harga menjadi tinggi. "Bapak menteri berkali-kali mengatakan stok lebih dan berlebih. Itu bukan sekali dua kali. Berkali-kali beliau mengatakan. Saya mengasih masukan kepada beliau 'Pak Januari Februari akan terjadi kekurangan beras medium'. Tapi bapak menteri mengatakan selalu surplus dan surplus. Seandainya data beliau benar dan valid tidak pernah terjadi harga beras seperti ini," jelasnya.</p>
aq	<p><b>Kejanggalan Dibalik Impor Beras</b> (<i>Gatra.com, 18 Januari 2018</i>). Rencana impor beras tidak disertai basis data yang jelas. Rantai distribusi yang panjang menjadi faktor penyebab kenaikan harga. Ada kejanggalan dalam proses penentuan izinnya? Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai setiap kementerian, lembaga dan badan memiliki data sendiri dan memiliki perbedaan yang sangat tajam. Itulah mengapa kebijakan beras selama ini dinilai tidak berbasis data valid.</p> <p>Komisioner KPPU Saidah Sakwan mengatakan kondisi tersebut rawan dieksploitasi oleh para pelaku pasar. KPPU mendesak segera dilakukan konsolidasi data perberasan nasional. Rieke mengatakan bulan November 2017, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman pasokan beras nasional aman sampai Mei 2018. Dan di Desember 2017, Perum Bulog mengatakan ada stok beras 1,1 juta ton dan aman hingga April 2018.</p> <p>Saat perayaan HUT PDIP belum lama ini, kata Rieke, Presiden Jokowi sama sekali tidak membicarakan impor beras. Dan pada 11 Januari 2018, Kementerian Perdagangan memutuskan untuk impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam. Semakin banyak keanehan setelah keputusan impor beras diumumkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Antara lain izin impor diubah dengan sangat cepat dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menjadi Perum Bulog. "Jadi jangan diplintir ini seolah-olah impor PDIP yang dorong atau usulkan. Tidak sama sekali, kami menolak impor beras," tegas Rieke.</p>



ar	<p><b>Gertakan Impor tak Mampu Menurunkan Harga Beras</b> (<i>Republika.co.id</i>, 18 Januari 2018). Jakarta - Gaung akan hadirnya 500 ribu ton beras impor asal Thailand dan Vietnam tidak serta merta menurunkan harga beras di pasaran. Padahal, biasanya gertakan impor akan membuat harga beras menurun.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Guru Besar Pertanian Universitas Negeri Lampung (Unila) dan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bustanil Arifin dalam mengatakan dalam diskusi bulanan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Kamis (18/1). Sebab, para penimbun akan berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengeluarkan simpanannya di gudang sebelum akhirnya kehadiran beras impor membuat harga beras turun. Data yang menyatakan adanya surplus adalah tidak valid. Jika surplus benar terjadi, maka tidak akan ada kelangkaan beras yang berdampak pada lonjakan harga. Lagipula, kata dia, stok 1,2 juta hektare tersebut merupakan beras sejahtera (rastra).</p>
as	<p><b>KPPU Bentuk Tim Selidiki Kejanggalan Impor Beras</b> (<i>Poskotanews.com</i>, 18 Januari 2018). Jakarta – Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan segera membentuk tim penyelidik terkait banyaknya kejanggalan wacana impor beras di tengah panen raya beras nasional oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. “Kejanggalan yang tengah kami selidiki mulai menunjukan pelaku impor, yang semula diberikan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tapi dikembalikan lagi ke Bulog; keterkaitan penetapan harga eceran tertinggi (HET); hingga ketidaksinkronan data instansi terkait,” ujar Saidah Sakwan, komisioner KPPU, di Jakarta, Kamis (18/1/2018).</p> <p>Indikasinya, ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo belum menandatangani persetujuan impor beras dimaksud lantaran kesimpangsiuran data terkait pangan termasuk konsumsi beras. “Jelasnya, politisasi perberasan ini kami curigai sebagai bentuk atau cara merusak citra Presiden Jokowi.”</p>
at	<p><b>Sebelum Impor Beras Seharusnya Antar Kementerian Bersinergi</b> (<i>Rmol.co</i>, 18 Januari 2018). Komisi IV DPR menilai kebijakan impor 500 ribu ton beras yang akan dilakukan pemerintah disebabkan kurangnya sinkronisasi data pasokan beras nasional. "Secara umum ada selisih data antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bulog," kata anggota Komisi IV Sulaeman L. Hamzah di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (18/1). Dia melihat bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menutupi kekurangan, bukan bersifat permanen.</p> <p>"Jadi ini sifatnya insidental saja. Jika pun masih ada stok maka beras ini bisa digunakan sebagai stok cadangan beras nasional untuk waktu ke depan saat ada kekurangan pasokan," jelas Sulaeman. Untuk memperbaiki persoalan tersebut, dia berharap adanya sinergitas antar kementerian dan lembaga terkait dalam hal pendataan ketersediaan pangan nasional. "Perlu duduk bareng mencocokkan data. Apakah data yang di lapangan maupun ketersediaan stok sudah sama atau belum, sehingga ketika nantinya diperlukan upaya jalan terakhir impor, kebijakannya sudah final. Karena memang ini diputuskan secara bersama," demikian Sulaeman.</p>
au	<p><b>Beras Impor Akan Tiba Akhir Bulan</b> (<i>Indo Pos</i>, 19 Januari 2018). Jakarta – Rawe-rawe rantas malang-malang patung. Kendati banyak sorotan, rencana impor beras rupanya tak akan terbendung. Impor beras di depan mata. Padahal versi para penolak impor beras menyebut stok beras di tanah air melimpah dan amsih cukup dalam tempo dua bulan.</p> <p>Spekulasi mengeruk untung di tengah kesulitan yang mencekik masyarakat. Impor beras dari Vietnam dan Thailand itu di klaim tidak cukup punya landasan kuat. Karena itu, impor beras</p>



	<p>khusus itu harus dibatalkan. Namun, pemerintah tetap bersikukuh kalau impor beras sebuah keniscayaan. Sebagai tindaklanjut keseriusan itu, Kemendag menunjukkan Perum Bulog untuk melakukan impor. Meski mendapat tantangan keras, impor beras 500 ribu ton, bakal mendarat di pengujung Januari ini.</p>
av	<p><b>Surplus Dulu Minus Kemudian</b> (<i>Koran Tempo, 22 Januari 2018</i>). Sikap Hermanu Triwidodo akhir-akhir ini mendua. Ia senang karena prediksinya tentang penurunan produksi beras jitu. Tapi pengajar Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor itu juga sedih karena kelangkaan beras membuat harga komoditas pangan paling utama tersebut melonjak. "Sejak tahun lalu, kami peringatan potensi produksi beras nasional menurun," kata Hermanu, Kamis pekan lalu.</p> <p>Direktur Jenderal Tanaman pangan Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto menyebutkan, saat itu, kementerianya kukuh bahwa tidak ada penurunan produksi. Sumardjo ragu terhadap data Kantor Staf Presiden, verifikasi lapangan Kementerian Koordinator Perekonomian, serta temuan lapangan Klinik Tanaman IPB dan Gerakan Petani Nusantara. "Orang IPB jumlahnya berapa? Kami jumlahnya berapa? Kami turunkan semuanya ke daerah serangan," ujar Sumardjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis pekan lalu.</p> <p>Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, sepanjang tahun lalu, anak buahnya terus menanggulangi serangan Wereng cokelat. Kementerian, kata dia, juga telah menyiapkan benih Inpari 43, yang relatif lebih tahan wereng. "Kami perbanyak dan ganti benihnya," kata Amran lewat sambungan telepon, Jumat pekan lalu. Namun Amran menolak anggapan yang menyebut tiga kali masa tanam dalam satu tahun sebagai biang siklus serangan Wereng tak bisa putus. "Tiga kali tanam itu bagus untuk Kesejahteraan petani karena mereka bisa berproduksi tiga kali," ujarnya.</p>
aw	<p><b>Aliansi Petani: Impor Beras Permainan Pedagang Besar</b> (<i>Republika.co.id, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Aliansi Petani Indonesia (API) menilai impor beras ini terjadi karena adanya permainan harga antar pedagang beras dan masalah distribusi yang tidak merata. Padahal, stok beras seharusnya cukup hingga masa panen raya dimulai.</p> <p>Sekjen Aliansi Petani Indonesia, M Nuruddin menilai data yang tidak jelas dari Kementerian Pertanian menyebabkan distribusi beras yang tidak merata. "Gejolak harga itu bukan karena faktor produksi petani nanam padi lalu kekurangan. Ini soal spekulatif permainan harga antar pedagang besar, sehingga konsumen terutama di perkotaan yang kelas menengah ke bawah keberatan dengan harga Rp 12 ribu per kilogram," ujar Nuruddin kepada <i>Republika.co.id</i>, Senin (15/1). Di sisi lain, tidak semua sentra beras mengalami kekurangan beras sehingga memerlukan stok beras dari impor. Apalagi saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog yang masih ada sekitar 1 juta ton dinilai cukup hingga masa panen raya Februari ini.</p>
ax	<p><b>JK Sebut Beras Impor tak akan Pengaruhi Harga Tingkat Petani</b> (<i>Republika.co.id, 15 Januari 2018</i>). Jakarta -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, impor beras tidak akan mengganggu harga beras di petani. Menurutnya, impor tersebut untuk menambah dan memperkuat cadangan beras nasional di Bulog yang saat ini sekitar 930 ribu ton. Adapun, stok beras nasional di Bulog harus berada di atas 1 juta ton.</p> <p>Jusuf Kalla menjelaskan, apabila harga beras di pasar naik maka petani juga akan ikut terkena dampak. Sebab, terdapat perbedaan antara petani pada zaman sekarang dengan petani pada zaman dahulu. Menurutnya, petani zaman dahulu petani memiliki lumbung beras yang</p>



	<p>digunakan untuk menyimpan hasil panen. Sehingga untuk konsumsi sehari-hari, petani hanya mengambil dari hasil panen saja.</p> <p>Dengan jumlah penduduk sekitar 220-260 juta jiwa, maka Indonesia membutuhkan sekitar 28 juta ton beras per tahun. Sementara, produksi beras paling tinggi yakni 30 juta ton per tahun sehingga menurut Jusuf Kalla, Indonesia tidak pernah ekspor beras. "Tidak ada pernah ekspor beras, jadi produksi kita paling tinggi 30 juta ton beras, begitu sedikit ada yang jelek (kualitasnya) bisa jadi masalah," kata Jusuf Kalla.</p>
ay	<p><b>Impor Beras Ancam Produksi Petani</b> (<i>Koran Jakarta, 12 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah diminta tidak gegabah membuka keran impor beras. Pasalnya, impor beras akan mematikan hasil produksi petani yang akan dipanen dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun pemerintah optimistis beras impor akan masuk pada akhir Januari ini dan masih jauh dari waktu panen, hal itu sangat diragukan. Sebab, impor beras tidak semudah yang dibayangkan.</p> <p>Peneliti Institute of Development for Economics and Finance (Indef), Bima Yudisthira, menegaskan rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka keran impor beras akan mengancam produksi padi pada 2018. Lahan sawah tak akan menarik untuk digarap karena pasar sudah tidak menguntungkan lagi bagi petani ketika menjual padi atau berasnya.</p> <p>Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menyebutkan beras jenis khusus itu akan masuk pada akhir Januari mendatang dan dipastikan tak akan mengganggu panen raya yang akan berlangsung pada beberapa bulan ke depan. "Jumlahnya 500 ribu ton dengan negara asalnya dari Vietnam dan Thailand. Jenisnya di luar IR 64," ungkapnya dalam jumpa pers, di Jakarta, Kamis (11/1) malam. Enggar menjelaskan, ketika beras itu masuk, maka harganya akan setara dengan beras medium. Adapun impor akan dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Dipilihnya PPI agar bisa dikontrol pemerintah.</p>
az	<p><b>Pemerintah Impor Beras 500.000 Ton, Pengamat Pertanian Angkat Bicara</b> (<i>Bisnis.com, 12 Januari 2018</i>). Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mempertanyakan keputusan untuk membuka keran impor beras sebesar 500.000 ton. Pasalnya, selama ini pemerintah, berdasarkan data dari kementerian teknis, meyakini bahwa kebutuhan beras di Indonesia cukup untuk konsumsi dalam negeri. Selain itu, keputusan untuk membuka keran impor saat ini dinilai sangat terlambat dan berpotensi menjadi mubazir jika merujuk pada data prediksi ketersediaan beras yang dimiliki Kementerian Pertanian.</p> <p>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan beras yang akan diimpor bersertifikasi khusus dan jenisnya tidak ditanam di dalam negeri. "Sebanyak 500.000 ton start awal. [Diimpor] dari berbagai negara yang ada beras. Vietnam, Thailand kita masukkan," kata Enggar di Jakarta pada Kamis (11/1/2018) malam. Menurutnya, keputusan tersebut dilakukan sambil menunggu panen raya yang diharapkan mulai terjadi pada Februari atau Maret. Pihaknya juga tak mau mengambil risiko untuk mengurangi pasokan beras yang ada. Jenis beras yang diimpor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 Tahun 2018. Namun belum diketahui bagaimana syarat impor tersebut. "Januari pasokan ini akan masuk dan terus kita masukkan," ujarnya</p>
ba	<p><b>Pemerintah Impor Beras 500.000 Ton</b> (<i>Harian Kontan, 12 Januari 2018</i>). Jakarta - Harga tak bisa bohong. Istilah ini tepat menggambarkan kondisi ketersediaan beras dalam negeri pada saat ini. Meskipun Kementerian Pertanian (Kemtan) mengklaim produksi beras surplus sekitar 10 juta ton, tapi kenyataannya harga beras meroket tajam beberapa hari ini. Harga beras jenis medium di Pasar Induk Cipinang tembus Rp 12.000 per kilogram (kg), di atas harga eceran tertinggi (HET)</p>



	<p>Rp 9.450 per kg. Sedangkan beras premium naik menjadi Rp 13.000 per kg, naik dari HET Rp 12.800 per kg.</p> <p>Melihat kondisi ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton. Beras yang diimpor adalah jenis beras khusus atau beras premium. "Saya tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan, saya mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam di dalam negeri," ujar Mendag, Kamis (11/1). Politisi Nasdem ini menjelaskan, pemerintah telah menugaskan perusahaan BUMN yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI/Persero) untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Enggar mengatakan kebijakan impor beras khusus ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Per-mendag) No 1/2018.</p> <p>Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengaku mendukung kebijakan Kemdag untuk mengimpor beras. Menurutnya, kelangkaan beras di pasaran pada saat ini terjadi karena tengah terjadi musim paceklik. Akibatnya stok beras di sejumlah daerah berkurang. Dengan adanya impor beras ini, Aprindo memastikan harga beras akan kembali stabil. "Kami mendapat kepastian dari suplier beras kalau tidak akan menaikkan harga beras, mereka akan jual sesuai HET," imbuhnya. Menurutnya, kalau impor beras ini tidak dilakukan, maka ada kekhawatiran harga beras medium akan naik terus dan berdampak pada kenaikan harga beras premium yang lebih tinggi lagi.</p>
bb	<p><b>Impor Beras Ancam Produksi Petani</b> (<i>Koran Jakarta, 12 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah diminta tidak gegabah membuka keran impor beras. Pasalnya, impor beras akan mematikan hasil produksi petani yang akan dipanen dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun pemerintah optimistis beras impor akan masuk pada akhir Januari ini dan masih jauh dari waktu panen, hal itu sangat diragukan. Sebab, impor beras tidak semudah yang dibayangkan.</p> <p>Peneliti Institute of Development for Economics and Finance (Indef), Bima Yudisthira, menegaskan rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka keran impor beras akan mengancam produksi padi pada 2018. Lahan sawah tak akan menarik untuk digarap karena pasar sudah tidak menguntungkan lagi bagi petani ketika menjual padi atau berasnya.</p> <p>Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemerintah akan mengimpor beras jenis khusus dalam beberapa pekan ke depan. Hal itu untuk menekan gejolak harga beras di dalam negeri yang mengalami kenaikan sejak akhir tahun lalu hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menyebutkan beras jenis khusus itu akan masuk pada akhir Januari mendatang dan dipastikan tak akan mengganggu panen raya yang akan berlangsung pada beberapa bulan ke depan.</p>
bc	<p><b>DPR: Jangan Ambil Gampangnya, Kurang Stok Beras Lalu Impor</b> (<i>Poskotanews.com, 12 Januari 2018</i>). Jakarta - Harga beras nasional mengalami kenaikan melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Bulog harus bekerja keras untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Selain itu, Kementerian Pertanian dan Kemendag punya tanggungjawab, jangan mudah impor. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, di DPR, Jakarta, Kamis (11/01/2018). "Bulog diharapkan bekerja keras untuk betul-betul memonitor harga, dan bisa memanfaatkan gabah hasil dari petani. Produksi nasional harus tetap ditingkatkan, dan stok pangan harus tetap dijaga," kata Agus.</p> <p>Menurut Agus, masalah kenaikan harga beras yang melampaui HET adalah tanggung jawab banyak pihak, tidak hanya Menteri Pertanian tapi juga Menteri Perdagangan. Dia juga</p>



	<p>menegaskan Pemerintah jangan sampai bergantung pada impor. Karena dampak dari impor pangan bisa menyengsarakan petani lokal. Pemerintah juga dituntut mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, sehingga, pemerintah tidak tergantung pada impor.</p> <p>Langkah Pemerintah sudah betul, sekarang Pemerintah melakukan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga beras tersebut. Tapi, ke depan dari kementerian harus menjaga betul jangan sampai harganya melebihi dari HET yang telah ditetapkan," pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu. Diketahui, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada Januari 2018, harga rata-rata beras jenis medium di Jakarta Rp 14.100 per kilogram, melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp 9.450 per kilogram. Angka ini melebihi harga beras pada awal tahun lalu sekitar Rp 9.500.</p>
bd	<p><b>Ekonom: Impor Beras Bukti Kegagalan Kementan Jaga Produksi</b> (<i>Liputan6.com, 12 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya memutuskan membuka keran impor beras. Padahal sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan jika stok beras mencukupi bahkan surplus sehingga tidak perlu impor.</p> <p>Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan dibukanya keran impor beras ini membuktikan jika data yang selama ini dimiliki oleh pemerintah terkait dengan stok beras tidak kredibel.</p> <p>"Dari berbagai negara yang ada. Dari Vietnam, Thailand, kita masukkan. Beras yang tidak ditanam di dalam negeri. Beras IR64 tidak kami impor, tetapi kami memasok beras impor," kata dia. Menurut dia, impor ini dilakukan guna mengisi pasokan beras di dalam negeri sambil menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018. Dengan adanya tambahan beras impor ini diharapkan tidak ada kekhawatiran soal kelangkaan dan kenaikan harga beras.</p>
be	<p><b>Impor Beras Bikin Harga Gabah Petani Anjlok Saat Panen?</b> (<i>Liputan6.com, 12 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah berencana membuka keran impor beras khusus untuk menurunkan harga beras yang tengah melambung. Namun, langkah impor ini dinilai justru akan membuat petani semakin menderita. Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, sebenarnya gejala kenaikan harga beras sudah terasa sejak November 2017. Namun sayangnya, pemerintah tidak memiliki persiapan untuk mengantisipasi hal tersebut.</p> <p>Menurut Bhima, jika mengutip data Kementerian Pertanian (Kementan), pada Maret 2018 produksi padi diprediksi kembali meningkat sebesar 11,9 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan ketersediaan beras sebanyak 7,47 juta ton, sementara konsumsi hanya sebesar 2,5 juta ton. Dari jumlah tersebut terdiri dari lahan panen di Jawa Barat seluas 222.186 hektare, Jawa Tengah 335.723 hektare, Jawa Timur 237.626 hektare, dan provinsi lainnya 842.856 hektare, sehingga total luas wilayah panen mencapai 1.638.391 hektare. "Artinya surplus 4,971 ton. Itu data Kementan semua. Kalau surplus kenapa harus impor. Padahal bulan Maret nanti produksi beras prediksi Kementan mencapai puncaknya," tandas dia.</p>
bf	<p><b>Perbaiki Data Beras Nasional</b> (<i>Warta Kota, 15 Januari 2018</i>). Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk melakukan perbaikan data produksi beras domestik. Data yang akurat akan menjadikan rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang stok beras di Indonesia. Kementan harus memperbaiki data produksi beras domestik, karena selama ini datanya tidak akurat," ujar pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawedaya, Minggu (14/1).</p>



	<p>Menteri Perdagangan Enggartiasto mengatakan lategori beras bukan IR64. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk menutupi kebutuhan konsumsi beras di masyarakat yakni sekitar 2.5 Juta ton per bulan dan sambil menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018. Berly melanjutkan, jika asumsi yang digunakan cukup Jauh dari kondisi yang sebenarnya dilapangan, maka estimasi yang dihasilkan tentu akan menjadi bias. Perbaikan data, lanjutnya, sangat mendesak untuk dilakukan. Jika data produksinya tidak real, maka akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku melihat sejumlah keanehan. Menurutnya, Kementan hingga saat ini mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018. Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton. Sementara tingkat konsumsi beras sekitar 2,5 juta ton. "Jika angka-angka ini benar, kita seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik," tutur Fadli.</p>
bg	<p><b>Impor Beras, Anggota DPR: Ada Permainan Mafia?</b> (<i>Tempo.co, 15 januari 2018</i>). Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso, mengatakan, jika Kementerian Perdagangan akan mengimpor beras maka harus melakukan perhitungan atau neraca beras terlebih dahulu. Ia mencurigai adanya permainan mafia untuk bisa melakukan impor.</p> <p>Awal 2018, Kementerian Pertanian mengklaim bahwa stok beras aman. Bahkan, Indonesia dikatakan tidak pernah lagi mendatangkan beras dari luar sejak setahun lalu. Indonesia akan memasuki masa panen raya di Februari mendatang. Jika diharuskan impor, Bowo menuturkan impor harus dilakukan oleh Negara. Dalam hal ini adalah Bulog. "Harus Bulog yang impor. Jangan pihak swasta atau pengusaha," kata dia.</p> <p>Mengkhawatirkan, kalau petani tengah panen dan beras impor masuk maka harga beras akan anjlok. "Harga beras akan hancur," ucap Bowo. Selain itu, ia berharap Satuan Petugas (Satgas) Pangan dari Kepolisian RI bisa menyelidiki ini. "Apakah ada penimbunan atau permainan illegal," kata dia.</p>
bh	<p><b>Pemerintah Impor 500 Ribu Ton Beras, DPR: Keputusan Ini Pil Pahit</b> (<i>Tempo.co, 15 Januari 2018</i>). Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar, Ichsan Firdaus, menilai kebijakan pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras akhir Januari ini disebabkan oleh gagalnyaantisipasi kondisi beras nasional sejak akhir 2017. "Keputusan ini memang merupakan pil pahit dari kurangnya antisipasi pemerintah," ujar Ichsan, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.</p> <p>Menurut Ichsan, pemerintah memiliki permasalahan data produksi beras yang kurang akurat. Sebab, kata dia, jika data produksi gabah nasional tahun 2017 sebesar 38,5 juta ton dan konsumsi beras nasional sekitar 31,5 juta ton, seharusnya Indonesia surplus sekitar 7 juta ton. "Tapi awal Januari 2018 ini terjadi kenaikan harga beras yang cukup mengkhawatirkan dan meluas hampir di seluruh Indonesia," katanya.</p> <p>Untuk menstabilkan harga, pemerintah telah memutuskan mengambil jalur impor beras. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pemerintah akan melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand sambil menunggu panen raya pada Februari-Maret. Beras impor itu akan masuk ke Tanah Air pada Januari.</p>



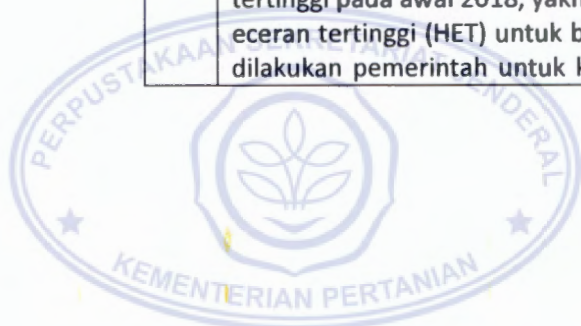
bi	<p><b>Impor Beras Jauhkan RI dari Kedaulatan Pangan</b> (<i>Koran Jakarta.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Keputusan pemerintah mengimpor beras di tengah klaim surplus beras mengindikasikan masih terjadinya ketidaksinkronan data antarkementerian. Selain itu, kebijakan impor pangan tersebut dinilai bakal merugikan petani dan makin menjauhkan Indonesia dari cita-cita kedaulatan pangan.</p> <p>Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, menilai keputusan impor beras itu menunjukkan pemerintah belum berhasil mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu, Presiden sudah sepatutnya segera mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga terkait yang tidak berhasil mewujudkan kedaulatan pangan. Dampak dari OP, nyatanya tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga, bahkan puncaknya pada awal Januari 2018 harga beras medium berada pada kisaran 11 ribu rupiah per kilogram (kg), atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan, yakni 9.450 rupiah/kg untuk wilayah Jawa.</p> <p>Jenis beras yang diimpor bukan jenis beras premium, melainkan beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri. Beras itu nantinya dijual sesuai dengan harga beras medium, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ekspor dan Impor Beras.</p>
by	<p><b>Hati-Hati dengan Impor Beras</b> (<i>Bisnis Indonesia, 13 Januari 2018</i>). Kementerian Perdagangan akhirnya hendak mengimpor 500.000 ton beras jenis khusus pada pekan terakhir bulan ini untuk memperkuat stok sekaligus menekan harga beras di tingkat konsumen. Kendati Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan beras yang akan diimpor bersertifikasi khusus dan jenisnya tidak ditanam di dalam negeri, tetap saja banyak pertanyaan mengemuka.</p> <p>Semua pemangku kepentingan semestinya harus saling bahu membahu untuk tujuan tersebut. Dengan demikian, prestasi swasembada beras dan beberapa komoditas utama lain, tidak sia-sia hanya karena ketidakmampuan kita mengelola stok. Selain itu, jangan sampai kebijakan impor itu kemudian dipolitisasi untuk memanasakan situasi menjelang pemilihan 171 kepada daerah tahun ini, apalagi berkepanjangan hingga pemilihan umum pada, tahun depan. Selain itu, kebijakan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sinyal agar para pedagang beras melepas stok, apalagi tak lama lagi panen raya menjelang.</p>
bk	<p><b>Impor Beras Bukan Berarti Gagal</b> (<i>Kompas, 13 Januari 2018</i>). Pemerintah akhirnya harus mengakui bahwa harga beras di pasar konsumen sudah tak terkendali. Lonjakan harga sudah jauh dari ketentuan harga eceran tertinggi Rp 9.450 per kilogram. Mengatasi gejala tak berlanjut, pemerintah akhirnya harus mengambil langkah impor beras premium untuk stabilisasi.</p> <p>Di sisi lain, petani yang juga konsumen beras, termasuk masyarakat selalu kelabakan mendapatkan beras dengan harga wajar saat musim paceklik. Dalam upaya mencari informasi tersebut semua pihak khususnya Kementerian Pertanian, diikuti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Bulog untuk duduk bersama membahas persoalan itu secara komprehensif. Hal ini penting untuk mengetahui secara pasti apa pemicu kekurangan komoditas pangan strategis ini di pasar.</p> <p>Kehabisan pasokan Sementara itu, dari Lampung dilaporkan stok gabah semakin menipis membuat sejumlah usaha penggilingan padi berhenti beroperasi. Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) wilayah Lampung meminta pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap data produksi padi 2017.</p>



	<p>Ketua Perpadai Lampung Midi Iswanto, Kamis (11/1). di Bandar Lampung, mengatakan, saat ini, ada sekitar 30 penggilingan di Lampung tidak beroperasi karena stok gabah habis. Kalau pun ada, jumlahnya hanya 20 ton di setiap penggilingan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pemkab Sidoarjo, meminta Bulog kembali menggelar operasi pasar di wilayahnya karena harga beras medium di tingkat konsumen jauh di atas HET. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, harga rata-rata beras medium di sejumlah pasar tradisional mencapai Rp 11.500 per kg. Harga ini masih berpotensi naik karena panen raya masih lama.</p>
bl	<p><b>Impor Beras</b> (<i>Investor Daily</i>, 13 Januari 2018). Setelah dalam dua tahun terakhir Indonesia tidak mengimpor beras, tiba-tiba tahun 2018 ketika baru berjalan beberapa hari, pemerintah mengumumkan impor beras. Volume impornya tidak bisa dibilang kecil, 500.000 ton. Ini memang beras khusus, yang tidak ditanam di Indonesia, yang lazimnya dipakai oleh hotel, restoran, dan perusahaan katering khusus. Tapi anehnya, menteri perdagangan (Mendag) beralasan bahwa impor beras dilakukan untuk menekan harga di dalam negeri, khususnya beras medium.</p> <p>Impor pangan, khususnya beras, menjadi sangat dilematis. Di satu sisi pemerintah harus melindungi petani produsen beras, agar menikmati harga jual yang pantas. Namun di sisi lain, pemerintah harus melindungi konsumen dari tingginya harga, sehingga ditetapkanlah harga eceran tertinggi (HET), meski realisasi di pasar kerap tidak berjalan. Dan celakanya, sebagian petani beras sekaligus menjadi konsumen beras, sehingga harga yang tinggi juga memberatkan mereka.</p> <p>Kita berharap bahwa impor beras yang dilakukan pemerintah adalah murni untuk menstabilkan harga. Jangan ada kepentingan lain di balik itu, misalnya demi penggalangan dana untuk pemenangan pemilu bagi kelompok atau partai tertentu. Impor pangan, termasuk beras, menjadi bisnis yang menggiurkan. Beberapa kasus terungkap bahwa korupsi impor pangan menyeret oknum partai ke jeruji besi.</p>
bm	<p><b>Impor Beras Jauhkan RI dari Kedaulatan Pangan</b> (<i>Koran Jakarta</i>, 13 Januari 2018). Jakarta - Keputusan pemerintah mengimpor beras di tengah klaim surplus beras mengindikasikan masih terjadinya ketidaksinkronan data antar kementerian. Selain itu, kebijakan impor pangan tersebut dinilai bakal merugikan petani dan makin menjauhkan Indonesia dari cita-cita kedaulatan pangan. Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan, Gunawan, menegaskan persyaratan impor balian pangan ialah karena tidak bisa ditanam di dalam negeri, kurangnya produksi dalam negeri, ketidakcukupan cadangan pangan nasional (pemerintah, pemda dan masyarakat), serta tidak boleh merugikan pelaku usaha pangan dalam negeri khususnya petani.</p> <p>Menurut dia, beras jelas bisa ditanam di Indonesia dan bisa diperluas sawahnya sehingga tidak perlu impor sehingga terwujud kedaulatan pangan. "Produksi beras ditargetkan swasembada sehingga ada program upaya khusus padi jagung kedelai (upsus pa-jale) dan telah melibatkan beberapa instansi untuk produksi dan distribusi sehingga tidak relevan merencanakan impor beras," tegas Gunawan.</p> <p>Keputusan mengimpor beras dilakukan setelah pemerintah, Satgas Pangan, dan Bulog melakukan operasi pasar (OP) pada November-Desember 2017 untuk menekan harga beras medium yang kian meningkat. Dampak dari OP, nyatanya tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga, bahkan puncaknya pada awal Januari 2018 harga beras medium berada pada kisaran 11 ribu rupiah per kilogram (kg), atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan, yakni 9.450 rupiah/kg untuk wilayah Jawa. Jenis beras yang diimpor bukan jenis beras</p>



	<p>premium, melainkan beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri. Beras itu nantinya dijual sesuai dengan harga beras medium, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ekspor dan Impor Beras.</p>
bn	<p><b>Jika Terus Impor, Harga Beras Petani Dapat Jatuh</b> (<i>Harian Ekonomi Neraca, 15 Januari 2018</i>). Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir bersyukur Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah memastikan tidak akan melakukan impor beras. Apalagi harga ditingkat petani saat ini sedang manis-manisnya dimana Harga gabah Kering Panen (GKP) mencapai Rp 5.500/kg.</p> <p>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa beras impor tersebut ditargetkan tiba di Indonesia pada akhir Januari 2018. "Saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan. Saya mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam di dalam negeri. Kami kemudian memasok beras impor. Dengan demikian, maka tidak ada kekhawatiran kekurangan pangan," katanya.</p> <p>Menurut Enggartiasto, pemerintah memproyeksi stok kembali stabil usai panen mencapai hasil yang mencukupi pada Februari atau Maret 2018. Ia memastikan bahwa pemerin tah saat ini sudah memegang kendali kembali atas harga beras yang sempat naik, melalui langkah-langkah yang di ambil, termasuk impor "Masalah perut, masalah pangan, itu menjadi prioritas," ujar Enggartiasto.</p>
bo	<p><b>Ironi Impor Beras</b> (<i>Koran Jakarta, 15 Januari 2018</i>). Belakangan pemerintah memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras khusus dari Thailand dan Vietnam untuk menjamin ketersediaan di dalam negeri dan sebagai salah satu upaya menekan harga. Beras tersebut rencananya akan mulai masuk akhir Januari 2018. Ini menunjukkan, klaim tidak impor dan sudah swasembada beras telah terbantahkan. Faktanya impor beras terus meningkat dari 0,844 juta ton pada 2014 menjadi 0,862 juta ton pada 2015 dan 1,283 juta ton pada 2016. Pada 2017 hingga bulan April telah diimpor beras 71.000 ton.</p> <p>Ketidakakuratan data produksi padi/beras mengakibatkan kebijakan beras kurang tepat. Ada disparitas besar antara laporan yang dijadikan data nasional dan kenyataan di lapangan (DA Santosa, 2017). Beras merupakan komoditas strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak, ini menentukan penyelenggaraan pangan nasional serta stabilitas sosial ekonomi. Maka, negara mesti hadir melalui penguatan kelembagaan pangan, bukan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme impor.</p> <p>Kebijakan impor beras cenderung berpihak pada kapitalis yang hanya membuahkan banyak persoalan. Kongkalikong antara pemberi dan penerima kuota impor bisa terjadi. Bahkan menciptakan kartel dan mafia impor yang mengeruk keuntungan ekonomi semata. Aparat pemerintah perlu tegas memberantas mafia impor dengan memberi sanksi berat. Pengawasan di setiap pelabuhan perlu diperketat. Sebab sering kali aturan yang keras di atas kertas, tidak diikuti pengawasan ketat di lapangan.</p>
bp	<p><b>Kebijakan Instan dan Instabilitas Harga Pangan</b> (<i>Seputar Indonesia, 15 Januari 2018</i>). Di awal tahun 2018, Indonesia sebagai negara yang memiliki ambisi besar mewujudkan ketahanan pangan, bahkan bermimpi untuk mencapai kedaulatan pangan, mulai terganggu dengan gejolak harga beberapa bahan pokok, terutama beras. Harga beras medium di pasaran mencapai titik tertinggi pada awal 2018, yakni Rp10.500 hingga Rp11.500. Ini lebih tinggi dari penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium yang berkisar Rp9.450-10.250. Regulasi harga yang dilakukan pemerintah untuk komoditas pangan seperti beras yang didasarkan atas Peraturan</p>



	<p>Menteri Perdagangan No57 Tahun 2017 dan efektif diimplementasikan sejak 1 September 2017 terbukti tidak mampu meredam kenaikan harga beras di Indonesia</p> <p>Koordinasi antar-kementerian dan lembaga negara lainnya ditambah dengan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pangan juga perlu ditingkatkan. Selain itu pemerintah perlu mewujudkan suasana yang kondusif bagi iklim usaha untuk tumbuh dan berkembangnya produksi pangan serta meminimalkan tindakan yang cenderung membuat kegaduhan dan instabilitas di pasar pangan.</p>
bq	<p><b>Beras: Swasembada Tetapi Impor</b> (<i>Harian Fajar, 15 Januari 2018</i>). Beberapa kali beliau tampil di media massa bahkan menjadi narasumber sebuah acara di televisi karena prestasi yang ditorehkan tersebut. Hal itu diklaim oleh Pak Menteri dengan tidak adanya aktivitas impor beras selama tiga tahun terakhir. Sebagaimana dikutip oleh salah satu media online katadata.co.id "Dalam sejarah pertanian Indonesia masuk tahun ketiga Indonesia swasembada pangan, khususnya beras. Kita tidak perlu data yang penting kita tidak impor," ujar Pak Menteri. Cukup disesalkan, sekelas Pak Menteri mengeluarkan statement seperti itu yakni.</p> <p>Mentan sendiri dan Kemendag. Seakan tidak ada kepercayaan diri untuk menggunakan data tersebut. Penyebabnya karena untuk memperkirakan luas panen dilakukan pendekatan eye estimate, kenyataannya yang dilakukan petugas pertanian adalah jika sudah ada satu lapangan bola dianggap satu hektare padahal itu masih kurang, dikalikan banyak maka akan over estimate.</p> <p>Mulai tahun 2017 BPS telah melakukan berbagai uji coba metode yang dianggap sangat akurat dalam menghitung produktivitas beras dan akan diaplikasikan di seluruh Indonesia tahun 2018 ini. Metode tersebut adalah Kerangka Sampel Area (KSA) yakni teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis informasi geografi (SIG) dengan bekerja sama dengan BPPT.</p>
br	<p><b>Serikat Petani: Impor Beras Langgar UU Pangan</b> (<i>Kompas, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, pemerintah gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Ini terkait dengan melambungannya harga beras dan impor yang dilakukan pemerintah sebesar 500.000 ton. Untuk itu, sebut Henry, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tidak berhasil wujudkan kedaulatan pangan. Kenaikan harga beras kali ini merugikan petani dan konsumen sekaligus. "Petani padi sendiri juga adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi," ungkap Henry dalam keterangan resmi, Minggu (14/1/2018).</p> <p>Jadi pada saat panen memang terpaksa harus langsung dijual untuk menutupi kebutuhan hidup, membayar pupuk, dan sebagainya, jadi hanya sedikit yang bisa disimpan untuk makan," terang Muhlasin. Di sejumlah daerah, seperti di Jawa Barat, kenaikan harga beras juga tak dirasakan petani dan harga panen malah rendah. "Penurunan harga disebabkan kualitas gabah yang buruk, karena banyak sawah yang terkena hama wereng. Banyak petani juga mengalami gagal panen dan puso," kata Ketua SPI Jawa Barat Tantan Sutandi.</p>
bs	<p><b>Bola Panas Impor Beras</b> (<i>Viva.co.id, 15 Januari 2018</i>). Indonesia kembali mengimpor beras. Awal 2018, pemerintah membuka keran impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Langkah yang dinilai tidak populis lantaran terjadi di tahun politik ini diharapkan bisa menekan harga beras yang saat ini sedang melonjak tinggi. Menurut Kementerian Perdagangan, keputusan impor setelah melewati rangkaian operasi pasar hingga pembahasan dengan berbagai pihak.</p>



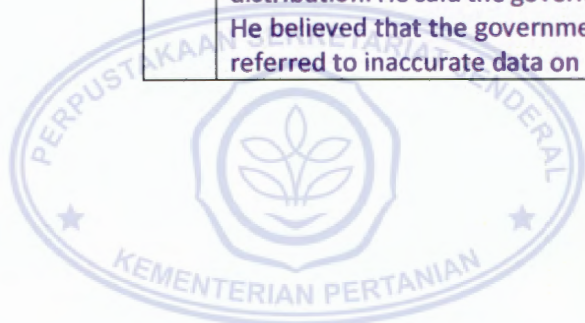
	<p>Ironis, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah sesumbar kalau Indonesia tidak akan impor beras pada 2018, karena capaian produksi cukup menggembirakan. Hal ini diungkapkannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional 2017 di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, awal Juni 2017. Namun fakta berkata lain. Di mata Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa, kenaikan harga beras sebenarnya sudah terjadi sejak Mei 2017.</p> <p>Nasib Petani Kian Mengenangkan Bicara profesi petani, kini makin mengenangkan. Petani, di mata para pemuda zaman now, bukanlah profesi yang menjanjikan. Pemerintah harus memutar otak mengembalikan muruah (kehormatan/harga diri) petani agar tidak ditinggalkan. Selain itu, paradigma budaya pertanian menggunakan lahan (on farm) juga dinilai harus diubah mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian.</p>
bt	<p><b>Dinilai Banyak Kejanggalaan, Impor Beras Ditolak</b> (<i>Republika.co.id, 15 Januari 2018</i>). Penolakan atas rencana pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand terus disuarakan. Mulai dari petani hingga pejabat tinggi negara menilai rencana impor beras itu bakal menekan para petani.</p> <p>Ketua Gabungan Kelompok Tani Sri Jaya Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sartam, meminta pemerintah menunda impor beras. "Mohon pemerintah jangan memasukkan beras impor dulu. Ini sebentar lagi kami akan panen," ujarnya, Ahad (14/1).</p> <p>Padahal, dalam waktu dekat, petani akan memasuki masa panen. "Oleh karena itu, koordinasi dan integrasi kementerian di pemerintahan perlu diperbaiki kembali," kata Viva. Ia menilai, persoalan beras bisa diselesaikan melalui koordinasi dan integrasi antarkementerian terkait. Menurut dia, perbedaan kebijakan pangan di internal pemerintah antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menjadi salah satu penyebab terjadinya persoalan pasokan beras.</p>
bu	<p><b>Lima Kejanggalaan Rencana Impor Beras</b> (<i>Republika.co.id, 15 Januari 2018</i>). Pemerintah berencana akan mengimpor 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam. Rencana impor beras ini datang menyusul tingginya harga beras dan kelangkaan di lapangan.</p> <p>Data BPS menunjukkan sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi beras 2,5 juta ton. Artinya, ada kelebihan beras 300 ribuan ton. Namun ternyata menurut versi lain terjadi kelangkaan beras yang berdampak pada mahalnya harga beras. Karena langka ini maka pemerintah pun lewat Kementerian Perdagangan akan melakukan impor beras.</p> <p>Kejanggalaan kedua, Fadli menyebut Kementerian Perdagangan mengimpor beras premium, bukan beras medium. Yang menjadi persoalan di pasar adalah kelangkaan beras medium yang dikonsumsi hampir 98 persen masyarakat. Sementara beras premium hanya dikonsumsi dua persen penduduk. Dalam pasal 39, impor pangan tidak boleh berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, dan kesejahteraan petani. Padahal, dalam waktu dekat, petani akan memasuki masa panen.</p>
bv	<p><b>Batalkan Impor Beras</b> (<i>Indopos.co.id, 15 Januari 2018</i>). Keputusan Pemerintah melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand guna menstabilkan harga beras di pasaran, menimbulkan tandatanya besar. Di satu sisi, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia mengalami surplus produksi beras. Namun di sisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan impor ratusan ton.</p>



	<p>Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, secara tegas menyatakan, rencana yang digaungkan Kemendag itu justru menunjukkan sejumlah keanehan. Keanehan pertama, katanya, rencana impor yang akan dilakukan oleh Kemendag justru menunjukkan tidak bagusnya penanganan tata kelola pangan nasional. Mendag mengaku, beras yang akan diimpor adalah beras kualitas khusus yang tidak ditanam di Indonesia. Jenis beras tersebut memiliki spesifikasi bulir patah di bawah lima persen. Meski masuk dalam golongan beras khusus, Enggartiasto memastikan komoditas pangan utama itu akan dijual dengan harga medium.</p> <p>Pemerintah sendiri telah menunjuk Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai perusahaan yang akan melakukan impor. Keputusan impor diambil karena saat ini tengah terjadi kelangkaan pasokan beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Meski pemerintah menyatakan panen masih terjadi, pasokan beras dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sementara, panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada Februari-Maret mendatang.</p>
bw	<p><b>Sepertinya Kartel Beras Lebih Berdaya ketimbang Pemerintah</b> (<i>Jpnn.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Zainut Tauhid Sa'adi yang membidangi pertanian menduga ada kartel beras yang mampu menakut-nakuti pemerintah. Akibatnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mengimpor beras di saat petani sedang panen. Zainut mengatakan, sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat mengumbar pernyataan bahwa stok beras 2018 aman karena ada panen raya hingga berlimpah.</p> <p>Karena itu, hal yang perlu dipertanyakan adalah perbedaan data antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan soal stok beras nasional. Yang menjadi masalah, lanjut politikus FPPP adalah jika impor beras itu dilakukan saat bersamaan dengan musim panen. Hal tersebut menjadi tindakan yang tidak bijaksana dan sangat melukai perasaan para petani. "Kasihannya mereka sudah bekerja keras banting tulang memeras keringat begitu panen tiba harganya jatuh dan tidak sesuai dengan harapan mereka," ucapnya.</p>
bx	<p><b>Anggota DPR Soal Impor Beras: Yang Salah Mentan atau Mendag</b> (<i>Gatra.com, 15 Januari 2018</i>). Rencana pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam menuai pro dan kontra. Termasuk suara dari parlemen. Karena rencana impor itu dilaksanakan menjelang panen. Disisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengklaim stok beras nasional cukup hingga April 2019. Menurut Zainut Tauhid Sa'adi, anggota Komisi IV FPPP DPR RI, kebijakan impor beras membuktikan Pemerintah tidak memiliki blueprint perberasan nasional dan juga menunjukkan lemahnya database yang terkait dengan ketersediaan stok beras nasional. "Pemerintah panik menghadapi gejolak kenaikan harga," katanya lewat keterangan tertulis yang diterima Gatra.com, Senin (15/1).</p>
by	<p><b>Pernyataan Mentan dan Mendag Berlawanan, Komisi IV: Siapa yang Sebenarnya Bersalah?</b> (<i>Kabar3.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Pernyataan yang keluar dari mulut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, bahwasanya Pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 500.000 Ton membuat geger masyarakat Indonesia. Zainut Tauhid yang merupakan Anggota Komisi IV DPR RI, turut memberikan tanggapannya. Menurutnya, impor beras ini merupakan bentuk kepanikan Pemerintah dalam menghadapi gejolak kenaikan harga.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat memastikan bahwa stok beras untuk tahun 2018 aman. Sebab, Indonesia tidak lagi mengalami paceklik. Dalam pernyataannya menyebutkan bahwa stok beras nasional kita tidak ada masalah, panen banyak dan stok sekitar 1 juta ton. Apa yang disampaikan Menteri Pertanian tersebut jauh dari kenyataan.</p>



	<p>Bahkan terkesan ada kebohongan dengan melakukan mark up data beras nasional hanya untuk menunjukkan capaian prestasi kerjanya. Karena nyatanya harga beras di pasaran melonjak. Hal ini membuktikan adanya ketidakseimbangan antara produksi, distribusi dan konsumsi. Serta, antara penawaran dan permintaan (supply and demand) di masyarakat.</p> <p>"Pertanyaan mendasarnya siapa yang sesungguhnya bersalah? Menteri Pertanian yang me-mark up data beras kah? Atau Menteri Perdagangan yang me-mark down data beras? Jika tidak keduanya, berarti ada pihak ketiga yaitu gurita besar yang bernama kartel dan sengaja ingin mengambil keuntungan di tengah kelemahan data birokrasi kita. Hal ini membenarkan anggapan bahwa negara memang tidak berdaya berhadapan dengan para mafioso pangan yang rakus memburu rente semata," ungkapnya sekaligus mengakhiri.</p>
bz	<p><b>Ombudsman Temukan Gejala Maladministrasi Stok dan Impor Beras</b> (<i>Antaraneews.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menemukan gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh pemerintah.</p> <p>Ombudsman menemukan gejala penggunaan kewenangan untuk tujuan lain, ketika stok di Bulog menipis dan harga beras naik, impor semestinya dilakukan untuk meningkatkan cadangan beras demi stabilisasi harga. Penunjukkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk impor dan distribusi beras dinilai Ombudsman berpotensi melanggar Perpres nomor 48/2016 dan Inpres nomor 5/2015 yang mengatur tugas impor dalam menjaga stabilitas harga dilakukan oleh Perum Bulog. Permendag nomor 1/2018 dianggap terlalu cepat dan tanpa sosialisasi sehingga berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung potensi konflik kepentingan.</p>
ca	<p><b>Stop Impor Beras, Presiden Jokowi Didesak Copot Menteri Perdagangan</b> (<i>Harianterbit.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Rencana pemerintah untuk impor beras 500.000 ton terus mendapat penolakan berbagai kalangan. Penolakan juga disampaikan sejumlah daerah yang alami surplus beras. Apalagi impor itu akan dilakukan jelang petani panen raya dan persediaan beras Bulog masih cukup dalam dua bulan ke depan. Sejumlah kalangan mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan meminta Satgas Pangan Polri mengusut dan membongkar oknum-oknum yang merekayasa kenaikan harga beras.</p> <p>Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan layak dicopot oleh Presiden. Pasalnya kedua menteri ini tidak mampu mengantisipasi dan mengendalikan kenaikan harga kebutuhan dasar rakyat," kata Alif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/01). Menurutnya, kenaikan harga beras ini menjadi persoalan hampir setiap tahun, kedua menteri ini tidak punya skema khusus untuk mengantisipasi kembali kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat itu. Enggar menjelaskan, tingginya harga beras saat ini dikarenakan minimnya ketersediaan. Pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya mengenai masalah itu, salah satunya, operasi pasar pada November dan Desember 2017. "Ternyata dampaknya tidak melakukan penurunan harga," paparnya.</p>
cb	<p><b>Unreliable Data Prompted Govt to Import Rice: Analyst</b> (<i>Thejakartapost.com, 15 Januari 2018</i>). The head of research at the Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia has questioned the validity of the government's rice data. Unreliable rice data has forced the government to import the commodity to ease prices, although the Agriculture Ministry claimed that the country's rice production was adequate. Faisal said that the government currently relied on data solely from the National Logistics Agency (Bulog), which controlled only 10 percent of the rice distribution. He said the government had no data on the other 90 percent of the rice distribution. He believed that the government had to make an urgent decision to import rice, because it had referred to inaccurate data on rice supply and demand.</p>



cc	<p><b>Gerindra Anggap Jokowi Gagal Wujudkan Janji Swasembada Pangan</b> (<i>Kompas.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta — Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mempertanyakan langkah pemerintah mengimpor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Edhy menilai, pemerintahan Jokowi-JK gagal mewujudkan swasembada pangan yang dijanjikan saat kampanye. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat kondisi pangan terbilang stabil.</p> <p>Menteri Pertanian, kata dia, pernah bilang tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi. Terakhir, Edhy juga mengingatkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye dulu berjanji kembali mewujudkan swasembada pangan. "Pak Jokowi bilang, 'Lahan sawah begitu luas, kok, beras masih impor?'," ujar Edhy menirukan kata-kata Jokowi semasa kampanye. Namun, sudah tiga tahun lebih menjabat, Edhy menilai janji itu gagal diwujudkan, terbukti dengan langkah pemerintah melakukan impor beras. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat daripada pemerintahan sebelumnya.</p>
cd	<p><b>Ombudsman Deteksi Gejala Maladministrasi dalam Pengelolaan Stok dan Rencana Impor Beras</b> (<i>Bisnis.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta -- Ombudsman melihat adanya gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras 500.000 ton yang terjadi saat ini.</p> <p>Berdasarkan pemantauan Ombudsman di 31 Provinsi pada 10-12 Januari 2018 menangkap beberapa hal yaitu adanya keluhan pedagang, stok beras pas-pasan, tidak merata dan harga meningkat tajam sejak Desember 2017. Menteri Enggar memperkirakan panen raya baru akan terjadi pada Februari dan Maret. Pihaknya mengaku tidak ingin mengambil resiko kekurangan pasokan beras. Sehingga solusi impor dinilai menjadi langkah tepat. Upaya ini disebut akan membuat masyarakat tidak perlu khawatir pada kekurangan pangan.</p>
ce	<p><b>Ada Disparitas Harga Beras Internasional Sebabkan Impor</b> (<i>Metrotvnews.com, 15 Januari 2018</i>). Kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras saat ini disebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah tingginya disparitas harga beras internasional dibandingkan dengan harga beras dalam negeri. Ketua Pengawas Persaingan Usaha, Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, hal itu yang menyebabkan Indonesia melakukan impor. Menurut data FAO tahun 2017, harga beras Vietnam sekitar US\$ 0,31 per kilogram atau setara dengan Rp4.100.</p> <p>"Sementara harga beras Thailand sekitar US\$ 0,34 per kilogram atau setara dengan Rp4.496. Sementara harga beras di Dalam negeri sekitar US\$ 0,79 per kilogram atau Rp10.447 secara rata-rata," kata Syarkawi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu, 14 Januari 2018.</p> <p>Pemerintah perlu mengadopsi sistem pemasaran online dan Pengembangan Pasar Induk Beras Nasional di Sentra-Sentra produksi beras Nasional seperti di Sulawesi Selatan, Jatim, Jateng, Jakarta - Jabar dan Sumut," terang dia.</p>
cf	<p><b>Beras Mahal, Ombudsman Curigai Adanya Maladministrasi</b> (<i>Okezone.com, 15 Januari 2018</i>). Pemerintah berencana untuk melakukan impor beras guna menalangi kelangkaan beras yang mengakibatkan lonjakan harga yang tidak wajar. Rencananya, akan ada 500 ribu ton beras yang masuk dari Vietnam.</p> <p>Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan, telah mengecek ketersediaan beras, harga, dan penyebaran stok yang ada melalui 31 perwakilan mereka. Menurutnya, hal ini dilakukan karena adanya pernyataan yang berbeda dari pemerintah. "Karena infonya berbeda. Kementan sebut stok beras cukup hingga puncak panen. Sehingga kalau impor tidakkah ini ganggu stabilitas harga ke depan," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).</p>



	<p>Menurutnya, kejadian ini tidak hanya terjadi sekali ini saja. Dia menilai, masalah suplai and demand ini seharusnya sudah mampu diselesaikan oleh pemerintah. "Ini apa tidak ada strategi kita selesaikan masalah ini?," katanya. "Tentu ada kesimpang siuran data yang perlu kita cari tahu yang sesungguhnya. Ombudsman menilai ada potensi gejala maladministrasi," tambah dia.</p>
cg	<p><b>Ombudsman Sebut Ada Maladministrasi di Keputusan Impor Beras</b> (<i>Viva.co.id, 15 Januari 2018</i>). Ombudsman RI menyarankan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk duduk bersama demi mencari jalan keluar terkait kebijakan impor beras. Sebab, kedua menteri memberikan pernyataan berbeda.</p> <p>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa persediaan beras cukup. Sementara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan stok langka dan diperlukan impor beras. Terkait kebijakan impor yang dilakukan Kemendag menjelang masa panen, kata Ahmad, akan menjadi isu sensitif. Hal itu dinilai mengabaikan prinsip kehati-hatian. "Keputusan impor beras untuk didistribusikan ke pasar khusus secara langsung dilakukan dalam masa yang kurang tepat.</p> <p>Hasil pantauan Ombudsman di 31 provinsi 10-12 Januari 2018, stok di masyarakat memang pas-pasan, tapi ada situasi menjelang panen. Diperlukan kehati-hatian," ujarnya. Atas dasar itu, Ombudsman mendorong agar efektifkan kembali fungsi koordinasi oleh Kemenko Perekonomian. "Sehingga perbedaan antarinstansi tidak perlu menjadi perdebatan publik yang tidak produktif," kata dia</p>
ch	<p><b>Ombudsman Pantau Pasokan Beras di 31 Provinsi, Ini Dia Hasilnya</b> (<i>Detik.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti masalah harga beras tinggi hingga akhirnya keluar keputusan impor. Menurut Ombudsman Menteri Pertanian menyatakan stok beras surplus, namun harga beras melonjak tinggi yang diindikasikan karena kelangkaan stok.</p> <p>Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, akhirnya memutuskan mengimpor beras untuk mengamankan pasokan di lapangan. "Ada kesimpangsiuran soal data dan (Ombudsman) mencari tahu kebenaran sesungguhnya," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/1/2018).</p> <p>Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah menambahkan, Ombudsman mengharapkan dua kementerian tersebut bisa duduk bersama membahas secara baik mengenai situasi harga beras yang mengalami kenaikan. "Kami harap Arman dan Enggar bisa duduk bersama. Apalagi ada Darmin (Menko Perekonomian) yang juga cukup berpengalaman untuk mengatasi masalah ini," tutur Ahmad.</p>
ci	<p><b>Ombudsman Impor Beras Abaikan Prinsip Kehati-hatian</b> (<i>Industry.co.id, 15 Januari 2018</i>). Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan, terjadi perbedaan informasi antara data Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). "Masalahnya, Menteri Pertanian menyatakan stok beras cukup, sementara Menteri Perdagangan menyatakan stok langka, sehingga perlu impor beras," kata Amzulian saat jumpa pers di Kantor Ombudsman Jakarta, Senin (15/1/2018) Menurutnya, Kementan kerap menyatakan stok beras surplus dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.</p> <p>Hal ini, didasarkan pada perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil. Kondisi tersebut, sekaligus mengindikasikan kemungkinan besar ada proses markup data produksi, dalam model perhitungan yang digunakan selama ini.</p>



	<p>"Pernyataan beras surplus ini, tanpa didukung data yang akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras di masyarakat. Sehingga, pengambilan keputusan ini berpotensi keliru," ujar Amzulian.</p>
cj	<p><b>Ombudsman ke Pemerintah: Hentikan Membuat Opini Surplus Beras</b> (<i>Detik.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Setelah harga beras naik tinggi, pemerintah memutuskan impor beras sebanyak 500.000 ton. Dari hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), terdapat indikasi maladministrasi dalam proses impor beras dan soal data stok yang menjadi acuan pemerintah memutuskan impor.</p> <p>Selanjutnya, Ombudsman memberikan masukan buat pemerintah. Pertama, lakukan pemerataan stok, tingkatkan koordinasi dengan kepala daerah untuk mengatasi penahanan stok lokal secara berlebihan. "Kadangkala Bulog kesulitan untuk operasi pasar karena Pemda menahan," kata Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/1/2018). Terakhir, efektifkan kembali fungsi koordinasi oleh Kemenko Perekonomian sehingga perbedaan antar instansi tidak perlu menjadi perdebatan publik yang tidak produktif.</p>
ck	<p><b>Asosiasi Pemkab Pertanyakan Rencana Kemendag Mengimpor Beras</b> (<i>Jpnn.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimpor 500 ribu ton beras mendapat reaksi penolakan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Menurut Ketua Umum APKASI Mardani Maming, kebijakan impor beras patut dipertanyakan karena petani baru saja panen raya. Mardani mengatakan, selama ini Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan setok beras nasional sudah surplus. Anehnya, Kementerian Perdagangan justru mengimpor beras.</p> <p>Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu menambahkan, Kemendag seharusnya memperhatikan nasib petani. Ketika sedang ada panen raya tapi Kemendag malah mengimpor beras, katanya, hal itu sama saja berdampak pada perekonomian petani. "Masuknya beras dari luar ini akan berdampak pada harga jual beras petani kita. Karena hasil petani kita akan kalah bersaing dengan beras dari luar tersebut," paparnya.</p> <p>"Saat ini, petani di Tanah Bumbu, hanya mendapatkan pupuk rata-rata 3-4 ton. Kami sudah mencoba untuk mendapatkan bibit dan memberikan pupuk tanaman dengan benar. Kami sudah buktikan di Tanah Bumbu bisa panen sampai tujuh ton, asal bibitnya jelas dan pupuknya pun datang tepat waktu," pungkasnya. <b>Ombudsman ke Pemerintah: Hentikan Membuat Opini Surplus Beras</b> (<i>Medanbisnisdaily.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Setelah harga beras naik tinggi, pemerintah memutuskan impor beras sebanyak 500.000 ton. Dari hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), terdapat indikasi maladministrasi dalam proses impor beras dan soal data stok yang menjadi acuan pemerintah memutuskan impor.</p>
cl	<p><b>Ombudsman Minta Kementan Stop Buat Opini Surplus Beras Berlebihan</b> (<i>Akurat.co, 15 Januari 2018</i>). Ombudsman RI (ORI) menyarankan agar Kementerian Pertanian yang di gawangi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, tidak terlalu over dalam membuat opini publik yang mengatakan bahwa Indonesia selalu surplus beras. Padahal dalam realitas di lapangan stok beras di pasar maupun di gudang perum Bulog pun semakin menipis dan tidak mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harga melonjak sejak Desember lalu.</p> <p>Ombudsman pun menyarankan agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, luas tambah tanam, benih subsidi. Pemberantasan hama. Hal ini agar memberikan kepastian data panen agar pemerintah tidak salah mengambil kebijakan atau terjadi over opini. Terkait data di atas, Ombudsman meyakini bahwa informasi yang didapat di</p>



	<p>daerah sangat kredibel dan terpercaya karena dari pantauan pegawai ombudsman, dipadukan dengan laporan pedagang dan pantauan media.</p> <p>Oleh karena itu ombudsman merasa penting untuk menggerakkan kantor perwakilannya di 31 provinsi untuk memberikan informasi ini, karena beras ini urusan semua orang, urusan perut. Tentu melalui pantauan kami sudah sangat mewakili sehingga kita tidak melakukan tebak-tebakan," tegas Amzulian Rifai, Ketua Ombudsman, di kesempatan yang sama.</p>
cm	<p><b>Ombudsman Cium Ada Margin Rp 1 Triliun di Impor Beras, Serius?</b> (<i>Jawapos.com, 15 Januari 2018</i>). Ombudsman Republik Indonesia mensinyalir ada gejala maladministrasi terkait rencana impor beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Selisih harga beras impor dengan harga beras yang dilempar ke pasar untuk meredam kenaikan diperkirakan cukup fantastis, mencapai Rp 1 triliun. "Apakah margin yang cukup tinggi ini. Katakanlah harga beras impor sampai di Jakarta Rp 7000. Dilempar ke pasar dengan harga Rp 9000, agar harga turun menjadi Rp 10.500 dari saat ini yang mencapai Rp 12.500. Maka Rp 9.000 dikurangi Rp 7.000, ada margin Rp 2000, bila dikali 500.000 ton hasilnya Rp 1 Triliun, ini keuntungan siapa?" kata Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (15/01).</p> <p>Selain itu, gejala maladministrasi juga terjadi karena beras yang langka adalah beras kualitas medium. Namun, Kemendag melakukan impor untuk beras khusus. "Impor dilakukan karena harga beras umum naik tapi yang diimpor adalah beras khusus. Apabila diimpor beras khusus, padahal sudah ada skema rutin yang dilakukan dengan proses izin. Ini sinyal bagi kami melihat adanya gejala maladministrasi," lanjutnya.</p> <p>Alamsyah mengingatkan pentingnya dilakukan koordinasi antara berbagai pihak baik Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian dan Kemendag terkait dengan kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah.</p>
cn	<p><b>Ombudsman Sarankan Pemerataan Stok Beras</b> (<i>Antaranews.com, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pemerintah untuk fokus meratakan stok beras agar tidak terjadi maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras serta mencegah ketidakpercayaan publik. "Pemerintah harus bisa mengkoordinir kepala daerah untuk tidak menahan stok," kata anggota Ombudsman Alamsyah Saragih saat jumpa pers di Jakarta, Senin. Ombudsman meminta pemerintah untuk tidak membangun opini stok beras surplus agar tidak membuat optimisme semu dan memicu ketidakpercayaan masyarakat. Ombudsman memantau pasokan beras di 31 provinsi di Indonesia pada 10-12 Januari lalu dan menemukan sebaran stok beras tidak merata. Ombudsman meminta pemerintah memberikan dukungan yang maksimal kepada Badan Pusat Statistik agar dapat menyediakan data produksi dan stok yang akurat.</p> <p>Pemerintah juga diharapkan agar mengefektifkan kembali fungsi koordinasi oleh Kemenko Perekonomian sehingga perbedaan antar instansi tidak perlu menjadi perdebatan publik. Ombudsman RI menemukan gejala maladministrasi terhadap pengelolaan data stok dan rencana impor beras 500.000 ton oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan berencana mengimpor beras khusus dari Vietnam dan Thailand untuk menekan harga beras medium yang meningkat di pasar.</p>
co	<p><b>Impor Beras, Jokowi Diminta Evaluasi Mentan Amran</b> (<i>Jurnas.com, 18 Januari 2018</i>). Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dinilai gagal menjadikan Indonesia sebagai swasembada pangan. Hal itu terkait kebijakan pemerintah soal impor beras sebanyak 500.000 ton.</p>



	<p>Ketua DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Bidang Media dan Propaganda, Pilian Hutasoit mengatakan, sebelum dilantik sebagai menteri, Amran berjanji akan mengundurkan diri dari kabinet Jokowi jika selama tiga tahun gagal menjadikan Indonesia swasembada pangan. "Dimana Mentan pernah berikrar, jika Indonesia tidak menjadi swasembada pangan akan mengundurkan diri. Itu seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Jokowi," kata Pilian, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (18/1).</p> <p>Sementara, untuk bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 100.000 unit pada 2016 dan 80.000 unit pada tahun 2015. "Ini sama saja mencederai citra Presiden Jokowi yang pro rakyat dan petani," tegas Pilian. Kata Pilian, reshuffle kabinet yang baru dilakukan Presiden Jokowi belum sempurna. Meski mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang mengangkat Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).</p>
cp	<p><b>Komisi VI Cengar Mendag dan Bulog soal Impor Beras</b> (<i>Okezone.com, 18 Januari 2018</i>). Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah. Dalam rapat kali ini, pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Perdagangan Enggartisto Lukita, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Djarot Kusumayakti serta Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Andriyani. Dalam rapat tersebut, para anggota komisi VI DPR RI mencecar pemerintah dengan sejumlah pertanyaan. Khususnya segala yang terkait dengan proses impor beras yang dilakukan pemerintah.</p> <p>"Tanggal 23 November 2017 Mentan bilang, stok sampai Mei 2018. 7 Desember 2017 Bulog mengatakan stok 1,1 juta akan sampai April 2018. Jadi persoalan (impor beras) jangan ditarik pada siapa yang boleh impor, PPI atau Bulog. Harusnya betulkah kita tidak ada stok beras," jelasnya. Lebih jauh dirinya mengatakan, berdasarkan data satelit, terlihat bahwa pada Januari 2018, akan ada panen di 854.369 ha lahan dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 4,2 juta ton.</p>
cq	<p><b>Pengusaha: Mentan Sebut Stok Beras 1,2 Juta Ton Itu Beras Raskin Tak Layak Jual</b> (<i>Merdeka.com, 18 Januari 2018</i>). Pemerintah Jokowi-Jk resmi melakukan impor 500.000 ton beras dari Thailand, Vietnam dan Pakistan. Impor dilakukan untuk meningkatkan cadangan beras dan menjaga ketersediaan beras.</p> <p>Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid mengatakan, impor ini perlu dilakukan karena stok beras medium berkurang. Akibat kekurangan tersebut harga beras di pasar melambung tinggi. "Saya sudah 40 tahun di pasar induk Cipinang baru kali ini saya menemukan harga beras tertinggi yang tidak jelas, harga sampai Rp 13.000- Rp 14.000," katanya dalam sebuah diskusi di Sekretariat Iluni Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Kamis (18/1).</p> <p>"Bapak menteri berkali-kali mengatakan stok lebih dan berlebih. Itu bukan sekali dua kali. Berkali-kali beliau mengatakan. Saya mengasih masukan kepada beliau 'Pak Januari Februari akan terjadi kekurangan beras medium'. Tapi bapak menteri mengatakan selalu surplus dan surplus. Seandainya data beliau benar dan valid tidak pernah terjadi harga beras seperti ini," jelasnya.</p>
cr	<p><b>Tak Puas dengan Mendag, Komisi VI DPR akan Bentuk Tim Pengawas Impor Beras</b> (<i>Kompas.com, 18 Januari 2018</i>). Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyebut pihaknya berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Hal ini diungkapkan Teguh saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan dan pihak terkait mengenai kebijakan impor beras di gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).</p>



	<p>Pada rapat dengar pendapat hari ini, sejumlah pandangan dan pertanyaan dikemukakan, baik dari anggota Komisi VI dan Kemendag bersama Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan pihak terkait lainnya. Namun, rapat tersebut belum mencapai kesepakatan atau kesimpulan apapun karena Enggar harus pamit untuk ikut rapat terbatas. Teguh memutuskan sidang hari ini ditutup untuk kemudian ditunda hingga jadwal berikutnya yang belum ditentukan.</p>
cs	<p><b>Data Pangan Pemerintah tak Kompak, DPR Tolak Impor Beras</b> (<i>Republika.co.id, 18 Januari 2018</i>). Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia berargumen, pemerintah tidak memiliki data tunggal terkait pangan. Padahal, data itu yang dijadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Karenanya, Rieke beranggapan, kebijakan impor bukan solusi yang tepat. "Kalau belum ada data yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai kondisi riil petani kita, tolak impor beras," kata dia, usai menghadiri rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (18/1).</p> <p>Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, beras impor tidak akan dilepas ke pasar. Namun, akan digunakan untuk memperkuat stok cadangan beras pemerintah.</p>
ct	<p><b>Bahas Impor Beras, DPR akan Rapat Bareng Mendag dan Mentan</b> (<i>Detik.com, 18 Januari 2018</i>). Jakarta - Komisi VI DPR RI berencana mengundang Kementerian Pertanian untuk menggelar rapat gabungan bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu lantaran data yang dimiliki kedua kementerian itu dinilai masih belum sinkron. Kementan sendiri sebetulnya berada dalam ranah Komisi IV DPR, namun Komisi VI ingin mengundang Kementan untuk bisa membahas beberapa hal terkait dengan data soal beras.</p> <p>Ketua Komisi VI Teguh Juwarno, mengatakan selama ini mengatakan Kementan mengklaim bahwa stok beras yang dimiliki mencukupi dan mampu untuk melakukan swasembada. Namun di sisi lain, Kemendag justru membuka keran impor sebanyak 500.000 ton.</p> <p>Teguh mengatakan, rencana pembentukan tim pengawas itu dilakukan karena anggota dewan melihat adanya ketidaksamaan data beras antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Selain itu, data-data beras dari pedagang juga belum cukup jelas didapatkan. Kendati begitu, Teguh belum bisa memastikan kapan tim pengawas tersebut terbentuk. Dia hanya mengatakan bahwa Komisi VI akan sesegera mungkin membahas rencana itu dan membentuknya. "Tim pengawas dari Komisi VI dari semua fraksi, sesegera mungkin dibentuk. Rapat gabungan juga akan bicarakan dengan komisi VI. Prinsi kita sudah ada komunikasi. Kita akan lakukan evaluasi," pungkasnya.</p>
cu	<p><b>Ekonom UI: Harga Beras Tinggi karena Masalah Pasokan</b> (<i>Republika.co.id, 18 Januari 2018</i>). Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya meragukan ulah mafia dalam kenaikan harga beras saat ini. Sebab, tingginya harga beras terjadi cukup masif dan merata di seluruh Indonesia. Kenaikan harga bukan hanya terjadi di DKI Jakarta. Setiap pekan, ia mengaku melakukan pengecekan harga pangan untuk semua provinsi. Kenaikan harga beras tersebar di Kalimantan bahkan pernah mencapai lebih dari Rp 13 hingga Rp 13.500 per kilogram (kg). Begitu juga kenaikan harga beras di Sumatra Barat, Riau dan wilayah lainnya.</p> <p>Beras merupakan komoditas yang sangat strategis dari segi makanan pokok. Komoditaa ini juga berkontribusi dalam menyumbang inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Desember sudah terjadi kenaikan harga yang berdampak padakontribusinya terhadap inflasi sebesar 0,6 persen pada 2017.</p>



cv	<p><b>Impor Beras Dinilai Bakal Berdampak ke Penurunan Harga Gabah</b> (<i>Detik.com, 18 Januari 2018</i>). Jakarta - Berdasarkan informasi yang dihimpun Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), secara historis gejolak harga beras mulai dirasakan sejak November 2017 yang terus merangkak naik. Awal pekan Januari 2018 Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita langsung merespons dengan keputusan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.</p> <p>Berbeda dengan Mendag, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman justru menyampaikan persediaan beras cukup. Kementan mengklaim bahwa sepanjang tahun 2017 Indonesia telah memproduksi gabah sebanyak 80 juta ton. Dengan angka rendemen 63 persen maka didapat beras sekitar 50 juta ton atau surplus sekitar 10 - 20 juta ton.</p> <p>Di sisi lain Mendag menyatakan bahwa stok beras menipis yang menyebabkan harga naik sehingga harus impor. Menunjuk kondisi tersebut PISPI mendorong agar Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi Menteri-menteri terkait yang menimbulkan kegaduhan dimasyarakat. Untuk itu Presiden perlu menginvestigasi, selain melalui satgas pangan, terhadap data pangan yang tidak valid dan dugaan mafia pangan dalam keputusan impor beras.</p>
cw	<p><b>Kejanggalan Menyelimuti Impor Beras Bulog</b> (<i>Republika, 19 Januari 2018</i>). Pemerintah kukuh mengambil jalan pintas mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dengan alasan untuk merespons harga beras yang terus melambung di dalam negeri. Fakta bahwa panen padi mulai terjadi di sejumlah daerah dan panen raya akan dilakukan pada akhir Januari sampai Februari nanti tak lantas membatalkan niat tersebut. Data-data surplus beras yang disajikan sejumlah daerah pun tak juga menggugah pemerintah. Mengapa pemerintah begitu ngotot mengimpor beras? Terdapat tiga hal yang patut dipertanyakan dari kebijakan impor beras ini.</p> <p>Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menilai, terdapat keanehan dari perbedaan data antara dua kementerian pemerintah terkait beras. Di satu sisi, dikatakan surplus, di sisi lain defisit. Kemudian, kata dia, beras yang diimpor juga tidak sesuai dengan kebutuhan. Ia menyatakan kebijakan tersebut menjadi tidak relevan jika pemerintah memaksakan barang yang diimpor adalah beras khusus (premium). Pemerintah berargumen bahwa langkah impor diambil sebagai solusi untuk mengisi kekurangan pasokan dan menurunkan harga yang terjadi pada beras medium.</p>
cx	<p><b>Enggar Kelabakan</b> (<i>Rakyat Merdeka, 19 Januari 2018</i>). Komisi VI DPR kemarin, menggelar rapat dengan Menteri Perindustrian Enggartiasto Lukita perihal impor beras. Dalam rapat yang berlangsung lima jam itu, Enggar kelabakan karena dicecar habis soal keputusannya mengimpor 500 ribu ton beras. Meski begitu, Enggar memastikan akan tetap mengimpor untuk mengamankan stok nasional.</p> <p>Rapat yang digelar di kompleks gedung DPR ini berlangsung panas sejak dimulai pukul 10 pagi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VI Teguh Juwarno. Selain Mendag dan jajarannya, sejumlah perwakilan mitra Komisi VI DPR juga terlihat hadir. Mereka adalah Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN Agro Wahyu Kuncoro, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Agus Andiyani dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti.</p> <p>Anggota Komisi VI DPR rupanya tak puas dengan penjelasan Enggar tersebut. Anggota Komisi VI Abdul Wahid misalnya mempertanyakan data stok beras yang tersebar di masyarakat yang isinya antara lain perbedaan data stok yang dimiliki Kementan dan Kemendag. Menurut dia, Kementan selalu mengklaim stok beras yang dimiliki pemerintah aman karena panen selalu terjadi. Akan</p>



	<p>tetapi, data dari Kemendag justru menunjukkan data stok beras yang menipis sehingga mengharuskan impor. "Ada simpang siur antara Kemendag dan Kementan. Akibat statement Menteri Pertanian, sebenarnya ada masalah harga Contoh data Kementan tidak akurat Harus ada rapat gabungan," ujarnya.</p> <p>Teguh pun memutuskan menutup rapat untuk kemudian dilanjutkan lagi setelah 28 Januari. Rapat akan kembali dilanjutkan agar DPR bisa terus memantau dan mengikuti perkembangan dari langkah pemerintah dalam memutuskan untuk melakukan impor beras. "Kita juga ingin memastikan bahwa impor apabila terjadi enggak akan buat petani kita tidak bisa menikmati harga yang layak. Kita ingin ada tim yang turun untuk evaluasi sebenarnya Kita data soal ketersediaan beras juga enggak jelas. Menteri tadi akui banyak gudang yang belum melapor. Pemerintah punya kewenangan untuk itu. Tim akan turun untuk investigasi itu," tuntasnya.</p>
cy	<p><b>Tolak Impor Beras, GP Ansor Ingin Pemerintah Pastikan Data Stok Beras</b> (<i>Beritaraonline.co.id, 19 Januari 2018</i>). Kebijakan pemerintah yang ingin menurunkan harga beras dengan mengimpor 500.000 ribu ton beras harus ditolak karena tidak didasarkan pada data dan berdampak pada nasib petani yang sebentar lagi akan melakukan panen raya, "Poin masalahnya ada pada sengkabut tidak sinkronnya data-data yang dimiliki pemerintah, dari satu kementerian dengan kementerian lain berbeda, bagaimana bisa data riil saja tidak ada, kemudian pemerintah merencanakan impor beras," kata Adhe Musa Said, Ketua Bidang Pertanian GP Ansor di Jakarta, Kamis (18/1/2018).</p> <p>Adhe juga mengindikasikan akan adanya spekulasi beras yang turut bermain, oleh karena itu pemerintah perlu mendorong agar Satgas Pangan yang memantau kemungkinan adanya pihak yang sengaja mengacaukan harga beras di pasaran untuk segera bertindak.</p>
cz	<p><b>Politik Impor Beras</b> (<i>Jawa Pos, 19 Januari 2018</i>). Beberapa waktu terakhir ini, soal impor beras menjadi salah satu trending topic di Indonesia. Sayangnya, lagi-lagi perdebatan yang tersaji di media sosial lebih kental nuansa politiknya ketimbang substansi masalahnya. Singkatnya, yang anti-Jokowi menuding rezim ini gagal karena pernah berjanji untuk tak pernah impor beras lagi. Sedangkan pro-Jokowi membela diri bahwa ini adalah keniscayaan. Sebuah perdebatan yang njelehi dan tak menyelesaikan masalah.</p> <p>Seharusnya momen seperti ini menjadi tonggak pengingat bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara agraris. Petani sebenarnya adalah mayoritas dan menjadi tonggak perekonomian. Pelajaran IPS SD mengajari kita bahwa 75 persen penduduk Indonesia hidup di desa-desa.</p> <p>Kritik juga untuk masyarakat urban atau netizen. Mereka berteriak-teriak ketika pemerintah mulai membuka keran impor. Alasannya, impor akan mematikan produk dalam negeri. Mereka hanya berteriak tanpa berpikir bahwa kenaikan harga eceran beras di masyarakat sudah melebihi toleransi (beras medium naik sekitar Rp 2 ribu, dari Rp 9 ribu ke Rp 11 ribuan).</p> <p>Selain itu, para pengkritik ini tak mengajukan solusi sama sekali. Ketika harga komoditas Pertanian anjlok, seperti bawang merah pada September 2017 lalu, ke mana mereka? Tak ada satu pun yang membela. Padahal, penderitaan para petani ketika harga jeblok berarti kehidupan yang mengerikan. Mereka akan tenggelam dalam jerat utang para tengkulak.</p>
da	<p><b>Beras Impor Akan Tiba Akhir Bulan</b> (<i>Indo Pos, 19 Januari 2018</i>). Rawe - rawe rantas malang-malang putung. Beras di depan mata. Kendati banyak sorotan rencana impor beras rupanya tak terbendung. Impor beras didepan mata. Padahal versi para penolak impor beras menyebut stok beras di tanah air melimpah dan masih cukup dalam tempo dua bulan. Selain itu impor beras</p>



	<p>tersebut bertepatan dengan momen panen para petani. Rencana impor pun dituding hanya menguntungkan para importir. Spekulasi mengeruk untung di tengah kesulitan yang mencekik masyarakat. Impor beras dari Vietnam dan Thailand itu diklaim tidak cukup punya landasan kuat. Karena itu, impor besar khusus itu harus dibatalkan.</p> <p>Ketua Umum Koperasi Pasar Induk beras Cipinang Zulkifly Rasyid mengambil posisi mendukung pemerintah. Mendukung penuh rencana pemerintah mendaratkan 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam. Pasarnya, harga beras terus membengkak. Berdasarkan harga eceran tertinggi (HET), beras medium ditetapkan sebesar Rp 9.450 per kg. Lalu, harga beras premium bertengger di kisaran Rp 12.800 per kg.</p>
db	<p><b>Stop Impor Beras, PISPI : Sarankan Pemerintah Bentuk Kelembagaan Pangan dan Investigasi Mafia Pangan!</b> (<i>Kabar3.com, 19 Januari 2018</i>). Berdasarkan informasi yang dihimpun Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), secara historis gejolak harga beras mulai dirasakan sejak November 2017 yang terus merangkak naik. Awal pekan Januari 2018 Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita langsung merespon dengan keputusan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.</p> <p>Berbeda dengan Mendag, Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru menyampaikan persediaan beras cukup. Kementan mengklaim bahwa sepanjang tahun 2017 Indonesia telah memproduksi gabah sebanyak 80 juta ton. Dengan angka rendemen 63 persen maka didapat beras sekitar 50 juta ton atau surplus sekitar 10 - 20 juta ton.</p> <p>Menurut Ketua Dewan Pengawas BPP PISPI, Salman Dianda Anwar bahwa seharusnya persediaan beras tidak berkurang, terlebih Bulog masih memiliki persediaan beras digudang sebesar 800-900 ribu ton. Untuk menstabilkan harga beras sampai pertengahan Februari ketika awal masa panen raya padi terjadi. "Sehingga secara tegas PISPI menolak impor beras, karena akan berdampak pada penurunan harga gabah dan beras petani disaat musim panen pada bulan Februari-April 2018", ujar Salman dalam keterangan kepada Kabar3.com.</p> <p>Menunjuk kondisi tersebut PISPI mendorong agar Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi Menteri-menteri terkait yang menimbulkan kegaduhan dimasyarakat. "Untuk itu PISPI mendesak presiden melakukan investigasi selain melalui Satgas Pangan terhadap data pangan yang tidak valid dan adanya dugaan mafia pangan dalam keputusan impor beras", tutup Salman kepada awak media hari ini (19/01).</p>
dc	<p><b>Akademisi Kritik Kebijakan Impor Beras yang Dilakukan Jelang Panen Raya</b> (<i>Kompas.com, 19 Januari 2018</i>). Akademisi dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai impor beras yang dilakukan pemerintah terlambat. Sebab, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan impor beras pada awal tahun 2018.</p> <p>Padahal masa panen padi dari petani akan berlangsung pada Maret 2018. Dengan adanya panen tersebut, ditakuti beras impor yang masuk akan membuat harga gabah di tingkat petani turun. Seharusnya pada saat harga beras mulai naik disebabkan stok beras menipis, pada bulan September dan Oktober, segera mengeluarkan keputusan untuk melakukan impor.</p>
dd	<p><b>Impor Beras Harusnya Oktober, Bukan Jelang Musim Panen</b> (<i>Republika.co.id, 19 Januari 2018</i>). Pemerintah dinilai mengeluarkan kebijakan impor beras di waktu yang tidak tepat. Pengurus Himpunan Alumni (HA) IPB Fathoni Ali menyayangkan sikap pemerintah yang terlambat melakukan impor. Seharusnya impor dilakukan pada saat harga beras mulai naik disebabkan stok beras menipis pada September dan Oktober tahun lalu. Sebab pada bulan tersebut, masa panen masih</p>



	<p>cukup lama. "Sementara Januari ini sudah mendekati masa panen," ujar dia saat mengikuti diskusi bulanan yang diadakan Iluni UI, di kampus UI Salemba Jakarta.</p> <p>Dosen Ekonomi Politik FE UI ini menyatakan kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Oktober 2017. Bank Indonesia (BI) mencatat harga beras mengalami kenaikan sejak Desember 2017 yang seharusnya tidak terjadi jika pasokan beras memadai. "Hal ini diperkuat dengan panen akhir 2017 yang diserang wereng di beberapa daerah sehingga mengindikasikan stok beras memang kurang," ujar Berly.</p>
de	<p><b>Enggar Kelabakan</b> (<i>Rmol.co, 19 Januari 2018</i>). Komisi VI DPR kemarin, menggelar rapat dengan Menteri Perindustrian Enggartiasto Lukita perihal impor beras. Dalam rapat yang berlangsung lima jam itu, Enggar kelabakan karena dicecar habis soal keputusannya mengimpor 500 ribu ton beras. Meski begitu, Enggar memastikan akan tetap mengimpor untuk mengamankan stok nasional.</p> <p>Rapat yang digelar di kompleks gedung DPR ini berlangsung panas sejak dimulai pukul 10 pagi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VI Teguh Juwarno. Selain Mendag dan jajarannya, sejumlah perwakilan mitra Komisi VI DPR juga terlihat hadir. Mereka adalah Deputy Bidang Usaha Kementerian BUMN Agro Wahyu Kuncoro, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Agus Andiyani dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti.</p> <p>Anggota Komisi VI DPR rupanya tak puas dengan penjelasan Enggar tersebut. Anggota Komisi VI Abdul Wahid misalnya mempertanyakan data stok beras yang tersebar di masyarakat yang isinya antara lain perbedaan data stok yang dimiliki Kementan dan Kemendag. Menurut dia, Kementan selalu mengklaim stok beras yang dimiliki pemerintah aman karena panen selalu terjadi. Akan tetapi, data dari Kemendag justru menunjukkan data stok beras yang menipis sehingga mengharuskan impor. "Ada simpang siur antara Kemendag dan Kementan. Akibat statement Menteri Pertanian, sebenarnya ada masalah harga. Contoh data Kementan tidak akurat. Harus ada rapat gabungan," ujarnya.</p> <p>Teguh pun memutuskan menutup rapat untuk kemudian dilanjutkan lagi setelah 28 Januari. Rapat akan kembali dilanjutkan agar DPR bisa terus memantau dan mengikuti perkembangan dari langkah pemerintah dalam memutuskan untuk melakukan impor beras. "Kita juga ingin memastikan bahwa impor apabila terjadi enggak akan buat petani kita tidak bisa menikmati harga yang layak. Kita ingin ada tim yang turun untuk evaluasi sebenarnya. Kita data soal ketersediaan beras juga enggak jelas. Menteri tadi akui banyak gudang yang belum melapor. Pemerintah punya kewenangan untuk itu. Tim akan turun untuk investigasi itu," tuntasnya.</p>
df	<p><b>Boleh Saja Impor Beras, Asal Tidak Jelang Musim Panen</b> (<i>Jpnn.com, 19 Januari 2018</i>). Bank Indonesia (BI) sendiri mencatat harga beras mengalami kenaikan sejak Desember 2017 yang seharusnya tidak terjadi jika pasokan beras memadai. Hal ini diperkuat dengan panen akhir tahun 2017 yang diserang wereng di beberapa daerah sehingga mengindikasikan stok beras memang kurang," kata Berly dalam diskusi bulanan yang dihelat Iluni UI di Kampus UI Salemba, Jakarta, Kamis (18/1).</p> <p>Beras yang ada saat ini adalah beras premium (mahal) dan beras rasta. Bukan beras medium. Beras medium sudah langka. Perlu ditambah dengan impor. Yang penting, impor berasnya jangan dilakukan menjelang masa panen. Kalau tidak dilakukan impor beras Januari ini, stok beras sudah sangat menipis," papar Zulkifli.</p>



	<p>Bustanul juga menyampaikan pendapat senada. Menurut dia, impor beras bukan hal yang tabu. "Impor kali ini menjadi heboh karena tahun ini adalah tahun politik," kata Bustanul. Sementara itu, Fathoni menyesalkan sikap pemerintah yang terlambat melakukan impor. Menurut dia, pemerintah harus melakukan impor beras pada September dan Oktober saat harga beras mulai naik.</p>
dg	<p><b>Iluni UI Anggap Impor Beras Bukan Hal Tabu</b> (<i>Bisnis.com, 19 Januari 2018</i>). Pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) berpendapat, Impor beras bukanlah hal yang tabu selagi pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 250 juta penduduk sepanjang tahun. Pemerintah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan pangannya. Jika kebutuhan beras dalam negeri tidak dibantu impor di saat musim paceklik, dipastikan harga beras akan semakin mencekik dan menyengsarakan rakyat.</p> <p>Menurut Ketua KPIBC Zulkifli Rasyid, dirinya lah yang pertama kali meneriakan perlunya impor beras. Sebab, stok beras di gudang-gudang beras sudah menipis. Yang ada tinggal beras Raskin atau beras Rasta (rakyat sejahtera). Sementara harga beras sudah mulai naik. Jika tidak dilakukan import, konsumen beras khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan kesulitan membeli beras dan dipastikan harganya akan semakin meningkat.</p> <p>Selain itu, lanjut Zaadit Taqwa, BEM UI juga mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat mensejahterakan para petani Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Serta memanfaatkan adanya badan usaha milik desa (bumdes). Sehingga, para petani saat masa panen dapat menjual hasil produksi berasnya langsung ke konsumen. Tidak melalui rantai penjualan yang panjang, yang merugikan para petani.</p> <p>Untuk menyasati kelangkaan stok beras di bulan Januari hingga musim panen, Fathoni Ali mengusulkan agar pemerintah merelokasi stok beras dari Sulawesi ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Alasannya, di wilayah Sulawesi sudah masuk musim panen, dan stok beras melimpah. ke depannya, pemerintah harus benar-benar memperhatikan sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu juga memberantas keberadaan mafia yang menjadi sebab tingginya harga beras saat ini</p>
dh	<p><b>Menghindari Jawa Sentris</b> (<i>Kompas, 22 Januari 2018</i>). Awal tahun ini, beras dan bencana kemanusiaan Agats, Papua, menjadi perbincangan utama. Kendati diperbincangkan secara terpisah, keduanya sebenarnya berakar pada satu persoalan, yaitu ketersediaan pangan. Harga beras yang melambung tinggi berkorelasi dengan terbatasnya suplai dan stok beras pada akhir tahun lalu. Untuk mengisi kekurangan stok itu, pemerintah menugaskan Perum Bulog mengimpor 500.000 ton beras.</p> <p>Seperti disebut banyak pihak, data pangan yang akurat sangat penting untuk mengambil kebijakan. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang diambil bisa salah dan terlambat Seperti awal tahun ini, kebijakan impor beras diambil justru mendekati panen raya sehingga berpotensi membuat harga gabah di tingkat petani jatuh. Padahal, sejumlah gejala berkurangnya stok beras sudah terbaca pada Agustus-September 2017.</p>
di	<p><b>Beras Langka, Harga Melejit</b> (<i>Indo Pos, 22 Januari 2018</i>). Harga beras di pasaran terus menggelinding bak bola liar. Penetapan harga eceran terendah (HET) benar-benar tak mempan. Harga kian tak terkendali semakin "mencekik" warga miskin. Berdasar HET, beras medium ditetapkan sebesar Rp 9.450 per kilogram (kg). Lalu, harga beras premium bertengger di kisaran Rp 12.800 per kg. Di lapangan, banderol harga beras baik medium dan premium terus merangkak</p>



	<p>naik. Harga beras medium ditransaksikan pada level Rp 11 ribu per kg dan premium sekitar Rp 13.500 per kg.</p> <p>Di sini, bilang Berly, berlaku hukum ekonomi. Di mana, kalau suplai berkurang dan permintaan melimpah, harga berlaku sesuai mekanisme pasar. Permintaan meningkat tidak imbangi pasokan sebanding memantik harga melejit tajam. Artinya, kalau harga tinggi hampir bisa dipastikan tidak ada pasokan memadai. "Sulit dibayangkan dan dipercaya klaim surplus beras 300 ton dan mafia menimbun beras," tukasnya.</p> <p>Penimbunan beras sangat mudah untuk diungkap. Karena, gudang besar untuk menampung dan menimbun beras sangat bisa dilacak melalui bantuan teknologi. Apalagi, beras merupakan komoditas sangat strategis sebagai makanan utama rakyat Indonesia. Komoditas beras tidak bisa dianggap remeh dan sangat berpengaruh dalam menyumbang tingkat laju inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak Desember tahun lalu, sudah terjadi kenaikan harga berdampak terhadap inflasi 0,6 persen.</p>
dj	<p><b>Impor Beras Versus Akurasi Data Produksi.</b> Hal ini terkait dengan dikeluarkannya kebijakan Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton, yang akan didatangkan dari Vietnam dan hailand pada akhir bulan Januari 2018 ini. Alasannya, impor tersebut dalam rangka memperkuat cadangan dan menekan gejolak harga yang semakin meningkat. Kondisi ini, bertentangan dengan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di beberapa kesempatan bahwa telah menaikkan target produksi padi dalam negeri dari 72 juta ton di tahun 2016 menjadi 77 juta ton di tahun 2017. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kalla, bahwa impor beras terjadi karena data produksi gabah dan beras kita tidak akurat.</p> <p><b>Kebijakan impor</b> Kebijakan impor beras dikeluarkan sebagai upaya untuk menutupi kebutuhan konsumsi beras di masyarakat yakni sekitar 2,5 juta ton per bulan. Selain itu, diharapkan impor beras juga menekan tingginya harga beras yang terus melonjak mulai akhir tahun 2017 lalu, dengan demikian dapat sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara Tulus Tambunan (2008) menyatakan bahwa pada prinsipnya impor suatu produk terjadi karena tiga alasan.</p> <p>Persoalannya sekarang sebenarnya bukan menyalahkan kebijakan pemerintah melakukan impor beras, tetapi, menjawab pertanyaan apakah produksi beras dalam negeri memang selama ini lebih kecil daripada kebutuhan beras nasional, atau ada penyebab lainnya, misalnya karena adanya perbedaan harga antara beras domestik dengan beras impor? Atau pertanyaan yang lebih menggelitik bisakah swasembada beras dicapai? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui besarnya produksi dan konsumsi beras di dalam negeri rata-rata per tahun yang diambil dari data yang akurat.</p>
dk	<p><b>Centang Perenang Mengurus Beras</b> (<i>Majalah Tempo, 22 Januari 2018</i>). Polemik tentang perlu tidaknya Indonesia mengimpor beras semestinya tak terjadi. Asalkan pemerintah memiliki data beras nasional yang valid, kekacauan kebijakan beras tidak perlu sampai pada tahap yang memalukan seperti sekarang saling tuding antar kementerian. Agak menyedihkan karena keributan seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Kegaduhan bermula ketika Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan Indonesia mengalami surplus beras tahun lalu dan akan berlanjut tahun ini. Klaim itu ternyata jauh panggang dari api di lapangan, pasokan beras ke pasar justru seret sehingga harganya meroket. Melonjaknya harga memicu Kementerian Perdagangan mengimpor beras 500 ribu ton akhir bulan ini.</p>



	<p>Impor beras memang telah menjadi ajang ambil untung para pemburu rente. Tapi praktik jahat itu tak perlu membuat pemerintah ragu. Sejumlah langkah preventif harus dilakukan, misalnya memberlakukan impor dengan transparan dan tender terbuka. Impor juga seyogianya dipraktikkan dengan berbekal data yang sah. Dengan langkah ini, pemerintah tidak perlu pontang-panting memastikan keamanan pasokan beras nasional. Selain itu, cara ini bisa menutup kesempatan kepala daerah dan menteri bermain politik dengan menyebarkan informasi kabur-semata-mata agar dinilai berkinerja baik.</p> <p>Pemerintah tak perlu menjadikan beras sebagai ajang memoles citra. Studi Bank Dunia menyebutkan setiap kenaikan harga beras 10 persen akan menambah angka kemiskinan 1,1 persen. Tanpa perbaikan manajemen beras, target penurunan angka kemiskinan dari 10,2 persen (2017) menjadi 9,5-10 persen (2018) hanya merupakan harapan kosong.</p>
dl	<p><b>Kebijakan HET Beras Dinilai Bisa Eliminasi Usaha Penggilingan</b> (<i>Harian Neraca Ekonomi</i>, 22 Januari 2018). Pengamat Pertanian Khudori menilai kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras telah mengeliminasi usaha penggilingan di tengah gejolak harga beras yang tinggi. Khudori yang juga Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan itu menuturkan para pelaku usaha penggilingan harus menghitung ulang untung rugi akibat kebijakan yang diterapkan 18 September 2017 itu.</p> <p>Perum Bulog, misalnya, memiliki basis data karena memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga dipastikan memiliki data serupa. "Kalau pun belum ada data yang bisa dijadikan pedoman itu, ya seharusnya mereka berembug saja untuk hasilkan yang terbaik. Mestinya bisa, hilangkan egosektoral," katanya.</p> <p>Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan pembenahan data pangan termasuk produksi beras yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPPT diperkirakan selesai Agustus mendatang.</p> <p>Dalam pemantauannya, BPPT menggunakan peta rupa bumi baik dari LAPAN, Badan Informasi Geospasial dan peta administrasi BPS untuk mengambil contoh sample dari titik-titik koordinat yang ditentukan. "Nanti kami ambil grid sample lahan 9 hektare. Itu nanti titik koordinatnya kita matikan, petugas datang kesana motret pakai handphone. Kalau tidak terjun ke lapangan sana, kelihatannya. Mereka hanya bisa bergerak dalam diameter 10 m persegi," tutur Kepala BPS Suhariyanto.</p>
dm	<p><b>Target Swasembada Beras Pemerintah Dinilai tak Realistis</b> (<i>Republika.co.id</i>, 23 Januari 2018). Bogor - Target swasembada beras yang ditetapkan pemerintah dinilai tidak realistis. Sebab, kondisi lahan pertanian banyak terkonversi menjadi permukiman.</p> <p>Direktur Kajian Strategis Kebijakan Pemerintah Institut Pertanian Bogor (KSKP IPB) Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, saat ini luasan lahan pertanian sangat terbatas, sementara konsumsi meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk.</p> <p>Data Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperlihatkan negara-negara maju justru mengalokasikan lahan pertanian dalam proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Bank Dunia juga merilis laporan bahwa Inggris mengalokasikan lebih dari 71 persen wilayahnya untuk lahan pertanian. Sementara, Australia menetapkan sekitar 53 persen dari wilayahnya untuk lahan pertanian yang melingkupi areal seluas lebih dari 371 juta hektare, hampir 10 kali lebih luas dari total lahan pertanian Indonesia.</p>



	<p>Para petani di negara-negara maju menguasai puluhan bahkan ratusan hektare lahan, sementara petani Indonesia umumnya hanya menggarap kurang dari setengah hektare lahan. "Di Australia kurang dari 40 hektare itu adalah petani miskin, sementara di Indonesia rata-rata 0,3 hektare," katanya. Menurutnya, selama ini pemerintah menyampaikan adanya surplus produksi beras. Namun, kata dia, berdasarkan kajian data yang telah banyak dilakukan, ada ketidaksesuaian data sebesar 20 hingga 30 persen. "Data tersebut perlu dievaluasi. Apalagi, yang berwenang mengeluarkan data adalah Badan Pusat Statistik (BPS), namun perguruan tinggi dan lembaga penelitian bisa ditugaskan membantu verifikasi dan validasi data," ujarnya.</p>
dn	<p><b>Pemerintah Diminta Jangan Klaim Stok Beras Surplus Namun Masih Impor</b> (<i>Merdeka.com, 25 Januari 2018</i>). Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati meminta pemerintah tidak lagi mengklaim produksi beras surplus sebelum melakukan pendataan produksi beras secara faktual dan sistematis. Sebab, jika stok surplus maka harga beras tidak akan naik, dan tidak ada keputusan impor.</p> <p>Enny menambahkan, beras impor yang akan sampai dalam waktu dekat tidak digelontorkan secara keseluruhan kepada masyarakat. Tetapi beras tersebut harus disalurkan secara bertahap untuk daerah-daerah yang memang tidak dapat menghasilkan beras. "Beras impor harus digelontorkan secara bertahap dan sebaran lokasi tetap dengan tujuan stabilkan harga. Lalu hentikan ketika masa panen tiba sehingga tidak mengurangi pendapatan petani Indonesia,"</p>
do	<p><b>Logika "Abu-Abu" Impor Beras</b> (<i>Kompas.com, 25 Januari 2018</i>). Jumlah penduduk Indonesia menurut data Kementerian Dalam Negeri per 30 Juni 2016 mencapai 257.912.349 jiwa. Jadi jumlah mulut yang harus tercukupi memang sangat besar. Artinya, jumlah penduduk yang perlu makan juga sebesar itu. Sementara jumlah produsen pangan, yakni petani, ternyata terus menurun.</p> <p>Data BPS sampai Februari 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian hanya 39,68 juta orang atau 31,86 persen dari jumlah penduduk bekerja Indonesia. Celakanya, dari jumlah tersebut ternyata sebagian besar tercatat berusia tua. Jika di sektor perberasan penimbunan menjadi masalah utama, perbedaan pada gula kristal rafinasi dan gula kristal putih menjadi isu sentral. Disparitas harga yang tinggi antara gula rafinasi dan gula konsumsi membuat oknum yang bermain dalam bisnis pergulaan mendapatkan keuntungan tinggi.</p>
dp	<p><b>Awas Harga Beras Terjun Bebas!</b> (<i>Indo Pos, 26 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah diminta mengantisipasi dampak kedatangan beras impor. Pasalnya, kedatangan beras impor 346 ribu ton itu berbarengan dengan panen raya. Kelebihan stok beras dikhawatirkan menekan harga dan merugikan para petani.</p> <p>Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menambahkan pemerintah terlambat mengambil keputusan impor beras. Dampaknya, realisasi impor beras bertepatan dengan panen raya. Impor Januari. Limpahan beras impor dan hasil panen raya akan membuat stok beras membengkak. Kondisi itu bakal membuat petani berhadapan dengan rugi. Pasalnya, harga beras akan semakin rendah di pasaran.</p> <p>Untuk mencegah itu, beras impor dapat disalurkan secara bertahap ke daerah bukan penghasil beras. Dengan begitu, stabilitas harga di masa mendatang bisa terjaga. "Beras impor harus digelontorkan secara bertahap. Stop distribusi beras kala masa panen tiba," ucapnya.</p>



dq	<p><b>Logika "Abu-Abu" Impor Beras</b> (<i>Kumparan.com, 26 Januari 2018</i>). Penduduk Indonesia menurut data Kementerian Dalam Negeri per 30 Juni 2016 mencapai 257.912.349 jiwa. Jadi jumlah mulut yang harus tercukupi memang sangat besar.</p> <p>Data BPS sampai Februari 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian hanya 39,68 juta orang atau 31,86 persen dari jumlah penduduk bekerja Indonesia. Celakanya, dari jumlah tersebut ternyata sebagian besar tercatat berusia tua. Itu berarti bahwa hanya ada 15,38 persen petani yang produktif untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan nasional.</p>
dr	<p><b>Impor Beras Jauhkan RI dari Kedaulatan Pangan</b> (<i>Koran Jakarta, 13 Januari 2018</i>). Jakarta - Keputusan pemerintah mengimpor beras di tengah klaim surplus beras mengindikasikan masih terjadinya ketidaksinkronan data antar kementerian. Selain itu, kebijakan impor pangan tersebut dinilai bakal merugikan petani dan makin menjauhkan Indonesia dari cita-cita kedaulatan pangan.</p> <p>Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, menilai keputusan impor beras itu menunjukkan pemerintah belum berhasil mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu, Presiden sudah sepatutnya segera mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga terkait yang tidak berhasil mewujudkan kedaulatan pangan.</p> <p>Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan, Gunawan, menegaskan persyaratan impor balian pangan ialah karena tidak bisa ditanam di dalam negeri, kurangnya produksi dalam negeri, ketidakcukupan cadangan pangan nasional (pemerintah, pemda dan masyarakat), serta tidak boleh merugikan pelaku usaha pangan dalam negeri khususnya petani.</p> <p>Menurut dia, beras jelas bisa ditanam di Indonesia dan bisa diperluas sawahnya sehingga tidak perlu impor sehingga terwujud kedaulatan pangan. "Produksi beras ditargetkan swasembada sehingga ada program upaya khusus padi jagung kedelai (upsus pa-jale) dan telah melibatkan beberapa instansi untuk produksi dan distribusi sehingga tidak relevan merencanakan impor beras," tegas Gunawan.</p>
ds	<p><b>Impor Beras, Petani Bakal Dirugikan</b> (<i>Indo Pos, 13 Januari 2018</i>). Jakarta - Keputusan pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) bukan tanpa alasan. Langkah itu diambil demi memastikan ketersediaan stok beras dan harga yang stabil. Sehingga, baik konsumen tidak protes karena harga mahal, namun petani tidak sampai dirugikan akibat harga terlalu murah. JK menuturkan, pada dasarnya beras di Indonesia sudah memiliki harga patokan. Bila harga beras melebihi patokan yang ditetapkan, maka Bulog akan mengeluarkan persediaan di gudang untuk dijual sesuai harga patokan</p> <p>Kata Henry, impor ini menunjukkan Kementerian Pertanian (Kementan) telah gagal mewujudkan Nawacita pemerintahan Jokowi -JK. "Kementan harus dipimpin oleh menteri yang sanggup menjalankan semangat kedaulatan pangan yang tercantum dalam Nawacita, menteri yang sekarang terbukti sudah gagal," tandasnya. Henry melanjutkan, kenaikan harga beras kali ini merugikan petani dan konsumen sekaligus. "Petani padi sendiri juga adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi," ungkapnya.</p> <p>Sementara merespon kecenderungan meningkatnya harga beras akhir-akhir ini, dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memenuhi kebutuhan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) bekerja sama</p>



	<p>dengan pemerintah daerah di empat provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan D.I. Jogjakarta mengadakan bazar beras pada Jumat, (12/1) dan Sabtu (13/1).</p>
dt	<p><b>Impor Beras Dibuka Lagi</b> (<i>Rakyat Merdeka, 13 Januari 2018</i>). Keran impor beras dibuka lagi. Pemerintah memutuskan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton untuk beras medium yang pasokannya sedang langka. Meski kebijakan impor beras dipertanyakan sejumlah pihak, pemerintah punya alasan sehingga keran impor beras terpaksa dibuka kembali setelah dua tahun terakhir ini tak terdengar lagi diributkan. Alasannya pemerintah khawatir Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tak mampu mengendalikan harga beras ketika terjadi lonjakan harga jika pasokan tidak ditambah. Jadi beras impor hanya berfungsi sebagai cadangan yang dapat dimanfaatkan pada saat pasokan langka dan harga naik.</p> <p>Sejak awal tahun ini, harga beras terus mendaki yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut membuat pemerintah khawatir harga beras tidak terkendali. Untuk menstabilkan harga, Mendag Enggartiasto Lukita mengklaim telah melakukan operasi pasar di sebanyak 2.500 titik di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang mengalami lonjakan harga beras yang signifikan. Adapun pasokan beras untuk operasi pasar mencapai 10.000 ton hingga 15.000 ton per hari.</p> <p>Masih berdasarkan publikasi FAO, mahal nya harga beras di Indonesia bila dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara adalah karena ongkos produksi padi yang tinggi dan diperparah tingginya margin dalam tata niaga beras selama ini. Bahkan persoalan tata niaga beras yang tidak efisien itu kabarnya menjadi sumber dominan yang membuat harga beras mahal. Di sisi lain Indonesia adalah negara produsen beras terbesar ketiga di dunia. Setiap tahun produksi gabah rata-rata sebanyak 70 juta ton yang kalau dikonversi menjadi beras sekitar 39 juta ton beras per tahun dengan kebutuhan rata-rata beras sekitar 2,67 juta ton per bulan. Kita berharap, kebijakan impor beras pemerintah kali ini tidak melebar ke pasar dan hanya untuk mengamankan cadangan beras bila terjadi kekurangan pasokan.</p>
du	<p><b>Impor Beras Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian Pertanian</b> (<i>Katadata.co.id, 13 Januari 2018</i>). Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya memutuskan membuka keran impor beras. Serikat Petani Indonesia (SPI) pun menagih janji kedaulatan pangan. Ketua Umum SPI, Henry Saragih meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kementerian yang gagal wujudkan kedaulatan pangan. "Tentu kami masih ingat janji Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan. Kita impor 500 ribu ton beras berarti kan gagal swasembada," kata Henry dalam keterangan resmi, Jakarta (12/1).</p> <p>Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa juga menilai pemerintah terlambat memutuskan impor. Menurutnya, kebutuhan impor sudah bisa diprediksi pada pertengahan tahun lalu karena panen pada musim gadu terganggu serangan hama wereng. Selain itu, masa tanam padi di beberapa daerah juga terlambat akibat banjir bawaan siklon tropis pada akhir 2017. "Harusnya kebijakan diputuskan lebih cepat," kata Dwi kepada Katadata, Jumat (12/1).</p> <p>Sementara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman masih berkeras bahwa masa panen padi akan dimulai bulan depan. Menurutnya, banjir yang terjadi akibat siklon tropis pada akhir 2017 lalu hanya merusak sekitar 40 ribu hektare dari total 400 ribu hektare ladang padi di Jawa. "Standing crop kita 5-6 juta ton, jadi masih aman," ujarnya, Kamis (11/1) lalu.</p>



dv	<p><b>Impor Beras, Jokowi Jahati Petani tapi Muliakan Pemburu Rente</b> (<i>Harianterbit.com, 13 Januari 2018</i>). Akhirnya hari ini (12/1) pemerintah terlihat satu suara untuk impor beras 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam. Setidaknya antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, dan Wakil Presiden. Tampak tidak ada lagi perbedaan data stok beras yang selama ini menjadi polemik. Presiden sendiri belum mengeluarkan sikap resmi menolak atau mendukung kebijakan yang rencananya akan dilakukan selambatnya akhir bulan Januari 2018 ini.</p> <p>Pola yang sedang berlangsung ini kami curiga adalah bagian dari kelompok pengejar rente untuk mengeruk keuntungan instan sekaligus menjatuhkan elektabilitas Jokowi di kalangan petani Indonesia. Sehingga isu impor beras ini akan digunakan siapapun lawan-lawan Jokowi di 2019 untuk menjatuhkan Jokowi. Jadi istilahnya, sekali tepuk dua tiga pulau terlampui! Berbicara tentang sejarah pergerakan harga beras, sebenarnya kenaikan yang tidak terkendali ini tidak hanya terjadi saat di era Jokowi, tetapi sudah sejak awal pemerintahan SBY di akhir tahun 2004. Pada akhir pemerintahan Orde Baru Suharto, harga beras sangat rendah dan stabil di kisaran Rp 1000/kg.</p> <p>Namun, setelah dimulainya era SBY. Saat impor beras swasta dilarang dan monopoli Bulog dikembalikan, harga beras malah naik hingga Rp 5000/kg di Juni tahun 2008, di akhir tahun 2014 sudah Rp 8000/kg. Harga rata-rata beras kembali naik di era Jokowi, sempat menyentuh Rp 9000/kg di Juni 2015 dan per Januari 2018 ini sudah di level Rp 11.600/kg. Ini berarti terjadi kesalahan dalam sistem tata niaga beras dan menurunnya performa Bulog selama 13 tahun terakhir. Menjahati petani tapi memuliakan para pemburu rente.</p>
dw	<p><b>Impor Beras Mengancam Petani</b> (<i>Harnas.co, 13 Januari 2018</i>). Jakarta - Keputusan pemerintah membuka keran impor beras mencerminkan produksi beras nasional kurang. Klaim beras surplus dari Kementerian Pertanian (Kementan) turut dipertanyakan publik.</p> <p>Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, persoalan data perberasan Indonesia sudah lama. Namun, pembenahan data belum dilakukan sepenuhnya sehingga terjadi anomali. Hanya Kementan yang mengetahui berapa kondisi stok beras sebenarnya. Henry mengatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) masih memiliki kelemahan, baik jumlah cadangan beras maupun sistem pembelian gabah petani. Selain itu, Bulog belum memiliki hubungan jelas dengan petani. "Sistem pembelian dan sistem pergudangan kita sekarang tidak benar. Ini harus dibenahi," kata Henry.</p> <p>Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Khudori mengatakan, keputusan impor secara implisit menunjukkan pasokan kurang. "Harga itu tidak menipu. Harga beras yang naik dari bulan ke bulan mencerminkan pasokan tidak memadai," ujarnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tetap mengklaim produksi beras mencukupi. Namun, dia enggan menjelaskan penyebab harga tinggi sehingga pemerintah mengimpor beras. Amran mengatakan, Indonesia sudah bisa swasembada beras sejak 2016. Menurut Amran, impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton termasuk kecil. Rata-rata konsumsi nasional per bulan mencapai 2,5 juta ton. Meski beras impor akan masuk jelang musim panen, dia memastikan petani tetap terlindungi dan tidak akan merugi.</p>
dx	<p><b>Indef: Pemerintah Gagal Jaga Produksi Beras Dalam Negeri</b> (<i>Industry.co.id, 13 Januari 2018</i>). Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya memutuskan membuka keran impor beras. Padahal sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan jika stok beras mencukupi bahkan surplus sehingga tidak perlu impor.</p>



	<p>Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan dibukanya keran impor beras ini membuktikan jika data yang selama ini dimiliki oleh pemerintah terkait dengan stok beras tidak kredibel.</p> <p>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, pihaknya akan membuka impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Beras tersebut rencananya akan mulai masuk pada akhir Januari 2018. "Untuk mengisi gap ini, saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan saya mengimpor beras khusus. Yang diimpor 500 ribu ton, start awal," ujar dia.</p>
dy	<p><b>Impor Beras Terus, Kapan Mau Swasembada?</b> (<i>Harianterbit.com, 13 Januari 2018</i>). Pemerintah kembali akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton. Kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan keinginan pemerintahan Jokowi untuk menjaga kedaulatan pangan dan swasembada beras.</p> <p>Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menilai pemerintahan Jokowi-JK telah gagal menjaga kedaulatan pangan. Dilihat dari melambungkannya harga beras di banyak daerah di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam. Untuk itu, Henry meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tak berhasil wujudkan kedaulatan pangan, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan.</p> <p>Sementara itu, pengamat pangan Ali Birham mengakui saat ini luas lahan sawah di Jawa semakin berkurang. Tidak heran untuk menutupi semakin berkurangnya lahan pertanian yang ujungnya produktivitas pangan yang menurun seperti beras maka pemerintah mengimpor beras dari luar negeri. Selain berkurangnya lahan, produktivitas juga menurun karena penggunaan pupuk kimia (urea) yang terus menerus. Ditambah juga jumlah penduduk yang semakin bertambah.</p>
dz	<p><b>Komisi IV: Kebijakan Impor Beras tidak Tepat</b> (<i>Republika.co.id, 13 Januari 2018</i>). Pontianak - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu karena petani hendak memasuki panen raya. "Dua minggu lagi sudah mulai panen raya, sehingga kebijakan impor ini sama saja hukuman yang tidak adil bagi petani yang sudah banting tulang bekerja keras," ujar Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Sabtu (13/1).</p> <p>Kebijakan impor diambil harus dari setahun sebelumnya, berdasarkan data produksi dan konsumsi yang valid per minggu setahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui pada minggu-minggu ke berapa suplai kurang. Seperti saat ini bila minggu pertama dan kedua bulan Januari suplai kurang, maka kebijakan impornya diambil satu bulan sebelumnya yakni November atau Desember tahun lalu sehingga tepat waktu dan menjawab kekosongan suplai," kata dia.</p> <p>la menambahkan, sampai kapan pun pemerintah tidak akan bisa membuat perencanaan yang baik bila datanya tidak baik dan valid. "Jadi Bappenas, BPS, Menkeu, Mentan, Mendag harus duduk bareng merumuskan kebijakan dari satu tahun sebelumnya dengan memastikan sumber data yang akurat dan valid," katanya.</p>
ea	<p><b>Impor Beras Mengkhianati Petani</b> (<i>Rmol.co, 13 Januari 2018</i>). Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Alasannya klasik, untuk mengamankan kebutuhan pangan dan hajat perut rakyat, serta menjaga stabilitas harga beras di pasaran.</p> <p>Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mempertanyakan kenapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras ketika kondisi pangan nasional saat ini terbilang stabil.</p>



	<p>Menteri Pertanian pernah bilang tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi. Selain itu, pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras.</p> <p>Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog. Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?" kata Edhy lagi.</p> <p>Lebih jauh Edhy mencermati janji pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye dulu, yang menyebut akan kembali mewujudkan swasembada pangan. Jokowi bilang lahan sawah begitu luas kok beras masih impor?. Namun nyatanya, tiga tahun lebih menjabat, janji Jokowi itu tidak kunjung terbukti. "Padahal anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Kita berhak menagih janji mereka untuk mewujudkan swasembada pangan demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan," demikian Edhy.</p>
eb	<p><b>Daniel Johan: Kebijakan Impor Beras tidak Tepat</b> (<i>Republika.co.id, 13 Januari 2018</i>). Pontianak - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu. Karena petani hendak memasuki panen raya dalam dua pekan ke depan. "Dua minggu lagi sudah mulai panen raya, sehingga kebijakan impor ini sama saja hukuman yang tidak adil bagi petani yang sudah banting tulang bekerja keras," ujar Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Sabtu (13/1). Kebijakan impor diambil harus dari setahun sebelumnya, berdasarkan data produksi dan konsumsi yang valid per minggu setahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui pada minggu-minggu ke berapa suplai kurang.</p> <p>"Seperti saat ini bila minggu pertama dan kedua bulan Januari suplai kurang, maka kebijakan impornya diambil satu bulan sebelumnya yakni November atau Desember tahun lalu sehingga tepat waktu dan menjawab kekosongan suplai," kata dia. Ia menambahkan, sampai kapan pun pemerintah tidak akan bisa membuat perencanaan yang baik bila datanya tidak baik dan valid. "Jadi Bappenas, BPS, Menkeu, Mentan, Mendag harus duduk bareng merumuskan kebijakan dari satu tahun sebelumnya dengan memastikan sumber data yang akurat dan valid," katanya.</p>
ec	<p><b>Presiden Harus Segera Mengevaluasi</b> (<i>Id.beritasatu.com, 14 Januari 2018</i>). Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyatakan, pemerintahan Joko Widodo gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tak berhasil mewujudkan kedaulatan pangan. "Kenaikan harga beras kali ini merugikan petani dan konsumen sekaligus. Petani padi sendiri juga adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi," ujar dia.</p> <p>Berdasarkan data yang pernah dilansir Kementan dengan merujuk data Aram II BPS, produksi padi 2017 mencapai 81,30 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik dari 2016 yang sebesar 79,30 juta ton dan 2015 sebesar 75,30 juta ton. Produksi 2017 naik 15,10% dari 2014. Produksi sebesar 81,30 juta ton GKG pada 2017 setara dengan ketersediaan beras sebesar 45,50 juta ton dan dengan konsumsi 33 juta ton maka diperkirakan surplus mencapai 12,50 juta.</p> <p>Sementara itu, mengutip situs resmi Organisasi Pangan Dunia (FAO), harga beras Thailand dengan patahan 5% per November 2017 adalah US\$ 399 per ton. Sedangkan harga beras Vietnam dengan patahan 5% pada periode sama adalah US\$ 392 per ton. Sedangkan seperti dilansir <a href="http://www.indexmundi.com">www.indexmundi.com</a>, harga beras putih Thailand dengan kepecahan atau patahan 5% untuk Desember 2017 sudah mencapai US\$ 406 per ton (Rp 5.341 per kg).</p>



ed	<p><b>Impor beras untuk Efek Psikologis</b> (<i>Media Indonesia, 14 Januari 2018</i>). Kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton diperlukan untuk memberikan efek psikologis. Impor beras diharapkan bisa membuat para pedagang atau pengusaha beras mengucurkan stok beras yang masih tersimpan di gudang.</p> <p>Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhammad Firdaus menilai impor beras memang dibutuhkan karena cadangan beras Bulog saat ini sudah di bawah normal, yakni hanya sekitar 900 ribu ton. Sementara itu, stok beras medium di Pasar Induk beras Cipinang (PIBC) Jakarta juga tercatat terus mengalami penurunan sejak Oktober tahun lalu.</p> <p>Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Agus Andiyani optimistis penyaluran beras impor bisa dilakukan mulai akhir Januari. Saat ini pihaknya masih mencari penyuplai dari negara-negara eksportir. Nantinya, pendistribusian beras impor akan dilakukan PPI dengan menggandeng mitra pengusaha beras, salah satunya PT Food Station Tjipinang Jaya untuk pendistribusian wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.</p> <p>Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan izin impor beras akan diberikan kepada PPI hingga Maret 2018. Impor beras akan dilakukan dari empat negara, yakni Myanmar, Pakistan, Vietnam, dan Thailand. "Pengajuan negaranya dari PT PPI. Kami berikan izin hanya sampai Maret karena menurut informasi, tidak berhimpitan dengan panen raya," pungkas Oke.</p>
ee	<p><b>KPPU: Ada Spekulasi yang Sengaja Mainkan Pasokan Beras</b> (<i>Detik.com, 14 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk kembali membuka keran impor untuk beras khusus sebanyak 500.000 ton. Keputusan itu diambil guna mengatasi kelangkaan yang terjadi dan kenaikan harga. Menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, kelangkaan beras yang terjadi saat ini lantaran rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian.</p> <p>Pemerintah perlu mengadopsi sistem pemasaran online dalam pemasaran beras, sehingga petani bisa secara langsung menjual berasnya ke konsumen akhir atau retailer tanpa melalui jalur pemasaran yang panjang," tambahnya. Dia juga mengusulkan agar dilakukan pengembangan pasar induk beras nasional di sentra-sentra produksi beras nasional, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Diharapkan pasar induk bisa menjadi sumber referensi ketersediaan dan harga beras.</p> <p>Peran Bulog dalam menyerap beras petani diharapkan juga semakin ditingkatkan yang juga dimanfaatkan untuk operasi pasar. Terakhir, dilakukan penegakan hukum terhadap spekulasi yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga.</p>
ef	<p><b>Impor Beras untuk Efek Psikologis</b> (<i>Metrotvnews.com, 14 Januari 2018</i>). Jakarta - Pendistribusian 500 ribu ton beras impor diprediksi tidak akan merugikan petani yang akan mulai panen raya. Kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton diperlukan untuk memberikan efek psikologis. Impor beras diharapkan bisa membuat para pedagang atau pengusaha beras mengucurkan stok beras yang masih tersimpan di gudang.</p> <p>Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhammad Firdaus menilai impor beras memang dibutuhkan karena cadangan beras Bulog saat ini sudah di bawah normal, yakni hanya sekitar 900 ribu ton. Sementara itu, stok beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta juga tercatat terus mengalami penurunan sejak Oktober tahun lalu.</p>



	<p>Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB, menyoroti, dibukanya keran impor beras sebagai pembuktian tidak akuratnya data produksi yang selama ini dirilis Kementerian Pertanian. Pemerintah mengklaim pasokan beras aman hingga surplus, tetapi harga di pasar terus merangkak naik. Ia meragukan data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang mencatat surplus beras selama 2017 mencapai 17,4 juta ton. "Di mana barangnya? Bulog saja yang fasilitas penyimpanannya terbesar di Indonesia hanya mampu menampung 3 juta ton. Meskipun Kementan berkeras produksi surplus, yang jelas harga tidak akan pernah berbohong," ujar Dwi.</p>
eg	<p><b>Serikat Petani Sebut Kenaikan Harga Beras Sangat Merugikan</b> (<i>Sindonews.com, 14 Januari 2018</i>). Jakarta - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai kenaikan harga beras kali ini merugikan petani dan konsumen sekaligus. Pasalnya, petani juga merupakan konsumen yang juga membeli beras dengan harga tinggi. "Petani padi sendiri juga adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi," katanya dalam rilis di Jakarta, Minggu (14/1/2018).</p> <p>Menurut Henry, dengan melakukan impor beras maka petani akan sangat dirugikan yang membuat petani tak punya patokan untuk memproduksi maupun dalam harga. "Harusnya pemerintah Indonesia punya kebijakan yang ajeg, yang permanen. Impor beras ini melanggar UU Pangan No 18/2012. Ini juga menunjukkan data Kementan – yang katanya surplus beras – tidak benar karena data produksi beras bukan dari BPS melainkan Kementan sendiri," imbuh dia.</p>
eh	<p><b>Ketua Fraksi PKS DPR Heran, Katanya Surplus Beras Tapi kok Impor 500 Ribu Ton?</b> (<i>Tribunnews.com, 14 Januari 2018</i>). Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, mengkritisi keputusan Pemerintah melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Apalagi data menunjukkan produksi beras nasional sebenarnya surplus sebagaimana diakui sendiri oleh Mentan Amran Sulaiman.</p> <p>"Kenaikan harga beras di tengah surplus produksi beras di berbagai daerah ini jelas menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan perberasan nasional. Ditambah lagi solusi instan yang diambil Pemerintah adalah impor, ini menunjukkan tata niaga perberasan yang sangat buruk," ujar Jazuli, dalam keterangannya, Sabtu (13/1) kemarin. Pemerintah, dalam hal ini Mentan dan Mendag, menurut Jazuli lemah dalam koordinasi dan supervisi sehingga tidak mampu mengintervensi pasar dan mengendalikan stok pangan yang ada di pasar.</p>
ei	<p><b>Impor Beras, CSIS Minta Harga Eceran Tertinggi Dicabut</b> (<i>Viva.co.id, 14 Januari 2018</i>). Pengamat ekonomi dari Center for Strategic and International Studies, Yose Rizal Damuri, menilai, kebijakan perberasan yang saat ini dijalankan pemerintah dipastikan gagal. Ada kecurigaan yang besar bahwa data saat ini dimanipulasi besar-besaran. Jadi, dengan data yang baik kita bisa tahu apakah pasokan tersedia dengan cukup atau tidak. Kalau kurang, memang kita perlu impor. Enggak perlu alergi terhadap impor. Apalagi pada tahun politik seperti ini," tegasnya.</p> <p>Ia pun mengakui, langkah impor saat ini sudah cukup tepat, tetapi mungkin telat untuk dilaksanakan. Untuk jangka panjang tentunya produktivitas pertanian harus ditingkatkan. "Ini adalah kewajiban Menteri Pertanian (Amran Sulaiman). Urusannya adalah meningkatkan kinerja pertanian, bukan mengatur impor dan harga beras. Itu serahkan saja ke Menteri Perdagangan (Enggartiaso Lukita)," kata Yose.</p>
ej	<p><b>Impor Beras, PKS: Ketidakmampuan Pemerintah Kelola Beras</b> (<i>Republika.co.id, 14 Januari 2018</i>). Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengkritisi keputusan Pemerintah melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk menstabilkan harga beras di pasaran.</p>



	<p>Apalagi data menunjukkan produksi beras nasional sebenarnya surplus sebagaimana diakui sendiri oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Di tengah surplus beras petani di berbagai daerah yang bulan Januari-Februari ini memasuki masa panen, kebijakan impor beras jelas bukan solusi. Melainkan semakin menekan petani. Maka lumrah banyak pemerintah daerah (Pemda) dan petani lokal serempak menolak masuknya beras impor tersebut.</p> <p>"Kenaikan harga beras di tengah surplus produksi beras di berbagai daerah ini jelas menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan perberasan nasional. Ditambah lagi solusi instan yang diambil pemerintah adalah impor, ini menunjukkan tata niaga perberasan yang sangat buruk," kata Jazuli melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id Ahad (14/1).</p> <p>Jazuli menuturkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terlihat lemah dalam koordinasi dan supervisi sehingga tidak mampu mengintervensi pasar dan mengendalikan stok beras. Hal ini dicontohkan dengan langsung adanya izin impor ketika ada kenaikan harga beras di pasaran. "Kebijakan impor 500 ribu ton beras ini sekaligus menunjukkan rendahnya keberpihakan dan perhatian Pemerintah pada petani," papar Jazuli.</p>
ek	<p><b>Serikat Petani Sebut Pemerintah Gagal</b> (<i>Sindonews.com, 14 Januari 2018</i>). Jakarta - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai pemerintahan Joko Widodo telah gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Hal ini menanggapi tingginya harga beras di pasaran serta keputusan pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras. Dia menilai, Presiden sudah sepatutnya segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tak berhasil wujudkan kedaulatan pangan.</p> <p>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, beras merupakan komoditas utama masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya pun harus mengambil sikap untuk menjaga kepentingan masyarakat. "Yang saya harus jaga adalah kepentingan konsumen. 260 juta rakyat. Political risk-nya terlalu berat, kalau supply beras kurang. Saya lakukan impor beras," katanya saat berbincang dengan media di kantornya, Jakarta, Jumat (13/1/2018).</p>
el	<p><b>Fadli Zon Sebut Empat Keanehan Rencana Impor Beras Pemerintah</b> (<i>Tribunnews.com, 14 Januari 2018</i>). Jakarta - Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018 mendapat kritik dari Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon. Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki.</p> <p>Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani, dan menyebabkan harga gabah petani pasti anjlok. Jadi, kebijakan tersebut sebenarnya hanya menyakiti petani saja. Ia pun mengaku heran apa dasar perhitungan dari angka impor 500 ribu ton itu. Lebih lanjut, jikapun stok beras kita memang minus, yang artinya pemerintah selama ini berbohong dengan klaim surplus beras, Fadli berharap agar setiap rencana impor, berapa jumlah yang perlu diimpor, dan kapan sebaiknya impor dilakukan, dikaji secara matang dan transparan dulu. Jadi tidak kemudian tiba-tiba muncul angka 500 ribu ton tanpa ada dasarnya.</p>
em	<p><b>Impor Beras 500 Ribu Ton, Ini 4 Keanehan Pemerintah Menurut Fadli Zon</b> (<i>Fajar.co.id, 14 Januari 2018</i>). Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemerintah mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018, hanya sebagai bukti kacaunya tata kelola pangan pemerintah Indonesia, juga sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang dimiliki. Fadli berharap, agar setiap rencana impor, berapa jumlah yang perlu diimpor, dan kapan</p>



	<p>sebaiknya impor dilakukan, agar dikaji secara matang dan transparan terlebih dahulu. Sehingga tidak muncul angka 500 ribu ton tanpa ada dasar alasannya.</p> <p>"Hal penting lainnya, kalau memang perlu impor dengan kajian jumlah dan waktu yang sudah dikalkulasi matang, impor itu harus dilakukan oleh Bulog," jelasnya. "Kita tak ingin petani dihancurkan oleh impor beras. Kita juga harus mencegah impor beras ini semacam jalan perburuan rente" tutup Fadli Zon.</p>
en	<p><b>Fadli Zon Temukan Empat Keanehan Rencana Pemerintah Impor Beras</b> (<i>Goriau.com, 14 Januari 2018</i>). Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018 mendapat kritik dari Ketua Umum DPN HKTl (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Fadli Zon. Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki.</p> <p>Kalau harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka kata Fadli, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar, dan bukannya impor. "Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani. Harga gabah petani pasti anjlok. Jadi, kebijakan tersebut sebenarnya hanya menyakiti petani saja. Lagi pula, angka impor 500 ribu ton itu apa dasar perhitungannya," tandas Fadli yang juga Wakil Ketua DPR RI itu. Fadli Zon juga menambahkan, jikapun stok beras memang minus, yang artinya pemerintah selama ini berbohong dengan klaim surplus beras. "Saya berharap agar setiap rencana impor, berapa jumlah yang perlu diimpor, dan kapan sebaiknya impor dilakukan, dikaji secara matang dan transparan dulu. Jadi tidak ujug-ujug muncul angka 500 ribu ton tanpa ada dasar alasannya," paparnya.</p> <p>Hal penting lainnya kata dia, kalau memang perlu impor dengan kajian jumlah dan waktu yang sudah dikalkulasi matang, impor itu harus dilakukan oleh Bulog. Jangan cari untung dengan dalih stabilkan harga. Bulog juga tidak boleh ambil untung dari impor beras. Itu sebabnya proses impor oleh Bulog juga harus transparan dan diawasi ketat.</p>
eo	<p><b>Tata Kelola Pangan Kacau Balau Tuh</b> (<i>Rakyat Merdeka, 15 Januari 2018</i>). Wakil Ketua Unjurm Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon, mengkritik kebijakan pemerintah yang mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018. Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki.</p> <p>Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi sekitar 2,5 juta ton. Jika angka-angka ini benar, seharusnya memang surplus beras. "Namun anehnya harga beras di pasas justru terus naik."</p> <p>Dan keanehan keempat, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani sedang menghadapi musim panen. "Bagi saya, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan," tuntasnya,</p>
ep	<p><b>Tata Kelola Pangan Kacau Balau Tuh</b> (<i>Rakyat Merdeka, 15 Januari 2018</i>). Wakil Ketua Unjurm Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon, mengkritik kebijakan pemerintah yang mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018. Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki.</p>



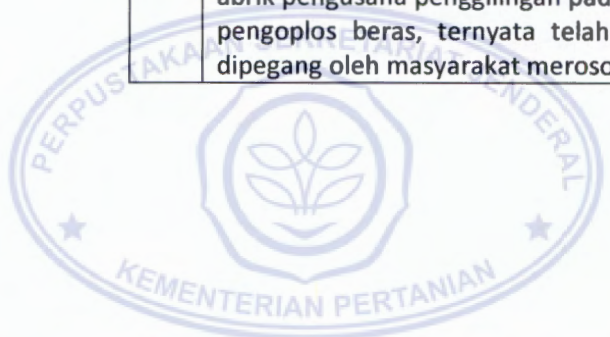
	<p>Keanehan ketiga, pemerintah beralih impor beras bulan ini untuk menstabilkan harga beras, artinya untuk keperluan umum. Nah, sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Permendag No. 1/2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras ini, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog. Fadli pun mempersilakan membaca Pasal 16 Permendag No. 1/2018. "Nah, ini Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain."</p> <p>Dan keanehan keempat, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani sedang menghadapi musim panen. "Bagi saya, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan," tuntasnya,</p>
eq	<p><b>Premium Rice Import Sparks Questions, Criticism</b> (<i>The Jakarta Post</i>, 15 Januari 2018). The governments recent decision to allow the import of high-quality rice to ease the stubbornly high prices of the commodity over the past few months is seen as contradictory to the real needs on the ground. Premium-grade rice totaling 500,000 tons will be sourced from major producing countries, such as Thailand and Vietnam, and is set to reach Indonesia late January through state-owned trading firm PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). State Logistics Agency (Bulog) president director Djarot Kusumayakti has suggested that the government revise the policy as it contradicts the fact that a majority of Indonesians consume "medium-grade" rice.</p> <p>Andreas of the IPB said it was the first time in history an import policy was issued in January, as such measures usually took place mid-year to support distribution during critical supply months. However, he said the policy could ease the high prices of rice as it would influence rice traders to release their rice stock. "After the news [import policy], prices could decline by around 10 percent. But we should wait one or two weeks to see if [the policy] really works," Andreas said</p>
er	<p><b>Batalkan Impor Beras!</b> (<i>Indo Pos</i>, 15 Januari 2018). Keputusan Pemerintah melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand guna menstabilkan harga beras di pasaran, menimbulkan tandatanya besar. Di satu sisi, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia mengalami surplus produksi beras. Namun di sisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan impor ratusan ton. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, secara tegas menyatakan, rencana yang digabungkan Kemendag itu justru menunjukkan sejumlah keanehan.</p> <p>Pemerintah sendiri telah menunjuk Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai perusahaan yang akan melakukan impor. Keputusan impor diambil karena saat ini tengah terjadi kelangkaan pasokan beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Meski pemerintah menyatakan panen masih terjadi, pasokan beras dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sementara, panen raya diperkirakan baru akan terjadi pada Februari-Maret mendatang. Enggartiasto memandang urusan pangan rakyat adalah urusan prioritas. Oleh karenanya, ia meyakini keputusan impor merupakan solusi terbaik. "Jangan ada pertentangan karena petani juga konsumen yang harus beli beras," ujarnya.</p> <p>Sementara Lembaga Ombudsman melihat ada gejala maladministrasi dalam pengelolaan data persediaan beras nasional dan kebijakan impor beras. Lembaga negara tersebut memberi sinyal yang kurang baik dalam penyelenggaraan negara. "Kita baru melihat gejala maladministrasi. Ada beberapa prosedur yg tak sesuai. Terutama isu surplus yang selalu diumbar dan impor yang tidak melalui bulog," kata Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.</p>
es	<p><b>Ironi Impor Beras</b> (<i>Koran-jakarta.com</i>, 15 Januari 2018). Belakangan pemerintah memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras khusus dari Thailand dan Vietnam untuk menjamin ketersediaan di dalam negeri dan sebagai salah satu upaya menekan harga. Beras tersebut rencananya akan mulai masuk akhir Januari 2018. Ini menunjukkan, klaim tidak impor dan sudah swasembada</p>



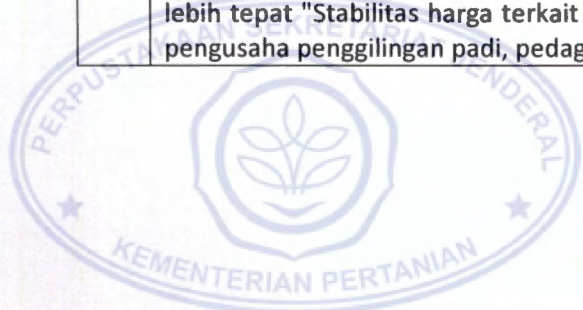
	<p>beras telah terbantahkan. Faktanya impor beras terus meningkat dari 0,844 juta ton pada 2014 menjadi 0,862 juta ton pada 2015 dan 1,283 juta ton pada 2016. Pada 2017 hingga bulan April telah diimpor beras 71.000 ton.</p> <p>Ketidakkuratan data produksi padi/beras mengakibatkan kebijakan beras kurang tepat. Ada disparitas besar antara laporan yang dijadikan data nasional dan kenyataan di lapangan (DA Santosa, 2017). Beras merupakan komoditas strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. ini menentukan penyelenggaraan pangan nasional serta stabilitas sosial ekonomi. Maka, negara mesti hadir melalui penguatan kelembagaan pangan, bukan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme impor.</p> <p>Kebijakan impor beras cenderung berpihak pada kapitalis yang hanya membuahkan banyak persoalan. Kongkalikong antara pemberi dan penerima kuota impor bisa terjadi. Bahkan menciptakan kartel dan mafia impor yang mengeruk keuntungan ekonomi semata. Aparat pemerintah perlu tegas memberantas mafia impor dengan memberi sanksi berat. Pengawasan di setiap pelabuhan perlu diperketat. Sebab sering kali aturan yang keras di atas kertas, tidak diikuti pengawasan ketat di lapangan. Rakyat di tahun politik ini merindukan muncul pemimpin yang tegas dalam mengurus pangan agar tidak selalu bergantung pada impor. Revolusi pangan mutlak dilakukan melalui kehadiran negara yang punya kekuatan untuk menyetop impor.</p>
et	<p><b>Kasih Petani Sudah Kerja Membanting Tulang</b> (<i>Rmol.co, 15 Januari 2018</i>). Pemerintah terkesan panik menghadapi gejolak kenaikan harga beras sehingga mengambil langkah impor. Di samping itu bukti pemerintah tidak memiliki blueprint perberasan nasional. "Kebijakan impor beras juga menunjukkan lemahnya database yang terkait dengan ketersediaan stok beras nasional," ujar anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangannya, Senin (15/1).</p> <p>Menurut dia, kenaikan harga beras bukan sekali dua kali terjadi dan solusi paling cepat dan praktis diambil pemerintah dengan impor. Alasannya untuk menambah stok beras nasional sehingga harga di pasar dapat terkendali dan normal kembali. Namun yang disayangkannya impor beras kali ini berdekatan musim panen. "Kasih mereka sudah bekerja keras membanting tulang memeras keringat begitu panen tiba harganya jatuh dan tidak sesuai dengan harapan mereka," tuturnya. Menurut dia, dalam hal ini jika bukan Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan maka kemungkinan ada pihak ketiga yaitu kartel ingin mengambil keuntungan kelemahan birokrasi di negeri ini. Hal ini membenarkan anggapan bahwa negara memang tidak berdaya berhadapan dengan para mafioso pangan yang rakus memburu rente semata," tutupnya.</p>
eu	<p><b>Jokowi Gadaikan Elektabilitas</b> (<i>Rilis.id, 25 Januari 2018</i>). Kebijakan impor beras awal tahun ini menuai polemik. Pemerintah dianggap tidak berpihak pada petani. Beras impor yang akan masuk ke Indonesia dinilai akan menurunkan harga jual beras yang secara otomatis akan membuat petani rugi. Berdasarkan anggapan seperti ini penolakan impor beras bergulis deras.</p> <p>Kelangkaan stok ini juga ditemukan dalam pengamatan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan, defisit stok beras di pasar sudah terlihat ketika harga beras medium pada Agustus 2017 mengalami kenaikan 0,39 persen menjadi Rp10.616 per kg, dari harga beras rata-rata nasional pada Juli 2017 sebesar Rp10.574 per kg. Andreas bahkan sudah melakukan peninjauan bersama asosiasi bank benih tani untuk mengetahui penyebab defisit stok di lapangan. Hasilnya, ada serangan hama yang masif terhadap produksi padi pada tahun 2017.</p>



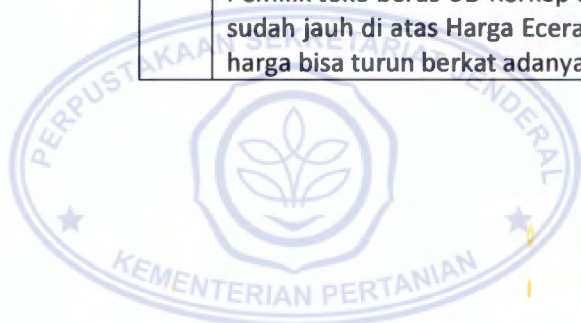
ev	<p><b>Hentikan Klaim Surplus Beras</b> (<i>Indopos.co.id, 25 Januari 2018</i>). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak pemerintah menghentikan klaim surplus beras. Pasalnya, itu hanya menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. "Surplus dari mana? Tolong hentikan klaim itu sebelum melakukan pendataan produksi beras secara faktual dan sistematis," tutur Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, di Jakarta, Kamis (25/1).</p> <p>Selanjutnya, menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok serta respon cepat pada daerah kekurangan. "Termasuk melakukan lagi kampanye dan langkah sistematis diversifikasi pangan nonberas dengan mengutamakan pokok yang diproduksi sehingga mengurangi permintaan beras jangka panjang," tukasnya.</p>
ew	<p><b>Dukung Produk Pangan Lokal agar Mampu Saingi Impor</b> (<i>Koran-jakarta.com, 31 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah diminta mendukung sepenuhnya produk pangan lokal sehingga mampu bersaing dengan produk impor, baik dalam pasar konvensional maupun perdagangan online. Bentuk dukungan tersebut terutama pemberian insentif dan fasilitas bagi produsen lokal, seperti bantuan untuk memperkuat promosi dan pemasaran, dan mencabut pajak pertambahan nilai (PPN) barang lokal.</p> <p>Sebelumnya, Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo, mengatakan dari total transaksi e-commerce makanan, hanya sekitar 10 persen saja yang merupakan produk buatan dalam negeri. Padahal, lanjut Fadjar, kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat dari sekitar 700 triliun hingga 750 triliun rupiah pada 2014 menjadi sekitar 1.000 triliun rupiah.</p>
ex	<p><b>Dukung Produk Pangan Lokal agar Mampu Saingi impor</b> (<i>Koran Jakarta, 31 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah diminta mendukung sepenuhnya produk pangan lokal sehingga mampu bersaing dengan produk impor, baik dalam pasar konvensional maupun perdagangan online. Bentuk dukungan tersebut terutama pemberian insentif dan fasilitas bagi produsen lokal, seperti bantuan untuk memperkuat promosi dan pemasaran, dan mencabut pajak pertambahan nilai (PPN) barang lokal. Hal itu bertujuan agar produk lokal memiliki level playing field yang seimbang dengan produk impor.</p> <p>Dekan Fakultas peternakan UGM, Ali Agus, mengatakan pemerintah mesti menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada produsen pangan lokal dengan menjalankan berbagai program untuk meningkatkan daya saing sehingga produk lokal bisa setara dengan impor.</p> <p>Sebelumnya, Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo, mengatakan dari total transaksi e-commerce makanan, hanya sekitar 10 persen saja yang merupakan produk buatan dalam negeri. Padahal, lanjut Fadjar, kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat dari sekitar 700 triliun hingga 750 triliun rupiah pada 2014 menjadi sekitar 1.000 triliun rupiah. "Info terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 2017 yang belum dipublikasi, angkanya sudah mendekati 1.000 triliun rupiah. Sekira 40 persen lebih dari nilai tersebut dikontribusi subsektor kuliner," jelas dia.</p>
ey	<p><b>Simalakama Kebijakan Impor Beras</b> (<i>Bisnis Indonesia, 30 Januari 2018</i>). Pemerintah akhirnya memutuskan untuk impor beras sebanyak 500.000 ton setelah mencermati perkembangan harga beras yang semakin liar. Operasi pasar (OP) yang digelar secara besar-besaran belum berhasil meredam kenaikan harga. Demikian juga, peran Satgas Pangan yang begitu aktif mengobrak-abrik pengusaha penggilingan padi (PP) dan pelaku usaha beras dituduh sebagai penimbun atau pengoplos beras, ternyata telah membuat pasar beras terluka, sehingga stok beras yang dipegang oleh masyarakat merosot tajam dan tidak mampu meredam kenaikan harga beras.</p>



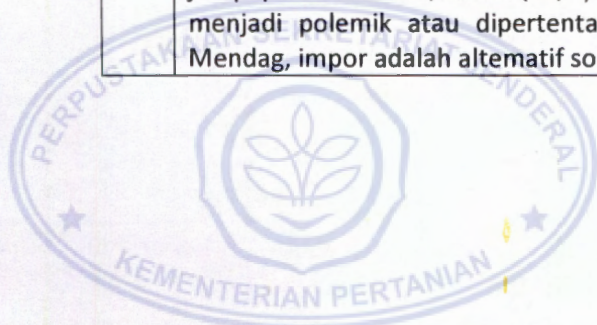
	<p>Para pelaku usaha menjadi sangat tidak nyaman apalagi sampai dituduh sebagai mafia beras yang hingga sekarang belum terbukti. Pada waktu yang sama, pemerintah terus memamerkan pesta panen padi yang dihadiri oleh para pejabat tinggi Kementerian/Lembaga yang disoroti oleh media massa serta diberitakan oleh sejumlah media sosial.</p> <p>Operasi Pasar dengan beras kualitas medium yang dikuasai Bulog (yang berasal dari CBP) tidak efektif dan mahal. Dengan Bulog memiliki CBP dengan beras kualitas premium akan jauh lebih efektif untuk intervensi pasar, serta biaya pengelolaannya tentu akan lebih murah.</p>
4	<p align="center"><b>Program Kementan gagal</b></p>
a	<p><b>Program Kementan Gagal? Padi Mulai Menguning Bantuan Datang</b> (<i>Wartabanten.id, 23 Januari 2018</i>). Serang - Program Kementerian Pertanian untuk menjadikan Provinsi Banten sebagai lumbung padi nasional terancam gagal. Segala macam bantuan untuk program lahan percontohan Demontrasi Arealk Wereng Batang Colkat (Dem-Area WBC) untuk para petani dari kementerian tersebut terlambat datang, sampai ke para petani saat tanaman padi mulai menguning.</p> <p>Menurut Iwan Hermawan aktifis pemerhati pertanian mengatakan, WBC merupakan hama yang menyerang langsung tanaman padi lewat cara menghisap cairan yang ada di tanaman, sehingga tanaman padi menjadi kering. Upaya pengendalian telah di lakukan oleh Kementrian Pertanian (Kementan) dengan teknologi, namun WBC susah dikendalikan. Dan sekarang menggunakan pola Dem-Area yang dapat menghalu atau mengalihkan WBC di tempat yang telah disediakan, yaitu tanaman sehat (refugia).</p> <p>Di Kota Serang yang menjadi kawasan lumbung padi yaitu di Kecamatan Kasemen, tepatnya di Kelurahan Sawah Luhur, dimana percontohan Dem-Area WBC ini dapat berhasil dan menjadi contoh bagi kelompok tani atau masyarakat petani yang mempunyai sawah agar menanam tanaman sehat di sekitar sawah (galengan).</p> <p>Salah satu anggota kelompok yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, memang ada bantuan dari ketua kelompok, namun bantuan itu telat datang, karena padi sudah di tanam lama dan tidak lama lagi akan panen. Bantuan tersebut berupa kapur dan pentiksida, sedangkan bibit padi dan refugia tidak ada.</p>
5	<p align="center"><b>Operasi Pasar</b></p>
a	<p><b>Operasi Pasar Belum Berdampak Signifikan</b> (<i>Kompas, 8 Januari 2018</i>). Jakarta - Operasi pasar beras yang digelar sejak Oktober 2017 belum signifikan mengerem kenaikan harga karena volume beras yang digelontorkan ke pasar kurang. Pasokan dari daerah sentra juga terus berkurang dalam tiga bulan terakhir. Sampai 3 Januari 2018, sedikitnya 30.530 ton beras diminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui badan usaha milik daerah PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ). Sebanyak 29.041 ton di antaranya telah didistribusikan ke pasar-pasar di Jakarta melalui Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Beras dijual Rp 7.800 per kilogram (kg) di tingkat pedagang dan diharapkan bisa dijual Rp 9.608 per kg di konsumen akhir.</p> <p>Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan, pemerintah sebaiknya memperbarui data beras terkait harga pokok produksi gabah di tingkat petani, batasan harga beras di tingkat penggilingan, pedagang, dan konsumen. Badan Pusat Statistik juga perlu memperbarui data produksi dan konsumsi beras supaya pengadaan beras dapat dilakukan secara lebih tepat "Stabilitas harga terkait dengan upaya menguntungkan semua pihak, yakni petani, pengusaha penggilingan padi, pedagang, dan konsumen," kata Djarot.</p>



	<p>Direktur Komersial Perum Bulog Tri Wahyudi mengatakan, CBP memang perlu ditambah agar pemerintah memiliki cadangan beras yang kuat untuk stabilisasi harga. Namun, penambahan CBP perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah. Di negara-negara ASEAN, cadangan beras pemerintah lebih dari 1 juta ton. CBP digunakan untuk menggelar operasi pasar dan kebutuhan mendesak, seperti bantuan bencana. "Dalam kondisi terjadi bencana dan pasokan yang berkurang, CBP bisa saja ditambah," ujarnya.</p> <p>Untuk mengecek panen, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono berkunjung ke Kecamatan Pandan-arum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu (6/1). "Persediaan beras secara nasional aman. Saya berkesimpulan, tidak layak kalau kita impor. Kalau impor, harga di tingkat petani bisa turun. Impor tidak berpihak kepada petani," tutur Momon.</p>
b	<p><b>Beras Operasi Pasar Kurang Diminati</b> (<i>Kompas</i>, 11 Januari 2018). Magelang - Beras operasi pasar yang berasal dari Perum Bulog hingga Rabu (10/1) kurang diminati konsumen di sejumlah daerah karena kualitasnya kurang bagus. Pedagang terpaksa menurunkan harga untuk menarik konsumen</p> <p>Kepala Perum Bulog Subdivre Wilayah V Kedu Sony Supriyadi mengatakan, banyak pedagang tak terlalu meminati beras Bulog karena merupakan stok lama yang disimpan sejak 2017. "Kebanyakan pedagang ragu menjual beras yang kami tawarkan karena memperkirakan bahwa tidak akan disukai konsumen," ujar Sony. Sejak Jumat (5/1), Perum Bulog Subdivre Wilayah V Kedu sudah menggelontorkan 400 ton beras di enam kota/kabupaten di wilayah Kedu. Namun, permintaan di enam kota/kabupaten itu hanya 5-20 ton beras per mitra dari 15 mitra kerja Bulog. Hanya ada satu mitra yang berani mengambil 50 ton.</p> <p>Mamik (57), warga Kelurahan Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah, mengatakan, harga beras medium terus naik dari Rp 10.500 per kilogram menjadi Rp 12.000 per kg. "Anak dan cucu saya tidak mau nasi dari beras operasi pasar karena tidak putih. Jadi mau tidak mau beli dengan harga Rp 12.000 per kg. Memang memberatkan," kata Mamik. Buang Sufli (60), warga di Bandar Lampung, mengatakan, beras yang dijual Bulog tidak pulen saat dimakan beras itu hanya bisa digunakan untuk campuran dengan beras merek lain yang harganya lebih tinggi dan kualitasnya lebih baik.</p> <p>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, saat ini sedang didata stok beras yang disimpan di gudang dan penggilingan. Kalau stok beras di gudang dan penggilingan tidak mencukupi, impor seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan dilakukan. "Kami lihat dulu perkembangannya. Namun, saya tidak mau mengambil risiko atas kekurangan stok yang mengakibatkan harga beras tinggi.</p>
c	<p><b>Operasi Pasar Belum Bisa Tekan Harga Beras Turun</b> (<i>Harian Kontan</i>, 12 Januari 2018). Jakarta - Upaya pemerintah menurunkan harga beras lewat operasi pasar dinilai tidak akan cepat menurunkan harga beras di pasaran. Hal itu terjadi karena pasokan beras sudah menurun drastis sejak akhir tahun 2017 lalu. Sejumlah pedagang pasar yang dihubungi KONTAN mengaku harga beras saat ini sudah terlanjur tinggi karena beras medium hilang dari peredaran. Kendati begitu, mereka tetap berharap kenaikan harga beras tidak berlangsung lama.</p> <p>Pemilik toko beras UD Kerkep di Jakarta, Andi Wyaya, mengatakan, saat ini harga beras medium sudah jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). "Kami berharap satu hingga dua hari ke depan harga bisa turun berkat adanya operasi pasar," ujar Rabu (10/1). Andi bilang operasi pasar dapat</p>



	<p>berpengaruh apabila jumlah yang digelontorkan mencukupi. Sebab kurangnya pasokan menyebabkan harga tinggi.</p> <p>Agar operasi pasar berjalan efektif, Bulog juga mengajak pelaku usaha beras menjadi penyalur. Hal itu dikatakan salah satu pemilik penggilingan gabah di Jawa Timur, Sumanto. Dia mengakui menjadi penyalur beras di daerah Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo dalam rangka stabilisasi harga beras. "Kita sudah lakukan operasi pasar di 20 titik," katanya.</p>
d	<p><b>Data Produksi Makin Diragukan</b> (<i>Koran Jakarta, 15 Januari 2018</i>). Jakarta - Melambungnya harga beras medium maupun premium dalam beberapa pekan terakhir memperkut dugaan jika data produksi gabah sepanjang 2017 kian diragukan. Hal itu bisa dibuktikan dengan tak kunjung efektifnya operasi pasar (OP) yang digelontorkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).</p> <p>Pakar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengatakan tujuan utama dari OP ialah supaya beras-beras pemasok yang disimpan di gudang keluar atau dijual ke pasar. Dengan itu, harganya turun mengikuti harga yang dijual Bulog melalui beras cadangan pemerintah, sebab jika tidak dijual maka beras yang digudang tak akan laku karena pasar diguyur beras Bulog.</p> <p>Anggota DPD RI, Dailami Firdaus, menilai kebijakan tersebut jelas tidak memihak kepada masyarakat yang membutuhkan kestabilan harga, sedangkan petani menginginkan kesejahteraannya meningkat. Menurut Anggota Komite II DPD RI, impor beras itu memperlihatkan seluruh program dan komitmen pemerintah yang tidak akan mengimpor beras pada 2018 hanyalah isapan jempol semata. "Saya tak setuju dengan kebijakan ini dan harus ditinjau kembali. Bila masalah pangan selalu dengan solusi impor maka jelas masalah klasik akan ditangani dengan klasik, tidak ada terobosan. Masyarakat hanya menjadi objek," jelas Anggota DPD RI asal DKI Jakarta.</p>
d	<p><b>Perbaiki Regulasi Beras</b> (<i>Seputar Indonesia, 15 Januari 2018</i>). Melonjaknya harga beras belakangan ini disinyalir akibat regulasi dan tata kelola beras yang buruk. Karena itu pemerintah perlu meninjau ulang dan memperbaiki regulasi perberasan. Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Palsuddin mengatakan, kebijakan yang berkaitan dengan tata niaga beras, mulai dari proses produksi, manajemen stok, pendataan, penentuan harga hingga kebijakan ekspor-impor, tidak sinergis sehingga terjadi anomali di beberapa situasi.</p> <p>Pit Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, rencana pemerintah mengimpor beras tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah. "Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain," tandas Fadli yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini. Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim Januari 2018 ini surplus beras 329.000 ton. Jika angka ini benar, menurut dia, seharusnya harga beras di pasar tidak naik.</p> <p>Mendag mengatakan, beras merupakan komoditas utama masyarakat sehingga pihaknya harus mengambil sikap untuk menjaga kepentingan 260 juta rakyat Indonesia. "Risiko politisnya terlalu berat kalau suplai beras kurang, (maka) saya lakukan impor beras. Jenis beras yang diimpor adalah yang tidak ditanam di Indonesia. Masuk dalam kategori beras khusus," ujar Mendag dalam jumpapers di Jakarta, Jumat (12/1). Lebih lanjut, Mendag meminta keputusan impor beras tidak menjadi polemik atau dipertentangkan seolah impor akan memiskinkan petani. Menurut Mendag, impor adalah alternatif solusi yang paling tepat untuk kondisi saat ini.</p>



e	<p><b>Akurasi Data</b> (<i>Kontan.co.id, 19 Januari 2018</i>). Kebijakan yang baik dibuat berdasarkan data. Bukan sembarang data, tapi harus data yang akurat dan tepercaya. Jika data tak akurat, maka kebijakan yang dibuat bisa salah, dan memalukan. Kurang lebih contohnya bisa kita lihat dalam ribut-ribut impor beras saat ini.</p> <p>Menteri Pertanian berulang kali menyatakan kita sudah swasembada beras, sehingga tak perlu impor lagi. Nyatanya, minggu lalu Kementerian Perdagangan mendadak mengumumkan pembukaan keran impor beras sebanyak 500.000 ton.</p> <p>Polemik tahunan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang memalukan ini seharusnya dibereskan pemerintahan Jokowi, yang berjanji mencapai swasembada beras dalam 3 tahun. Salah satu caranya, Presiden menugaskan lembaga lain, BPS misalnya, untuk segera menyajikan data pangan yang akurat dan kredibel. Kalau perlu, pembenahan data pangan ini menjadi prioritas Jokowi di tahun keempat pemerintahannya ini.</p>
6	<p><b>Data Cabai/Bawang</b></p>
a	<p><b>Harga Cabai Rawit Merah Masih Tinggi Rp 60.000/Kg</b> (<i>Detik.com, 16 Januari 2018</i>). Jakarta - Beberapa harga pangan mengalami lonjakan, namun ada juga sebagian pangan yang harganya justru stabil. Misalnya saja harga cabai rawit merah yang masih tinggi di angka Rp 60.000/kg serta bawang merah dan bawang putih di kisaran Rp 25.000/kg. Menurut pedagang di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan, Ning harga komoditas cabai rawit merah mengalami lonjakan sejak satu bulan terakhir dan kondisi tersebut belum mengalami penurunan.</p> <p>Selanjutnya harga komoditas bawang merah dan bawang putih dinilai ia cenderung stabil. Pasalnya harga bawang merah dan putih masih bertahan di Rp 30.000/kg. "Bawang merah, putih Rp 30.000/kg. Bawang mah ini stabil harganya," ungapnya.</p> <p>Sementara itu, pedagang lainnya Suryami mengatakan harga cabai rawit merah ia jual Rp 50.000/kg dari yang biasanya Rp 40.000 per kg. Sedangkan harga cabai keriting hijau Rp 45.000/kg dan cabai hijau besar Rp 20.000/kg. "Iya ini masih mahal ya cabai rawitnya, Rp 50.000/kg biasanya mah Rp 40 ribu-an per kg. Kalau cabai keriting hijau Rp 45.000/kg, cabai hikau besar Rp 20.000/kg," tuturnya. Untuk bawang merah dan bawang putih, ia mengatakan bahwa harga komoditas tersebut masih stabil yakni Rp 25.000/kg. Di pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan harga komoditas lainnya untuk wortel Rp 10.000/kg, kentang Rp 18.000/kg, tomat Rp 12.000/kg dan jagung Rp 10.000/kg.</p>
b	<p><b>Petani Bawang Cirebon Ancam Mogok Tanam</b> (<i>Antaraneews.com, 18 Januari 2018</i>). Cirebon, Jawa Barat - Para petani bawang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kecewa kepada pemerintah yang tak kunjung menyelesaikan masalah harga bawang sehingga mereka berencana mogok tanam. "Kalau menanam bawang tapi rugi terus buat apa, mending mogok tanam saja," kata Ketua Kelompok Tani Kecamatan Babakan Cirebon, Wasirudin, di Cirebon, Kamis. Menurut dia, selama ini pemerintah sama sekali tidak memihak para petani, ketika petani terus merugi dan sampai kekurangan modal untuk tanam bawang, pemerintah tidak pernah melihat dan membantu.</p> <p>Mereka Pemerintah hanya diam ketika petani terus merugi dan tidak bisa tanam lagi, padahal dulu diperintah untuk swasembada bawang merah. "Tapi setelah bawang merah melimpah dan harga anjlok yang membuat petani merugi, pemerintah diam saja, mana peran pemerintah," katanya. Dia memegang bawang yang hampir busuk karena tidak laku. Senada dengan Wasirudin, petani bawang lain, Abung memilih akan tidak akan menanam bawang lagi, karena</p>



	modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan, untuk itu dirinya akan menanam jagung pada musim tanam kali ini.
<b>7</b>	<b>Asuransi Pertanian</b>
a	<p><b>Program Asuransi Pemerintah Masih Hadapi Berbagai Kendala</b> (<i>Rmol.co, 15 Januari 2018</i>). Realisasi beberapa program asuransi milik pemerintah untuk petani, peternak, dan nelayan tidak mencapai target. Minimnya pengetahuan serta sosialisasi menjadi kendala utama. Untuk diketahui, beberapa program asuransi pemerintah yang digulirkan adalah Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU), Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Asuransi Nelayan dan Asuransi Penyingkiran Rangka Kapal.</p> <p>Kepada pemerintah, pihaknya berharap, agar target 1 juta lahan petani maupun cakupan komoditas maupun objek asuransi yang bisa diasuransikan bertambah di tahun ini. Dan kepada perusahaan maupun lembaga penyalur asuransi tani dan nelayan bisa mempermudah akses dan layanan ke sektor tersebut. Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo melihat, pendekatan terhadap para petani dan nelayan harus lebih masif. Sosialisasi asuransi kepada kelompok tani menjadi aspek yang sangat menentukan keberhasilan program ini.</p>
b	<p><b>Sektor Pertanian Kian Tak Menarik</b> (<i>Koran Jakarta, 17 Januari 2018</i>). Jakarta - Sektor pertanian dinilai sudah tak menarik lagi sehingga memicu penurunan minat petani dari kalangan muda, termasuk para sarjana pertanian. Sektor pertanian dianggap sudah tak mampu menjanjikan kehidupan layak bagi petani. Ini dampak dari kebijakan pertanian yang kurang berpihak ke petani. Direktur Eksekutif Indonesian for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, mengatakan faktor terbesar yang mengakibatkan rendahnya minat anak muda untuk bekerja di sektor pertanian disebabkan rendahnya nilai pendapatan yang diterima di sektor ini, sehingga dianggap tidak dapat menjamin peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian. Hal ini sebagai dampak dari tidak adanya keseriusan pemerintah untuk memajukan sektor pertanian Indonesia.</p> <p>Deagrarianisasi Pertanian Penasihat Ahli Komite Nasional Pertanian Keluarga, Gunawan, menambahkan menurunnya jumlah orang muda yang terjun ke sektor pertanian sebagai akibat dari involusi pertanian dan deagrarianisasi. Untuk itu, agar generasi muda tertarik menjadi petani nilai tukar petani harus terus naik. Harga gabah harus bisa menutupi biaya produksi petani.</p>
c	<p><b>Sektor Pertanian Kian Tak Menarik</b> (<i>Koran-jakarta.com, 17 Januari 2018</i>). Jakarta - Sektor pertanian dinilai sudah tak menarik lagi sehingga memicu penurunan minat petani dari kalangan muda, termasuk para sarjana pertanian. Sektor pertanian dianggap sudah tak mampu menjanjikan kehidupan layak bagi petani. Ini dampak dari kebijakan pertanian yang kurang berpihak ke petani.</p> <p>Direktur Eksekutif Indonesian for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, mengatakan faktor terbesar yang mengakibatkan rendahnya minat anak muda untuk bekerja di sektor pertanian disebabkan rendahnya nilai pendapatan yang diterima di sektor ini, sehingga dianggap tidak dapat menjamin peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian.</p> <p>Penasihat Ahli Komite Nasional Pertanian Keluarga, Gunawan, menambahkan menurunnya jumlah orang muda yang terjun ke sektor pertanian sebagai akibat dari involusi pertanian dan deagrarianisasi. Untuk itu, agar generasi muda tertarik menjadi petani nilai tukar petani harus terus naik. Harga gabah harus bisa menutupi biaya produksi petani. Nilai tukar petani akan naik jika terjadi pembaruan hukum dan kebijakan terkait agraria, pertanian dan pangan,</p>



	terselenggaranya reforma agraria, tranformasi dari pertanian kimiawi diubah menjadi pertanian alami.
8	<b>Swasembada Pangan</b>
a	<p><b>Impor Pangan Indikasikan Program Swasembada Bermasalah</b> (<i>Harian Ekonomi Neraca, 19 Januari 2018</i>). Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fitriana Fauzi mengatakan kebijakan pemerintah mengambil jalan pintas dengan melakukan impor beras ketika terjadi Krisis pangan di dalam negeri menunjukkan bahwa program Swasembada pangan belum membumi. "Salah satu poin dari nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Namun faktanya, upaya mewujudkan Swasembada pangan itu belum terwujud," ujar Intan Fitriana Fauzi dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, disalin dari Antara</p> <p>Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018. "Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500 ribu ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018,"kata Oke, disalin dari Antara di Jakarta. Rencana pemerintah tersebut dilakukan akibat harga beras medium di dalam negeri mengalami kenaikan lebih dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian. Perdagangan menetapkan HET beras kualitas medium sebesar Rp9.450 per kilogram untuk wilayah. Jawa, Lampung, Sumatera. Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi.</p> <p>Namun, pada akhirnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang. Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional menyatakan bahwa Bulog dapat melaksanakan importasi. Importasi beras tersebut, bisa masuk dalam kategori beras untuk kepentingan umum dan kepentingan lain. Importasi teisebui direncanakan berasal dari Vietnam dan Thailand. Pemerintah menyatakan bahwa importasi sebesar 500 ribu ton tersebut tidak akan mengganggu petani lokal.</p>
b	<p><b>Mimpi Swasembada</b> (<i>Rayat Merdeka, 19 Januari 2018</i>). Visi dan komitmen untuk berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) sudah digaungkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno. Presiden Soeharto lalu menggantinya dengan istilah Swasembada. Spiritnya sama bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang punya kemandirian di segala bidang. Kemandirian ini terkait kemampuan sebuah bangsa untuk melepaskan ketergantungan terhadap bantuan dari Asing. Untuk mewujudkan cita-cita itu, bangsa kita harus mempunyai kemampuan produksi sendiri untuk mencukupi kebutuhan warga bangsanya sendiri dari mulai sandang, pangan, papan termasuk energi. Mampu mengerjakan dan menyediakannya sendiri.</p> <p>Kemampuan produksi dalam negeri tidak bisa mengejar besarnya permintaan, oleh karenanya tiada pilihan lain mengambil jalan pintas dengan cara mengimpor. Sayangnya kegiatan impor dalam sejarahnya selalu banyak dinodai oleh tindakan tidak jujur dan mencederai nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Terlalu banyak permainan dan perkongsian. Terlalu banyak sejarah meriwayatkan tentang kejahatan skandal dibalik kegiatan impor beras, sebagian sudah terungkap, sebagian lainnya masih gelap. Tidak ada jalan lain meminimalisir kejahatan dibalik program ini selain membangun kemandirian di internal kehidupan bangsa dan negara kita. Semoga kita bisa.</p>
c	<p><b>Swasembada Beras Dinilai Tak Relevan Lagi</b> (<i>Kompas, 24 Januari 2018</i>). Jakarta - Program swasembada beras dinilai sudah tidak layak dipertahankan sebagai landasan ketahanan pangan nasional. Selain ketersediaan sumber daya alam yang makin terbatas, swasembada beras juga dihadapkan pada tantangan perburuan rente, struktur pasar, dan tata niaga.</p>

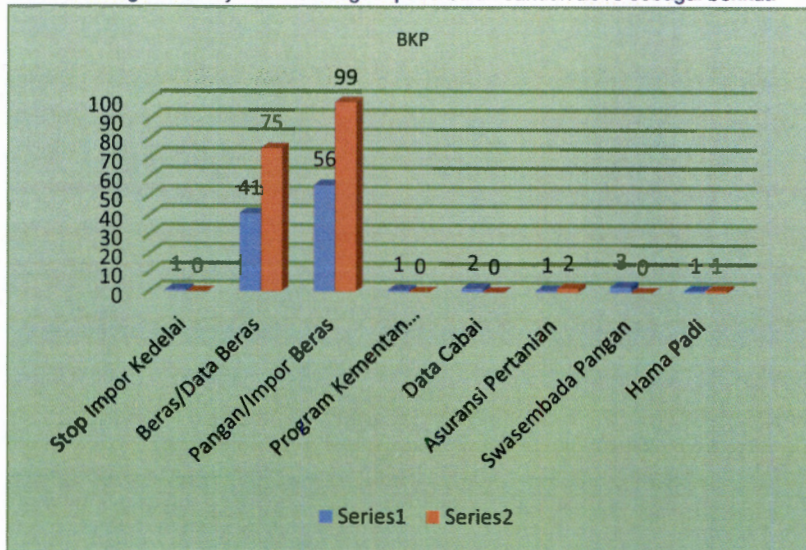


	<p>Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor Manuntun Parulian Hutagaol, di Bogor, Selasa (23/1), memperhitungkan, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar empat juta orang per tahun dan konsumsi mencapai 130-140 kilogram per kapita per tahun, dibutuhkan setidaknya tambahan 0,5 juta ton beras per tahun. Padahal, peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi menghadapi tantangan serius.</p> <p>Program swasembada memungkinkan beras lebih mudah didapat oleh konsumen di mana saja dan kapan saja dengan harga yang dikawal agar tetap murah. Pemerintah pun lebih terfokus pada produksi dan penyediaan beras. Sebaliknya, sumber pangan lain, seperti jagung, singkong, dan sagu, semakin terabaikan dan tersingkir.</p> <p>Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengingatkan, sulit berharap diversifikasi pangan bakal sukses jika pemerintah terus berfokus pada padi atau beras. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 telah mengamanatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Akan tetapi, peraturan itu perlu direvisi agar pelaksanaannya bisa dipantau dan lebih terukur.</p>
9	<b>Hama Padi/gabah</b>
a	<p><b>Tanam Tiga Kali Picu Hama Padi</b> (<i>MediaIndonesia.com, 17 Januari 2018</i>). Wakil Bupati Karawang, Jawa Barat, Ahmad Zamakhsyari menuding kelangkaan beras bisa terjadi akibat program percepatan tanam. Menurutnya, program tiga kali tanam padi dalam setahun bisa menimbulkan siklus hama yang panjang dan mengakibatkan gagal panen. "Langkanya beras akibat gagal panen yang dipicu oleh hama. Hama ini muncul akibat kebijakan tiga kali tanam padi dalam setahun. Menurut saya, Pak Menteri Pertanian perlu mengevaluasi kebijakan tanam padi tiga kali. Tahun ini perlu rehat, jangan dipaksakan," kata Ahmad kepada wartawan se usai melakukan sidak di Pasar Beras Johar, Karawang, Selasa (16/1).</p> <p>Pada bagian lain, beberapa daerah masih melakukan operasi pasar dan pengecekan stok. Seperti di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten, dan Cianjur, operasi pasar terus ditingkatkan. Di Jawa Timur, pemerintah provinsi setempat memastikan stok beras saat ini aman dan melimpah. "Stok beras di Jawa Timur melimpah, masyarakat tidak perlu memborong beras secara berlebihan," kata Gubernur Jatim, Soekarwo, di Surabaya, Selasa (16/1). Sama halnya di Sumatera Selatan, stok beras melimpah dan aman sehingga tidak perlu mendapat bantuan beras dari luar provinsi. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menegaskan hal itu. "Tidak perlu mencari beras dari luar.</p>
b	<p><b>Penggilingan Kesulitan Cari Stok Gabah</b> (<i>Kompas, 30 Januari 2018</i>). Semarang - Panen raya padi di Jawa Tengah belum mampu menurunkan harga beras di pasaran. Harga di sejumlah daerah masih berkisar Rp 11.500-Rp 12.500 per kilogram. Kondisi ini terjadi akibat tingginya harga gabah sejak di tingkat petani. Hingga Senin (29/1), harga beras medium masih sekitar Rp 11.500 kilogram (kg). Bahkan di Kabupaten Banyumas mencapai Rp 12.500 per kg. Adapun harga gabah kering panen masih mencapai Rp 5.400 per kg. Tingginya harga gabah membuat perusahaan penggilingan padi sulit mendapat stok.</p> <p>Anggota Dewan Pakar Perkumpulan Pengusaha Penggilingan padi dan Pedagang Beras (Perpadi) Provinsi Jateng, Damin Hartono, Senin, mengatakan, tingginya harga gabah menyebabkan perusahaan penggilingan padi kesulitan memperoleh stok gabah kering panen (GKP). Hal ini mengemuka saat panen raya di Desa Upang Marga, Air Saleh, Banyuasin, Senin. Hadir dalam acara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Komisi Pengawas Persaingan</p>



Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, Bupati Banyuasin Supriono, Ketua Satgas Pangan Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, dan sejumlah pejabat lain. Menteri Pertanian mengatakan, penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tidak hanya terjadi di Sumsel. Di Jawa Timur harga turun hingga Rp 600 per kg, Jawa Tengah Rp 700 per kg, dan Sumsel menjadi yang terbesar dengan penurunan harga gabah hingga Rp 1.300 per kg.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gambaran isu berita negatif terkait pada BKP untuk bulan Januari 2018, meliputi stop impor kedelai, data pangan, impor beras, program Kementan gagal, data cabai, auransi pertanian, swasembada pangan, dan hama padi. Secara rinci gambaran jumlah isu negatif pada bulan Januari 2018 sebagai berikut.



Gambar 2.4. Petemakan Jumlah berita negatif sebanyak 8 judul, 106 berita cetak, dan 177 berita online.

No.	Prasarana dan Sarana Pertanian
1	Kartu Tani
a	<p><b>Akali Kartu Tani Petani Timbun Pupuk</b> (<i>Media Indonesia, 3 Januari 2018</i>). Sejumlah petani di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sampai kemarin mengaku belum menerima kartu tani. Mereka baru mendapat informasi kartu sakti itu akan dibagikan bulan ini. Berlarut-larutnya masalah itu membuat mereka nekat menumpuk pupuk di rumah. "Kami terpaksa menimbun pupuk karena khawatir saat membutuhkan nanti bakal kesulitan mendapatkannya," ujar Udin, petani Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, kemarin.</p> <p>Kondisi yang sama juga diutarakan Dasman, petani asal Desa Pulaujaya, Kecamatan Lemahabang. "Untuk program kartu tani, kami sudah didata, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan." Dasman merasa khawatir, jika dirinya dan sejumlah petani lain tidak dapat membeli pupuk karena program tersebut dijalankan mulai awal tahun ini. Di sisi lain, petani belum mengantongi kartu tani. "Sekitar 3 minggu lagi tanaman kami akan membutuhkan pupuk," ujarnya.</p> <p>Kepala Dinas Pertanian Karawang Hanafi Chaniago mengaku mengalami kesulitan mendata untuk program kartu tani. "Dari 114 ribu petani yang ada di Karawang, kami baru berhasil mendata sekitar 60 ribu petani."</p>
2	Subsidi Benih
a	<p><b>Menyoal Subsidi Benih</b> (<i>Koran Jakarta, 3 Januari 2018</i>). Subsidi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Subsidi juga disebut subvensi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.</p> <p>Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut, misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh, seperti dalam subsidi upah. Ada anggapan, sejak Indonesia meratifikasi berbagai kebijakan dalam WTO, kondisi perekonomian negara tidak semakin membaik, antara lain Indonesia yang dahulunya dikenal sebagai negara agraris penghasil produk-produk pertanian bergeser menjadi negara pengimpor sejumlah produk pertanian, seperti kedelai, kentang, bawang putih, dan garam. Kita berharap pemerintah perlu lebih mengefektifkan program bantuan subsidi benih pertanian dalam rangka meningkatkan harkat kesejahteraan kalangan petani di Tanah Air, mengingat sejumlah benih telah banyak diekspor. Padahal, kualitas benih yang diproduksi petani Indonesia semakin diakui dunia internasional dengan berkembangnya produsen benih.</p>
b	<p><b>Pencabutan Subsidi Benih Ancam Ketersediaan Pangan</b> (<i>Harian Ekonomi Neraca, 3 Januari 2018</i>). Jakarta - Pemerintah berencana untuk mencabut subsidi benih padi yang nilainya mencapai Rp1,3 triliun pada 2018 ini. Hal itu tentunya mendapatkan protes, tak terkecuali dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi kebijakan tersebut karena tidak populis. Bahkan Bambang berpendapat, kebijakan ini dipastikan menekan para pe tani sekaligus menurunkan gairah menanam padi. Rencananya, subsidi sebesar Rp 1,3 triliun per tahun, akan dihapus pada 2018 ini.</p>



	<p>Ketua Umum Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) Herman Khaeron mengatakan, insentif untuk sektor perbenihan sangat diperlukan. Pasalnya, insentif ini dapat mendorong produsen benih untuk melalaikan inovasi serta menyediakan benih dengan tepat waktu. Menurut dia, dengan mendorong inovasi di sektor perbenihan, maka benih yang dihasilkan dapat membantu mewujudkan target-target yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>Menurutnya, apabila subsidi benih ini dicabut maka minat para penyedia benih akan berkurang. Karena itulah Khaereon berpendapat, pengambil kebijakan harus mempertimbangkan benih sebagai unsur yang penting dalam pencapaian target di bidang pangan. Sementara itu, Herman masih optimistis produksi benih di dalam negeri masih mencukupi. Dia pun mengatakan penggunaan benih oleh petani harus menggunakan benih di dalam negeri. "Penggunaan benih dalam negeri itu sudah menjadi keputusan politik. Bahkan diputuskan minimal 40% benih yang digunakan harus dari dalam negeri," ujar Khaereon.</p>
c	<p><b>Mentan Amran Tegaskan Pemerintah Tak Cabut Subsidi Benih</b> (<i>Tempo.co</i>, 3 Januari 2018). Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak mencabut kebijakan subsidi benih di 2018 ini. Petani akan tetap bisa mendapatkan benih berkualitas dari pemerintah. Pemerintah mengalokasikan Rp 1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk subsidi benih tersebut. "Rp 1 triliun sepakat kami ambil untuk benih," kata Andi di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 Januari 2018.</p> <p>Selain itu, 3 juta ha untuk benih padi, 4 juta ha untuk benih jagung, benih kedelai mendapat 500ribu ha, dan bibit lainnya. Kementerian Pertanian pun juga memberikan pupuk secara cuma-cuma. Di 2018 ini, Kementerian Pertanian mengambil anggaran subsidi benih tersebut dan langsung mendistribusikan benih kepada petani melalui program mandiri benih 1000 desa. "Ini dibagikan gratis kepada para petani," kata Andi. Ia menuturkan, di tahun 2015-2016, serapannya hanya 20 persen. Sedangkan sisanya tidak terserap dengan baik. Atas alasan itu lah, Andi mengambil sikap untuk membagikan benih secara langsung. "Tapi kami kreatif, sehingga anggaran Rp1 triliun kami sepakat diambil, Rp1 triliun ini diberikan benih langsung," ucap dia. Ia berharap dengan subsidi benih ini, produksi bisa meningkat lebih banyak. "Produksi padi bisa naik jadi 10 ton dan produksi jagung bisa meningkat jadi 8-10 ton," ujar dia.</p>
d	<p><b>DPR Kritik Penghapusan Subsidi Benih</b> (<i>Medanbisnisdaily.com</i>, 3 Januari 2018). Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono mengkritisi wacana penghapusan subsidi benih pertanian. Alasannya, hal itu akan semakin mendorong komersialisasi benih yang menekan petani nusantara. "Permintaan benih akan tinggi dan pasar bebas diberlakukan (bila penghapusan subsidi benih dilaksanakan)," kata Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (2/1).</p> <p>Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) Herman Khaeron di sela perayaan 26 tahun Asbenindo di Jakarta, Selasa (12/12) mengatakan, langkah pemerintah untuk menghapus subsidi benih merupakan kebijakan disinsentif bagi pengembangan benih di Tanah Air sehingga dikhawatirkan mengganggu pembangunan pangan nasional. "Seharusnya pemerintah memberikan insentif untuk pengembangan benih unggul bukan menerapkan kebijakan disinsentif. Kebijakan ini akan mematikan minat penyedia benih yang akhirnya target-target (produksi) yang ditetapkan akan terganggu," kata mantan wakil ketua Komisi IV DPR RI itu. Untuk itu, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Mentan Amran Sulaiman, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk mengusulkan dikembalikannya kebijakan subsidi benih. Herman</p>



	<p>menyatakan, jika pemerintah tetap menghapus subsidi benih maka kalangan industri maupun pelaku usaha benih akan menjalankan kebijakan komersial untuk pengadaan benih bagi petani.</p>
e	<p><b>Wacana Penghapusan Subsidi Benih Bakal Tekan Petani</b> (<i>Harian Ekonomi Neraca</i>, 4 Januari 2018). Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Bambang Soekartono menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penghapusan subsidi benih pertanian karena hal itu akan semakin mendorong komersialisasi benih yang menekan petani nusantara. "Permintaan benih akan tinggi dan pasar bebas diberlakukan (bila penghapusan subsidi benih dilaksanakan)," kata Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, disalin dari Antara, kemarin.</p> <p>Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) Herman Khaeron di sela perayaan 26 tahun Asbenindo di Jakarta, Selasa (12/12) mengatakan, langkah pemerintah untuk menghapus subsidi benih merupakan kebijakan disinsentif bagi pengembangan benih di Tanah Air sehingga dikhawatirkan mengganggu pembangunan pangan nasional. "Seharusnya pemerintah memberikan insentif untuk pengembangan benih unggul bukan menerapkan kebijakan disinsentif. Kebijakan ini akan mematikan minat penyedia benih yang akhirnya target-target (produksi) yang ditetapkan akan terganggu," kata mantan wakil ketua Komisi IV DPR RI itu.</p> <p>Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD RI Hermanto mengingatkan petani penerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk menggunakannya secara optimal sehingga peralatan tersebut tidak menganggur dan sia-sia. Menurutnya tanpa koordinasi alsintan akan banyak menganggur sehingga potensi untuk meningkatkan produksi hasil pertanian bisa terganggu. Hermanto juga meminta petani agar tidak mudah menjual tanahnya atau mengalihfungsikannya ke penggunaan lain. "Negara kesulitan mencari lahan untuk cetak sawah baru, karena itu lahan yang masih ada di tangan petani saat ini amat berarti," katanya</p>
	<p><b>Subsidi Benih Dihapus, Produksi Padi Terancam</b> (<i>Harian Fajar</i>, 4 Januari 2018). Petani di Sulsel harus bersiap mengeluarkan biaya lebih. Pada 2018, pemerintah mewacanakan tidak lagi memberi subsidi untuk pengadaan benih padi. Jika selama ini petani bisa mendapat benih padi subsidi sebesar Rp2.500 per kg, maka penghapusan subsidi itu bakal memaksa petani membeli benih pada hingga Rp11 ribu per kg. Kondisi itu tentu saja akan berpengaruh pada biaya produksi di tingkat petani. Selain itu, penghapusan subsidi benih padi itu, bisa memengaruhi tingkat produksi pada petani. Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Kabupaten Wajo, Ambo Epu memastikan jika subsidi dihapus, produksi padi akan terpengaruh.</p> <p>Kepala Dinas Pertanian Bulukumba, Harun berharap subsidi benih tetap ada sebab sangat dibutuhkan petani. Dia menilai, produksi padi sangat ditentukan benih yang berkualitas. Jika subsidi dihapus, petani dipastikan lebih memilih benih lokal. Ketua Penyuluh Pertanian Wilayah Gantarang, Nurwahid mengaku, petani selalu mau bibit yang murah. Dia mengatakan, petani dapat benih gratis saja masih asal-asalan dalam bekerja, apalagi jika harus membeli dengan harga tinggi. "Selain kualitas benih, petani juga mestinya harus betul-betul meningkatkan kualitas produksinya," katanya</p>
g	<p><b>Berita Foto: Kebijakan</b> (<i>Pos Kota</i>, 4 Januari 2018). Kebijakan Pemerintah c/q Mentan Andi Amran Sulaiman menghapus subsidi benih akan menekan sekaligus menurunkan gairah petani menanam padi. Dampaknya, benih padi yang selama ini hanya Rp2.500/Kg akan naik menjadi Rp11.000/Kg.</p>





3

### Subsidi Pertanian

a

**Subsidi Pertanian Rp52,2 T Dinilai Rawan Disalahgunakan** (*Cnnindonesia.com, 3 Januari 2018*). Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu merevisi kebijakan di sektor pangan. Salah satunya terkait anggaran subsidi senilai Rp52,2 triliun. Jumlah tersebut dianggap tidak efektif dan rawan disalahgunakan. Mengutip ANTARA, Rabu (3/1), Peneliti CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, kebijakan yang tidak tepat berdampak pada permasalahan ketersediaan, serta harga pangan. "Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia seharusnya melihat isu pertanian dan pangan bukan hanya dari sisi produsen, melainkan juga dari sisi konsumen," ujarnya.

Pemerintah harus merevisi peraturan yang menghambat dan bersifat nontarif. Selain itu, terkait kebijakan impor, untuk menghindarkan monopoli, pemerintah sebaiknya juga memberikan kesempatan kepada pihak lain di luar pihak yang itu-itu saja untuk mengimpor komoditas pangan," kata Hizkia. Pemerintah, sambung dia, tidak perlu ragu untuk melibatkan diri ke dalam perdagangan internasional dan mengambil manfaat dari mekanisme pasar karena dengan mengikuti mekanisme pasar, harga komoditas pangan di Tanah Air yang akan lebih terjangkau.

b

**Mengupayakan Kelancaran Tepat Sasaran Subsidi Pertanian 2018** (*Harian Ekonomi Neaca, 4 Januari 2018*). Subsidi pertanian dengan beragam kendalanya sebenarnya tidak hanya menjadi sorotan di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat. Dalam suatu kesempatan, anggota DPR Amerika Serikat Michael McCaul pernah berkata, "Petani dan peternak kami tidak pernah menghadapi banyak permasalahan, seperti yang dihadapi saat ini dengan kekeringan, kebakaran lahan, tingginya harga BBM, serta anggaran yang semakin ketat terkait subsidi pertanian." Di dalam negeri, subsidi juga kerap menjadi persoalan klasik sektor pertanian Nusantara, mulai dari penyaluran yang tersendat hingga distribusi yang kerap tidak kepada seluruh kalangan petani.

Sekretaris Umum DPP SPI Agus Ruli Ardiansyahturan mengatakan tentang pengurangan subsidi yang terus didorong negara maju telah berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan perikanan akibat tingginya biaya produksi. Hal tersebut, lanjutnya, juga ternyata mengakibatkan produk impor dapat masuk dengan mudah ke pasar domestik dan menimbulkan berkurangnya penyerapan produk lokal. Catatan SPI menyebutkan, pada tahun 1995 Indonesia mampu memenuhi konsumsi pasar domestik untuk produk bawang putih sebesar 95 persen dengan total produksi mencapai 279 ribu ton. Namun saat ini, menurut SPI, Indonesia dinilai hanya mampu memproduksi sebesar 10 persen dari kebutuhan nasional dan selebihnya dipenuhi dari impor negara China dan India.



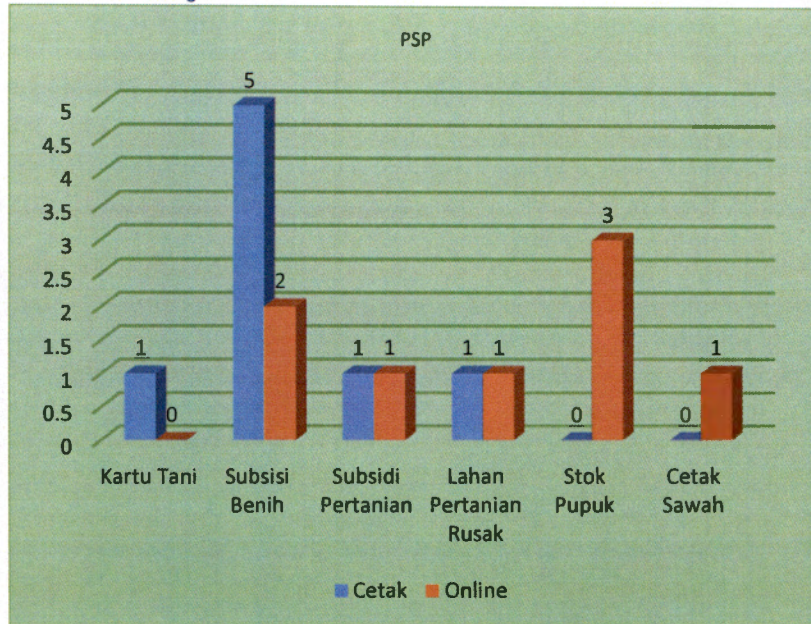
	<p>Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin pertanian Distanak Pandeglang Dicky di Pandeglang, Kamis (28/12), menyatakan, selama ini, penyaluran pupuk bersubsidi pada petani berjalan lancar, walaupun ada permasalahan pada pengiriman karena terkait infrastruktur jalan yang belum memadai. Meski ada keterlambatan dalam bidang transportasi penyaluran, namun dia memastikan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya kelangkaan.</p>
<b>4</b>	<b>Lahan Pertanian Rusak</b>
<b>a</b>	<p><b>Petani Lingkar Sinabung Kembali Terpuruk</b> (<i>Kompas, 6 Januari 2018</i>). Kabanjahe - Ladang petani seluas 6.230 hektar rusak terpapar abu vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dua pekan terakhir, Sinabung berkali-kali erupsi. Akibatnya, produksi tanaman turun hingga 50 persen. Dalam beberapa tahun ini, petani kerap merugi hingga puluhan juta karena tanaman rusak terpapar abu. Kerusakan paling parah di empat kecamatan, Kecamatan Naman Teran, Merdeka, Simpang Empat, dan beras tagi.</p> <p>Dari pantauan Kompas, Jumat (5/1), tanaman layu dan sebagian membusuk. Tanaman yang paling rentan adalah cabai, tomat, dan tanaman muda lain. Abu vulkanik menempel di permukaan daun sehingga tanaman berwarna abu-abu. Kerusakan ladang antara lain dialami Jointa Sitepu (31), petani di Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran. Ladang yang ditanami 2.000 batang tomat dan 1.000 batang cabai secara tumpang sari rusak. "Saya baru panen 200 kg cabai, tanaman langsung rusak diterjang abu. Padahal, harga cabai sedang tinggi, Rp 35.000 per kg. Tomat belum panen," katanya.</p> <p>Sementara itu, warga terdampak erupsi Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali, meminta pemerintah konsisten mengurus kepentingan pengungsi. Mereka minta jaminan keamanan, mitigasi, dan kontigensi jika terjadi erupsi besar. Infrastruktur jalur evakuasi dinilai belum siap membantu warga pengungsi yang pulang setelah ada penyempitan zona bahaya dari radius 8-10 kilometer menjadi 6 kilometer dari kawah, Kamis lalu.</p> <p>Deputi Mitigasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Wisnu Widjaja minta seluruh pihak pembuat kebijakan memikirkan dampak perubahan rekomendasi demi mengurangi kebingungan warga</p>
<b>5</b>	<b>Stok Pupuk</b>
<b>a</b>	<p><b>Petani Sulit Dapat Pupuk Urea dan SP-36</b> (<i>Jawapos.com, 3 Januari 2018</i>). Petani di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, mengeluh karena sulit mendapatkan pupuk Urea dan SP-36. Pupuk yang saat ini dibutuhkan petani tersebut tidak ada di distributor atau di pasaran. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk, petani di Sampang mencari ke luar daerah. "Kami kesulitan mendapatkan pupuk Urea dan SP-36. Padahal, pupuk jenis ini sekarang sangat dibutuhkan," kata Samlawi, 47, petani di Desa Gunung Maddah.</p> <p>Anggota Komisi III DPRD Sampang Shohebus Sulton mengatakan, kelangkaan disebabkan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi kurang maksimal. Hal itu berdampak pada ketersediaan pupuk untuk petani. Politikus Gerindra itu meminta Dinas Pertanian (Disperta) Sampang memaksimalkan pengawasan terhadap kios-kios yang mendistribusikan pupuk bersubsidi. Di Sampang terdapat 85 kios resmi pupuk bersubsidi yang perlu pemantauan rutin. Sayangnya, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Diperta Sampang Suyono belum bisa dimintai keterangan terkait kelangkaan pupuk Urea dan SP-36. Dihubungi melalui telepon, tidak ada respons.</p>



b	<p><b>Petani Aceh Kesulitan Pupuk</b> (<i>Harnas.co, 11 Januari 2018</i>). Sejumlah petani di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh mengaku resah akibat kelangkaan pupuk bersubsidi jenis phonska 15-15 untuk musim tanam padi (MT) rendengan 2017-2018.</p> <p>Ketua Kelompok Tani Pusu Cut, Desa le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Arjuna di Blangpidie, Rabu (10/1) mengatakan, kesulitan memperoleh pupuk tersebut. "Jika ada, harganya mencapai Rp 180 ribu hingga Rp 200 ribu per sak. Banyak petani terpaksa membeli pupuk jenis urea," ujarnya. Ia mengatakan, pemberian pupuk urea ataupun pupuk jenis ZA pada tanaman padi di areal persawahan tidak begitu sempurna jika tidak dibarengi pupuk jenis phonska.</p> <p>"Dengan phonska, tanaman padi bisa subur dan hasil produktivitasnya meningkat, berbeda dengan urea. Tanaman padi tidak begitu sempurna bila tidak dibarengi phonska," ujarnya. Arjuna mengaku tidak pernah dapat membelikan pupuk phonska yang harganya sudah disubsidi pemerintah pada kios-kios pengencer.</p> <p>Tribunnews.com</p>
c	<p><b>Pupuk Subsidi Langka di Provinsi Aceh, Produksi Padi Terancam Menurun</b> (<i>Tribunnews.com, 28 Januari 2018</i>). Banda aceh - Petani di Provinsi Aceh tengah mengalami kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi di kios-kois resmi pengecernya di kecamatan. Ini terjadi di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, juga Aceh Barat Daya (Abdya). Anehnya, pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, mengaku sudah menerbitkan surat keputusan (SK) pembagian kuota pupuk subsidi yang diberikan pusat 75.420 ton kepada kabupaten/kota pada 3 Januari 2018.</p> <p>Kehilangan dan penurunan produktivitas tanaman padi 1-1,5 ton itu telah membuat petani kehilangan pendapatan dan rugi besar. Seandainya harga gabah pada masa panen Rp 5.000/kg, dikali dengan 1 ton (1.000 kg), maka petani padi bisa kehilangan pendapatan Rp 5 juta-Rp 7,5 juta/ha. Akibat kehilangan pendapatan sebesar itu, lanjut Mukhlis, nilai tukar petani terus merosot di bawah 100. Kondisi ini, bisa membuat jumlah petani yang miskin di Aceh bertambah banyak.</p>
6	<b>Cetak Sawah</b>
a	<p><b>Pemerintah Berhasil Cetak Sawah Baru 200 Ribu Hektar, Kenapa Harus Impor</b> (<i>Daulat.co, 30 Januari 2018</i>). Komisi IV DPR RI mempertanyakan program cetak sawah yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Dimana menurut laporan Kementan disampaikan telah berhasil mencetak sawah baru lebih dari 200 ribu hektar</p> <p>Anggota Komisi IV DPR RI Asep Maosul dari Fraksi PPP juga mempertanyakan program cetak sawah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Pasalnya selama ini tidak terdengar keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut. Berbeda ketika jaman pemerintahan Presiden RI Soeharto yang mengaku melakukan cetak sawah dan dibuktikan dengan program swasembada berasnya. Saat ini masyarakat lebih melihat banyaknya sawah yang berganti pemukiman. Sementara program cetak sawah baru untuk menambah atau meningkatkan produksi beras malah tidak terdengar gaungnya.</p>



Berdasarkan uraian tersebut di atas, gambaran isu berita negatif terkait pada PSP untuk bulan Januari 2018, meliputi kartu tani, subsidi benih, subsidi pertanian, lahan pertanian rusak, stok pupuk, cetak sawah. Secara rinci gambaran jumlah isu negatif pada bulan Januari 2018 sebagai berikut.



Gambar 2.5. Prasarana dan Sarana Pertanian  
Jumlah berita negatif sebanyak 6 judul, 8 berita cetak, dan 4 berita online.

No.	Pertanian Umum
1	Perekonomian
a	<p><b>Mengelola Tarik-Menarik Kepentingan</b> (<i>Kompas, 2 Januari 2018</i>). Tahun 2018 sudah tiba. Sejumlah pencapaian pada tahun lalu menjadi modal untuk lebih kuat menggerakkan roda perekonomian. Namun, pemerintah juga akan dihadapkan pada pertanyaan berlatar keraguan terhadap pilihan kebijakan ekonomi. Apakah kepentingan jangka pendek dapat dikelola tanpa mengorbankan strategi pembangunan yang bervisi masa depan, atau sebaliknya.</p> <p>Tahun 2017, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 190 negara dalam Laporan Kemudahan Usaha 2018, melompat 37 peringkat dibandingkan posisi 2015 yang tecermin pada laporan 2016. Lembaga pemeringkat kredit Moodys Investors Service, Standard &amp; Poor's, dan belakangan Fitch Ratings juga menaikkan peringkat utang jangka panjang Indonesia Dunia kini berevolusi, antara lain melalui analisis atas deta berukuran raksasa dalam penyusunan kebijakan.</p> <p>Indonesia akan tertinggal apabila pemerintah lebih banyak berkuat dengan kepentingan kepentingan jangka pendek. Hal itu akan tecermin antara lain pada kebijakan "tambal sulam" demi menekan gejolak sesaat, Indonesia kini memulai langkah pada tahun politik 2018. Kita menyambut pergelaran 171 pemilihan kepala daerah dan persiapan pemilihan presiden. Mengelola kepentingan jangka pendek termasuk popularitas dan preferensi politik sekaligus kepentingan jangka panjang, akan menjadi tantangan yang terpampang di depan mata.</p>
2	Sektor Pertanian
a	<p><b>Korban Terbesar Jokowi Bernama Sektor Pertanian</b> (<i>Rakyat, 2 Januari 2018</i>). Pemerintahan Jokowi-JK dianggap hanya fokus mengejar pembangunan fisik berupa infrastruktur tanpa memperhatikan sektor primer yakni sektor pertanian. Karena itu, hingga akhir 2017, pemerintahan Jokowi disebut telah menjadikan sektor pertanian sebagai korban terbesar dari ambisi pembangunan infrastruktur.</p> <p>Hal ini dinyatakan Direktur Pusat Kajian Pertanian, Pangan dan Advokasi Kebijakan (Pataka) Yeka Hendra Patika. Menurutnya, dari evaluasi sektor pertanian di 2017 ini, hampir semua potensi pertanian malah tersedot dan dirampas untuk pembangunan infrastruktur. Sesungguhnya, budaya gotong royong yang sudah ada turun temurun di sektor pertanian kita sudah kian mengalami kehancuran parah. Semua hal diukur dalam penguasaan ekonomi semata, sedangkan budaya kita sebenarnya bijak dan harusnya mampu menangkal pola-pola penggerusan di sektor pertanian kita," tuturnya.</p>
3	Regenerasi Petani
a	<p><b>Bertani Harus Pakai Jurus Jaman Now</b> (<i>Rakyat Merdeka, 12 Januari 2018</i>). Kondisi regenerasi petani Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik. (BPS) 2013. jumlah petani muda di Indonesia saat ini 3359.587 dan tiap tahun terus berkurang. Hal ini juga diingatkan kembali oleh Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. "Jumlah petani muda hanya 3,3 juta orang. Sementara luas lahan pertanian kita saat ini 7,78 juta hektar. Berarti harus bertani secara modern," tegasnya.</p> <p>Untuk itu, Panglima TNI periode 30 Agustus 2013 -8 Juli 2015 ini, HKTI harus memperkenalkan modernisasi dunia pertanian. Yaitu adaptif terhadap kemajuan teknologi pertanian, namun tetap menjaga kekhasan budaya bangsa Indonesia. Hal ini dia sampaikan saat melantik Ketua Umum</p>

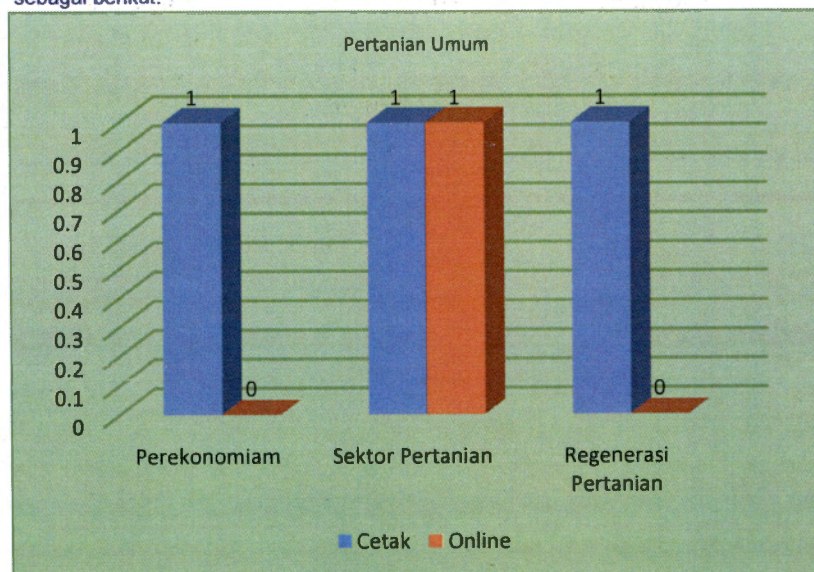


DPN Pemuda Tani HKTI, Rina Saadah Adisurya dan Ketua Perempuan Tani HKTI, Dian Novita di kantor DPN HKTI, Jl Cokroaminoto 55-57, Jakarta Pusat, Rabu (10/1) lalu.

Pelantikan ini, jelasnya, merupakan langkah HKTI melakukan pembenahan dan pematapan organisasi dan kader-kadernya. Walaupun baru dilantik secara formal, dua organisasi tersebut selama ini sudah banyak melakukan berbagai kiprah dalam kancah dunia pertanian Indonesia. Dia menjelaskan, tugas kedua organisasi sayap HKTI ini adalah mengupayakan proses regenerasi petani berjalan. Selain itu, juga memaksimalkan peran perempuan di sektor pertanian .

Dia mencontohkan, HKTI telah mengembangkan pesawat drone untuk pertanian . Drone ini berfungsi untuk pemupukan dan menyemprotkan pestisida untuk hama tanaman. "Hal-hal inovatif inilah yang akan dilakukan anak muda untuk sektor pertanian . Biarkan mereka melampaikan kreativitasnya untuk pertanian . Nanti, mereka akan mencintai pertanian ," tambah Moeldoko.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gambaran isu berita negatif terkait pada Pertanian Umum untuk bulan Januari 2018, meliputi perekonomian, sektor pertanian, dan regenerasi pertanian. Secara rinci gambaran jumlah isu negatif pada bulan Januari 2018 sebagai berikut.



Gambar 2.6. Pertanian Umum  
Jumlah berita negatif sebanyak 3 judul, 3 berita cetak, dan 1 berita online.

## BAB. IV PENUTUP

Berdasarkan uraian berita di media cetak, maka berita pertanian yang mempunyai kecenderungan negatif baik terhadap Kementerian Pertanian maupun pemangku kepentingan selama periode bulan Januari 2018, dari sumber dari media cetak dan online dengan analisis konten terhadap masalah yang ada antara lain sebagai berikut :

	Cetak	Online	Jumlah
<b>1. Tanaman Pangan ;</b>			
- Sapi Impor Kedelai	1	0	1
<b>2. Hortikultura ;</b>			
- Harga Bawang	7	19	26
<b>3. Peternakan ;</b>			
- Harga Telur	1	0	1
- Harga Daging Ayam	1	1	2
- Sapi Perah/Siwab/Upsus	1	0	1
- Solusi Penyakit Unggas	1	0	1
- Impor Daging Kerbau	7	8	16
- Larangan Penggunaan AGP	1	0	0
<b>4. Badan Ketahanan Pangan ;</b>			
- Stop Impor Kedelai	1	0	0
- Beras/Data Pangan	41	75	116
- Pangan/Impor Beras	56	99	155
- Program Kementan Gagal	1	0	1
- Data Cabai	2	0	2
- Asuransi Pertanian	1	2	3
- Swasembada Pangan	3	0	3
- Hama Padi	1	1	2
<b>5. Prasarana dan Sarana Pertanian ;</b>			
- Kartu Tani	1	0	1
- Subsidi Benih	5	2	7
- Subsidi Pertanian	1	1	2
- Lahan Pertanian Rusak	1	1	2
- Stok Pupuk	0	3	3
- Cetak Sawah	0	1	1
<b>6. Pertanian Umum ;</b>			
- Perekonomiam	1	0	1
- Sektor Pertanian	1	1	0
- Regenerasi Pertanian	1	0	1







KEMENTERIAN PERTANIAN  
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

[www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)



@kementerianpertanian



Kementan RI



@kementan



Kementerian pertanian RI